

2022

LAKIP - LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH

KATA PENGANTAR



Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Sekretariat Badan Pengatur Jalan Tol Tahun 2022 merupakan salah satu perwujudan laporan pelaksanaan anggaran berbasis kinerja dan juga sebagai laporan pertanggungjawaban dalam mewujudkan visi, misi, dan tujuan organisasi. Melalui Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2022, Sekretariat Badan Pengatur Jalan Tol melaporkan kinerjanya yang diukur dari pencapaian kinerja misi, sasaran, program, dan kegiatan yang dilakukan pada tahun 2022 sesuai yang tertuang dalam Renstra Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat serta Rencana Kinerja Tahunan Tahun

2020-2024. Pengukuran pencapaian kinerja dilakukan dengan merujuk pada indikator kinerja output dan outcome yang telah ditetapkan dan direalisasikan per tahun.

Dengan disusunnya Laporan Kinerja Instansi Pemerintah ini, diharapkan dapat memberikan informasi secara transparan kepada seluruh pihak yang terkait mengenai tugas fungsi Sekretariat Badan Pengatur Jalan Tol, sehingga dapat memberikan umpan balik guna peningkatan kinerja pada periode berikutnya. Demikian Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Sekretariat Badan Pengatur Jalan Tol Tahun 2022 ini kami susun untuk dapat dimanfaatkan sebagaimana mestinya.

Jakarta, 20 Januari 2023
Sekretaris Badan Pengatur Jalan Tol,



Triono Junoasmono, Ph.D
NIP. 197106041998031006

Tujuan, Sasaran Strategis

Berdasarkan tujuan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Direktorat Jenderal Bina Marga melaksanakan tujuan mewujudkan konektivitas jalan nasional yang andal dan prima dalam mendukung perwujudan Indonesia maju yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian berlandaskan gotong royong; meningkatkan standar pelayanan jalan nasional sesuai kebutuhan dan standar; meningkatkan efektivitas pelaksanaan kegiatan teknis dalam program penyelenggaraan jalan nasional; meningkatkan kualitas sumber daya dan kelembagaan di Lingkungan Ditjen Bina Marga.

Sekretariat Badan Pengatur Jalan Tol dalam rangka mewujudkan tujuan tersebut diatas, melaksanakan sasaran strategis “meningkatnya konektivitas jaringan jalan nasional”, dengan sasara program “Meningkatnya Kinerja Pelayanan Jalan Nasional” dan sasaran kegiatan “Pengaturan, Pengusahaan dan Pengawasan Jalan Tol”. Sasaran kegiatan tersebut merupakan dasar kegiatan utama Sekretariat Badan Pengatur Jalan Tol.

Capaian Kinerja

Capaian Kinerja Sekretariat BPJT pada akhir tahun berdasarkan Perjanjian Kinerja, sebagai berikut:

IKSP : Tingkat Aksesibilitas Jalan Nasional

IKK : Tingkat Pencapaian Pembangunan Jalan bebas Hambatan

100 %

Parameter : Panjang Jalan Tol yang Beroperasi 54 %

Pengaturan, Pengusahaan, Pengawasan Jalan Tol 100 %

IKSP : Tingkat Dukungan Manajemen

Kementerian PUPR

IKK : Tingkat Efektifitas dan Efisiensi Tata Kelola Penyelenggaraan Jalan

99,92 %

Layanan Perkantoran 100 %

Layanan Sarana Internal 90,75%

Capaian Indikator Kinerja Output Sekretariat BPJT dalam rincian sebagai berikut:

- Capaian kinerja output Pengaturan, Pengusahaan, Pengawasan Jalan Tol sebesar 100% dari capaian 1 Rekomendasi Kegiatan terhadap target awal 1 Rekomendasi Kegiatan.
- Capaian Kinerja output Layanan Perkantoran sebesar 100% dari capaian 1 Layanan terhadap target awal 1 Layanan.
- Capaian Kinerja output Layanan Sarana Internal sebesar 90,75% dari capaian 39 unit terhadap target awal 43 Unit.

Realisasi Anggaran

Pada Tahun Anggaran 2022 Sekretariat Badan Pengatur Jalan Tol mendapatkan alokasi dana dari Pemerintah (APBN) melalui DIPA Sekretariat Pengatur Jalan Tol Nomor SP DIPA-033.04.1.498721/2022 tanggal 17 November 2021 sebesar Rp. 91.427.972.000,- dan mengalami Perubahan alokasi anggaran dikarenakan menindaklanjuti Surat Direktur Jenderal Bina Marga Nomor PR 0201-Db/1354 tentang Usulan Revisi Anggaran TA. 2022 di Lingkungan Direktorat Bina Marga.

DIPA AWAL Rp 91.427.972.000

DIPA REVISI AKHIR Rp 289.808.558.000

Realisasi keuangan dan Fisik untuk Sekretariat Badan Pengatur Jalan Tol pada akhir Desember 2022 berdasarkan e-monitoring tanggal 10 Januari 2023 adalah sebagai berikut:

Realisasi
Rp 285.139.588.000

Keuangan

98,4%

Fisik

100%

Permasalahan dan Kendala

- Perlu analisis perencanaan SDM yang efektif dan peningkatan kualitas SDM melalui pelatihan teknis/seminar/workshop, peningkatan keterlibatan dan tanggung jawab staf pada substansi, serta penambahan staf profesional bila diperlukan;
- Perlu dilakukan proses perencanaan program tahunan Sekretariat BPJT yang lebih baik dan tajam guna mencapai sasaran yang ditargetkan, untuk kegiatan yang masih perlu tindak lanjut, agar diproses dalam kegiatan lanjutan sehingga dapat dicapai sasaran dan manfaat yang maksimal;
- Peningkatan peran manajemen dalam pengelolaan organisasi yang efektif agar kinerja perencanaan, pelaksanaan, supervisi, dan evaluasi bisa dilaksanakan secara optimal.

Upaya Peningkatan Kinerja

- Pengembangan SDM perlu mendapat perhatian dan perlu diprogramkan penambahan SDM secara periodik baik perekrutan baru maupun mutasi dari Unit Kerja Lainnya sesuai kebutuhan kompetensi Badan Pengatur Jalan Tol;
- Perlu adanya peningkatan kemampuan maupun keterampilan dengan cara mengikut sertakan SDM dalam kegiatan pelatihan - pelatihan;

- Meningkatkan kualitas perencanaan kinerja dengan menentukan prioritas kinerja yang akurat dan handal;
- Meningkatkan koordinasi internal antar Sekretariat BPJT dalam rangka perencanaan dan pelaksanaan kegiatan sehingga tidak terjadi tumpang tindih kegiatan dan waktu pelaksanaan kegiatan lebih selaras;
- Mengupayakan adanya keseragaman persepsi dalam mendefinisikan indikator kinerja output untuk paket pekerjaan non-fisik, sehingga dapat terukur dengan jelas dan akurat.
- Menyusun perencanaan dalam Dokumen Rencana Kerja dan Anggaran (RKA-K/L) dengan target kinerja yang lebih matang sehingga tidak terlalu banyak revisi yang perlu dilakukan.
- Badan Pengatur Jalan Tol perlu mempertahankan komitmen dan meningkatkan kualitas penerapan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP).

Keberhasilan dan Kegagalan

- Sekretariat Badan Pengatur Jalan Tol berhasil melakukan laik fungsi jalan tol sebanyak **14 ruas** jalan tol dengan 10 ruas jalan tol telah beroperasi. Total panjang jalan tol baru yang dioperasikan di **Tahun 2022** adalah **142,11 km**.
- Telah terdapat **69 ruas** jalan tol yang beroperasi dengan panjang jalan tol sampai dengan **Tahun 2022** adalah **2.599,13 km**.
- Penetapan pemenang pelelangan perusahaan jalan tol untuk 1 ruas jalan tol yaitu Jalan Tol Gedebage-Tasikmalaya-Cilacap.
- Capaian **nilai investasi** kinerja pengembangan jalan tol sampai dengan desember **2022** adalah sebesar **Rp794,85 Triliun**.
- Telah dilakukan peresmian dan operasi jalan tol dengan 10 ruas jalan tol.

NO	RUAS JALAN TOL	TANGGAL OPERASI	PANJANG (KM)
1	Cileunyi - Sumedang - Dawuan : Seksi 1 (Cileunyi - Pamulihan)	24 Januari 2022	11,40
2	Sigli - Banda Aceh : Seksi 2 (Seulimeum - Jantho)	8 Maret 2022	6,35
3	Binjai - Langsa : Seksi 1 (Binjai - Stabat)	4 Februari 2022	11,80
4	Manado - Bitung (Seksi Danowudu - Bitung)	25 Februari 2022	13,43
5	Cibitung - Cilincing :(Seksi 2 dan 3)	11 Juli 2022	24,45
6	Lubuklinggau - Curup - Bengkulu : (Seksi Bengkulu - Taba Penanjung)	25 Agustus 2022	16,73
7	Serpong - Balaraja : Seksi 1 (Serpong - SS CBD)	20 September 2022	3,97
8	Pekanbaru - Padang : (Seksi Pekanbaru - Bangkinang)	27 September 2022	30,89
9	Bekasi Cawang Kampung Melayu : Seksi 1A dan Koneksi Jalan Tol Wiyoto Wiyono Sisi Timur, serta Off Ramp Jatiwaringin	29 September 2022	2,00
10	Cileunyi - Sumedang - Dawuan : Seksi 2,3 (Pamulihan - Cimalaka)	13 Desember 2022	21,10

DAFTAR ISI

10 PENDAHULUAN

- 11 Latar Belakang
- 12 Tugas dan Fungsi BPJT
- 16 Struktur Organisasi BPJT
- 17 Isu Strategis

24 PERENCANAAN KINERJA

- 24 Uraian Singkat Renstra BPJT 2020-2024
- 28 Perjanjian Kinerja
- 34 Metode Pengukuran
- 35 Target 2022 Menurut Renstra

37 KAPASITAS ORGANISASI

- 37 Sumber Daya Manusia
- 43 Sarana dan Prasarana
- 45 Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA)

48 AKUNTABILITAS KINERJA

- 48 Capaian Kinerja Organisasi
- 138 Perbandingan Kinerja Organisasi
- 101 Realisasi Anggaran
- 101 Analisis Atas Efisiensi Pengguna SDM
- 102 Paket Strategis
- 102 Paket Diresmikan dan
- 104 Penghargaan

149 PENUTUP

- 149 Permasalahan
- 149 Rekomendasi

DAFTAR TABEL

19	Tabel 1.4.1 Data Jalan Tol Operasi s.d. Desember 2022
22	Tabel 1.4.2 Tabel Ruas Selesai Konstruksi 2022
25	Tabel 2.1.1 Rencana Pembangunan Jalan Tol Tahun 2020-2024 menurut RPJMN
26	Tabel 2.1.2 Rencana Pembangunan Jalan Tol
30	Tabel 2.2.1 Perbandingan PK Awal dan PK Revisi Tahun 2022 (outcome)
30	Tabel 2.2.2 Perbandingan PK Awal dan PK Revisi Tahun 2022 (output)
35	Tabel 2.4.1 Perbandingan Target Capaian Kinerja Berdasarkan Renstra dan Perjanjian Kinerja TA 2022
38	Tabel 3.1.1 Jumlah Pegawai Sekretariat Badan Pengatur Jalan Tol
44	Tabel 3.2.1 Neraca Tahunan Komperasi
46	Tabel 3.3.1 Kronologis Revisi DIPA TA 2022
48	Tabel 4.1.1 Informasi Capaian Kinerja Tahun 2022
50	Tabel 4.1.2 Perbandingan Capaian Target (PK Revisi dan DIPA Revisi Terakhir)
52	Tabel 4.1.3 Jalan Tol yang beroperasi dan diresmikan Tahun 2022
57	Tabel 4.1.4 Penanganan Perkara Tahun 2022
57	Tabel 4.1.5 Somasi dan Pengaduan
59	Tabel 4.1.6 Lembar Kendali Rancangan Peraturan Menteri PUPR Terkait Jalan Tol
61	Tabel 4.1.7 Ruas yang telah di laik fungsi dan beroperasi
84	Tabel 4.1.8 Ruas yang dilelang pada tahun 2022
104	Tabel 4.1.9 Tabel Capaian Aset Konsesi Pengusahaan Jalan Tol
105	Tabel 4.1.10 Tabel Nilai Investasi Pengusahaan Jalan Tol
105	Tabel 4.1.11 Tabel Penyesuaian Tarif Tol Tahun 2022
106	Tabel 4.1.12 Tabel Penyesuaian Tarif Tol Yang Belum Terealisasi
132	Tabel 4.1.13 Rekapitulasi Cost of Fund Tahun 2022
139	Tabel 4.2.1 Perbandingan Capaian Kinerja Outcome Tahun 2020-2022
139	Tabel 4.2.2 Perbandingan Capaian Kinerja Output Tahun 2020-2022
140	Tabel 4.2.3 Perbandingan Realisasi Kinerja Antara Renstra dan Tahun 2022
141	Tabel 4.2.4 Perbandingan Capaian IKSP dengan Instansi Lain
141	Tabel 4.2.5 Realisasi Penyerapan Anggaran TA. 2022
142	Tabel 4.2.6 Efisiensi SDM terhadap Capaian Kinerja
143	Tabel 4.2.7 Daftar Proyek Strategis Nasional Sektor Jalan Tol
145	Tabel 4.2.8 Data Jalan Tol yang diresmikan Tahun 2022

DAFTAR GAMBAR

- 17** Gambar 1.3.1 Stuktur Organisasi Badan Pengatur Jalan Tol
- 32** Gambar 2.2.1 Perjanjian Kinerja (PK) Awal Sekretariat Pengatur Jalan Tol 2022
- 32** Gambar 2.2.2 Perjanjian Kinerja (PK) Awal Sekretariat Badan Pengatur Jalan Tol 2022
- 33** Gambar 2.2.3 Perjanjian Kinerja (PK) Revisi Sekretariat Badan Pengatur Jalan Tol 2022
- 38** Gambar 2.2.4 Perjanjian Kinerja (PK) Revisi Sekretariat Badan Pengatur Jalan Tol 2022
- 39** Gambar 3.1.1 Jumlah Pegawai Sekretariat Pengatur Jalan Tol
- 39** Gambar 3.1.2 Persentase PNS Berdasarkan Jenis Kelamin
- 40** Gambar 3.1.3 Jumlah PNS Berdasarkan Pendidikan
- 41** Gambar 3.1.4 Jumlah PNS Berdasarkan Golongan
- 41** Gambar 3.1.5 Jumlah PNS Berdasarkan Usia
- 42** Gambar 3.1.6 Persentase Non PNS Berdasarkan Jenis Kelamin
- 42** Gambar 3.1.7 Jumlah Non PNS Berdasarkan Pendidikan
- Gambar 3.1.8 Jumlah Non PNS Berdasarkan Usia

BAB 1

PENDAHULUAN

Perbaikan pemerintahan dan sistem manajemen merupakan agenda penting dalam reformasi birokrasi yang sedang dijalankan oleh pemerintah saat ini. Sistem manajemen pemerintahan diharapkan berfokus pada peningkatan akuntabilitas serta sekaligus peningkatan kinerja yang berorientasi pada hasil (*outcome*). Maka Pemerintah telah menetapkan kebijakan untuk penerapan sistem pertanggungjawaban yang jelas dan teratur dan efektif yang disebut dengan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP).

Akuntabilitas merupakan kata kunci dari sistem tersebut yang dapat diartikan sebagai perwujudan dari kewajiban seseorang atau instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan pengelolaan sumber daya dan pelaksanaan kebijakan yang dipercayakan kepadanya dalam rangka pencapaian tujuan yang telah ditetapkan melalui media pertanggungjawaban dan berupa laporan akuntabilitas yang disusun secara periodik.

Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah atau disingkat dengan SAKIP tertuang dalam Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 09/PRT/M/2018 tentang Penyelenggaraan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Kementerian PUPR yang mana didalamnya menyebutkan SAKIP merupakan rangkaian sistematis dari berbagai aktivitas, alat dan prosedur yang dirancang untuk tujuan penetapan dan pengukuran, pengumpulan data, pengklarifikasian, pengikhtisaran, dan pelaporan kinerja pada instansi pemerintah, dalam rangka pertanggungjawaban dan peningkatan kinerja instansi pemerintah.

Tujuan Sistem AKIP adalah untuk mendorong terciptanya akuntabilitas kinerja instansi pemerintah sebagai salah satu prasyarat untuk terciptanya pemerintah yang baik dan terpercaya. Sedangkan sasaran dari Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah adalah:

1. Menjadikan instansi pemerintah yang akuntabel sehingga dapat beroperasi secara efisien, efektif dan responsif terhadap aspirasi masyarakat dan lingkungannya;
2. Terwujudnya transparansi instansi pemerintah;
3. Terwujudnya partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan nasional;
4. Terpeliharanya kepercayaan masyarakat kepada pemerintah.

Penyelenggaraan SAKIP ini dilaksanakan untuk menghasilkan sebuah laporan kinerja yang berkualitas serta selaras dan sesuai dengan tahapan-tahapan meliputi :

1. Rencana Strategis

Rencana strategis merupakan dokumen perencanaan instansi pemerintah dalam periode 5 (lima) tahunan. Rencana strategis ini menjadi dokumen perencanaan untuk arah pelaksanaan program dan kegiatan dan menjadi landasan dalam penyelenggaraan SAKIP.

2. Perjanjian Kinerja

Perjanjian kinerja adalah lembar/dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja. Perjanjian

kinerja selain berisi mengenai perjanjian penugasan/pemberian amanah, juga terdapat sasaran strategis, indikator kinerja dan target yang diperjanjikan untuk dilaksanakan dalam 1 (satu) tahun serta memuat rencana anggaran untuk program dan kegiatan yang mendukung pencapaian sasaran strategis.

3. Pengukuran Kinerja

Pengukuran kinerja merupakan langkah untuk membandingkan realisasi kinerja dengan sasaran (target) kinerja yang dicantumkan dalam lembar/dokumen perjanjian kinerja dalam rangka pelaksanaan APBN/APBD tahun berjalan. Pengukuran kinerja dilakukan oleh penerima tugas atau penerima amanah pada seluruh instansi pemerintah.

4. Pengelolaan Kinerja

Pengelolaan kinerja merupakan proses pencatatan/registrasi, penatausahaan dan penyimpanan data kinerja serta melaporkan data kinerja. Pengelolaan data kinerja mempertimbangkan kebutuhan instansi pemerintah sebagai kebutuhan manajerial, data/laporan keuangan yang dihasilkan dari sistem akuntansi dan statistik pemerintah.

5. Pelaporan Kinerja

Pelaporan kinerja adalah proses menyusun dan menyajikan laporan kinerja atas prestasi kerja yang dicapai berdasarkan penggunaan anggaran yang telah dialokasikan. Laporan kinerja tersebut terdiri dari Laporan Kinerja bulanan dan Laporan Kinerja Tahunan. Laporan Kinerja Tahunan paling tidak memuat perencanaan strategis, pencapaian sasaran strategis instansi pemerintah, realisasi pencapaian sasaran strategis dan penjelasan yang memadai atas pencapaian kinerja.

6. Reviu dan Evaluasi Kinerja

Reviu merupakan langkah dalam rangka untuk meyakinkan keandalan informasi yang disajikan sebelum disampaikan kepada pimpinan. Reviu tersebut dilaksanakan oleh aparat pengawasan internal pemerintah dan hasil reviu berupa surat pernyataan yang telah direviu dan ditandatangani oleh aparat pengawasan intern pemerintah. Sedangkan evaluasi kinerja merupakan evaluasi dalam rangka implementasi SAKIP di instansi pemerintah.

1.1 LATAR BELAKANG

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi No. 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah merupakan keinginan nyata Pemerintah untuk melaksanakan *good governance* dalam penyelenggaraan kehidupan bernegara. Dalam suatu pemerintahan yang baik salah satu hal yang disyaratkan adalah terselenggaranya *Good Governance*.

Jaringan jalan merupakan salah satu infrastruktur utama dalam pengembangan suatu kawasan atau daerah. Adanya kemudahan akses menuju suatu daerah akan memudahkan mobilitas barang dan orang, sehingga mampu memicu pertumbuhan ekonomi daerah tersebut. Dengan dua per tiga jaringan jalan nasional sudah mengalami kemacetan dan

lalu lintas diperkirakan akan tumbuh dua kali lipat dalam 15 tahun mendatang, muncul kebutuhan infrastruktur atau jalan tol untuk memenuhi kebutuhan mobilitas masyarakat setempat yang semakin meningkat seiring dengan pertumbuhan dan perkembangan kegiatan perekonomian di Indonesia.

Pembangunan jaringan jalan saat ini menjadi prioritas Pemerintah dalam agenda pembangunan tahun 2020 sampai 2024. Pembangunan infrastruktur tersebut mencakup pembangunan jalan tol yang bertujuan untuk meningkatkan konektivitas di wilayah Indonesia. Rencana Strategi (RENSTRA) Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Tahun 2020-2024 menyebutkan bahwa dalam rangka dukungan terhadap konektivitas nasional untuk penguatan daya saing telah dilakukan pembangunan jalan nasional sepanjang 47.017 km, jalan bebas hambatan (jalan tol) sepanjang 2.334 km.

Target konektivitas jalan tersebut diwujudkan dengan pembangunan ruas ruas jalan tol di Trans Jawa dan Trans Sumaterera sebagai *backbone*. Pembangunan jalan tol itu sendiri menghadapi dilema budget constraint dengan keterbatasan alokasi pembiayaan pemerintah untuk pembangunan. Oleh karena itu, pemerintah fokus untuk mengajak pihak swasta/ badan usaha untuk menjadi mitra dalam penyediaan infrastruktur melalui program Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU). Sektor swasta/ Badan Usaha memiliki peran yang penting karena diharapkan bisa membiayai sebagian besar pertumbuhan ekonomi melalui proyek-proyek KPBU. Kerangka pembangunan dengan skema KPBU terus dikembangkan dan formulasi untuk pengembangan skema pembiayaan dalam kerjasama pemerintah dan swasta terus berevolusi demi semakin terbangunnya iklim investasi yang sehat dalam sektor jalan tol dan pengembangan infrastuktur secara umum.

BPJT dibentuk sesuai amanat UU No 38 Tahun 2004 tentang Jalan sebagai regulator jalan tol menggantikan fungsi PT. Jasa Marga yang sebelumnya berperan sebagai regulator dan operator jalan tol. Dalam pelaksanaan tugasnya sehari-hari, Sekretariat BPJT bertugas memberikan pelayanan teknis dan administratif kepada BPJT.

1.2 TUGAS DAN FUNGSI BADAN PENGATUR JALAN TOL

Berdasarkan Pasal 45 ayat (6) Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan, tugas BPJT adalah melaksanakan sebagian penyelenggaraan jalan tol, yang meliputi:

- a. Pengaturan jalan tol, mencakup pemberian rekomendasi tarif awal dan penyesuaiannya kepada Menteri Pekerjaan Umum, serta pengambilalihan jalan tol pada akhir masa konsesi dan pemberian rekomendasi pengoperasian selanjutnya;
- b. Pengusahaan jalan tol, mencakup persiapan pengusahaan jalan tol, pengadaan investasi, dan pemberian fasilitas pembebasan tanah;
- c. Pengawasan jalan tol, mencakup pemantauan dan evaluasi pengusahaan jalan tol, dan pengawasan terhadap pelayanan jalan tol.

Berdasarkan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 20/PRT/M/2020 tentang Wewenang dan Tugas Direktorat Jenderal Bina Marga, Direktorat Jenderal Pembiayaan Infrastuktur Perkerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Badan Pengatur Jalan Tol, dan Badan Usaha Jalan Tol dalam penyelenggaraan Jalan Tol, Sekretariat BPJT mempunyai tugas meliputi :

- a. Pembinaan jalan tol;

- b. Pengusahaan jalan tol;
- c. Pengawasan penyelenggaraan jalan tol;

1. Bagian Umum

Bagian Umum mempunyai tugas melaksanakan kegiatan ketatausahaan, kepegawaian, keuangan, kearsipan, hukum, dan hubungan masyarakat

Dalam melaksanakan tugas dimaksud, Bagian Umum menyelenggarakan fungsi:

- a. Pelaksanaan pemberian pertimbangan hukum, advokasi hukum, sosialisasi hukum, serta dokumentasi, promosi dan publikasi jalan tol;
- b. Pengumpulan dan pengelolaan data dan Informasi penyelenggaraan jalan tol, serta pengembangan sistem informasi;
- c. Pelaksanaan urusan ketatausahaan dan kearsipan perusahaan jalan tol, penyediaan dan pemeliharaan sarana dan prasarana, serta perencanaan, pendayagunaan, dan pengembangan sumber daya manusia;
- d. Pengelolaan anggaran, administrasi keuangan, evaluasi dan pelaporan, pemanfaatan anggaran, serta penyelesaian hasil pemeriksaan.

Bagian Umum terdiri atas:

- a. Subbagian Hukum dan Hubungan Masyarakat;
- b. Subbagian Administrasi dan Kepegawaian; dan
- c. Subbagian Keuangan.

- (1) Subbagian Hukum dan Hubungan Masyarakat mempunyai tugas pemberian pertimbangan hukum, advokasi hukum, dan sosialisasi hukum, pelaksanaan dokumentasi, promosi dan publikasi, jalan tol, pengumpulan dan pengelolaan data dan informasi penyelenggaraan jalan tol, serta pengembangan sistem informasi.
- (2) Subbagian Administrasi dan Kepegawaian, mempunyai tugas melakukan pelaksanaan urusan ketatausahaan dan kearsipan perusahaan jalan tol, penyediaan dan pemeliharaan sarana dan prasarana, serta perencanaan, pendayagunaan, dan pengembangan sumber daya manusia.
- (3) Subbagian Keuangan, mempunyai tugas melakukan pengelolaan anggaran, administrasi keuangan, evaluasi dan pelaporan pemanfaatan anggaran, dan penyelesaian hasil pemeriksaan.

2. Bidang Teknik

Bidang Teknik mempunyai tugas melaksanakan pengawasan persiapan dan pelaksanaan konstruksi jalan tol.

Dalam melaksanakan tugas dimaksud, Bidang Teknik menyelenggarakan fungsi:

- a. Pengawasan pemenuhan kewajiban badan usaha terkait aspek teknis sesuai perjanjian perusahaan jalan tol;
- b. pelaksanaan evaluasi rencana teknik akhir yang disusun oleh badan usaha dan penyusunan rekomendasi persetujuan;
- c. Pengawasan pelaksanaan konstruksi jalan tol oleh badan usaha;
- d. Pelaksanaan pengujian laik fungsi dan laik operasi jalan tol; dan

- e. Pelaksanaan evaluasi teknis terhadap perubahan ruang lingkup perusahaan jalan tol

Bidang Teknik terdiri atas:

- a. Subbidang Perencanaan Teknis; dan
- b. Subbidang Pengawasan Konstruksi.

- (1) Subbidang perencanaan teknis mempunyai tugas melakukan pengawasan pemenuhan kewajiban badan usaha terkait aspek teknis sesuai perjanjian perusahaan jalan tol, pelaksanaan evaluasi rencana teknik akhir yang disusun oleh badan usaha dan penyusunan rekomendasi persetujuan.
- (2) Subbidang Pengawasan Konstruksi mempunyai tugas melakukan pengawasan pelaksanaan konstruksi jalan tol oleh badan usaha, pelaksanaan pengujian laik fungsi dan laik operasi jalan tol, dan pelaksanaan evaluasi teknis terhadap perubahan ruang lingkup perusahaan jalan tol.

3. Bidang Investasi

Bidang Investasi mempunyai tugas melaksanakan persiapan, pelayanan, dan pengawasan perusahaan jalan tol.

Dalam melaksanakan tugas dimaksud, Bidang Investasi menyelenggarakan fungsi:

- a. Penyusunan kajian studi kelayakan financial dan lingkungan jalan tol dan penentuan model bisnis perusahaan jalan tol;
- b. Penyusunan perjanjian perusahaan jalan tol dan pelelangan perusahaan jalan tol;
- c. Pengawasan pemenuhan kewajiban badan usaha terkait aspek investasi sesuai perjanjian perusahaan jalan tol;
- d. Pengawasan pelaksanaan investasi jalan tol, persiapan evaluasi dan penyesuaian tarif tol awal;
- e. Pelaksanaan evaluasi investasi terhadap perubahan ruang lingkup perusahaan jalan tol; dan
- f. Persiapan pengambilalihan hak perusahaan jalan tol yang telah selesai masa konsesinya atau gagal dalam pelaksanaan konsesinya.

Bidang Investasi terdiri dari:

- a. Subbidang Persiapan dan Pelayanan Investasi; dan
- b. Subbidang Pengawasan Investasi

- (1) Subbidang persiapan dan pelayanan investasi mempunyai tugas melakukan penyusunan kajian studi kelayakan financial dan lingkungan jalan tol, penentuan model bisnis perusahaan jalan tol, penyusunan perjanjian perusahaan jalan tol, dan pelelangan perusahaan jalan tol.

- (2) Subbidang pengawasan investasi mempunyai tugas melakukan pengawasan pemenuhan kewajiban badan usaha terkait aspek investasi sesuai perjanjian pengusahaan jalan tol, pengawasan pelaksanaan investasi jalan tol, penyiapan evaluasi dan penyesuaian tarif tol awal, pelaksanaan evaluasi investasi terhadap perubahan ruang lingkup pengusahaan jalan tol, dan penyiapan pengambilalihan hak pengusahaan jalan tol yang telah selesai masa konsesinya atau gagal dalam pelaksanaan masa konsesinya.

4. Bidang Operasi dan Pemeliharaan

Bidang Operasi dan Pemeliharaan mempunyai tugas melaksanakan pengawasan pengoperasian jalan tol.

Dalam melaksanakan tugas dimaksud, bidang operasi dan pemeliharaan menyelenggarakan fungsi:

- a. Pengawasan pemenuhan kewajiban badan usaha terkait pengoperasian dan pemeliharaan sesuai perjanjian pengusahaan jalan tol;
- b. Pelaksanaan evaluasi rencana dan pengawasan pelaksanaan pengoperasian dan pemeliharaan jalan tol yang disusun oleh badan usaha;
- c. Pengawasan terhadap badan usaha atas Pemenuhan Standar Pelayanan Minimal Jalan Tol;
- d. Pelaksanaan evaluasi pelayanan jalan tol, kepuasan pengguna jalan tol, dan keselamatan jalan tol, dan
- e. Pengelolaan data volume lalu lintas dan kecelakaan serta penyusunan rekomendasi kebijakan.

Bidang Operasi dan Pemeliharaan, terdiri dari:

- a. Subbidang Operasi dan Pemeliharaan I; dan
- b. Subbidang Operasi dan Pemeliharaan II

- (1) Subbidang Operasi dan Pemeliharaan I mempunyai tugas melakukan pengawasan pemenuhan kewajiban badan usaha terkait pengoperasian dan pemeliharaan sesuai perjanjian pengusahaan jalan tol, pelaksanaan evaluasi rencana dan pengawasan pelaksanaan pengoperasian dan pemeliharaan jalan tol yang disusun oleh badan usaha, pengawasan terhadap badan usaha atau pemenuhan Standar Pelayanan Minimal jalan tol, pelaksanaan evaluasi pelayanan jalan tol, pengelolaan data volume lalu lintas dan kecelakaan serta penyusunan rekomendasi kebijakan pada ruas jalan tol yang berada di Wilayah I.
- (2) Subbidang Operasi dan Pemeliharaan II mempunyai tugas melakukan pengawasan pemenuhan kewajiban badan usaha terkait pengoperasian dan pemeliharaan sesuai perjanjian pengusahaan jalan tol, pelaksanaan evaluasi rencana dan pengawasan pelaksanaan pengoperasian dan pemeliharaan jalan tol yang disusun oleh badan usaha, pengawasan terhadap badan usaha atas pemenuhan Standar Pelayanan Minimal Jalan Tol, pelaksanaan evaluasi pelayanan jalan tol, kepuasan pengguna jalan tol dan keselamatan jalan tol, pengelolaan data volume lalu lintas dan

kecelakaan serta penyusunan rekomendasi kebijakan pada ruas jalan tol yang berada di Wilayah II.

5. Bidang Pendanaan

Bidang Pendanaan mempunyai tugas melaksanakan perencanaan dan pelaksanaan pendanaan tanah jalan tol.

Dalam melaksanakan tugas Bidang Pendanaan menyelenggarakan fungsi:

- a. Perencanaan pendanaan tanah jalan tol
- b. Pelaksanaan pendanaan jalan tol

Bidang Pendanaan terdiri atas:

- a. Subbidang Perencanaan; dan
 - b. Subbidang Pelaksanaan
1. Subbidang Perencanaan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perencanaan pendanaan tanah jalan tol.
 2. Subbidang Pelaksanaan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan pelaksanaan pendanaan tanah jalan tol.

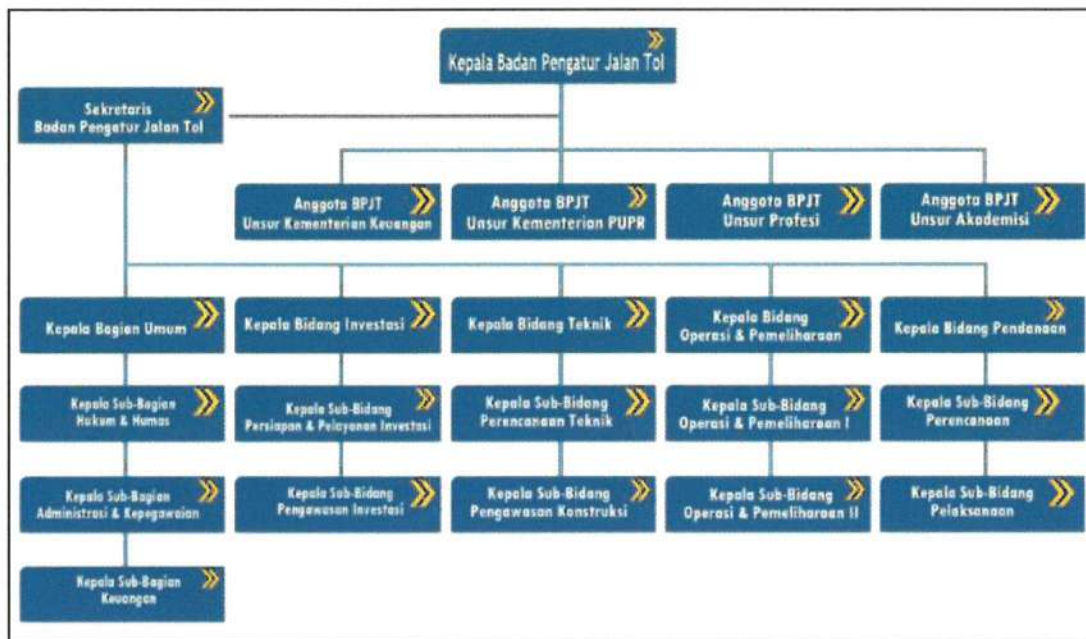
1.3 STRUKTUR ORGANISASI BADAN PENGATUR JALAN TOL

Badan Pengatur Jalan Tol (BPJT) adalah badan non struktural yang dibentuk di lingkungan Kementerian Pekerjaan Umum berdasarkan amanat Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan, dan diatur lebih lanjut dalam Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2005 tentang Jalan Tol dan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 43/PRT/M/2015. Secara formal BPJT dibentuk oleh Menteri Pekerjaan Umum pada tanggal 28 Juni 2005 sebagai unit non struktural yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Menteri Pekerjaan Umum, bertujuan untuk melaksanakan sebagian wewenang Pemerintah dalam penyelenggaraan jalan tol.

Struktur BPJT terdiri dari seorang Kepala (merangkap Anggota) dan empat orang Anggota. Kepala BPJT adalah pejabat Kementerian Pekerjaan Umum sebagai wakil unsur Pemerintah, sedangkan empat orang Anggota BPJT masing-masing adalah: pejabat Kementerian Pekerjaan Umum dan pejabat Kementerian Keuangan (sebagai wakil unsur Pemerintah), seorang dari asosiasi profesi (wakil unsur pemangku kepentingan), dan seorang dari akademisi (wakil unsur masyarakat).

Untuk membantu dalam pelaksanaan fungsi dan tugas BPJT maka dibentuk Sekretariat BPJT di lingkungan Kementerian Pekerjaan Umum sebagai unsur staf yang mempunyai tugas memberikan pelayanan teknis dan administratif kepada BPJT. Sekretariat BPJT dipimpin oleh seorang Sekretaris sebagai pejabat struktural setingkat eselon II/a.

Sekretariat BPJT secara teknis operasional bertanggung-jawab kepada Kepala BPJT dan secara administratif bertanggung jawab kepada Menteri. Struktur Organisasi Sekretariat BPJT terdiri atas; Bagian Umum, Bidang Teknik, Bidang Investasi, Bidang Operasi dan Pemeliharaan serta Bidang Pendanaan sebagai staf struktural setingkat eselon III. Kemudian pada tingkat dibawahnya Sekretariat BPJT didukung sebelas staf struktural eselon IV sebagaimana tercantum pada tabel di bawah ini.



Gambar 1.3.1 Struktur Organisasi Badan Pengatur Jalan Tol
(Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor : 43/PRT/M/2015)

Dalam unit kerja Sekretariat BPJT, terdapat Satuan Kerja yang melaksanakan tugas dan fungsi kesatkeran yaitu Satuan Kerja Sekretariat Pengatur Jalan Tol.

1.4 ISU STRATEGIS

Presiden terpilih, Bapak Joko Widodo, telah menyampaikan "Visi Indonesia" pada hari Minggu tanggal 14 Juli 2019 di di SICC, Sentul, Jawa Barat. Dalam pidatonya, Presiden menyampaikan 5 (lima) hal yang menjadi catatan utama yaitu:

1. Melanjutkan pembangunan infrastruktur
2. Pembangunan SDM;
3. Pangkas penghambat investasi;
4. Reformasi birokrasi; dan
5. Penggunaan APBN tepat sasaran.

Visi Indonesia telah jelas memperlihatkan bahwa infrastruktur tetap merupakan prioritas bagi Pemerintah Indonesia. Justru, visi tersebut mempertegas perlunya kemanfaatan dari infrastruktur bagi pembangunan ekonomi nasional. Interaksi antar infrastruktur, seperti jalan tol dengan kawasan pusat pertumbuhan dan juga infrastruktur konektivitas lain

seperti bandar udara dan pelabuhan justru semakin penting untuk integrasi moda dan sistem jaringan. Penuntasan Jalan Tol Trans Sumatera dari Bakaheuni hingga Banda Aceh di akhir tahun 2024 telah disampaikan oleh Presiden secara terbuka. Demikian pula konektivitas ke Kawasan industri, Kawasan Ekonomi Khusus, dan Kawasan Pariwisata Super Prioritas seperti Kawasan Toba-Samosir, dan Kawasan Borobudur perlu menjadi fokus pengembangan jaringan jalan tol. Disamping itu juga terdapat dua kawasan pariwisata lain yang terfasilitasi oleh jaringan jalan tol seperti Kawasan Tanjung Lesung dan Bromo-Tengger.

Dampak investasi jalan tol juga perlu merespon kebutuhan pertumbuhan ekonomi lokal, partisipasi pemerintah daerah dan usaha setempat, serta mengembangkan sistem operasi jalan tol yang sensitif terhadap aspek lingkungan, sosial dan perubahan iklim.

Ketersediaan SDM berkualitas yang dilengkapi dengan teknologi infrastruktur mutakhir, metodologi konstruksi yang efektif, teknologi survailans dan sistem pemantauan operasi yang maju akan menjadi kunci bagi sistem jalan tol yang modern. Dengan jumlah ASN sebanyak 59 orang, Anggota dan sekretariat BPJT perlu melakukan transformasi digital dan mendorong sebanyak mungkin teknologi yang tersedia. Modernisasi konstruksi dan sistem operasi juga sejalan dengan reformasi birokrasi di BPJT yang mengedepankan inovasi teknologi digital dan perbaikan proses bisnis sehingga lebih efektif. Salah satu yang menjadi prioritas adalah tersusun dan diimplementasikannya prosedur operasi standar (SOP: Standard Operating Procedure), khususnya dalam pengambilan keputusan di tingkat anggota BPJT.

Pesan Presiden Joko Widodo juga mendorong tumbuhnya iklim investasi, mengurangi hambatan perijinan investasi, serta memfasilitasi investor untuk menanamkan modalnya untuk membangun jalan tol di Indonesia. Fasilitasi penyediaan lahan untuk kepentingan umum oleh pemerintah sesuai dengan Undang Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum. Kemudahan penyediaan dan pembayaran dana talangan telah difasilitasi dengan terbitnya Peraturan Presiden Nomor 66 Tahun 2020 tentang Pendanaan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum Dalam Rangka Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional dan PMK 139/PMK.06/2020 tentang Tata Cara Pendanaan Pengadaan Tanah bagi Proyek Strategis Nasional oleh Lembaga Manajemen Aset Negara. Pendanaan APBN untuk pengadaan lahan serta dukungan konstruksi dan VGF (Variable Gap Funds) merupakan tantangan pembangunan yang perlu menjadi perhatian BPJT dan K/L khususnya LMAN dan Direktorat Jenderal Bina Marga dalam pembangunan jalan tol.

Dalam kerangka regulasi, pembentukan peraturan perundang-undangan juga mejadi fokus. Beberapa produk peraturan perundangan tersebut adalah sebagai berikut :

Produk Pembentukan Regulasi Tahun 2022

1. Penetapan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan.

2. Penyusunan konsep Revisi Ke Lima atas Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2005 tentang Jalan Tol.
3. Penyusunan Konsep Peraturan Menteri PUPR tentang Perubahan Rencana Usaha Jalan Tol

Jalan Tol di Indonesia yang sudah beroperasi adalah sebanyak 69 ruas jalan tol, antara lain :

Tabel 1.4.1 Data Jalan Tol Operasi s.d. Desember 2022

No	Nama Ruas Jalan Tol	Badan Usaha Jalan Tol (BUJT)	Panjang (Km)	Tanggal Operasi	Tanggal Peresmian	Keterangan
JAWA						
1	Jakarta - Bogor - Ciawi	PT Jasa Marga (Persero) Tbk.	59	09 Maret 1978	09 Maret 1978	JABODETABEK
2	Prof.Dr.Ir.Soedijatmo	PT Jasa Marga (Persero) Tbk.	14.3	01 April 1985	01 April 1985	
3	Cawang - Tomang - Pluit (CTC)	PT Jasa Marga (Persero) Tbk.	23.5	20 April 1997	20 April 1997	
4	Cawang - Tj. Priok - Ancol Timur - Jembatan Tiga/Pluit	PT Citra Marga Nusaphala Persada, Tbk	27.05	10 November 1989	10 November 1989	
5	JORR S	PT Hutama Karya (Persero)	14.25	04 Agustus 1995	04 Agustus 1995	
6	JORR NON S	PT Jasa Marga (Persero) Tbk.	31.18	28 Agustus 2007	28 Agustus 2007	
7	JORR W1 (Kebon Jeruk - Penjaringan)	PT Jakarta Lingkar Baratsatu	9.85	22 Februari 2010	22 Februari 2010	
8	JORR W2 Utara (Kebon Jeruk - Ulujami)	PT Marga Lingkar Jakarta	7.87	27 Desember 2013	27 Desember 2013	
9	Akses Tanjung Priuk	PT Hutama Karya (Persero)	11.4	17 April 2017	15 April 2017	
10	Bogor Ring Road Seksi I-III A	PT Marga Sarana Jabar	11.3	23 November 2009	23 November 2009	
11	Cinere-Jagorawi	PT Translingkar Kita Jaya	9.2	03 Februari 2012	03 Februari 2012	
12	Pondok Aren - Bintaro Viaduct - Ulujami	PT Jasa Marga (Persero) Tbk.	5.55	02 Februari 1999	02 Februari 1999	
13	Pondok Aren - Serpong	PT Bintaro Serpong Damai	7.24	02 Februari 1999	02 Februari 1999	
14	Bekasi Cawang Kampung Melayu	PT Kresna Kusuma Dyandra Marga	8.4	03 November 2017	03 November 2017	

No	Nama Ruas Jalan Tol	Badan Usaha Jalan Tol (BUJT)	Panjang (Km)	Tanggal Operasi	Tanggal Peresmian	Keterangan
15	Depok - Antasari	PT Citra Waspphutowa	12.1	28 September 2018	27 September 2018	
16	Kunciran-Serpong	PT Marga Trans Nusantara	11.14	06 Desember 2019	06 Desember 2019	
17	Cimanggis - Cibitung Seksi 1	PT Cimanggis Cibitung Tollways	2.75	26 Oktober 2020	-	
18	Serpong - Cinere Seksi 1	PT Cinere Serpong Jaya	6.505	01 April 2021	01 April 2021	
19	Cengkareng - Batu Ceper - Kunciran	PT Jasamarga Kunciran Cengkareng	14.19	01 April 2021	01 April 2021	
20	Cibitung - Cilincing Seksi 1	PT Cibitung Tanjung Priok Port Tollways	2.65	15 Juli 2021	20 September 2022	
21	6 (Enam) Ruas Dalam Kota Jakarta Seksi A (Kelapa Gading - Pulo Gebang)	PT Jakarta Tollroad Development Jaya Pratama	9.29	23 Agustus 2021	23 Agustus 2021	
22	Serpong - Balaraja Seksi 1 (Serpong - SS CBD)	PT Trans Bumi Serbaraja	3,97	20 September 2022	20 September 2022	
TOTAL JABODETABEK			298.71			
23	Tangerang - Merak	PT Marga Mandalasakti	73	13 Juli 1992	13 Juli 1992	TRANS JAWA
24	Jakarta - Tangerang	PT Jasa Marga (Persero) Tbk.	33	31013	31013	
25	Jakarta - Cikampek	PT Jasa Marga (Persero) Tbk.	83	32407	32407	
26	Jalan Layang MBZ Sheikh Mohamed Bin Zayed	PT Jasamarga Jalanlayang Cikampek	38	12 Desember 2019	12 Desember 2019	
27	Cikampek-Palimanan	PT Lintas Marga Sedaya	116.75	13 Juni 2015	13 Juni 2015	
28	Palimanan - Kanci	PT Jasa Marga (Persero) Tbk.	26.3	24 Januari 1998	24 Januari 1998	
29	Kanci - Pejagan	PT Semesta Marga Raya	35	26 Januari 2010	26 Januari 2010	
30	Pejagan - Pemalang	PT Pejagan Pemalang Tol Road	57.5	09 Juni 2016	16 Juni 2016	
31	Pemalang - Batang	PT Pemalang Batang Tol Road	39.2	21 Desember 2018	43413	
32	Semarang - Batang	PT Jasamarga Semarang Batang	75	21 Desember 2018	20 Desember 2018	

No	Nama Ruas Jalan Tol	Badan Usaha Jalan Tol (BUJT)	Panjang (Km)	Tanggal Operasi	Tanggal Peresmian	Keterangan
33	Semarang Seksi A,B,C	PT Jasa Marga (Persero) Tbk.	24.75	09 Juli 1983	09 Juli 1983	
34	Semarang-Solo	PT Trans Marga Jateng	72.95	10 November 2011	10 November 2011	
35	Solo Ngawi	PT Jasamarga Solo Ngawi	90.12	15 Juli 2018	15 Juli 2018	
36	Ngawi - Kertosono	PT Jasamarga Ngawi Kertosono Kediri	87.05	29 Maret 2018	29 Maret 2018	
37	Kertosono - Mojokerto	PT Marga Harjaya Infrastruktur	40.23	13 Oktober 2014	13 Oktober 2014	
38	Surabaya - Mojokerto	PT Jasamarga Surabaya Mojokerto	36.27	26 Agustus 2011	26 Agustus 2011	
39	Surabaya - Gempol	PT Jasa Marga (Persero) Tbk.	48.85	26 Juli 1986	26 Juli 1986	
40	Gempol - Pasuruan	PT Jasamarga Gempol Pasuruan	34.5	31 Maret 2017	31 Maret 2017	
41	Gempol - Pandaan	PT Jasamarga Pandaan Tol	13.61	12 Juni 2015	12 Juni 2015	
42	Pasuruan- Probolinggo	PT Trans Jawa Paspro Jalan Tol	31.3	10 Juni 2019	43565	
TOTAL TRANS JAWA			1056.4			
43	Padalarang - Cileunyi	PT Jasa Marga (Persero) Tbk.	64.4	11 Maret 1991	11 Maret 1991	
44	Surabaya-Gresik	PT Margabumi Matraraya	20.7	08 Maret 1993	08 Maret 1993	
45	Cikampek - Padalarang	PT Jasa Marga (Persero) Tbk.	58.5	26 April 2005	26 April 2005	
46	Simpang Susun Waru - Bandara Juanda	PT Citra Margatama Surabaya	12.8	27 April 2008	27 April 2008	
47	Jembatan Surabaya-Madura	PT Jasa Marga (Persero) Tbk.	5.4	10 Juni 2009	10 Juni 2009	
48	Soreang Pasir Koja	PT Citra Marga Lintas Jabar	8.15	27 November 2017	04 Desember 2017	
49	Ciawi - Sukabumi	PT Trans Jabar Tol	15.35	17 Desember 2018	01 Desember 2018	
50	Pandaan-Malang	PT Jasamarga Pandaan Malang	38.46	10 Juni 2019	13 Mei 2019	NON TRANS JAWA

No	Nama Ruas Jalan Tol	Badan Usaha Jalan Tol (BUJT)	Panjang (Km)	Tanggal Operasi	Tanggal Peresmian	Keterangan
51	Krian - Legundi - Bunder - Manyar (Krian - Legundi - Bunder)	PT Waskita Bumi Wira	29	19 November 2020	-	
52	Serang - Panimbang Seksi 1 (Serang - Rangkasbitung)	PT Wijaya Karya Serang Panimbang	26.5	16 November 2021	16 November 2021	
53	Cileunyi - Sumedang - Dawuan Seksi 1-3 (Cileunyi - Cimalaka)	PT Citra Karya Jabar Tol	32,50	24 Januari 2022	24 Januari 2022	
TOTAL NON TRANS JAWA			279.26			
SUMATERA						
54	Belawan - Medan - Tanjung Morawa	PT Jasa Marga (Persero) Tbk.	42.7	15 Desember 1989	15 Desember 1989	TRANS SUMATERA
55	Palembang - Indralaya	PT Hutama Karya (Persero)	21.58	12 Oktober 2017	12 Oktober 2017	
56	Medan Binjai	PT Hutama Karya (Persero)	17.67	13 Oktober 2017	3 Maret 2021	
57	Medan Kualanamu Tebingtinggi	PT Jasamarga Kualanamu Tol	62.11	13 Oktober 2017	13 Oktober 2017	
58	Bakauheni - Terbanggi Besar	PT Hutama Karya (Persero)	140.41	21 Januari 2018	21 Januari 2018	
59	Terbanggi Besar - Pematang Panggang - Kayu Agung	PT Hutama Karya (Persero)	189.4	14 November 2019	15 November 2019	
60	Kayuagung - Palembang - Betung (Kayuagung - Kramasan)	PT Waskita Sriwijaya Tol	37.62	25 Januari 2021		
61	Sigli - Banda Aceh	PT Hutama Karya (Persero)	35,87	01 Juli 2020		
62	Pekanbaru - Dumai	PT Hutama Karya (Persero)	131,69	21 September 2020	25 September 2020	
63	Binjai - Langsa Seksi 1 (Binjai - Stabat)	PT Hutama Karya (Persero)	11,80	04 Februari 2022	4 Februari 2023	
64	Lubuklinggau - Curup - Bengkulu (Bengkulu - Taba Penanjung)	PT Hutama Karya (Persero)	16,73	25 Agustus 2022		

No	Nama Ruas Jalan Tol	Badan Usaha Jalan Tol (BUJT)	Panjang (Km)	Tanggal Operasi	Tanggal Peresmian	Keterangan
65	Pekanbaru - Bangkinang - Payakumbuh - Bukittinggi - Padang Panjang - Lubuk Alung - Padang (Pekanbaru - Bangkinang)	PT Hutama Karya (Persero)	30,89	27 September 2022	4 Januari 2023	
TOTAL TRANS SUMATERA			672.7			
SULAWESI						
66	Ujung Pandang Seksi 1 - 3	PT Makassar Metro Network	10.08	21 September 2021	21 September 2021	SULAWESI
67	Makassar Seksi IV	PT Jalan Tol Seksi Empat	11.6	29 September 2008	29 September 2008	
68	Manado - Bitung (Manado - Danowudu)	PT Jasamarga Manado Bitung	26.35	10 Juli 2020	29 September 2020	
TOTAL SULAWESI			48.03			
BALI						
69	Nusa Dua-Ngurah Rai-Benoa (Bali Mandara)	PT Jasamarga Bali Tol	10.07	23 September 2013	23 September 2013	BALI
TOTAL BALI			10.07			
KALIMANTAN						
70	Balikpapan-Samarinda	PT Jasamarga Balikpapan Samarinda	97.27	17 Desember 2019	17 Desember 2019	KALIMANTAN
TOTAL KALIMANTAN			97.27			
TOTAL (DENGAN SURAMADU)			2604			
TOTAL (TANPA SURAMADU)			2599			

Status : Desember 2022

Berkenaan dengan sasaran strategis Meningkatkan Konektivitas Jaringan Jalan Nasional pada sasaran program Meningkatkan Kinerja Pelayanan Jalan Nasional tahun 2022, Sekretariat Badan Pengatur Jalan Tol telah menyelesaikan target penyelesaian konstruksi jalan tol sepanjang 166,51 Km, sepanjang 142,12 km dari total tersebut sudah diresmikan pengoperasiannya pada tahun 2022. Rincian ruas-ruas jalan tol yang sudah selesai konstruksi pada tahun 2022, yaitu:

Tabel 1.4.2 Tabel Ruas Selesai Konstruksi 2022

No	Nama Ruas Tol	Tanggal Operasi	Panjang (KM)	Keterangan
1	Cileunyi - Sumedang - Dawuan : Seksi 1 (Cileunyi - Pamulihan)	24 Januari 2022	11,40	Diresmikan
2	Sigli - Banda Aceh :	8 Maret 2022	6,35	Dioperasikan

	Seksi 2 (Seulimeum - Jantho)			
3	Binjai – Langsa : Seksi 1 (Binjai - Stabat)	4 Februari 2022	11,80	Diresmikan
4	Manado – Bitung (Seksi Danowudu – Bitung)	25 Februari 2022	13,43	Diresmikan
5	Cibitung – Cilincing : (Seksi 2 dan 3)	11 Juli 2022	24,45	Diresmikan
6	Lubuklinggau - Curup – Bengkulu : (Seksi Bengkulu - Taba Penanjung)	25 Agustus 2022	16,73	Dioperasikan
7	Serpong – Balaraja : Seksi 1 (Serpong - SS CBD)	20 September 2022	3,97	Diresmikan
8	Pekanbaru – Padang : (Seksi Pekanbaru – Bangkinang)	27 September 2022	30,89	Diresmikan
9	Bekasi Cawang Kampung Melayu : Seksi 1A dan Koneksi Jalan Tol Wiyoto Wiyono Sisi Timur, serta Off Ramp Jatiwaringin	29 September 2022	2,00	Dioperasikan
10	Cileunyi - Sumedang – Dawuan : Seksi 2,3 (Pamulihan - Cimalaka)	13 Desember 2022	21,10	Dioperasikan
11	Semarang – Demak Seksi II (Sayung – Demak)	-	16,01	Selesai Konstruksi
12	Bekasi Cawang Kampung Melayu : Seksi 2A dan 2A - Ujung	-	4,88	Selesai Konstruksi
13	Cinere – Jagorawi Seksi 3A (kukusan – krukut)	-	3,5	Selesai Konstruksi
Total			166,51	Selesai Konstruksi

Status : Desember 2022

BAB 2

PERENCANAAN KINERJA

Berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, Dokumen Penetapan Kinerja merupakan suatu dokumen pernyataan kinerja/ kesepakatan kinerja/ perjanjian kinerja antara atasan dan bawahan untuk mewujudkan target kinerja tertentu berdasarkan pada sumber daya yang dimiliki oleh instansi. Dokumen Penetapan Kinerja disusun dengan memperhatikan antara lain dokumen perencanaan jangka menengah, dokumen perencanaan kinerja tahunan, dan dokumen penganggaran dan/atau pelaksanaan anggaran.

2.1 URAIAN SINGKAT RENSTRA BADAN PENGATUR JALAN TOL 2020 – 2024

Rencana Strategis (Renstra) Sekretariat Badan Pengatur Jalan Tol Tahun 2020-2024 merupakan dokumen perencanaan program dan kegiatan yang akan dilaksanakan dalam bidang oleh Direktorat Jenderal Bina Marga selama periode 5 (lima) tahun. Dokumen tersebut merupakan bagian dari Renstra Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Tahun 2020-2024 yang disusun berdasarkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN), Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005–2025, serta Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2020-2024.

Program Badan Pengatur Jalan Tol adalah “Program Infrastruktur Konektivitas”, dengan sasaran strategis pertama yaitu “Meningkatnya Konektivitas Jaringan Jalan Nasional”, dengan sasaran program “Meningkatnya Kinerja Pelayanan Jalan Nasional” dan sasaran kegiatan “Pengaturan, Pengusahaan dan Pengawasan Jalan Tol”. Sasaran kegiatan tersebut merupakan dasar kegiatan utama Sekretariat Badan Pengatur Jalan Tol.

Dalam program pembangunan jalan, salah satu prioritas adalah rencana pembangunan 110,17 km jalan tol pada 2020-2024 dengan target operasi jalan tol 2.513,45 km sesuai dengan Rencana Pembangunan Jangka menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2020-2024 yang telah dicanangkan pemerintah. Dalam Rencana Pembangunan Jangka menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2020-2025, jalan tol direncanakan untuk dibangun dan dioperasikan di Jawa, Sumatera, Jawa, Sulawesi dan Kalimantan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi dan sosial. Pembangunan jalan tol merupakan strategi peningkatan mobilitas pada koridor-koridor utama di Indonesia. Selain itu, pembangunan jalan tol juga diharapkan dapat mengurangi waktu tempuh koridor-koridor utama serta menjadi pendorong peningkatan kualitas logistik di Indonesia. Jalan tol dikembangkan sebagai tulang punggung transportasi darat pulau-pulau besar di Indonesia.

Dalam rangka percepatan pembangunan jalan tol, Badan Pengatur Jalan Tol yang menyelenggarakan sebagian kewenangan Pemerintah dalam pengusahaan jalan tol melaksanakan tugas pokok dan fungsinya dengan mengacu kepada kebijakan-kebijakan yang telah ditetapkan. Kebijakan Badan Pengatur Jalan Tol dilaksanakan dalam rangka

mendukung Program Peningkatan Kinerja Pelayanan Jalan Nasional dengan melaksanakan kegiatan pengaturan, pengusaha dan pengawasan jalan tol.

Kebijakan pengembangan dan percepatan pembangunan jalan tol mengacu pada kebijakan dalam hal penyiapan peraturan dan perundangan dengan melalui koordinasi internal dan eksternal yang sinergis, penyusunan Perjanjian Pengusahaan Jalan Tol PPJT yang "bankable" dan "investor friendly", penyiapan dana bergulir untuk pengadaan tanah jalan tol, pemantauan/pengawasan pemenuhan kewajiban PPJT dan kinerja jalan tol yang intensif dan berkelanjutan, dan pengembangan sumber daya dan tata laksana yang efektif dan efisien.

Strategi pendanaan bidang jalan dikaitkan dengan kebutuhan investasi bidang jalan untuk mencapai tingkat pertumbuhan ekonomi tertentu (pendekatan *top-down*). Khusus untuk pengembangan Jalan Tol, diupayakan menggunakan dana swasta, dimana proyek harus layak secara ekonomi dan finansial. Apabila kelayakan finansial rendah/marginal, perlu diupayakan dukungan pemerintah (*government support*), baik melalui penyediaan tanah oleh pemerintah, dukungan penjaminan resiko dari PII, kontribusi pinjaman lembaga bilateral/multilateral atau dikemas dalam skema kerjasama pemerintah dan swasta (KPS) yang tepat (misalnya BOT, DBO, DBL, leasing, annuity, dan sebagainya).

Tabel 2.1.1 Rencana Pembangunan Jalan Tol Tahun 2020-2024 menurut RPJMN

Program Prioritas (PP)/Kegiatan Prioritas (KP)/Proyek Prioritas (Prop)/Proyek	Indikator (Panjang Jalan yang dibangun)	Indikasi Target					Indikasi Pendanaan (Rp. Miliar)
		2020	2021	2022	2023	2024	
ProP : Pembangunan Jalan Tol	(2500 km)						682.903,8
Jalan Tol Non Trans Jawa (Dukungan APBN)	(km)	3,18	3,18	3,18	3,18	3,18	3.903,5
Jalan Tol Non Trans Jawa (Dukungan APBN)	(km)	102,5	102,5	102,5	102,5	102,5	125.858,0
Jalan Tol Jabodetabek (Dukungan KPBU)	(km)	60	75	80	75,04	57,9	110.823,0
Jalan Tol Trans Jawa (Dukungan KPBU)	(km)	30	50	60	50	57	43.309,0
Jalan Tol Trans Sumatra (Dukungan APBN)	(km)	472	590	495	325	149	105.524,0
Jalan Tol Trans Sumatra (Dukungan KPBU)	(km)	472	590	495	325	149	203.026,0
Jalan Tol Kalimantan (Dukungan APBN)	(km)	2	2	2	2	2,13	2.661,8
Jalan Tol Kalimantan (Dukungan KPBU)	(km)	15	20	25	25	12,1	25.514,1
Jalan Tol Sulawesi (Dukungan APBN)	(km)	3,1	3,1	3,1	3,1	3,1	3.061,0
Jalan Tol Sulawesi (Dukungan KPBU)	(km)	10	15	20	20	11,2	15.153,5
Jalan Tol Semarang-Demak (Dukungan KPBU)	(km)	-	-	-	-	11,5	5.300,0
Jalan Tol Semarang-Demak (Dukungan APBN)	(km)	-	-	-	-	15,5	7.100,0
Jalan Tol Samarinda-Bontang (Potensi)	(km)	-	-	-	-	5	2.970,0
Jalan Tol Ngawi-Bojonegoro-Tuban-Lamongan-Manyar-	(km)	-	-	-	-	10	1.700,0

Bunder (Potensi)							
Jalan Tol Bandara Juanda-Tanjung Perak (SERR) (Potensi)	(km)	-	-	-	-	25	8.500,0
Jalan Tol Waru (Aloha) Wonokromo-Tanjung Perak	(km)	-	-	-	-	8	3.500,0
Jalan Tol Perkotaan Medan	(km)	-	-	-	10	20	15.000,0

Adapun Badan Pengatur Jalan Tol telah merencanakan pembangunan Ruas Jalan Tol baru, sebagai berikut :

Tabel 2.1.2 Rencana Pembangunan Jalan Tol

No.	Ruas	Tahun				
		2020	2021	2022	2023	2024
A	Target Operasi Jalan Tol Tahun 2020-2024 yang sudah memiliki PPJT	338,41	346,15	262,80	76,80	263,07
1.	Trans Jawa	0,00	29,60	13,70	31,00	27,90
2.	Non Trans Jawa	32,11	137,99	73,05	00,00	170,97
3.	Jabodetabek	61,69	104,86	34,15	00,00	0,00
4.	Sumatera	186,81	55,20	141,90	45,80	64,20
5.	Kalimantan	33,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Sulawesi	24,80	18,50	0,00	0,00	0,00
B	Target Operasi Jalan Tol Tahun 2020-2024 (ruas baru/belum PPJT)	0,00	0,00	0,00	570,02	656,20
1.	Non Trans Jawa	0,00	0,00	0,00	0,00	95,20
2.	Jabodetabek	0,00	0,00	0,00	9,02	0,00
3.	Sumatera	0,00	0,00	0,00	561,00	561,00
4.	Kalimantan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Sumber : Renstra Ditjen Bina Marga

2.1.1 Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran Strategis

Badan Pengatur Jalan Tol merupakan bagian dari Direktorat Jenderal Bina Marga yang dalam menjalankan tugasnya harus dilandaskan dan mengacu kepada visi misi RPJMN 2020 – 2024 sebagaimana tertuang dalam dokumen RPJMN 2020 – 2024 (Perpres No 18 Tahun 2020). Visi RPJMN 2020 - 2024 adalah “Terwujudnya Indonesia yang berdaulat, mandiri dan berkepribadian berlandaskan Gotong Royong”.

Sedangkan misi RPJMN 2020 – 2024 adalah sebagai berikut :

1. Peningkatan kualitas manusia Indonesia
2. Struktur ekonomi yang produktif, mandiri, dan berdaya saing.
3. Pembangunan yang merata dan berkeadilan.
4. Mencapai lingkungan hidup yang berkelanjutan.
5. Kemajuan budaya yang mencerminkan kepribadian bangsa.

6. Penegakan sistem hukum yang bebas korupsi, bermartabat, dan terpercaya.
7. Perlindungan bagi segenap bangsa dan memberikan rasa aman pada seluruh warga.
8. Pengelolaan pemerintahan yang bersih, efektif, dan terpercaya.
9. Sinergi pemerintah daerah dalam kerangka Negara Kesatuan.

Dalam konteks pelaksanaan tugas dan fungsi Badan Pengatur Jalan Tol, visi dan misi di atas diterjemahkan ke dalam tujuan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat sebagai rumusan yang hendak dituju diakhir periode perencanaan yang merupakan penjabaran dari visi yang dilengkapi dengan rencana sasaran strategis yang hendak dicapai dalam rangka mencapai sasaran nasional dalam RPJMN tahun 2020 – 2024.

Agar program penyelenggaraan jalan nasional Ditjen Bina Marga lebih tepat mendukung sasaran pembangunan nasional 2020 – 2024, sasaran strategis, sasaran program dan sasaran kegiatan Ditjen Bina Marga disempurnakan menjadi:

1. Sasaran Strategis: Meningkatnya konektivitas jaringan jalan nasional.
2. Sasaran Program: Meningkatnya kinerja pelayanan jalan nasional.
3. Sasaran Kegiatan: Mencakup seluruh kegiatan yang menjadi tugas dan fungsi dari Ditjen. Bina Marga sesuai Permen PUPR Nomor 13 Tahun 2020.

Kegiatan yang dilaksanakan oleh Ditjen Bina Marga saat ini sangat terkait dengan konektivitas jaringan jalan nasional dan aksesibilitas wilayah. Kegiatan preservasi jalan dan jembatan meningkatkan kemantapan jalan nasional, sedangkan kegiatan pelebaran dan pembangunan jalan dan jembatan meningkatkan aksesibilitas suatu wilayah. Agregat dari kemantapan dan aksesibilitas akan meningkatkan konektivitas antar pusat pertumbuhan kawasan di Indonesia.

2.1.2 Kebijakan, Program, dan Kegiatan

Arah kebijakan RPJMN 2020-2024 terkait bidang jalan untuk mencapai sasaran yakni Memperkuat Infrastruktur untuk Kebijakan penyelenggaraan jalan nasional untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar khususnya pada:

1. Program Prioritas Infrastruktur Pelayanan Dasar terutama pada Kegiatan Prioritas Keselamatan dan Keamanan Transportasi, termasuk infrastruktur perkotaan (pembangunan perlintasan tidak sebidang antara jalan dan KA di perkotaan, serta pembangunan jalan lingkar perkotaan; dan
2. Program Prioritas Infrastruktur Ekonomi terutama pada Kegiatan Prioritas Konektivitas Jalan.

Secara umum kebijakan dan strategi utama di dalam RPJMN 2020-2024 terkait dengan bidang jalan dapat dibagi ke dalam 6 bagian, yakni:

1. Peningkatan penerapan jalan berkeselamatan sebagai salah satu pilar dari RUNK LLAJ; (Infrastruktur Pelayanan Strategi: Keselamatan dan Keamanan Transportasi)
2. Optimalisasi sistem preservasi jalan nasional yang mengutamakan kegiatan pemeliharaan; (Infrastruktur Ekonomi: Konektivitas Jalan)

3. Skema Kerjasama antara Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU) *Availability Payment* (AP) yang berbasis kinerja serta Program Hibah Jalan daerah yang mendorong kinerja pemeliharaan jalan perlu diperluas. Skema KPBU-AP juga mendukung kualitas jalan melalui keterpaduan penyelenggaraan jalan dan pengoperasian jembatan timbang untuk mengendalikan perilaku pembebanan berlebih di jalan (*road overloading*) yang menjadi penyebab utama kerusakan jalan.
4. Pembangunan jalan nasional pada lintas utama pulau, untuk mendukung kawasan-kawasan prioritas nasional (KI dan KSPN prioritas, simpul transportasi prioritas, jalan lingkaran/trans pulau terluar dan jalan akses mendukung wilayah 3T dan kawasan perbatasan);
5. Peningkatan efektivitas perencanaan DAK Bidang Jalan agar pelaksanaannya selaras dengan prioritas pengembangan wilayah; dan
6. Inovasi pendanaan infrastruktur seperti KBPU, pemanfaatan dana jangka panjang, dan progra dana bergulir (*revolving fund*) khususnya untuk pengembangan jalan tol.

Terdapat indikasi Proyek Prioritas (termasuk di dalamnya 3 *major project*) bidang jalan dalam RPJMN 2020-2024, yakni:

1. Peningkatan jalan berkeselamatan;
2. Pembangunan jalan strategis;
3. Pembangunan jalan tol;
4. Pembangunan jalan nasional mendukung kawasan prioritas (KI prioritas, KEK, KSPN, dan kawasan perbatasan);
5. Pembangunan jalan akses simpul transportasi (pelabuhan utama, pelabuhan pengumpul, bandara pengumpul primer, sekunder, tersier yang berada di ibukota provinsi, pelabuhan penyeberangan kelas I, pelabuhan angkutan sungai danau dan penyeberangan skala pengumpul, terminal tipe A);
6. Preservasi jalan nasional (peningkatan/pelebaran jalan nasional);
7. Pembangunan dan pemeliharaan jalan daerah;
8. Pengembangan Wilayah Suramadu;
9. Pembangunan perlintasan tidak sebidang antara jalan dan KA di perkotaan; dan
10. Pembangunan Jalan Lingkar Perkotaan.

2.2 PERJANJIAN KINERJA

Dokumen Perjanjian Kinerja merupakan dokumen berupa pernyataan komitmen atau kesepakatan untuk mencapai target kinerja tertentu antara yang memberi amanah dalam hal ini pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada yang menerima amanah dalam hal ini pimpinan instansi yang lebih rendah. Perjanjian Kinerja berisi indikator kinerja yang terukur tertentu yang dapat menggambarkan keberhasilan atau kegagalan suatu unit organisasi dan unit kerja. Perjanjian Kinerja disusun berdasarkan tugas, fungsi, dan wewenang dengan mempertimbangkan sumber daya yang tersedia, baik sumber daya manusia, sarana dan prasarana, maupun sumber dana (anggaran).

Perjanjian Kinerja disusun oleh masing-masing unit organisasi dan unit kerja dengan tujuan, antara lain:

- a. Sebagai wujud nyata komitmen antara penerima dan pemberi amanah untuk meningkatkan integritas, akuntabilitas, transparansi, dan kinerja Aparatur;

- b. Menciptakan tolok ukur kinerja sebagai dasar evaluasi kinerja aparatur;
- c. Sebagai dasar penilaian keberhasilan/kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran organisasi dan sebagai dasar pemberian penghargaan dan sanksi;
- d. Sebagai dasar bagi pemberi amanah untuk melakukan monitoring, evaluasi dan supervisi atas perkembangan/ kemajuan kinerja penerima amanah;
- e. Sebagai dasar dalam penetapan sasaran kinerja pegawai.

Dokumen Perjanjian Kinerja dimanfaatkan oleh setiap pimpinan instansi pemerintah untuk:

- a. Memantau dan mengendalikan pencapaian kinerja organisasi;
- b. Melaporkan capaian realisasi kinerja dalam Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
- c. Menilai keberhasilan organisasi.

Perjanjian Kinerja Sekretariat Badan Pengatur Jalan Tol merupakan komitmen untuk tercapainya kinerja dari sasaran strategis yang telah ditetapkan dalam Renstra Direktorat Jenderal Bina Marga Tahun 2020 - 2024. Didalam perjanjian kinerja Sekretariat Badan Pengatur Jalan Tol tahun 2022 telah ditetapkan target capaian kinerja sasaran kegiatan tahun 2022 yang menjadi panduan arah untuk mencapai visi dan misi dari Direktorat Jenderal Bina Marga. Agar target capaian kinerja yang ditetapkan dalam perjanjian kinerja dapat terukur dengan baik, maka disusun indikator kinerja output yang mengacu kepada PK tahun 2022 dengan target dan alokasi anggaran kegiatan berdasarkan DIPA Awal tahun 2022.

Komponen perjanjian kinerja tahun 2022 dapat dijelaskan meliputi hal-hal sebagai berikut:

- a. **Sasaran Program**, sesuai dengan yang dimuat dalam Renstra Direktorat Jenderal Bina Marga, pada perjanjian kinerja Sekretariat Badan Pengatur Jalan Tol tahun 2022 terdapat 2 (dua) sasaran, yaitu Meningkatnya Kinerja Pelayanan Jalan Nasional dan Meningkatnya Kualitas Tata kelola Kelola Kementerian PUPR dan Tugas Teknis Lainnya.
- b. **Indikator Kinerja Kegiatan**, sesuai dengan Renstra Direktorat Jenderal Bina Marga terdapat 1 indikator kinerja kegiatan yang mendukung kinerja Sekretariat Badan Pengatur Jalan Tol, yaitu Tingkat Pencapaian Pembangunan Jalan Bebas Hambatan dengan output Layanan Pengaturan, Pengusahaan, Pengawasan Jalan Tol. Dalam revisi Perjanjian Kinerja Tahun 2022, terdapat 2 indikator kinerja kegiatan yang mendukung kinerja Sekretariat Badan Pengatur Jalan Tol, yaitu Tingkat Pencapaian Pembangunan Jalan Bebas Hambatan dengan output Layanan Pengaturan, Pengusahaan, Pengawasan Jalan Tol dan Tingkat Efektifitas dan Efisiensi Tata Kelola Penyelenggaraan Jalan dengan output Layanan Perkantoran dan Layanan Sarana Internal.
- c. **Indikator Kinerja Output**, sesuai dengan yang dimuat dalam RKA-KL Sekretariat Badan Pengatur Jalan Tol tahun 2022.
- d. **Target**, merupakan kuantitas yang ingin dicapai dari indikator kinerja output yang dimiliki Sekretariat Badan Pengatur Jalan Tol di tahun 2022. Target yang dicantumkan

bersumber dari dokumen anggaran (RKA-KL) awal Sekretariat Badan Pengatur Jalan Tol tahun 2022.

- e. **Jumlah anggaran**, merupakan total alokasi anggaran Sekretariat Badan Pengatur Jalan Tol yang bersumber dari dokumen anggaran (RKA-KL) awal Sekretariat Badan Pengatur Jalan Tol Tahun Anggaran 2022.

2.2.1 Perbandingan PK Awal dan PK Revisi Tahun 2022 (outcome)

Tabel 2.2.1 Perbandingan PK Awal dan PK Revisi Tahun 2022 (outcome)

NO	OUTPUT	SAT	TARGET		KETERANGAN
			PK AWAL	PK REVISI	
Sasaran Program : Meningkatnya Kinerja Pelayanan Jalan Nasional					
IKP 1 : Tingkat Aksesibilitas Jalan Nasional					
	<i>Parameter Panjang Jalan Tol Yang Beroperasi</i>	Km	346,15	262,80	
Sasaran Program : Meningkatnya Dukungan Manajemen dan Tugas Teknis Lainnya					
IKP : Tingkat Dukungan Manajemen Kementerian PUPR					
	<i>Parameter Tingkat Dukungan Manajemen Kementerian PUPR</i>	%	0,00	100,00	

2.2.2 Perbandingan PK Awal dan PK Revisi Tahun 2022 (ouput)

Tabel 2.2.2 Perbandingan PK Awal dan PK Revisi Tahun 2022 (output)

NO	OUTPUT	SAT	TARGET		KETERANGAN
			PK AWAL	PK REVISI	
Sasaran Program : Meningkatnya Kinerja Pelayanan Jalan Nasional					
IKP 1 : Tingkat Aksesibilitas Jalan Nasional					
Indikator Kinerja Kegiatan					
1	ABF 010 Pengaturan, Pengusahaan, Pengawasan Jalan Tol	Rekomendasi Kebijakan	1,00	1,00	
Sasaran Program : Meningkatnya Dukungan Manajemen dan Tugas Teknis Lainnya					
IKP : Tingkat Dukungan Manajemen Kementerian PUPR					
Indikator Kinerja Kegiatan					

1	EBA 994 Layanan Perkantoran	Layanan	0,00	1,00	
2	EBB 951 Layanan Sarana Internal	Unit	0,00	43,00	

2.2.3 Penjelasan Kronologis Perubahan PK Tahun 2022

Perjanjian Kinerja dapat direvisi atau disesuaikan dalam hal terjadi kondisi sebagai berikut:

- a) Terjadi pergantian atau mutasi pejabat;
- b) Perubahan dalam strategi yang mempengaruhi pencapaian tujuan dan sasaran (perubahan program, kegiatan dan alokasi anggaran);
- c) Perubahan prioritas atau asumsi yang berakibat secara signifikan dalam proses pencapaian tujuan dan sasaran.

Perjanjian Kinerja Sekretariat Badan Pengatur Jalan Tol mengalami revisi karena Perubahan asumsi dalam pencapaian sasaran program pada indikator kinerja sasaran program Tingkat Dukungan Manajemen Kementerian PUPR dan Perubahan alokasi anggaran dikarenakan menindaklanjuti Surat Direktur Jenderal Bina Marga Nomor PR 0201-Db/1354 tentang Usulan Revisi Anggaran TA. 2022 di Lingkungan Direktorat Bina Marga. Perjanjian Kinerja Revisi Sekretariat Badan Pengatur Jalan Tol TA 2022 dapat dilihat pada gambar berikut:

Perjanjian Kinerja Badan Pengatur Jalan Tol tahun 2022 sebagaimana disajikan dalam **Gambar 2.2.1** di bawah ini.


PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : TRIONO JUNOASMONO
Jabatan : SEKRETARIS BADAN PENGATUR JALAN TOL

Selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**

Nama : HEDY RAHADIAN
Jabatan : DIREKTUR JENDERAL BINA MARGA

Selaku atasan langsung pihak pertama, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**

- PIHAK PERTAMA pada tahun 2022 ini berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab PIHAK PERTAMA.
- PIHAK KEDUA akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, Januari 2022


PIHAK KEDUA
 HEDY RAHADIAN


PIHAK PERTAMA
 TRIYONO JUNOASMONO

Sumber : Perjanjian Kinerja (PK) 2022

Gambar 2.2.1 Perjanjian Kinerja (PK) Awal Sekretariat Badan Pengatur Jalan Tol 2022

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022
SEKRETARIAT BADAN PENGATUR JALAN TOL
DIREKTORAT JENDERAL BINA MARGA
KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT


Sasaran Program	Indikator Kinerja	Baseline 2021	Target 2022
Meningkatnya Kinerja Pelayanan Jalan Nasional	IKSP : Tingkat Aksesibilitas Jalan Nasional		
	IKK : Tingkat pencapaian pembangunan jalan bebas hambatan	35,48 %	100,00 %
	Parameter Panjang Jalan Tol yang beroperasi	123,00 Km	346,15 Km
	Rincian Output		
ABF 010	Pengaturan, Pengusahaan, Pengawasan Jalan Tol	1,00 Rekomendasi Kebijakan	1,00 Rekomendasi Kebijakan


Kegiatan

- Pengaturan, Pengusahaan dan Pengawasan Jalan Tol
- Dukungan Manajemen Ditjen Bina Marga

Anggaran
Rp. 91.427.972.000

Jakarta, Januari 2022


 Direktur Jenderal Bina Marga,
Hedy Rahadian


 Sekretaris Badan Pengatur Jalan Tol,
Triyono Junoasmono

Sumber : Perjanjian Kinerja (PK) 2022

Gambar 2.2.2 Perjanjian Kinerja (PK) Awal Sekretariat Badan Pengatur Jalan Tol 2022

2.3 METODE PENGUKURAN

Pengukuran Kinerja merupakan proses sistematis dan berkesinambungan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, kebijakan, sasaran strategis dan tujuan yang telah ditetapkan dalam rencana strategis. Untuk memperoleh gambaran keberhasilan/kegagalan pelaksanaan tugas Sekretariat Badan Pengatur Jalan Tol, ditetapkan metode pengukuran kinerja untuk mendapatkan gambaran secara rinci pencapaian kinerja kegiatan dan sasaran, serta hal-hal yang mendukung keberhasilan dan kegagalan dalam mencapai tujuan-tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan.

2.3.1 Metode Pengukuran Terhadap Indikator Kinerja

Pengukuran kinerja terhadap indikator kinerja sasaran program dilakukan dengan cara menghitung realisasi terhadap target capaian (persentase).

SASARAN KEGIATAN/ INDIKATOR KINERJA		CARA PENGUKURAN	SUMBER DATA
IKSP1	Tingkat Akseibilitas Jalan Nasional		
	Panjang Jalan Tol yang ber Operasi	%	Renstra
IKK 1	Tingkat Pencapaian Pembangunan Jalan bebas hambatan		
Output	Layanan Pengaturan, Pengusahaan, Pengawasan Jalan Tol	Jumlah layanan	e-Monitoring
	Layanan Perkantoran	Jumlah Layanan	e-Monitoring
	Layanan Sarana Internal	Jumlah Unit	e-Monitoring

Metode pengukuran capaian output menggunakan parameter jumlah layanan yang dihasilkan/ jumlah bulan layanan dalam satu tahun.

$$\text{Capaian RO Y (\%)} = \frac{(\text{Real Fisik (\%)} \text{ Paket A} \times \text{Pagu Paket A}) + (\text{Real Fisik (\%)} \text{ Paket B} \times \text{Pagu Paket B}) + \text{dst}}{\text{Pagu Paket A} + \text{Paket B} + \text{dst}} \times 100\%$$

Realisasi capaian kinerja output Sekretariat Badan Pengatur Jalan Tol merupakan realisasi capaian kinerja dari paket-paket kegiatan yang telah dilaksanakan selama periode tahun 2022. Data capaian kinerja bersumber dari data SIPP terpadu Direktorat Jenderal Bina Marga dan E-Monitoring Online Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.

2.3.2 Pengumpulan Data yang Mendukung Pengukuran Kinerja

Pengukuran capaian kinerja Sekretariat Badan Pengatur Jalan Tol dilaksanakan oleh Bagian Umum sesuai tugas dan fungsi yang tertuang dalam Peraturan Menteri Pekerjaan

Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 20/PRT/M/2020 dan di dukung oleh seluruh bidang dan satker dilingkungan Sekretariat Badan pengatur Jalan Tol. Kegiatan pengumpulan data kinerja dan pengolahan data kinerja dilakukan oleh Bidang Teknik, Bidang Operasi dan Pemeliharaan, Bidang Investasi, Bidang Pendanaan dan Satuan Kerja yang kemudian di serahkan kepada Bagian Umum serta bertanggung jawab atas pengumpulan data yang didukung oleh Bidang terkait. Bagian Umum melakukan penyusunan Laporan Kinerja dan Pengesahan Laporan Kinerja dilakukan oleh Sekretaris Badan Pengatur Jalan Tol.

2.4 TARGET 2022 MENURUT RENSTRA

Target kinerja dalam hal ini diartikan sebagai target kinerja sasaran, baik sasaran strategis, sasaran program maupun sasaran kegiatan yang dilengkapi dengan indikatornya. Target kinerja sasaran menunjukkan tingkat sasaran kinerja spesifik yang akan dicapai oleh kementerian yang meliputi program dan kegiatan dalam periode waktu yang telah ditetapkan. Dalam penyusunan target kinerja baik tingkat kegiatan, program maupun kementerian didasarkan pada kriteria-kriteria diantaranya:

Target menggambarkan angka kuantitatif dan satuan yang akan dicapai dari setiap indikator kinerja sasaran;

Tahun 2022 merupakan tahun ketiga periode RENSTRA Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Tahun 2020-2024. Indikator kinerja kegiatan yang tercantum di dalam dokumen RENSTRA Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Tahun 2020-2024 tidak selaras/ tidak sesuai dengan indikator kinerja kegiatan/ output pada DIPA yang tertuang di dalam dokumen Perjanjian Kinerja Revisi tahun 2022. Perbandingan target capaian kinerja tahun 2022 berdasarkan Perjanjian Kinerja, RKA-K/L revisi terakhir dan RENSTRA Sekretariat Badan Pengatur jalan Tol disajikan pada Tabel berikut :

2.4.1 Sandingan *Outcome* dan target pada Perjanjian Kinerja 2022 dengan Renstra 2022

Tabel 2.4.1 Perbandingan Target Capaian Kinerja Berdasarkan Renstra dan Perjanjian Kinerja TA 2022

NO	IKSP	SAT	TARGET			KET
			RENSTRA	PERJANJIAN KINERJA	REVISI AKHIR	
Sasaran Program : Meningkatnya Kinerja Pelayanan Jalan Nasional						
1	Tingkat Aksesibilitas Jalan Nasional	%	100,00	100,00	100,00	
	<i>Parameter Panjang Jalan Tol Yang Beroperasi</i>	Km	262,80	346,15	262,80	
Sasaran Program : Meningkatnya Dukungan Manajemen dan Tugas Teknis Lainnya						

1	Tingkat Dukungan Manajemen Kementerian PUPR	%	-	0,00	100,00	Perubahan Indikator kinerja
Parameter	Tingkat Dukungan Manajemen Kementerian PUPR	%	-	0,00	100,00	

2.4.2 Sandingan *Output* dan target pada Perjanjian Kinerja 2022 dengan Renstra 2020

Sandingan output dan target pada perjanjian kinerja Tahun 2022 dengan Renstra 2022 Sekretariat Badan Pengatur Jalan Tol dapat dilihat pada tabel dibawah ini.

Tabel 2.4.2 Perbandingan Target Capaian Kinerja Berdasarkan Renstra dan Perjanjian Kinerja TA 2022

NO	IKSP	SAT	TARGET			KET
			RENSTRA	PERJANJIAN KINERJA	REVISI AKHIR	
Sasaran Program : Meningkatkan Kinerja Pelayanan Jalan Nasional						
IKP 1 : Tingkat Aksesibilitas Jalan Nasional						
Indikator Kinerja Kegiatan						
1	Pengaturan, ABF Pengusahaan, 010 Pengawasan Jalan Tol	Rekomendasi kebijakan	-	1,00	1,00	
Sasaran Program : Meningkatkan Dukungan Manajemen dan Tugas Teknis Lainnya						
IKP : Tingkat Dukungan Manajemen Kementerian PUPR						
Indikator Kinerja Kegiatan						
1	EBA Layanan 994 Perkantoran	Layanan	-	1,00	1,00	Perubahan Indikator kinerja
2	EBB Layanan Sarana 951 Internal	Unit	-	43,00	43,00	Perubahan Indikator kinerja

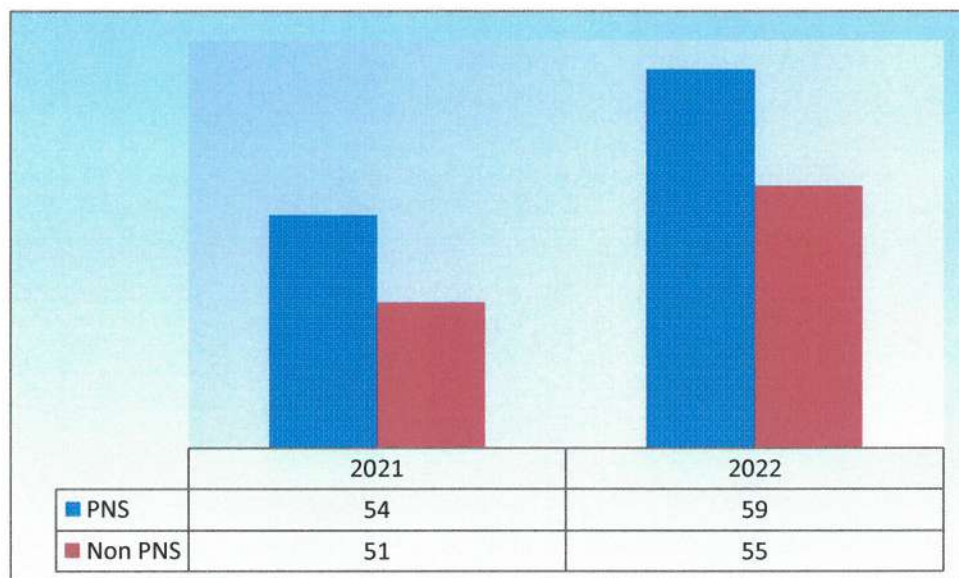
BAB 3

KAPASITAS ORGANISASI

Sumber Daya Manusia (SDM) serta sarana dan prasarana adalah salah satu faktor yang sangat penting bahkan tidak dapat dilepaskan dari sebuah organisasi, baik institusi maupun perusahaan sehingga sasaran kinerja yang telah ditetapkan dapat sepenuhnya tercapai.

3.1 SUMBER DAYA MANUSIA

Sekretariat Badan Pengatur Jalan Tol menjalankan tugas dengan wilayah kerja meliputi seluruh wilayah Indonesia. Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya Sekretariat Badan Pengatur Jalan Tol pada tahun 2022 ini didukung oleh 114 orang yang terdiri dari 59 orang PNS dan 55 orang Non PNS. Jumlah tersebut berubah (meningkat) jika dibandingkan dengan tahun 2021 dengan perubahan jumlah pegawai dengan total 105 orang. Perubahan tersebut disebabkan adanya pegawai pensiun, mutasi dan promosi pegawai. Perbandingan total jumlah pegawai di lingkungan Sekretariat Badan pengatur Jalan Tol dapat dilihat pada gambar dibawah ini.

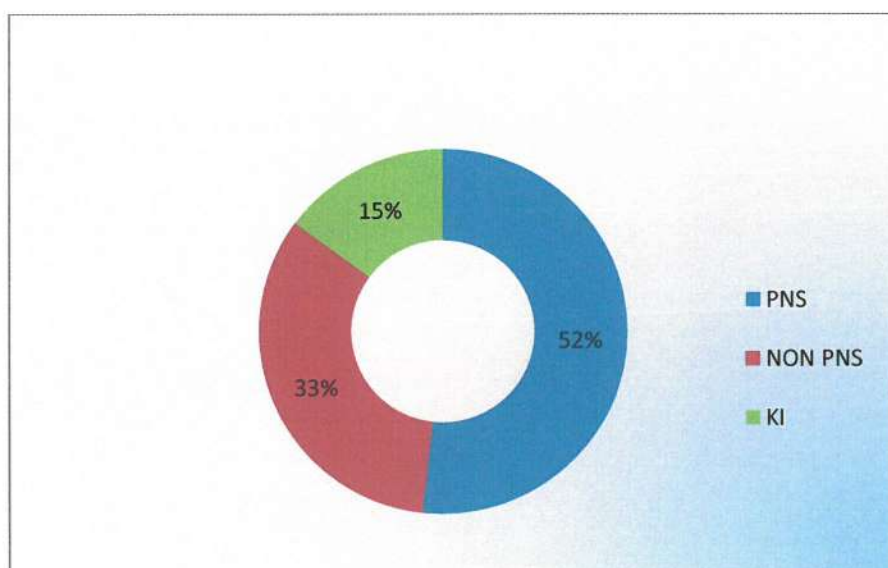


Gambar 3.1.1 Perbandingan Jumlah Pegawai Sekretariat BPJT Tahun 2021-2022

Rincian formasi pegawai di lingkungan Sekretariat Badan Pengatur Jalan Tol dapat dilihat pada rincian di bawah ini.

Tabel 3.1.1 Jumlah Pegawai Sekretariat Badan Pengatur Jalan Tol

No	Kategori	Jumlah
1	PNS	59 Pegawai
a	Golongan IV	14 Pegawai
b	Golongan III	37 Pegawai
c	Golongan II	8 Pegawai
2	Non PNS	55 Pegawai
a	Non PNS/ PPNPN	38 Pegawai
b	Konsultan Individu	17 Pegawai
Total		114 Pegawai

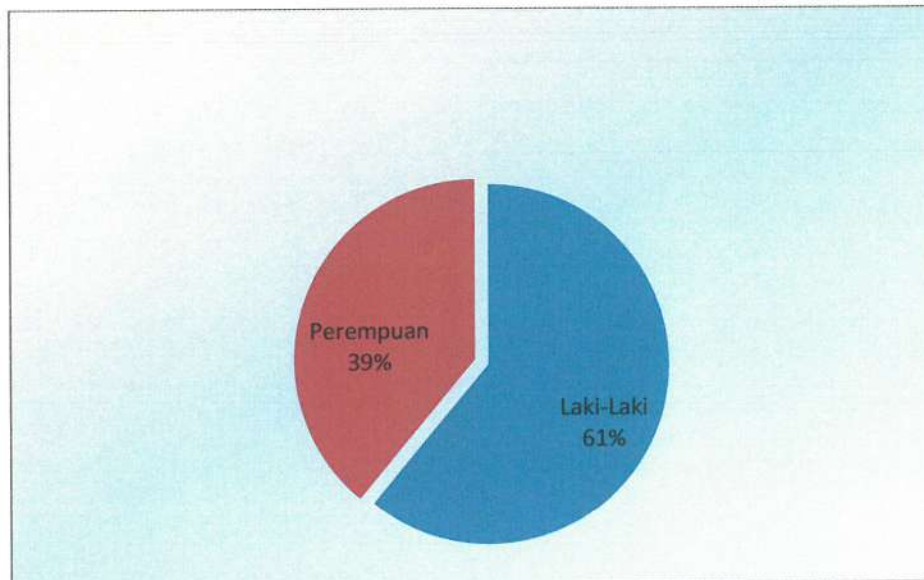


Gambar 3.1.2 Jumlah Pegawai Sekretariat Badan Pengatur Jalan Tol

5.3.1. Sumber Daya Manusia Pegawai Negeri Sipil

Sumber daya manusia Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang mendukung kinerja Sekretariat Badan Pengatur Jalan Tol dapat digolongkan berdasarkan jenis kelamin, tingkat pendidikan, pangkat/golongan dan usia. Adapun informasi rinci mengenai PNS di lingkungan Sekretariat Badan Pengatur Jalan Tol adalah:

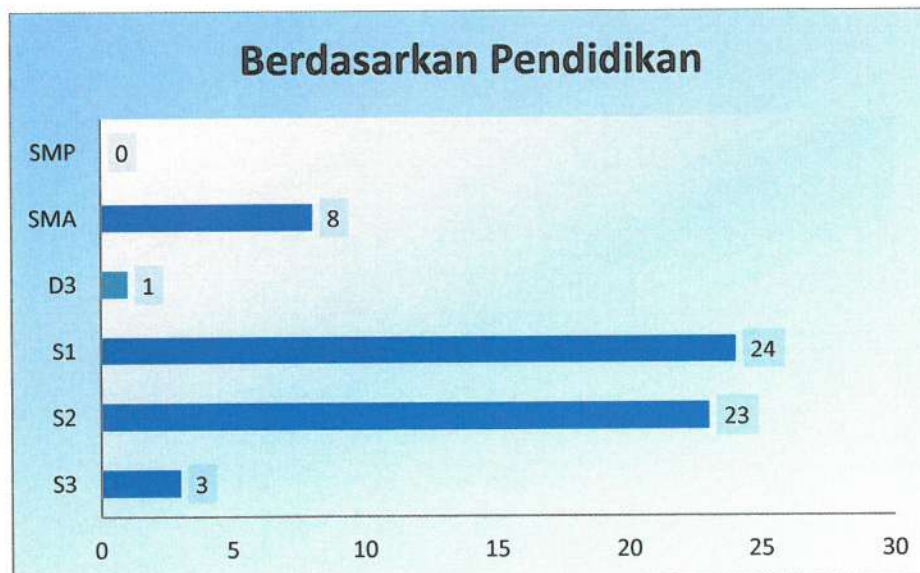
1. Berdasarkan Jenis Kelamin



Gambar 3.1.3 Persentase PNS Berdasarkan Jenis Kelamin

Pada **gambar 3.1.3** diatas bisa dilihat bahwa Perbandingan PNS berjenis kelamin Laki-laki berjumlah 36 pegawai sebesar 61% sedangkan untuk PNS berjenis kelamin perempuan berjumlah 23 pegawai sebesar 39%.

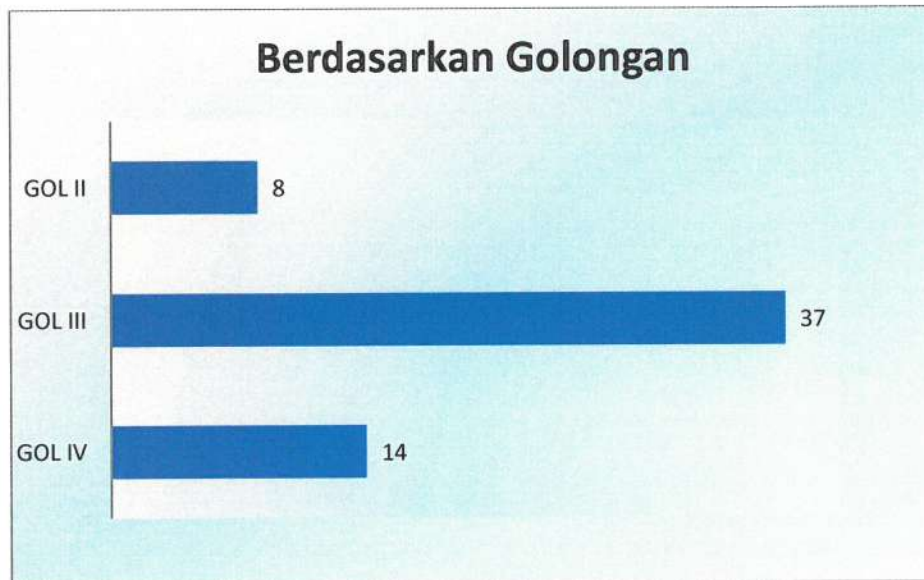
2. Berdasarkan Pendidikan



Gambar 3.1.4 Jumlah PNS Berdasarkan Pendidikan

Pada **gambar 3.1.4** dapat dilihat bahwa tingkat pendidikan Pegawai PNS tahun 2022 didominasi dengan pendidikan S1 dan S2 yaitu sebanyak 47 pegawai, pegawai berpendidikan SMA sebanyak 8 pegawai dan 3 pegawai untuk berpendidikan S3, pegawai berpendidikan D3 sebanyak 1 pegawai.

3. Berdasarkan Golongan



Gambar 3.1.5 Jumlah PNS Berdasarkan Golongan

Pada **gambar 3.1.5** diatas bisa dijabarkan bahwa di lingkungan Sekretariat Badan Pengatur Jalan Tol jumlah memiliki pegawai menurut golongan dengan rincian sebagai berikut :

No	Kategori	Jumlah
1	Golongan IV/D	1 Pegawai
2	Golongan IV/C	1 Pegawai
3	Golongan IV/B	6 Pegawai
4	Golongan IV/A	8 Pegawai
5	Golongan III/D	10 Pegawai
6	Golongan III/C	8 Pegawai
7	Golongan III/B	12 Pegawai
8	Golongan III/A	4 Pegawai
9	Golongan II/C	6 Pegawai
10	Golongan II/B	7 Pegawai

4. Berdasarkan Usia

PNS yang mendominasi adalah dengan usia 36-50 tahun yaitu sebanyak 19 orang dari jumlah PNS. PNS dengan usia lebih dari 50 tahun yaitu sebanyak 3 orang. Sementara itu, PNS usia 20-35 tahun, yaitu sebanyak 16 orang dari jumlah PNS. Dapat dilihat dengan **gambar 3.1.6** dibawah ini:



Gambar 3.1.6 Jumlah PNS Berdasarkan Usia

5.3.2. Sumber Daya Manusia Non Pegawai Negeri Sipil

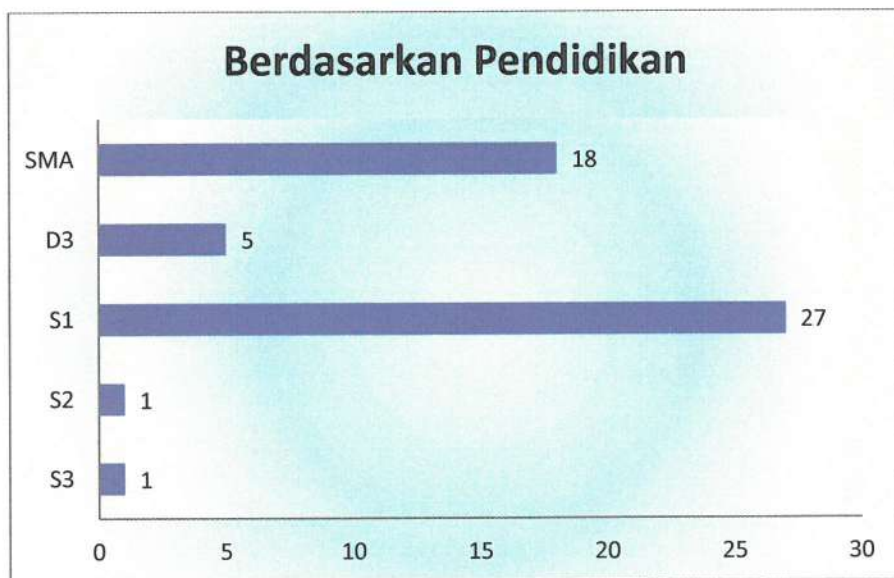
1. Berdasarkan Jenis Kelamin



Gambar 3.1.7 Persentase Non PNS Berdasarkan Jenis Kelamin

Dari **gambar 3.1.6** diatas Jumlah Non PNS di Sekretariat Badan Pengatur Jalan Tol dengan total pegawai sebanyak 55 orang dengan 34 orang atau 67% adalah laki-laki dan sisanya sebanyak 17 orang atau 33% adalah perempuan.

2. Berdasarkan Pendidikan



Gambar 3.1.8 Jumlah Non PNS Berdasarkan Pendidikan

Berdasarkan gambar 3.1.8 dapat diketahui bahwa Pegawai Non PNS pada Sekretariat Badan Pengatur Jalan Tol sebagian besar berlatar pendidikan S1 dengan jumlah 27 orang dari jumlah Non PNS. Untuk pendidikan Diploma 3 (D3) sebanyak 5 orang dan Strata 2 (S2) dengan jumlah 1 orang. Pegawai Non PNS dengan jenjang Pendidikan SMA sebanyak 18 orang.

3. Berdasarkan Usia



Gambar 3.1.9 Jumlah Non PNS Berdasarkan Usia

Berdasarkan Gambar 3.1.8 dapat diketahui bahwa Pegawai Non PNS pada Sekretariat Direktorat Badan Pengatur Jalan Tol yang terbanyak adalah usia 20-35 tahun yaitu sebanyak 27 orang dari jumlah Non PNS. Pegawai Non PNS dengan usia 36-50 tahun sebanyak 21 orang, dan dengan usia lebih dari 50 tahun yaitu sebanyak 7 orang dari total pegawai Non PNS 55 orang.

3.2 SARANA DAN PRASARANA

Dalam melakukan tugas dan fungsinya Badan Pengatur Jalan Tol didukung dengan sarana dan prasarana yang cukup memadai. Sarana dan prasarana tersebut tercatat sebagai barang milik negara.

Barang Milik Negara, atau yang biasa disingkat BMN, merupakan bagian tak terpisahkan dari Keuangan Negara sebagaimana tertuang dalam pasal 1 Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara disebutkan bahwa: "Keuangan Negara adalah semua hak dan kewajiban negara yang dapat dinilai dengan uang, serta segala sesuatu baik berupa uang maupun berupa barang yang dapat dijadikan milik negara berhubung dengan pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut."

Dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, pada pasal 1 disebutkan bahwa: "Barang Milik Negara adalah semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban APBN atau berasal dari perolehan lainnya yang sah." Dimana tidak termasuk dalam pengertian BMN adalah barang-barang yang dikuasai dan atau dimiliki oleh:

- a. Pemerintah Daerah (sumber dananya berasal dari APBD termasuk yang sumber dananya berasal dari APBN tetapi sudah diserahkan kepada Pemerintah Daerah);
- b. Badan Usaha Milik Negara/Badan Usaha Milik Daerah yang terdiri dari:
 - 1) Perusahaan Perseroan, dan
 - 2) Perusahaan Umum.
- c. Bank Pemerintah dan Lembaga Keuangan Milik Pemerintah.

Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah, dalam Lampiran I.08 PSAP 07 tentang Akuntansi Aset Tetap dijelaskan bahwa aset tetap diklasifikasikan berdasarkan kesamaan dalam sifat atau fungsinya dalam aktivitas operasi entitas. Klasifikasi aset tetap tersebut yaitu sebagai berikut :

- a. **Tanah**
Tanah yang dikelompokkan sebagai aset tetap ialah tanah yang diperoleh dengan maksud untuk dipakai dalam kegiatan operasional pemerintah dan dalam kondisi siap pakai.
- b. **Peralatan dan Mesin**
Peralatan dan mesin mencakup mesin-mesin dan kendaraan bermotor, alat elektronik, inventaris kantor, dan peralatan lainnya yang nilainya signifikan dan masa manfaatnya lebih dari 12 (dua belas) bulan dan dalam kondisi siap pakai.
- c. **Gedung dan Bangunan**

Gedung dan bangunan mencakup seluruh gedung dan bangunan yang diperoleh dengan maksud untuk dipakai dalam kegiatan operasional pemerintah dan dalam kondisi siap pakai.

d. **Jalan, Irigasi, dan Jaringan**

Jalan, irigasi, dan jaringan mencakup jalan, irigasi, dan jaringan yang dibangun oleh pemerintah serta dimiliki dan/atau dikuasai oleh pemerintah dan dalam kondisi siap pakai.

e. **Aset Tetap Lainnya**

Aset tetap lainnya mencakup aset tetap yang tidak dapat dikelompokkan ke dalam kelompok aset tetap di atas, yang diperoleh dan dimanfaatkan untuk kegiatan operasional pemerintah dan dalam kondisi siap pakai.

f. **Konstruksi dalam Pengerjaan**

Konstruksi dalam pengerjaan mencakup aset tetap yang sedang dalam proses pembangunan namun pada tanggal laporan keuangan belum selesai seluruhnya.

Sarana dan prasarana Sekretariat Badan Pengatur Jalan Tol yang tercatat dalam Barang Milik Negara dapat dilihat pada lampiran dokumen ini. Dan berikut tabel neraca aset tahunan Sekretariat Badan Pengatur Jalan Tol.

Tabel 3.2.1 Neraca Tahunan Komperasi

AKUN NERACA		JUMLAH
KODE	URAIAN	
1	2	3
132111	Peralatan dan Mesin	13,746,244,734
135111	Aset Tetap Renovasi	978,609,417
137111	Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin	(12,420,148,455)
138121	Aset Konsesi Jasa Partisipasi Mitra	335,335,139,000,000
138131	Aset Konsesi Jasa Partisipasi Mitra Dalam Pengerjaan	33,620,256,000,000
162151	Software	5,039,009,000
162191	Aset Tak Berwujud Lainnya	3,702,994,350
166112	Aset Tetap yang tidak digunakan dalam Operasi Pemerintahan	481,635,000
169122	Akumulasi Penyusutan Aset Tetap yang Tidak Digunakan dalam	(481,635,000)
169315	Akumulasi Amortisasi Software	(5,039,009,000)
J U M L A H		368,961,402,700,046

Laporan kondisi barang Sekretairat Badan Pnegatur Jalan Tol (terlampir)

3.3 DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN (DIPA)

Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) adalah dokumen pelaksanaan anggaran yang disusun oleh Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran. DIPA disusun berdasarkan Keputusan Presiden mengenai rincian anggaran belanja pemerintah pusat. DIPA berfungsi sebagai dasar pelaksanaan anggaran setelah mendapat pengesahan Menteri Keuangan.

- DIPA awal dari Sekretariat Badan Pengatur Jalan Tol sesuai dengan Perjanjian Kinerja memiliki pagu anggaran sebesar **Rp91.427.972.000,-**.
- Sekretariat Badan Pengatur Jalan Tol melakukan 7 (tujuh) kali revisi DIPA dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 3.3.1 Kronologis Revisi DIPA TA 2022

NO	Uraian	DIGITAL STAMP	TANGGAL DIPA	NILAI DIPA (Rp)		ALASAN / PENYEBAB REVISI
				SEMULA	MENJADI	
NOMOR: DIPA-033.04.1.498721/2022						
1	DIPA Awal	DS:0945-3822-6992-6963	17-Nov-21	91.427.972.000	-	
2	Revisi 1	DS:5177-4950-9767-6176	14 Desember 2021	91.427.972.000	91.427.972.000	Automatic Adjustment Belanja Pegawai
3	Revisi 2	DS:7762-0632-3729-5372	25 Maret 2022	91.427.972.000	107.553.664.000	Penambahan Anggaran pada Program Konektivitas Infrastruktur sebesar Rp 16.161.692.000, untuk pemenuhan belanja jasa konsultasi penyusunan studi kelayakan
4	Revisi 3	DS:7762-0632-3729-5372	17 Mei 2022	107.553.664.000	107.553.664.000	Pergeseran Anggaran antar jenis belanja
5	Revisi 4	DS:2410-5657-0655-4784	06 Oktober 2022	107.553.664.000	293.090.886.000	<p>✚ Penambahan Anggaran pada Program Konektivitas Infrastruktur sebesar Rp 185.537.222.000, untuk pemenuhan pembayaran Kegiatan Rasionalisasi Tarif Tol Solo-Ngawi</p> <p>✚ Pergeseran Anggaran antar jenis belanja dari pemanfaatan sisa lelang pada:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Kebutuhan pencegahan covid-19 • Audit Surveillance ISO 9001:2015 • Capacity building

NO	Uraian	DIGITAL STAMP	TANGGAL DIPA	NILAI DIPA (Rp)		ALASAN / PENYEBAB REVISI
				SEMULA	MENJADI	
6	Revisi 5	DS:0053-5424-5631-9101	27 Oktober 2022	293.090.886.000	294.049.240.000	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Pergeseran Anggaran antar jenis belanja ➤ Penambahan Anggaran pada Program Dukungan Manajemen sebesar Rp 958.354.000, untuk pemenuhan belanja pegawai
7	Revisi 6	DS:8095-0996-3998-0512	09 November 2022	294.049.240.000	293.066.458.000	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Pergeseran Anggaran antar jenis belanja ➤ Revisi perubahan output kegiatan ➤ Revisi Penghematan Anggaran pada Pagu Blokir
8	Revisi 7	DS:7296-0978-3001-6845	19 Desember 2022	293.066.458.000	289.808.558.000	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Pergeseran Anggaran antar jenis belanja ➤ Revisi Penghematan Anggaran pada Program Dukungan Manajemen

Issue terkait Perubahan Anggaran pada Sekretariat Badan Pengatur Jalan Tol:

1. Automatic Adjustment Belanja Pegawai
2. Pemanfaatan sisa lelang yang tidak terserap
3. Pembayaran Rasionalisasi Tarif Tol pada BUJT
4. Penghematan Anggaran pada Pagu Blokir

➤ Pagu terakhir Sekretariat Badan Pengatur Jalan Tol sesuai yang tercantum pada situs www.emonitoring.pu.go.id adalah Rp.289.808.558.000.-.

BAB 4

AKUNTABILITAS KINERJA

Untuk melakukan monitoring terhadap pelaksanaan dokumen penetapan kinerja tahun 2022 maka dilaksanakan penilaian kinerja selama tahun 2022 yang dituangkan dalam laporan rencana aksi. Laporan rencana aksi disusun untuk melakukan monitoring terhadap proses pencapaian kinerja dan alat untuk memprediksi sedini mungkin hambatan - hambatan yang mungkin muncul yang akan menyebabkan kinerja yang diharapkan tidak tercapai. Dengan dilakukan penyusunan rencana aksi diharapkan sasaran kinerja yang telah ditetapkan dalam dokumen Penetapan Kinerja TA. 2022 dapat sepenuhnya tercapai.

4.1. CAPAIAN KINERJA ORGANISASI

Akuntabilitas Kinerja merupakan pengukuran tingkat capaian kinerja yang diperoleh berdasarkan perbandingan antara target dengan realisasi yang berhasil dicapai dalam jangka waktu 1 (satu) tahun berjalan. Capaian Kinerja Sekretariat Badan Pengatur Jalan Tol Tahun 2022 didapatkan dengan membandingkan antara Realisasi yang dicapai dengan target sesuai dengan indikator kinerja yang ditetapkan dalam dalam Perjanjian Kinerja Sekretariat Badan Pengatur Jalan Tol. Semakin tinggi realisasi menunjukkan pencapaian kinerja yang semakin baik dan sebaliknya jika semakin rendah realisasi menunjukkan pencapaian kinerja yang semakin buruk. Capaian kinerja dan perbandingan antara realisasi penyerapan anggaran dengan rencana penyerapan Sekretariat Badan Pengatur Jalan Tol secara rinci dapat dilihat pada tabel dibawah ini.

4.1.1 Capaian Indikator Kinerja Sasaran Program TA. 2022

Tabel 4.1.1 Informasi Capaian Kinerja Tahun 2022

NO	INDIKATOR KINERJA SASARAN PROGRAM	SAT	TARGET	REALISASI	CAPAIAN (%)	KETERANGAN
Sasaran Program : Meningkatnya Kinerja Pelayanan Jalan Nasional						
	Tingkat Aksesibilitas Jalan Nasional	%	100,00	100,00	100,00	
<i>Parameter</i>	Panjang Jalan Tol Yang Beroperasi	KM	262,8	142,11	54	Capaian tidak tercapai dikarenakan permasalahan lahan, <i>cashflow</i> BUJT dan Pandemi Covid-19
Sasaran Program : Meningkatnya Dukungan Manajemen dan Tugas Teknis Lainnya						
	Tingkat Dukungan Manajemen Kementerian PUPR	%	100,00	99,94	99,94	
<i>Parameter</i>	Tingkat Dukungan Manajemen Kementerian PUPR	%	100,00	99,94	99,94	

Kegiatan pengaturan, pengusaha dan pengawasan jalan tol, dilaksanakan oleh unit kerja "Badan Pengaturan Jalan Tol", dengan sasaran kegiatan "Tingkat pencapaian

pembangunan jalan bebas hambatan” Sasaran kegiatan tersebut memiliki target 100%, dengan parameter “Panjang jalan tol beroperasi yang dilakukan pengaturan, pengusahaan dan pengawasan jalan tol”. Target panjang tol beroperasi tersebut pada akhir tahun 2024 adalah 2.513 km.

Perhitungan Sasaran Kegiatan :

$$SK\ 3.9 = \frac{\text{Realisasi panjang jalan tol beroperasi pada tahun}_i}{\text{Target panjang tol beroperasi pada tahun}_i} \times 100\%$$

$$SK\ 3.9 = \frac{142,11}{268,80} \times 100\%$$

$$SK\ 3.9 = 54 \%$$

Dimana:

1. SK 3.9 = Sasaran kegiatan 3.9 (memiliki satuan %)
2. Realisasi panjang jalan tol beroperasi pada tahun, (Km) = Realisasi panjang jalan tol beroperasi pada tahun 2020, 2021, 2022, 2023, dan 2024
3. Target panjang tol beroperasi pada tahun, (Km) = Target jalan tol beroperasi pada tahun 2020, 2021, 2022, 2023, dan 2024, sebagaimana tercantum pada table di bawah ini:

No	Parameter Sasaran Kegiatan 3.9	Satuan	2020	2021	2022	2023	2024
1	Panjang Tol Beroperasi	Km	338	346	263	647	919

Untuk mencapai Indikator Kinerja Sasaran Program, Sekretariat Badan Pengatur Jalan Tol mempunyai parameter Panjang Jalan Tol yang Beroperasi. Pada Tahun 2022 ini, capaian parameter tersebut tidak tercapai dikarenakan beberapa kendala sebagai berikut:

1. Permasalahan terkait lahan
2. *Cashflow* Badan Usaha Jalan Tol
3. Dampak Pandemi Covid-19

Namun demikian, Sekretariat Badan Pengatur Jalan Tol berupaya untuk mencapai target dengan beberapa upaya percepatan, meliputi:

1. Mempercepat proses pembebasan lahan.
2. Mempfokuskan perencanaan, pemograman, penganggaran pada pengadaan tanah.
3. Melakukan analisis produktifitas konstruksi dilapangan dan memberikan rekomendasi kepada BUJT berdasarkan hasil analisis untuk mencapai target konstruksi.

4.1.2 Capaian Indikator Kinerja Output

Tabel 4.1.2 Perbandingan Capaian Target (PK Revisi dan DIPA Revisi Terakhir)

NO	OUTPUT	SAT	TARGET		REALISASI	CAPAIAN (%)		KETERANGAN
			AWAL	REVISI AKHIR		THD TARGET AWAL	THD TARGET REVISI AKHIR	
	Sasaran Program : Meningkatnya Kinerja Pelayanan Jalan Nasional							
	IKP 1 : Tingkat Aksesibilitas Jalan Nasional							
	Indikator Kinerja Kegiatan							
	ABF 010 Pengaturan, Pengusahaan, Pengawasan Jalan Tol	Rekomendasi Kebijakan	1,00	1,00	1,00	100,00	100,00	
	Sasaran Program : Meningkatnya Dukungan Manajemen dan Tugas Teknis Lainnya							
	IKP : Tingkat Dukungan Manajemen Kementerian PUPR							
	Indikator Kinerja Kegiatan							
	EBA 994 Layanan Perkantoran	Layanan	1,00	1,00	1,00	100,00	100,00	
	EBB 951 Layanan Sarana Internal	Unit	33,00	33,00	30,00	92,42	92,42	

4.1.3 Meningkatnya Kinerja Pelayanan Jalan Nasional

Sasaran program Sekretariat Badan Pengatur Jalan Tol adalah meningkatnya kinerja pelayanan jalan nasional dan tugas teknis lainnya, dengan indikator kinerja kegiatan sebagai berikut:

A. Pengaturan, Pengusahaan, Pengawasan Jalan Tol

Persentase capaian kinerja indikator kinerja kegiatan pengaturan, pengusahaan, pengawasan jalan tol adalah 100.00%. Untuk mencapai target kinerja pengaturan, pengusahaan, pengawasan jalan tol didukung dengan komponen kegiatan dalam rincian sebagai berikut:

Pengaturan, Pengusahaan, Pengawasan Jalan Tol		
100 %		
Kegiatan	Target	Realisasi
Fasilitasi Dokumentasi dan Publikasi Jalan Tol	12 bulan	12 bulan

1. Fasilitasi Dokumentasi dan Publikasi Jalan Tol

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan, Badan Pengatur Jalan Tol (BPJT) dibentuk sebagai regulator jalan tol menggantikan fungsi PT. Jasa Marga yang sebelumnya berperan sebagai regulator dan operator jalan tol. Dalam pelaksanaan tugasnya sehari-hari, Berdasarkan Pasal 45 ayat (6) Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan, tugas BPJT adalah melaksanakan sebagian penyelenggaraan jalan tol, yang meliputi :

- pengaturan jalan tol, mencakup pemberian rekomendasi tarif awal dan penyesuaiannya kepada Menteri Pekerjaan Umum, serta pengambilalihan jalan tol pada akhir masa konsesi dan pemberian rekomendasi pengoperasian selanjutnya;
- pengusahaan jalan tol, mencakup persiapan pengusahaan jalan tol, pengadaan investasi, dan pemberian fasilitas pembebasan tanah;
- pengawasan jalan tol, mencakup pemantauan dan evaluasi pengusahaan jalan tol, dan pengawasan terhadap pelayanan jalan tol.

Berdasarkan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor Nomor 43/M/PRT/2015, Sekretariat BPJT mempunyai tugas memberikan pelayanan teknis dan administratif kepada BPJT. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud di atas, Sekretariat BPJT menyelenggarakan fungsi :

- pelaksanaan kajian dan evaluasi penyiapan pengusahaan jalan tol dan sistem informasi jalan tol;
- pelaksanaan penyiapan, pelayanan, dan pengawasan pengusahaan jalan tol;
- pelaksanaan pengawasan dan pemantauan pelaksanaan Perjanjian Pengusahaan Jalan Tol oleh Badan Usaha;
- pelaksanaan perencanaan, pengelolaan, dan penyiapan bahan penetapan skala prioritas penyaluran dana bergulir serta administrasi, penyaluran, dan pengembalian pinjaman dana bergulir;

e. pelaksanaan kegiatan hukum dan humas, ketatausahaan, kepegawaian, dan keuangan.

Dalam penyelenggaraan fungsi pada kegiatan hukum dan humas yang berada pada Bagian Umum, sebagaimana tertuang pada pasal 18 huruf a Peraturan Menteri PUPR Nomor 43/PRT/M/2015 tentang BPJT, fungsi Bagian Umum adalah pelaksanaan pemberian pertimbangan hukum, advokasi hukum dan sosialisasi hukum, serta dokumentasi, promosi dan publikasi jalan tol.

Lebih spesifik lagi dalam pelaksanaan fungsi dokumentasi, promosi dan publikasi jalan tol, dilaksanakan melalui kegiatan, antara lain :

1. konsolidasi program kehumasan jalan tol,
2. fasilitasi pelaksanaan peresmian/Groundbreaking jalan tol,
3. publikasi/sosialisasi jalan tol di media,
4. pendokumentasian jalan tol,
5. kegiatan partisipasi dalam pameran, dan
6. pembuatan video profil.

BPJT juga melakukan publikasi terkait jalan tol yang telah beroperasi pada tahun 2022 sepanjang 142,11 km, yaitu sebagai berikut :

Berikut data jalan tol yang diresmikan pada tahun 2022 yaitu sebagai berikut :

Tabel 4.1.3 Jalan Tol yang beroperasi dan diresmikan Tahun 2022

No	Bulan	Nama Ruas Tol	Panjang (KM)
1	Januari	Jalan Tol Cileunyi - Sumedang - Dawuan Seksi 1 Cileunyi - Pamulihan	11,4 km
2	Februari	Jalan Tol Binjai - Langsa Seksi 1 Binjai - Stabat	11,8 Km
3	Februari	Jalan Tol Manado - Bitung Danowudu - Bitung	13,425 Km
4	Maret	Jalan Tol Sigli - Banda Aceh Seksi 2 Seulimeum - Jantho	6,35 Km
5	Juli	Jalan Tol Cibitung - Cilincing Seksi 2 dan 3 Telaga Asih - Tambelang - Tarumajaya	24,45 Km
6	Agustus	Jalan Tol Lubuk Linggau - Curup - Bengkulu Seksi 3 Bengkulu - Taba Penanjung	16,725 Km
7	September	Jalan Tol Serpong - Balaraja Seksi 1A Serpong - CBD	3,97 Km
8	Desember	Jalan Tol Pekanbaru - Bangkinang	30,89 Km
9	Desember	Jalan Tol Bekasi - Cawang - Kp. Melayu Cipinang-Casablanca & Koneksi Tol Wiyoto Wiyono Sisi Timur	2 Km

10	Desember	Jalan Tol Cileunyi - Sumedang - Dawuan Seksi 2 dan 3 Pamulihan - Sumedang - Cimalaka	21,1 Km
----	----------	--	---------



Output Pekerjaan :

- Program Kehumasan Jalan Tol
- Pelaksanaan Groundbreaking dan Peresmian Jalan Tol
- Publikasi, dokumentasi dan sosialisasi terkait jalan tol
- Partisipasi pada event

Manfaat :

Mendukung Badan Pengatur Jalan Tol dalam melakukan kegiatan fasilitasi, publikasi, dan kehumasan sehingga informasi mengenai tol baik yang dalam tahap pra konstruksi, konstruksi maupun operasi dapat tersampaikan kepada stakeholders terkait dan masyarakat umum.

Hambatan :

- Terdapat keterbatasan SDM yang ada di bagian Umum yang menguasai kehumasan, sehingga dirasa belum optimal dalam melakukan dokumentasi dan publikasi
- Masih terbatasnya sarana prasarana yang dimiliki BPJT untuk menunjang kegiatan fasilitasi publikasi dan kehumasan.

Alternatif Solusi :

Memaksimalkan SDM yang ada, dan bekerja sama dengan pihak ketiga dalam melakukan kegiatan. Selain itu, dalam hal dokumentasi, meminta foto/video yang dimiliki oleh Badan Usaha Jalan Tol untuk dapat melengkapi kebutuhan yang diperlukan dalam kegiatan fasilitasi publikasi dan kehumasan.

Dokumentasi :

Konten Populer Instagram



Konten Populer Instagram



Konten Populer Tiktok



Konten Populer Facebook



2. Advokasi dan Pertimbangan Hukum

Pengaturan, Pengusahaan, Pengawasan Jalan Tol		
100 %		
Kegiatan	Target	Realisasi
Advokasi dan Pertimbangan Hukum	12 bulan	12 bulan

Berdasarkan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 43/M/PRT/2015, Sekretariat BPJT mempunyai tugas memberikan pelayanan teknis dan administratif kepada BPJT. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud di atas, Sekretariat BPJT menyelenggarakan fungsi:

- pelaksanaan kajian dan evaluasi penyiapan pengusahaan jalan tol dan sistem informasi jalan tol;
- pelaksanaan penyiapan, pelayanan, dan pengawasan pengusahaan jalan tol;
- pelaksanaan pengawasan dan pemantauan pelaksanaan Perjanjian Pengusahaan Jalan Tol oleh Badan Usaha;
- pelaksanaan perencanaan, pengelolaan, dan penyiapan bahan penetapan skala prioritas penyaluran dana bergulir serta administrasi, penyaluran, dan pengembalian pinjaman dana bergulir;
- pelaksanaan kegiatan hukum dan humas, ketatausahaan, kepegawaian, dan keuangan.

Dalam penyelenggaraan fungsi pada kegiatan hukum dan humas yang berada pada Bagian Umum, sebagaimana tertuang pada pasal 18 huruf a Peraturan Menteri PUPR Nomor 43/PRT/M/2015 tentang BPJT, fungsi Bagian Umum adalah pelaksanaan pemberian pertimbangan hukum, advokasi hukum dan sosialisasi hukum, serta dokumentasi, promosi dan publikasi jalan tol.

Advokasi dan pertimbangan hukum adalah kegiatan swakelola yang pelaksanaannya mencakup kegiatan, seperti :

- Pengumpulan dan pengolahan data
- Pendampingan litigasi dan/atau non litigasi
- Rapat pembahasan terkait permasalahan hukum di jalan tol
- Pendampingan pakar/narasumber yang kompeten terhadap masalah-masalah hukum
- Cetak regulasi jalan tol
- Sosialisasi Peraturan Jalan Tol

Output Pekerjaan :

Laporan swakelola advokasi dan pertimbangan hukum

Manfaat :

Mendukung Badan Pengatur Jalan Tol dalam memberikan pendapat hukum (legal opinion), pendampingan baik litigasi maupun non litigasi, serta kompilasi regulasi terkait perusahaan jalan tol.

Dokumentasi :

FGD Implementasi UU Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja, Khususnya di Bidang Jalan Tol "Optimalisasi Pemberdayaan UMKM di TIP" Solo, 21 Oktober 2022



Rapat Penyusunan Kesimpulan dan Peninjauan Lapangan Sengketa Perkara Perdata No. 72/Pdt.G/2021/PN.Smd. Bandung, 28-30 Juli 2022



Pada tahun 2022, Sub Bagian Hukum Humas BPJT menangani perkara, dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 4.1.4 Penanganan Perkara Tahun 2022

Penanganan Perkara Tahun 2022				
NO	NOMOR PERKARA	RUAS JALAN TOL	STATUS	KETERANGAN
1	3121/Pdt.G/2022/PA.Dpk	Permintaan ganti rugi pengadaan tanah di Jalan Tol Cijago	Sidang selanjutnya Senin, 9 Januari 2023 Agenda Jawaban Para Tergugat	
2	237/Pdt.G/2022/PN.Ckr	Ganti rugi pembebasan tanah terkait pembangunan Jalan Tol Cibitung-Cilincing	Sidang selanjutnya Senin, 9 Januari 2023 agenda Pemanggilan Turut Tergugat 2	
3	71/Pdt.G/2021/PN.Jkt.Utr	Permohonan untuk menghentikan /menangguhkan proses pembebasan tanah dan ganti rugi JT Cibitung-Cilincing	Sudah diputus pada Kamis, 17 Februari 2022	Putusan sebagai berikut: <ul style="list-style-type: none"> ✚ MH mengabulkan Eksepsi T1 dan T2 ✚ Gugatan Penggugat tidak dapat diterima ✚ Penggugat membayar biaya perkara
4	240/Pdt.G/2020/PN.Tng	Kunciran-Serpong (pembebasan tanah)	<ul style="list-style-type: none"> ✚ BPJT mendaftarkan Banding pada 26 Maret 2021 ✚ Telah menyerahkan memori Banding pada 3 Juni 2021 ✚ Banding diputus pada 15 Feb 2022 	Putusan sebagai berikut: <ul style="list-style-type: none"> ✚ Majelis Hakim mengabulkan Sebagian Gugatan Penggugat pada pengadilan tingkat pertama ✚ Membatalkan putusan PN Tangerang tgl 15 Maret 2021 ✚ Mengabulkan Eksepsi Tergugat dan Turut Tergugat sebagian ✚ Gugatan Penggugat tidak dapat diterima

5	55/G/2021/ PTUN.JKT	Meminta untuk menyatakan batal atau tidak sah serta mencabut Keputusan Menteri PUPR terkait Persetujuan Roatex Ltd. sebagai badan usaha pengadaan MLFF	<ul style="list-style-type: none"> ✚ Telah dilakukan Permohonan Banding oleh Penggugat pada 8 Oktober 2021 ✚ Telah diputus banding pada Kamis, 03 Februari 2022 	Putusan sebagai berikut: <ul style="list-style-type: none"> ✚ Majelis Hakim menerima Eksepsi Para Tergugat ✚ Menyatakan gugatan Pengugat ditolak seluruhnya ✚ Menghukum Penggugat membayar biaya perkara Banding diterima, dan MH menguatkan Putusan PTUN No. 55 tanggal 21 Sept 2021
6	594 PK/Pdt/ 2022 jo.413 /Pdt.G/2019 /PN.Jkt.Sel	Ganti rugi tanah pada ruas tol Depok-Antasari	<ul style="list-style-type: none"> ✚ Telah dilakukan putusan PK pada 14 Juli 2022 	PK di Mahkamah Agung Tanggal 10 Juni 2021 oleh Kepala Kantah Jakarta Selatan Putusan PK sbb: Mengadili: <ul style="list-style-type: none"> ✚ Menolak permohonan PK dari Pemohon PK Kepala Kantor Pertanahan Kota Jakarta Selatan tersebut; Mengkhususkan Pemohon PK membayar biaya perkara dalam pemeriksaan PK ini
7	72/Pdt.G/20 21/PN.Smd	Permintaan ganti rugi kepemilikan tanah eigendom di Ruas Tol Cisumdawu	<ul style="list-style-type: none"> ✚ Telah dilaksanakan putusan pada 31 Agustus 2022 ✚ Penggugat mengajukan Banding 9 September 2022 ✚ Telah dilaksanakan putusan Banding pada 28 November 2022 	Pada intinya menguatkan Putusan PN Sumedang dan Menghukum Para Pembanding semula Para Penggugat untuk membayar biaya perkara
8	809/Pdt.G/2 022/PN.Tng	Permohonan Keberatan Ganti Rugi Pengadaan Tanah di Ruas Tol Cinere-Serpong	Telah dilaksanakan perdamaian oleh Para Pihak dengan di tandatanganinya Perjanjian Perdamaian tanggal 3 November 2022	Perjanjian Perdamaian menerangkan bahwa Para Pihak sepakat untuk berdamai dan menyelesaikan secara penuh, menyeluruh, dan final atas perkara

Tabel 4.1.5 Somasi dan Pengaduan

Somasi dan Pengaduan					
NO	NOMOR SURAT	PENGIRIM	TUJUAN	RINGKASAN	TINDAK LANJUT
1	28 April 2022 010/FB O/TARU MAJAYA /IV/2022	Forum Bersatu Ormas Kec. Tarumajaya	PT Cibitung Tanjung Priok Port Tollways (BPJT sebagai tembusan)	Konfirmasi Dugaan Penyalahgunaan Wewenang oleh oknum yang memberikan ijin membuka panel/akses jalan dibawah Tol Cibitung-Cilincing Seksi 3 STA 23 di Desa Samuderajaya. FBO mengkonfirmasi: <ul style="list-style-type: none"> ✚ apakah PT CTP mengetahui dan memberikan ijin membuka panel dimaksud dan apa dasar pemberian ijinnya? ✚ Hal ini merupakan pelanggaran hukum karena memberikan ijin demi kepentingan bisnis dan bukan kepentingan masyarakat 	Bidang Teknik meminta agar akses tersebut segera ditutup
2	31 Mei 2022 AM.00/1700/DPD RI/V/2022	Ketua DPD RI	Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat RI	Adanya permasalahan yang dihadapi masyarakat Kabupaten Sumedang yang belum menerima pembayaran akan pembangunan Nasional Jalan Tol Cisumdawu	Sudah dikoordinasikan oleh Dit.JBH dan dimintakan Data dari PPK (Status 14 Juli 2022)
3	11 Juni 2022	Ketua Tim Masyarakat Anti Korupsi dan Kekerasan (Suharto)	<ul style="list-style-type: none"> ✚ Bapak Pimpinan BPJT ✚ Bapak Kapolri ✚ Bapak Kejaksaan Agung 	Telah terjadi kesewenangan oleh Bapak Hotman Saragih Pimpro Pembangunan Jalan Tol Ruas Tebing Tinggi - Indrapura pada PT. Utama Marga Waskita. Adapun permasalahannya adalah: <ul style="list-style-type: none"> ✚ Pelarangan Beribadah oleh Pimpro karena diwajibkan bekerja dari Senin-Minggu, sehingga mengganggu bagi yang beragama kristen untuk menjalankan ibadah ✚ Mark UP Progres Fisik berbeda yang aktual dilapangan dengan yang diajukan untuk penarikan dana ✚ Pemakaian tanah timbun proyek jalan tol Ruas Tebing Tinggi - Indrapura diduga tidak mempunyai izin galian C, yang mengakibatkan kerusakan lingkungan dan kerugian Pendapatan Asli Daerah (PAD) 	Sudah dikonfirmasi kepada BUJT (Status 29 Juli 2022)

				<ul style="list-style-type: none"> ✦ Penjualan Tanah bekas skriping dan pembersihan, padahal pembayaran pembebasan lahan menggunakan APBN sehingga menjadi milik Negara dan tidak boleh diperjualbelikan. ✦ Pengurangan tinggi timbunan sampai ratusan ribu kubik yang mengakibatkan kerugian negara yang sangat fantastis sampai ratusan milyar rupiah ✦ Pekerjaan yang bermutu rendah karena pengurangan persyaratan pekerjaan dan mutu bahan material ✦ Perubahan system kontrak kerja dari Lumsan Prais menjadi unit Prais yang sangat akal-akalan 	
4	05 September 2022 11.304/PENJAR A1-NGO/IX/22	LSM PENJARA 1	Kepala BPJT	<p>Terindikasi adanya rekayasa dari pihak-pihak tertentu pada pelelangan Pengusahaan Jalan Tol Gilimanuk-Mengwi, yang mengakibatkan proses tahapan evaluasi prakualifikasi tidak adil, tidak terbuka, tidak transparan dan tidak terjadi persaingan yang sehat.</p> <p>Masa konsesi tidak ada dicantumkan pada dokumen prakualifikasi dan addendum 1 (satu), ini baru dicantumkan oleh panitia dalam addendum yang ke II (dua)</p> <p>Pengumuman penetapan hasil negoisasi No. 44/BPJT/L/GLMG/2022 adalah keputusan cacat hukum, karena panitia sama sekali tidak mencantumkan surat penetapan yang dikeluarkan oleh Menteri</p>	Telah dikoordinasikan dengan BUJT

Permohonan Pendapat Hukum					
NO	NOMOR SURAT	PERIHAL	TUJUAN	RINGKASAN	TINDAK LANJUT
1	13 Juli 2022 UM.01.02.BK /159	Undangan Rapat dari Direktorat JBH	Kepala Bagian Umum, BPJT	Sehubungan dengan permohonan pendapat hukum dari Kementerian PUPR ke Jamdatun terhadap Permohonan Pembayaran Kompensasi Pembebasan Jalan Tol Semarang-Demak dari PT. Jasa Marga (Persero) Tbk, maka diadakan rapat bersama.	Telah dilaksanakan rapat pada Senin, 18 Juli 2022 di Ruang Rapat Datun 3, Kejaksaan Agung.
2	18 Juli 2022 057/TJKB/VI 1/2022	Permohonan	BPJT Kementerian PUPR	Agar BUJT PT. Tol Jagat Kerthi Bali mendapatkan pendampingan hukum dan pendapat hukum dari pengacara negara perihal proses lelang, penetapan pemenang, serta proses pengadaan tanah atas proyek jalan tol Gilimanuk-Mengwi.	Telah dibuatkan surat dari Kepala BPJT kepada Bapak Sekjen untuk dapat memproses permohonan pendampingan hukum kepada JAM Intel Kejagung RI

T
a
b
e
l

Tabel 4.1.6 Lembar Kendali Rancangan Peraturan Menteri PUPR Terkait Jalan Tol

No.	Rancangan Peraturan Menteri PUPR	Status	Keterangan
1	Rapermen Perubahan Permen PUPR No. 10/PRT/M/2018 tentang TI/TIP	Menunggu harmonisasi dengan Kemenkumham	
2	Rapermen Perubahan Permen PUPR No. 1/PRT/M/2017 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pengadaan Badan Usaha Untuk Pengusahaan Jalan Tol	Proses DJPI	
3	Rapermen PUPR tentang Transaksi Tol Nontunai Nirsentuh Di Jalan Tol	Selesai	Permen PUPR Nomor 18 Tahun 2020 Tentang Transaksi Tol Nontunai Nirsentuh Di Jalan Tol (Berita negara RI Tahun 2020 Nomor 738)
4	Rapermen PUPR tentang Kompensasi Atas Penetapan Golongan Jenis Kendaraan Bermotor dan Perubahan Tarif pada Jalan Tol	Selesai	Permen PUPR Nomor 19 Tahun 2020 Tentang Kompensasi Atas Penetapan Golongan Jenis Kendaraan Bermotor dan Perubahan Tarif pada Jalan Tol (Berita negara RI Tahun 2020 Nomor 962)
5	Rapermen BLU Dukungan Pengusahaan Jalan Tol	Draft dokumen BLU dari Sekretaris BPJT kepada Direktur PPKBLU Kemenkeu	
6	Rapermen tentang Standar Pelayanan Minimal Jalan Tol	Dalam pembahasan di Bidang OP	
7	Rapermen Tentang Perubahan Rencana Usaha Dalam Pengusahaan Jalan Tol	Dalam pembahasan di Bina Marga	

3. Penyusunan, Perencanaan, Program dan Anggaran, Pelaporan Keuangan dan Evaluasi Pelaksanaan TA 2022

Pengaturan, Pengusahaan, Pengawasan Jalan Tol		
100 %		
Kegiatan	Target	Realisasi
Penyusunan, Perencanaan, Program dan Anggaran, Pelaporan Keuangan dan Evaluasi Pelaksanaan TA.2022	12 bulan	12 bulan

Merujuk kepada Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor : 43/M/PRT/2015 tentang Badan Pengatur Jalan Tol, Sekretariat BPJT mempunyai tugas memberikan pelayanan teknis kepada BPJT dengan menyelenggarakan fungsi :

1. Pelaksanaan kajian dan evaluasi penyiapan pengusahaan jalan tol dan sistem informasi jalan tol;
2. Pelaksanaan penyiapan, pelayanan, dan pengawasan pengusahaan jalan tol;
3. Pelaksanaan pengawasan dan pemantauan pelaksanaan Perjanjian Pengusahaan Jalan Tol oleh Badan Usaha;
4. Pelaksanaan perencanaan, pengelolaan, dan penyiapan bahan penetapan skala prioritas penyaluran dana bergulir serta administrasi, penyaluran, dan pengembalian pinjaman dana bergulir; dan
5. Pelaksanaan kegiatan hukum dan hubungan masyarakat, ketatausahaan, kepegawaian, dan keuangan.

Salah satu kegiatan yang menjadi tupoksi adalah pelaksanaan kegiatan hukum dan hubungan masyarakat, ketatausahaan, kepegawaian, dan keuangan.

Penjelasan :

Kegiatan penyusunan, perencanaan, program dan anggaran, pelaporan keuangan dan evaluasi pelaksanaan TA 2022 adalah kegiatan yang mendukung tugas dan fungsi Sekretariat BPJT di bagian umum, yaitu :

1. Penyusunan RKA-K/L 2022 dan konsep LKIP 2022 dengan menghadirkan narasumber yang kompeten dibidangnya.
2. Menghadiri sosialisasi kegiatan Penyusunan RKA-KL dan LKIP dalam rangka sinkronisasi dan penajaman program di lingkungan Direktorat Jenderal Bina Marga.
3. Menghadiri kegiatan Penyusunan Laporan Keuangan dalam rangka laporan keuangan.
4. Penyusunan evaluasi pelaksanaan anggaran 2022.

Output Pekerjaan :

Laporan keuangan dan evaluasi pelaksanaan anggaran.

Manfaat :

Mendukung Sekretariat Badan Pengatur Jalan Tol dalam melakukan kegiatan penyusunan, perencanaan, program dan anggaran, pelaporan keuangan dan Evaluasi Pelaksanaan TA 2022

Dokumentasi :

Penyusunan RKA-K/L 2023



4. Pembinaan dan Pemberdayaan SDM

Pengaturan, Pengusahaan, Pengawasan Jalan Tol		
100 %		
Kegiatan	Target	Realisasi
Pembinaan dan Pemberdayaan SDM	12 bulan	12 bulan

Merujuk kepada Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor : 43/M/PRT/2015 tentang Badan Pengatur Jalan Tol, Sekretariat BPJT mempunyai tugas memberikan pelayanan teknis kepada BPJT dengan menyelenggarakan fungsi :

1. Pelaksanaan kajian dan evaluasi penyiapan pengusahaan jalan tol dan sistem informasi jalan tol;
2. Pelaksanaan penyiapan, pelayanan, dan pengawasan pengusahaan jalan tol;
3. Pelaksanaan pengawasan dan pemantauan pelaksanaan Perjanjian Pengusahaan Jalan Tol oleh Badan Usaha;
4. Pelaksanaan perencanaan, pengelolaan, dan penyiapan bahan penetapan skala prioritas penyaluran dana bergulir serta administrasi, penyaluran, dan pengembalian pinjaman dana bergulir; dan
5. Pelaksanaan kegiatan hukum dan hubungan masyarakat, ketatausahaan, kepegawaian, dan keuangan.

Salah satu kegiatan yang menjadi tupoksi adalah pelaksanaan kegiatan hukum dan hubungan masyarakat, ketatausahaan, kepegawaian, dan keuangan.

Penjelasan :

Kegiatan Pembinaan dan Pemberdayaan SDM adalah kegiatan yang mendukung tugas dan fungsi BPJT di bagian umum, seperti :

1. Terlaksananya Kegiatan Pembinaan dan Pemberdayaan SDM;
2. Terlaksananya Capacity Building di Lingkungan Sekretariat Badan Pengatur Jalan Tol;
3. Terlaksananya kegiatan Workshop Mind Setting bagi Pegawai di Lingkungan Sekretariat Badan Pengatur Jalan Tol.

Output Pekerjaan :

Laporan Kegiatan Pembinaan dan Pemberdayaan SDM

Manfaat :

Pembinaan dan pemberdayaan SDM merupakan salah satu upaya untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas pokok bagi bagian umum terutama di sub bagian kepegawaian agar pengelolaan data kepegawaian dapat berjalan dengan efektif dan efisien dan didukung dengan administrasi yang baik dan benar demi tercapainya pelayanan prima bagi setiap Pegawai di lingkungan Badan Pengatur Jalan Tol.

Hambatan :

SDM yang kurang serta beban kerja yang besar menjadi penghambat dalam penyerapan anggaran sehingga belum banyak dilakukan pelaksanaan diklat pegawai yang disebabkan minimnya jumlah pegawai / SDM dan kondisi pandemi membuat proses administrasi kepegawaian menjadi terhambat.

Alternatif Solusi :

Memaksimalkan SDM yang ada dan mengajukan penambahan SDM untuk menunjang kegiatan-kegiatan yang ada.

Dokumentasi :

Penyusunan Naskah Akademik



Penyusunan dan Pembahasan Zona Integritas



Kegiatan Internalisasi Core Values ASN BerAKHLAK Bagi Pegawai Sekretariat BPJT



5. Penataan Arsip

Pengaturan, Pengusahaan, Pengawasan Jalan Tol		
100 %		
Kegiatan	Target	Realisasi
Penataan Arsip	1 Paket	1 Paket

Merujuk kepada Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor : 43/M/PRT/2015 tentang Badan Pengatur Jalan Tol, Sekretariat BPJT mempunyai tugas memberikan pelayanan teknis kepada BPJT dengan menyelenggarakan fungsi :

1. Pelaksanaan kajian dan evaluasi penyiapan pengusaha jalan tol dan sistem informasi jalan tol;
2. Pelaksanaan penyiapan, pelayanan, dan pengawasan pengusaha jalan tol;
3. Pelaksanaan pengawasan dan pemantauan pelaksanaan Perjanjian Pengusahaan Jalan Tol oleh Badan Usaha;
4. Pelaksanaan perencanaan, pengelolaan, dan penyiapan bahan penetapan skala prioritas penyaluran dana bergulir serta administrasi, penyaluran, dan pengembalian pinjaman dana bergulir; dan
5. Pelaksanaan kegiatan hukum dan hubungan masyarakat, ketatausahaan, kepegawaian, dan keuangan.

Salah satu kegiatan yang menjadi tupoksi adalah pelaksanaan kegiatan hukum dan hubungan masyarakat, ketatausahaan, kepegawaian, dan keuangan.

Penjelasan :

Kegiatan penataan arsip mencakup :

1. Identifikasi arsip
2. Pendeskripsian arsip
3. Pembungkusan arsip
4. Penomoran definitif
5. Penataan fisik arsip
6. Pelabelan boks
7. Pengiriman arsip pusat arsip bina marga
8. Penempatan boks arsip yang telah dilabelin ke pusat arsip Bina Marga

Output Pekerjaan :

Penataan Arsip yang tertata dengan rapih dalam pelaksanaan ketatausahaan dan kearsipan di lingkungan Badan Pengatur Jalan Tol.

Manfaat :

Mendukung Badan Pengatur Jalan Tol dalam melakukan kegiatan penataan arsip.

Hambatan :

SDM yang kurang serta beban kerja yang besar menjadi penghambat dalam penyerapan anggaran sehingga belum optimal dalam pelaksanaan.

Alternatif Solusi :

Memaksimalkan SDM yang ada dan mengajukan penambahan SDM untuk menunjang kegiatan-kegiatan yang ada.

Dokumentasi:

Penataan Arsip



6. Pembangunan Data Warehouse dan Pemutakhiran Informasi Jalan Tol

Pengaturan, Pengusahaan, Pengawasan Jalan Tol		
100 %		
Kegiatan	Target	Realisasi
Pembangunan Data Warehouse dan Pemutakhiran Informasi Jalan Tol	1 Paket	1 Paket

Pengembangan sistem informasi sebagai wadah atau rumah dari sistem informasi yang ada di lingkungan BPJT baik berupa dashboard, sistem informasi dan mobile apps yang diperlukan untuk pengelolaan data, pengintegrasian data, menginformasikan dan memutakhirkan data, capaian kinerja dan kegiatan BPJT yang telah, sedang, atau akan dilakukan melalui Aplikasi, website dan media lainnya, serta memberikan dukungan teknis dalam teknologi informasi dan komunikasi di BPJT.

Sehingga BPJT memiliki sistem data warehouse sebagai database yang dapat mengintegrasikan dan mengelola data beserta seluruh media lainnya yang dimiliki BPJT dapat dikelola dengan baik dan up to date, sehingga dapat memberikan data mengenai jalan tol yang mutakhir kepada para stakeholders dan juga sebagai pelaporan kepada pimpinan yang terupdate dan mudah diakses untuk manajemen internal BPJT dan tersedianya sistem informasi data warehouse yang terintegrasi dengan sistem informasi di lingkungan BPJT dan mengelola data dan informasi yang lengkap (up to date) terkait capaian kinerja dan kegiatan BPJT melalui Aplikasi, website dan media sosial di BPJT.

Output Pekerjaan :

Keluaran yang diharapkan dari kegiatan ini adalah laporan tersampainya informasi terkait capaian kinerja dan kegiatan BPJT kepada masyarakat serta informasi-informasi lainnya terkait jalan tol, berupa :

1. Pendahuluan

2. Laporan Laporan Bulanan
3. Laporan Antara
4. Laporan Akhir

Manfaat :

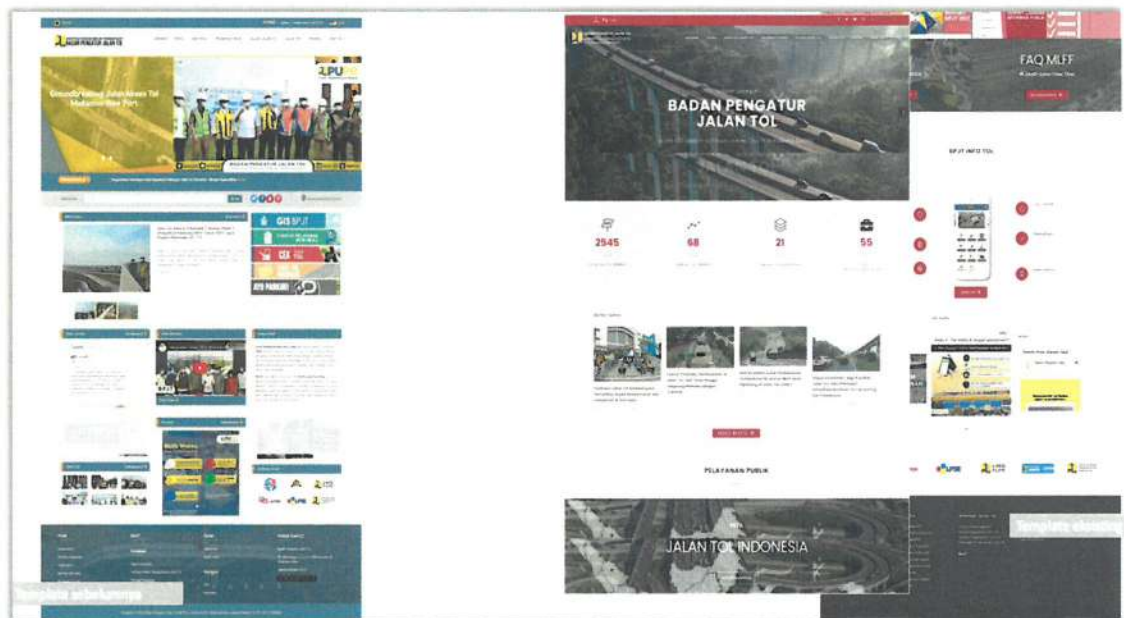
supaya BPJT memiliki sistem data warehouse sebagai database yang dapat mengintegrasikan dan mengelola data beserta seluruh media lainnya yang dimiliki BPJT dapat dikelola dengan baik dan up to date, sehingga dapat memberikan data mengenai jalan tol yang mutakhir kepada para stakeholders dan juga sebagai pelaporan kepada pimpinan yang terupdate dan mudah diakses untuk manajemen internal BPJT.

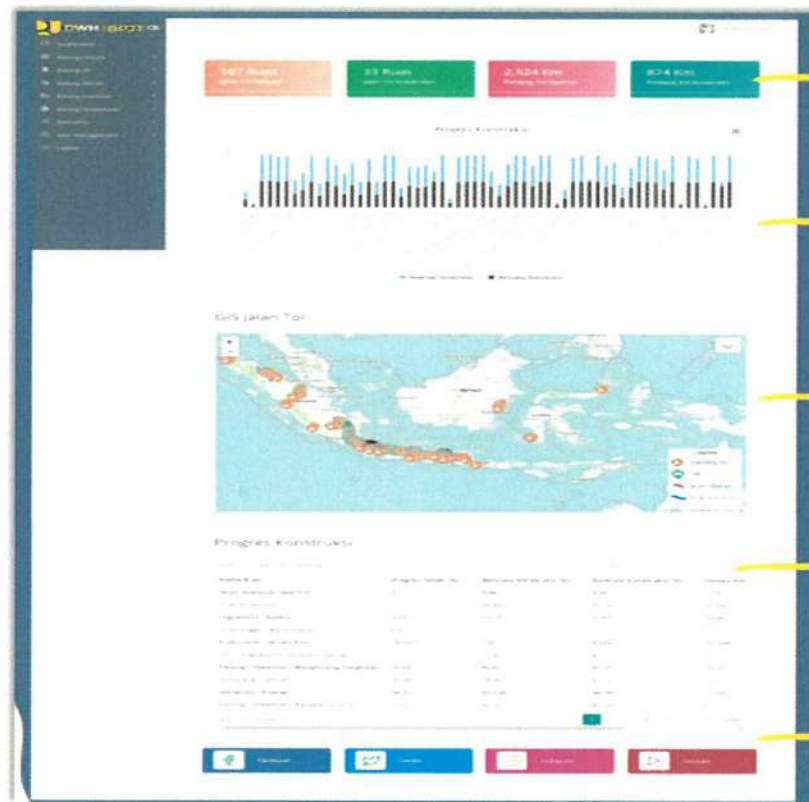
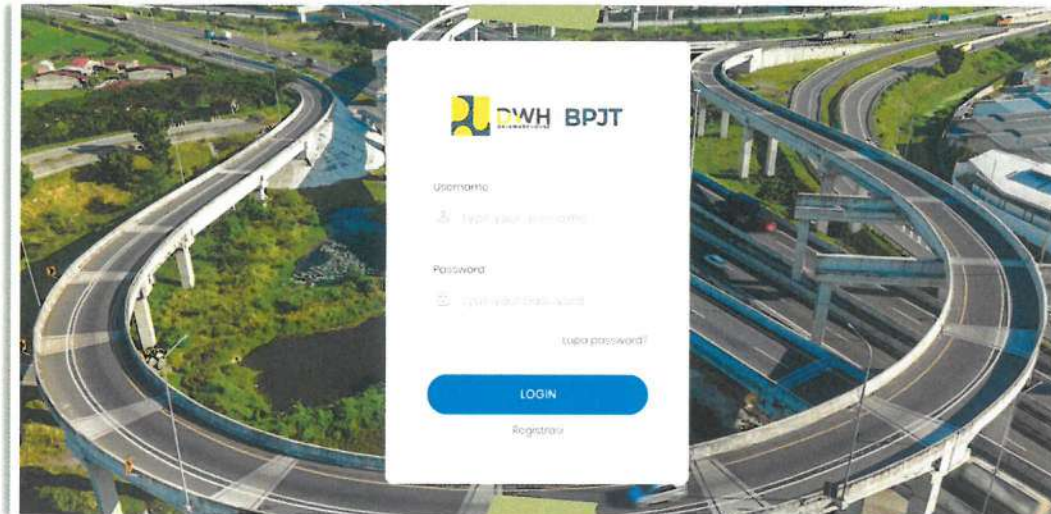
Hambatan :

1. Terdapat perbedaan data antar bidang di Badan Pengatur Jalan Tol sehingga diperlukan koordinasi terkait data yang akan dikeluarkan untuk informasi pimpinan ataupun *stakeholder* terkait.
2. Masih terdapat data yang belum terakomdir pada datawarehouse sehingga diperlukan penambahan data ataupun pemutakhira data.
3. Dikarenakan masih dalam pembangunan sehingga pada datawarehouse diperlukan pengembangan lebih lanjut dalam hal tampilan atau visual agar memudahkan dalam memahami data yang ditampilkan.

Dokumentasi :

Website BPJT





7. Pelaporan Secara Elektronik (e-Monitoring) Satuan Kerja Kementerian PUPR

Pengaturan, Pengusahaan, Pengawasan Jalan Tol		
100 %		
Kegiatan	Target	Realisasi
Pelaporan secara elektronik (e-Monitoring) Satuan Kerja Kementerian PUPR	12 Bulan	12 Bulan

Merujuk kepada Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor : 43/M/PRT/2015 tentang Badan Pengatur Jalan Tol, Sekretariat BPJT mempunyai tugas memberikan pelayanan teknis kepada BPJT dengan menyelenggarakan fungsi :

- a. pelaksanaan kajian dan evaluasi penyiapan pengusahaan jalan tol dan sistem informasi jalan tol;
- b. pelaksanaan penyiapan, pelayanan, dan pengawasan pengusahaan jalan tol;
- c. pelaksanaan pengawasan dan pemantauan pelaksanaan Perjanjian Pengusahaan Jalan Tol oleh Badan Usaha;
- d. pelaksanaan perencanaan, pengelolaan, dan penyiapan bahan penetapan skala prioritas penyaluran dana bergulir serta administrasi, penyaluran, dan pengembalian pinjaman dana bergulir; dan
- e. pelaksanaan kegiatan hukum dan hubungan masyarakat, ketatausahaan, kepegawaian, dan keuangan.

Penjelasan :

Kegiatan Pelaporan secara elektronik (e-Monitoring) Satuan Kerja Kementerian PUPR adalah kegiatan yang mendukung tugas dan fungsi BPJT di bagian umum, yaitu *updating* progress anggaran secara e-Monitoring.

Output Pekerjaan :

Laporan e-monitoring di Sekretariat Badan Pengatur Jalan Tol

Manfaat :

Mendukung Sekretariat Badan Pengatur Jalan Tol dalam melakukan kegiatan penyusunan, perencanaan, program dan anggaran, pelaporan keuangan dan Evaluasi Pelaksanaan TA 2022.

Hambatan : -

8. Administrasi Kegiatan

Pengaturan, Pengusahaan, Pengawasan Jalan Tol		
100 %		
Kegiatan	Target	Realisasi
Administrasi Kegiatan	12 Bulan	12 Bulan

Merujuk kepada Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor : 43/M/PRT/2015 tentang Badan Pengatur Jalan Tol, Sekretariat BPJT mempunyai tugas memberikan pelayanan teknis kepada BPJT dengan menyelenggarakan fungsi :pelaksanaan kajian dan evaluasi penyiapan pengusahaan jalan tol dan sistem informasi jalan tol;

1. pelaksanaan penyiapan, pelayanan, dan pengawasan pengusahaan jalan tol;

2. pelaksanaan pengawasan dan pemantauan pelaksanaan Perjanjian Pengusahaan Jalan Tol oleh Badan Usaha;
3. pelaksanaan perencanaan, pengelolaan, dan penyiapan bahan penetapan skala prioritas penyaluran dana bergulir serta administrasi, penyaluran, dan pengembalian pinjaman dana bergulir; dan
4. pelaksanaan kegiatan hukum dan hubungan masyarakat, ketatausahaan, kepegawaian, dan keuangan.

Salah satu kegiatan yang menjadi tupoksi adalah pelaksanaan kegiatan hukum dan hubungan masyarakat, ketatausahaan, kepegawaian, dan keuangan.

Penjelasan :

Kegiatan Administrasi Kegiatan mencakup pengadministrasian di setiap kegiatan yang ada di Sekretariat Badan Pengatur Jalan Tol

Output Pekerjaan :

Laporan Administrasi di Sekretariat Badan Pengatur Jalan Tol.

Manfaat :

Menunjang kinerja Sekretariat Badan Pengatur Jalan Tol dalam melakukan pelaksanaan kegiatan kinerja tugas dan fungsi Sekretariat Badan Pengatur Jalan Tol.

Hambatan :

Kondisi pandemi membuat proses administrasi kepegawaian menjadi terhambat.

Alternatif Solusi :

Melakukan koordinasi melalui sistem daring serta melakukan kunjungan lapangan dengan menerapkan protokol Kesehatan.

Dokumentasi :

Rekon UAKPA



Pelaporan SPT Tahunan



9. Penyusunan Laporan Keuangan BMN Triwulan

Pengaturan, Pengusahaan, Pengawasan Jalan Tol		
100 %		
Kegiatan	Target	Realisasi
Penyusunan Laporan Keuangan BMN Triwulan	12 Bulan	12 Bulan

Satuan Kerja Sekretariat Pengatur Jalan Tol adalah salah satu entitas akuntansi di bawah Direktorat Jenderal Bina Marga yang berkewajiban menyelenggarakan akuntansi dan laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. Salah satu pelaksanaannya adalah dengan menyusun laporan keuangan berupa Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas dan Catatan atas Laporan Keuangan.

Penyusunan Laporan Keuangan Satuan Kerja Sekretariat Pengatur Jalan Tol mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan dan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat dalam Pemerintahan. Laporan Keuangan ini telah disusun dan disajikan dengan basis akrual sehingga akan mampu menyajikan informasi keuangan yang transparan, akurat dan akuntabel.

Dengan disusunnya Laporan Keuangan ini diharapkan dapat membantu Sekretariat BPJT dalam melakukan Pendataan Aset dan Administrasi BMN.

Output Pekerjaan :

1. Penyusunan RKBMN
2. Penyusunan Laporan Keuangan dan BMN
3. Penyusunan Laporan Bulanan Barang Milik
4. Penyusunan Laporan Semesteran Kondisi Barang Milik Negara
5. Penyusunan Laporan GLP Bulanan

Manfaat :

Tersusunnya Laporan Keuangan BMN Sekretariat Badan Pengatur Jalan Tol Tahun Anggaran 2022

Hambatan :

1. Keterbatasan waktu dalam penyusunan laporan BMN;
2. Aplikasi Sistem Akuntansi yang masih belum sempurna;

Alternatif Solusi :

Melakukan pendampingan penyusunan laporan BMN satuan kerja yang memiliki permasalahan yang kompleks;

10. Kebutuhan Pencegahan Covid-19

Pengaturan, Pengusahaan, Pengawasan Jalan Tol		
100 %		
Kegiatan	Target	Realisasi
Kebutuhan Pencegahan Covid-19	12 Bulan	12 Bulan

Membantu Sekretariat BPJT dalam meminimalkan penyebaran dan pencegahan Covid-19 di lingkungan BPJT.

Manfaat :

Mendukung Sekretariat Badan Pengatur Jalan Tol dalam melakukan Pencegahan dan Penyebaran Covid-19 serta bantuan penanganan bagi pegawai yang terpapar Covid-19.

Output Pekerjaan :

Dalam upaya pencegahan Covid-19, diharapkan dapat melaksanakan test swab rutin disetiap bulan, pembagian vitamin penambah daya tahan tubuh dan pemberian obat-obatan bagi pegawai di Sekretariat Badan Pengatur Jalan Tol.

Hambatan : -

Dokumentasi :

Kegiatan Antigen Berkala



Pengadaan Penunjang Daya Tahan Tubuh



11. Pemeliharaan Database Pencatatan Aset Konsesi Jasa BPJT

Pengaturan, Pengusahaan, Pengawasan Jalan Tol		
100 %		
Kegiatan	Target	Realisasi
Administrasi Kegiatan	12 Bulan	12 Bulan

Badan Pengatur Jalan Tol (BPJT) adalah badan yang berwenang untuk melaksanakan sebagian wewenang Pemerintah dalam penyelenggaraan jalan tol yang meliputi pengaturan, pengusahaan dan pengawasan Badan Usaha Jalan Tol sehingga dapat memberikan manfaat bagi masyarakat. Keberadaan BPJT diamanatkan oleh Undang-undang No. 38 tahun 2004 tentang Jalan, diatur dalam Peraturan Pemerintah No. 15 tahun 2005 tentang Jalan Tol sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 30 tahun 2017 dan ditetapkan melalui Peraturan Menteri Pekerjaan Umum No.295/PRT/M/2005 tentang Badan Pengatur Jalan Tol. Tugas dan fungsi BPJT adalah sebagai berikut :

- a. merekomendasikan tarif awal dan penyesuaian tarif tol kepada Menteri;
- b. melakukan pengambilalihan hak pengusahaan jalan tol yang telah selesai masa konsesinya dan merekomendasikan pengoperasian selanjutnya kepada Menteri;
- c. melakukan pengambilalihan hak sementara pengusahaan jalan tol yang gagal dalam pelaksanaan konsesi, untuk kemudian dilelangkan kembali pengusaannya;
- d. melakukan persiapan pengusahaan jalan tol yang meliputi analisa kelayakan finansial, studi kelayakan, dan penyiapan amdal;
- e. melakukan pengadaan investasi jalan tol melalui pelelangan secara transparan dan terbuka;
- f. membantu proses pelaksanaan pembebasan tanah dalam hal kepastian tersedianya dana yang berasal dari Badan Usaha dan membuat mekanisme penggunaannya;
- g. memonitor pelaksanaan perencanaan dan pelaksanaan konstruksi serta pengoperasian dan pemeliharaan jalan tol yang dilakukan Badan Usaha; dan
- h. melakukan pengawasan terhadap Badan Usaha atas pelaksanaan seluruh kewajiban perjanjian pengusahaan jalan tol dan melaporkannya secara periodik kepada Menteri. Badan Usaha yang dimaksud diatas adalah adalah badan hukum yang bergerak di bidang pengusahaan jalan tol atau biasa disebut dengan Badan Usaha Jalan Tol (BUJT).

Dalam rangka menindaklanjuti temuan BPK untuk melengkapi dokumen sumber sebagai dasar pencatatan aset jasa konsensi dan menyeragamkan cara penyajian nilai konstruksi dalam aset jasa konsensi sesuai ketentuan akan mengadakan kegiatan Pemeliharaan Database Pencatatan Aset Jasa Konsensi dalam Tahun Anggaran 2022.

Output Pekerjaan :

Output dari Kegiatan ini adalah Database Pencatatan dan Pelaporan Pelaksanaan Inventarisasi Aset konsesi jasa dan Kewajiban konsesi jasa yang lengkap dan komprehensif terkait kuantitas, kondisi, dan nilai Aset konsesi jasa pada 76 ruas jalan tol serta pedoman penyusunannya, yang dilengkapi dengan laporan sebagai Rencana Mutu Kontrak, Laporan pendahuluan, Laporan antara, draft laporan akhir, laporan Akhir dan executive Summary.

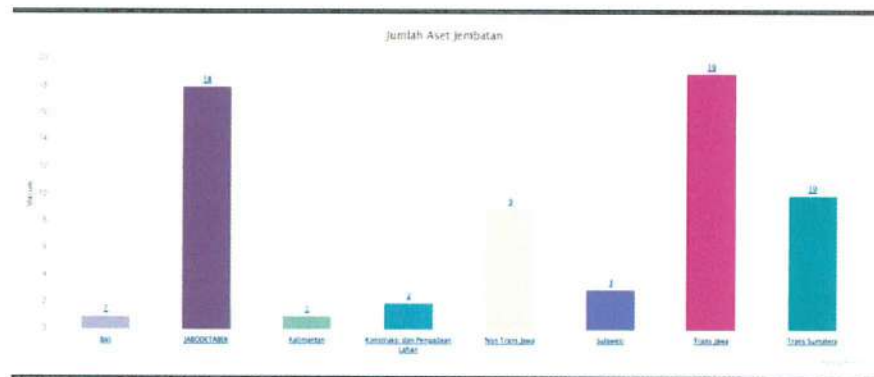
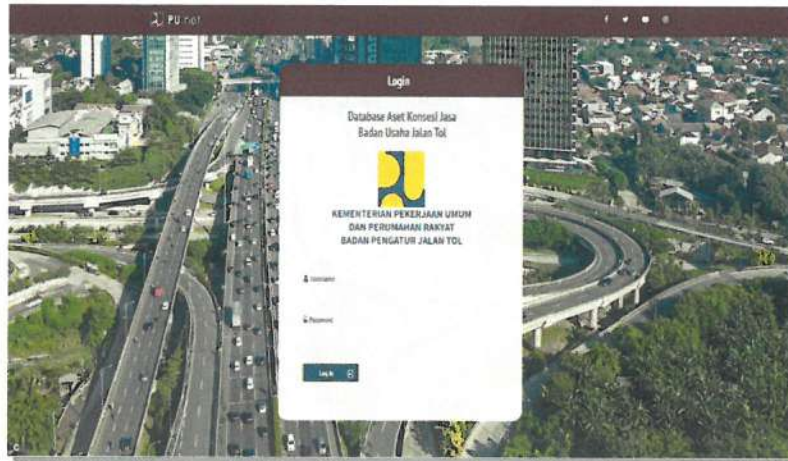
Manfaat :

Tersedianya pemeliharaan Database Pencatatan Inventarisasi Aset konsesi jasa yang lengkap dan komprehensif terkait kuantitas, kondisi, dan nilai Aset konsesi jasa pada seluruh Ruas Jalan Tol sampai tahun 2022.

Hambatan : -

Dokumentasi :

Pelaksanaan Pemeliharaan Database Konsesi Jasa



12. Penerapan Sistem Manajemen Risiko ISO 31000 : 2018

Pengaturan, Pengusahaan, Pengawasan Jalan Tol		
100 %		
Kegiatan	Target	Realisasi
Penerapan Sistem Manajemen Risiko ISO 31000 : 2018	1 Paket	1 Paket

Badan Pengatur Jalan Tol (BPJT) adalah badan yang berwenang untuk melaksanakan sebagian wewenang Pemerintah dalam penyelenggaraan jalan tol yang meliputi pengaturan, pengusahaan dan pengawasan Badan Usaha Jalan Tol sehingga dapat memberikan manfaat bagi masyarakat. Keberadaan BPJT diamanatkan oleh Undang-undang No. 38 tahun 2004 tentang Jalan, diatur dalam Peraturan Pemerintah No. 15 tahun 2005 tentang Jalan Tol sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 tahun 2021 dan ditetapkan melalui Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat No.43/PRT/M/2015 tentang Badan Pengatur Jalan Tol.

Dalam rangka melakukan persiapan pengusahaan jalan tol mengenai analisis kelayakan finansial, maka diperlukan suatu model analisis manajemen resiko yang baku, untuk diterapkan di ruas jalan tol yang akan dibangun. Model analisis manajemen resiko itu harus selalu terupdate karena adanya perkembangan kondisi yang ada, sehingga pembangunan jalan tol bisa berjalan dengan baik dan bermanfaat bagi masyarakat. Terkait hal tersebut di atas, Bidang Umum BPJT perlu melakukan pekerjaan pembuatan Model Analisis Manajemen Resiko Pelaksanaan Pembangunan Jalan Tol.

Terkait hal tersebut di atas, Bagian Umum Sekretariat BPJT perlu melakukan penerapan sistem Manajemen Risiko ISO 31000 : 2018, yang bertujuan untuk Tercapainya Analisis Manajemen Resiko Pelaksanaan Pembangunan Jalan Tol sesuai standar yang berlaku.

Output Pekerjaan :

- a. Laporan Administratif, terdiri dañ : Laporan Pendahuluan Laporan Antara Draft Laporan Akhir Laporan Akhir Executive Summary
- b. Laporan Teknis, terdiri dari : Dokumen tentang Analisis Manajemen Risiko Pelaksanaan Pembangunan Jalan Tol.

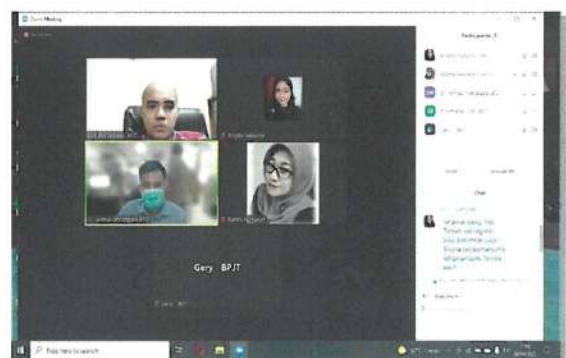
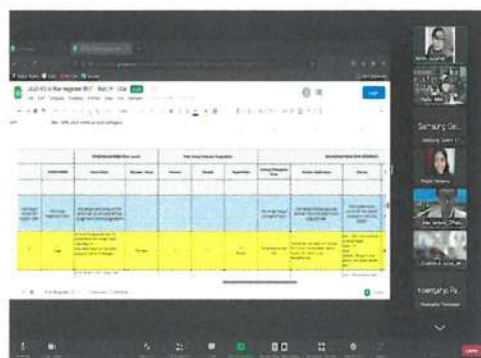
Manfaat :

- a. Tersedianya Model Analisis Manajemen Risiko yang terupdate dalam Pelaksanaan Pembangunan Jalan Tol di Bidang Umum BPJT.
- b. Tercapainya Analisis Manajemen Risiko Pelaksanaan Pembangunan Jalan Tolyang akurat dan selalu update.

Hambatan : -

Dokumentasi :

Rapat Pendampingan Penerapan Manajemen Risiko



13. Monitoring dan Penagihan Piutang Pendanaan Pengusahaan Jalan Tol

Pengaturan, Pengusahaan, Pengawasan Jalan Tol		
100 %		
Kegiatan	Target	Realisasi
Monitoring dan Penagihan Piutang Pengadaan Pengusahaan Jalan Tol	12 Bulan	12 Bulan

Satuan kerja (Satker) Bidang Pendanaan Sekretariat BPJT merupakan Satker di lingkungan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat yang bersumber dana Rupiah Murni dengan tugas dan fungsi pengelolaan piutang pokok, Nilai Tambah dan Denda Nilai Tambah. Piutang pokok merupakan saldo pinjaman dana bergulir dari Badan Usaha Jalan Tol (BUJT) yang belum selesai dibayarkan oleh BUJT sampai dengan tanggal 31 Desember 2019 sehingga proses penagihannya perlu dilanjutkan ke tahun 2022. Oleh karena itu, pengelolaan piutang dan penyusunan laporan keuangan dianggap penting guna memastikan Penerrimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) dapat diterima oleh negara secara tepat waktu dan tepat jumlahnya dan laporan keuangan dapat disajikan sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan.

Output Pekerjaan : Laporan Akhir

Manfaat :

Mendukung Sekretariat Badan Pengatur Jalan Tol dalam melakukan monitoring dan penagihan piutang pendanaan pengusahaan jalan tol.

Hambatan : -

14. Digitalisasi dan Pengarsipan Data Jalan Tol

Pengaturan, Pengusahaan, Pengawasan Jalan Tol		
100 %		
Kegiatan	Target	Realisasi
Digitalisasi dan Pengarsipan Data Jalan Tol	1 Paket	1 Paket

Dalam rangka melaksanakan wewenangnya Badan Pengatur Jalan Tol, diperlukan suatu data Jalan Tol yang terupdate serta mudah diakses, sehingga tugas yang dibebankan bisa terlaksana dengan baik.

Terkait hal tersebut di atas, Bidang Umum BPJT perlu melakukan pekerjaan Digitalisasi Dan Pengarsipan Data Jalan Tol.

Arsip digital dapat berasal dari arsip tercetak yang dikonversi menjadi digital. Arsip adalah rekaman kegiatan atau peristiwa dalam berbagai bentuk dan media

sesuai dengan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi yang dibuat dan diterima oleh lembaga negara dalam hal ini BPJT.

Mengelola arsip Jalan Tol berarti mengelola informasi dan dokumen secara efektif yang membuat pelayanan di bidang Jalan Tol menjadi lebih mudah dan cepat. Penyimpanan arsip Jalan Tol secara teratur, akan memudahkan dalam menemukan dokumen Jalan Tol atau informasi yang dibutuhkan.

Arsip dapat memberikan informasi mengenai tentang apa yang terjadi pada suatu pekerjaan, kapan hal itu terjadi, dan siapa yang terlibat dalam perihal tersebut, apa keputusan yang telah ditetapkan atau direkomendasikan dan oleh siapa hal tersebut diusulkan atau diputuskan, apa saran atau instruksi yang telah diberikan perintah dari suatu pekerjaan atau peristiwa atau keputusan. Pengelolaan administrasi yang baik akan memberikan kontribusi yang baik dalam manajemen internal di BPJT maupun pelayanan kepada masyarakat.

Output Pekerjaan :

- a. Laporan Administratif, terdiri dañ : Laporan Pendahuluan Laporan Antara Draft Laporan Akhir Laporan Akhir Executive Summary
- b. Laporan Teknis, terdiri dari : Dokumen tentang Digitalisasi dan Pengarsipan Data Jalan Tol

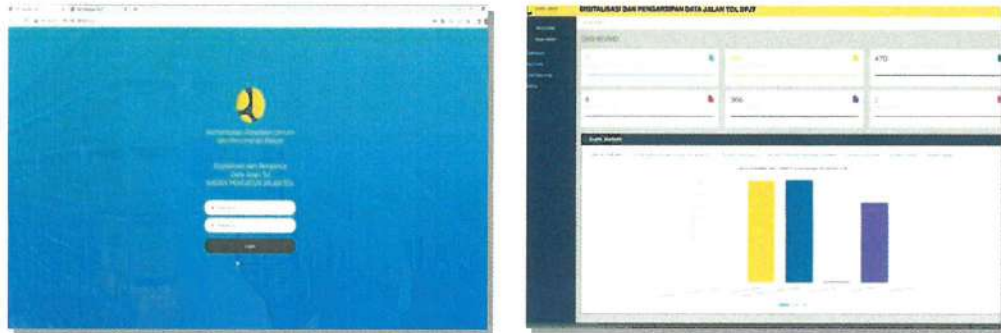
Manfaat :

Mendukung Sekretariat Badan Pengatur Jalan Tol dalam melakukan Digitalisasi Pengarsipan Data Jalan Tol yang terupdate dan mudah diakses untuk manajemen internal BPJT.

Hambatan : -

Dokumentasi :





15. Pelaksanaan Audit Surveillance ISO 9001 : 2015

Pengaturan, Pengusahaan, Pengawasan Jalan Tol		
100 %		
Kegiatan	Target	Realisasi
Pelaksanaan Audit Surveillance ISO 9001 : 2015	1 Kegiatan	1 Kegiatan

Penjelasan :

Surveillance Audit merupakan salah satu cara Badan Sertifikasi melihat dan memverifikasi sistem manajemen mutu sudah dijalankan dengan baik, efektif dan efisien pada sebuah organisasi, baik Perusahaan, ataupun Institusi lainnya. *Surveillance Audit* juga merupakan sarana yang dilakukan untuk dapat memastikan konsistensi dijalanannya sistem manajemen mutu di sebuah organisasi dengan cara memastikan semua pasal yang dipersyaratkan oleh ISO 9001:2015 sudah terpenuhi.

Untuk menjaga kinerja sistem manajemen mutu organisasi, maka kesiapan menghadapi *surveillance audit* perlu dipersiapkan dengan baik, sehingga proses audit yang akan dilaksanakan dapat berlangsung dengan baik dan tidak ada temuan ketidaksesuaian yang menyebabkan kegagalan implementasi sistem manajemen mutu.

Guna memetakan pemenuhan pasal-pasal yang menjadi persyaratan sistem manajemen mutu, maka dipandang perlu dilakukan kegiatan *Gap Analysis* dengan tujuan antara lain :

- Memastikan apakah persyaratan Sistem Manajemen Mutu ISO 9001:2015 masih diimplementasikan secara konsisten oleh organisasi.
- Memverifikasi apakah kecukupan dokumen yang ada masih relevan dengan persyaratan ISO 9001:2015,
- Memastikan semua rekaman dan catatan serta sistem pelaporan sudah dilakukan dan sudah didokumentasikan dengan baik,
- Memberikan saran dan masukan kepada Badan Pengatur Jalan Raya terhadap

potensi temuan audit yang akan dilakukan oleh Badan Sertifikasi.

Output Pekerjaan :

Dapat mempertahankan sertifikasi TUV SUD

Manfaat :

Membantu Sekretariat Badan Pengatur Jalan Tol dalam mengimplementasikan Sistem Manajemen Mutu/ISO 9001 : 2015

Dokumentasi :

Pelaksanaan Audit Surveillance ISO 9001 : 2015



16. Capacity Building

Pengaturan, Pengusahaan, Pengawasan Jalan Tol		
100 %		
Kegiatan	Target	Realisasi
Capacity Building	1 Kegiatan	1 Kegiatan

Penjelasan :

Capacity Building atau pengembangan kapasitas merupakan kegiatan yang dilakukan untuk meningkatkan kemampuan individu, sistem, dan organisasi di Lingkungan Sekretariat BPJT dari aspek ilmu pengetahuan, keterampilan maupun perilaku melalui aktivitas yang menarik. Pengelolaan SDM merupakan hal yang

harus menjadi *concern* karena setiap SDM mempunyai ciri khas yang berbeda-beda. *Attitude* dan *skills* merupakan *goal* dalam pelaksanaan *capacity building*. *Skill* dapat dipelajari sendiri, namun pembentukan *attitude* dari pembentukan lingkungan.

Output Pekerjaan :

1. Pegawai / peserta mampu bekerjasama dengan tim
2. Memiliki motivasi kerja untuk meraih prestasi
3. Memiliki kepercayaan diri dalam bekerja
4. Memiliki attitude yang baik dalam lingkungan kerja.

Manfaat :

Meningkatkan kemampuan pengetahuan dan keterampilan (*skills*), sikap (*attitude*), dan perilaku (*behaviour*) dari sumber daya manusia di Lingkungan Sekretariat Badan Pengatur Jalan Tol.

Dokumentasi :

Kegiatan Capacity Building Sekretariat BPJT



17. Monitoring Perencanaan Teknis, Pelaksanaan Konstruksi dan Pelaksanaan Laik Fungsi Ruas-Ruas Jalan Tol

Pengaturan, Pengusahaan, Pengawasan Jalan Tol

100 %

Kegiatan	Target	Realisasi
Monitoring Perencanaan Teknis, Pelaksanaan Konstruksi dan Pelaksanaan Laik Fungsi Ruas-Ruas Jalan Tol	12 Bulan	12 Bulan

Merujuk kepada Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor : 43/M/PRT/2015 tentang Badan Pengatur Jalan Tol, Sekretariat BPJT mempunyai tugas memberikan pelayanan teknis kepada BPJT dengan menyelenggarakan fungsi :

1. pelaksanaan kajian dan evaluasi penyiapan perusahaan jalan tol dan sistem informasi jalan tol;
2. pelaksanaan penyiapan, pelayanan, dan pengawasan perusahaan jalan tol;
3. pelaksanaan pengawasan dan pemantauan pelaksanaan Perjanjian Perusahaan Jalan Tol oleh Badan Usaha;
4. pelaksanaan perencanaan, pengelolaan, dan penyiapan bahan penetapan skala prioritas penyaluran dana bergulir serta administrasi, penyaluran, dan pengembalian pinjaman dana bergulir; dan
5. pelaksanaan kegiatan hukum dan hubungan masyarakat, ketatausahaan, kepegawaian, dan keuangan.

Salah satu kegiatan yang menjadi tupoksi adalah pelaksanaan penyiapan, pelayanan, dan pengawasan perusahaan jalan tol.

Melakukan monitoring pelaksanaan, perencanaan dan pelaksanaan konstruksi serta pengoperasian dan pemeliharaan jalan tol yang dilakukan oleh BUJT, melakukan pengawasan terhadap penyusunan dokumen Right Of Way (ROW), Basic Design dan Rencana Teknik Akhir (RTA) serta melakukan pengawasan terhadap ruas jalan tol tahap konstruksi berdasarkan spesifikasi jalan tol dan dokumen perencanaan terkait, melaksanakan uji laik fungsi jalan tol.

Tabel 4.1.7 Ruas yang telah di laik fungsi dan beroperasi

No	Nama Ruas Tol	SK Operasi	Panjang (KM)	Keterangan
1	Cileunyi - Sumedang - Dawuan : Seksi 1 (Cileunyi - Pamulihan)	Januari 2022	11,40	Diresmikan
2	Sigli - Banda Aceh : Seksi 2 (Seulimeum - Jantho)	Februari 2022	6,35	Dioperasikan
3	Binjai - Langsa : Seksi 1 (Binjai - Stabat)	Februari 2022	11,80	Diresmikan
4	Manado - Bitung (Seksi Danowudu - Bitung)	Februari 2022	13,43	Diresmikan
5	Cibitung - Cilincing : (Seksi 2 dan 3)	Juli 2022	24,45	Diresmikan
6	Lubuklinggau - Curup - Bengkulu : (Seksi Bengkulu - Taba Penanjung)	Agustus 2022	16,73	Dioperasikan
7	Serpong - Balaraja : Seksi 1 (Serpong - SS CBD)	September 2022	3,97	Diresmikan
8	Pekanbaru - Padang :	September	30,89	Diresmikan

No	Nama Ruas Tol	SK Operasi	Panjang (KM)	Keterangan
	(Seksi Pekanbaru – Bangkinang)	2022		
9	Bekasi Cawang Kampung Melayu : Seksi 1A dan Koneksi Jalan Tol Wiyoto Wiyono Sisi Timur, serta Off Ramp Jatiwaringin	September 2022	2,00	Dioperasikan
10	Cileunyi - Sumedang – Dawuan : Seksi 2,3 (Pamulihan - Cimalaka)	Desember 2022	21,10	Dioperasikan
11	Semarang – Demak Seksi II (Sayung – Demak)	-	16,01	Selesai Konstruksi
12	Bekasi Cawang Kampung Melayu : Seksi 2A dan 2A - Ujung	-	4,88	Selesai Konstruksi
13	Cinere – Jagorawi Seksi 3A (kukusan – krukut)	-	3,5	Selesai Konstruksi
Total			166,51	Selesai Konstruksi

Status : Desember 2022

Output Pekerjaan : Laporan Akhir

Manfaat :

Mendukung Sekretariat Badan Pengatur Jalan Tol dalam melakukan kegiatan Monitoring Perencanaan Teknis, Pelaksanaan Konstruksi dan Pelaksanaan Laik Fungsi Ruas-Ruas Jalan Tol.

Hambatan : -

Dokumentasi :

Kunjungan Lapangan Konstruksi Jalan Tol





18. Project Management Office Perencanaan Teknis dan Pengawasan Konstruksi Jalan Tol

Pengaturan, Pengusahaan, Pengawasan Jalan Tol		
100 %		
Kegiatan	Target	Realisasi
Monitoring Perencanaan Teknis, Pelaksanaan Konstruksi dan Pelaksanaan Laik Fungsi Ruas-Ruas Jalan Tol	1 Paket	1 Paket

Penjelasan :

Berdasarkan Peraturan Menteri PUPR Nomor 43/PRT/M/2015 tentang Badan Pengatur Jalan Tol (BPJT), salah satu tugas BPJT adalah melakukan monitoring pelaksanaan perencanaan dan pelaksanaan konstruksi serta pengoperasian dan pemeliharaan jalan tol yang dilakukan oleh Badan Usaha Jalan Tol

Pada tahapan persiapan konstruksi jalan tol, BPJT antara lain bertugas menyiapkan dokumen perencanaan jalan tol yang meliputi kegiatan Studi Kelayakan (FS), Basic Design, Gambar Ruang Milik Jalan Tol (Rumijatol) dan Rencana Teknik Akhir (RTA).

Sedangkan pada tahap pelaksanaan konstruksi, BPJT memiliki tugas melakukan pengawasan terhadap ruas jalan tol tahap konstruksi berdasarkan dokumen perencanaan terkait sesuai dengan spesifikasi jalan tol serta peraturan perundang-undangan yang berlaku, monitoring kinerja Konsultan Pengendali Mutu Independen (PMI), monitoring pemenuhan jadwal konstruksi dan pembiayaan konstruksi, hingga pelaksanaan uji laik fungsi jalan tol.

Untuk membantu pelaksanaan tugas-tugas tersebut, maka BPJT dipandang perlu untuk melakukan kegiatan Jasa Konsultansi Project Management Office Perencanaan Teknis Dan Pengawasan Konstruksi Jalan Tol sebagai tim yang melakukan pendampingan BPJT dalam melaksanakan tugas-tugas tersebut

Output Pekerjaan :

- Keluaran dari paket kegiatan ini adalah Laporan Bulanan yang mencakup:

- Hasil evaluasi pembahasan dokumen perencanaan teknis
- Hasil evaluasi perubahan lingkup konstruksi
- Hasil monitoring dan evaluasi progres konstruksi jalan tol
- Hasil evaluasi permasalahan konstruksi
- Laporan hasil kunjungan lapangan dalam rangka monitoring maupun uji laik fungsi jalan tol

Manfaat :

Mendukung Badan Pengatur Jalan Tol dalam melakukan kegiatan Project Management Office Perencanaan Teknis dan Pengawasan Konstruksi Jalan Tol, meliputi :

Tim Perencana

1. Melakukan pemeriksaan dokumen teknis (ROW, basic design dan/ atau RTA).
2. Menyampaikan hasil pemeriksaan dokumen teknis dalam bentuk lembar asistensi, laporan, draft surat tanggapan ROW, basic design dan/ atau RTA.
3. Melakukan pemeriksaan evaluasi biaya konstruksi berdasarkan dokumen basic design atau RTA untuk lelang investasi dan untuk usulan perubahan lingkup.
4. Melakukan kunjungan lapangan dalam rangka perencanaan teknis.
5. Melakukan evaluasi laporan Konstruksi BUJT dan Konsultan PMI.
6. Melakukan monitoring dan pengelolaan sistem informasi monitoring konstruksi.
7. Membantu tim uji laik fungsi jalan tol dalam melaksanakan pra uji laik fungsi dan uji laik fungsi jalan tol.

Hambatan : -

Dokumentasi :

Kunjungan Lapangan Konstruksi Jalan Tol





19. Pemeliharaan Sistem Informasi Monitoring Konstruksi Jalan Tol

Pengaturan, Pengusahaan, Pengawasan Jalan Tol		
100 %		
Kegiatan	Target	Realisasi
Pemeliharaan Sistem Informasi Monitoring Konstruksi Jalan Tol	1 Paket	1 Paket

Merujuk kepada Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor : 43/M/PRT/2015 tentang Badan Pengatur Jalan Tol, Sekretariat BPJT mempunyai tugas memberikan pelayanan teknis kepada BPJT dengan menyelenggarakan fungsi :

1. pelaksanaan kajian dan evaluasi penyiapan pengusahaan jalan tol dan sistem informasi jalan tol;
2. pelaksanaan penyiapan, pelayanan, dan pengawasan pengusahaan jalan tol;
3. pelaksanaan pengawasan dan pemantauan pelaksanaan Perjanjian Pengusahaan Jalan Tol oleh Badan Usaha;
4. pelaksanaan perencanaan, pengelolaan, dan penyiapan bahan penetapan skala prioritas penyaluran dana bergulir serta administrasi, penyaluran, dan pengembalian pinjaman dana bergulir; dan
5. pelaksanaan kegiatan hukum dan hubungan masyarakat, ketatausahaan, kepegawaian, dan keuangan.

Salah satu kegiatan yang menjadi tupoksi adalah pelaksanaan penyiapan, pelayanan, dan pengawasan pengusahaan jalan tol.

Penjelasan :

Berdasarkan Peraturan Menteri PUPR Nomor 43/PRT/M/2015 tentang Badan Pengatur Jalan Tol (BPJT), salah satu tugas BPJT adalah melaksanakan pengendalian pada tahap persiapan, pelaksanaan konstruksi, dan operasi jalan tol.

Dalam pelaksanaan tugasnya, BPJT telah mengembangkan system informasi yang memudahkan untuk melakukan monitoring konstruksi jalan tol. Melihat perkembangan kebutuhan dan jumlah data yang dinamis, maka diperlukan pemeliharaan secara berkala terhadap sistem informasi yang terbangun, sehingga

sistem informasi yang telah terbangun dapat terus berkembang untuk mempermudah pelaksanaan tugas dan fungsi BPJT.

Untuk membantu pelaksanaan tugas-tugas tersebut, maka BPJT dipandang perlu untuk melakukan kegiatan Jasa Konsultansi Pemeliharaan Sistem Informasi Monitoring Konstruksi Jalan Tol.

Output Pekerjaan :

Output kegiatan dari Pemeliharaan Sistem Informasi Monitoring Konstruksi Jalan Tol:

1. Sistem informasi terkini sesuai dengan perkembangan teknologi;
2. Hasil evaluasi dan penyusunan rekomendasi pengembangan sistem informasi yang telah terbangun
3. Pelaporan yang harus disampaikan pelaksana pekerjaan kepada pemilik pekerjaan meliputi: Laporan Pendahuluan, Laporan Antara, Laporan Akhir
4. Produk yang harus diselesaikan dalam kegiatan ini: pembaruan dan pemeliharaan sistem informasi yang telah terbangun (berbasis web, spasial dan aplikasi *mobile*) dan validasi data, Buku Monitoring Konstruksi setiap ruas jalan tol, dan Buku Informasi Jalan Tol berbasis peta.

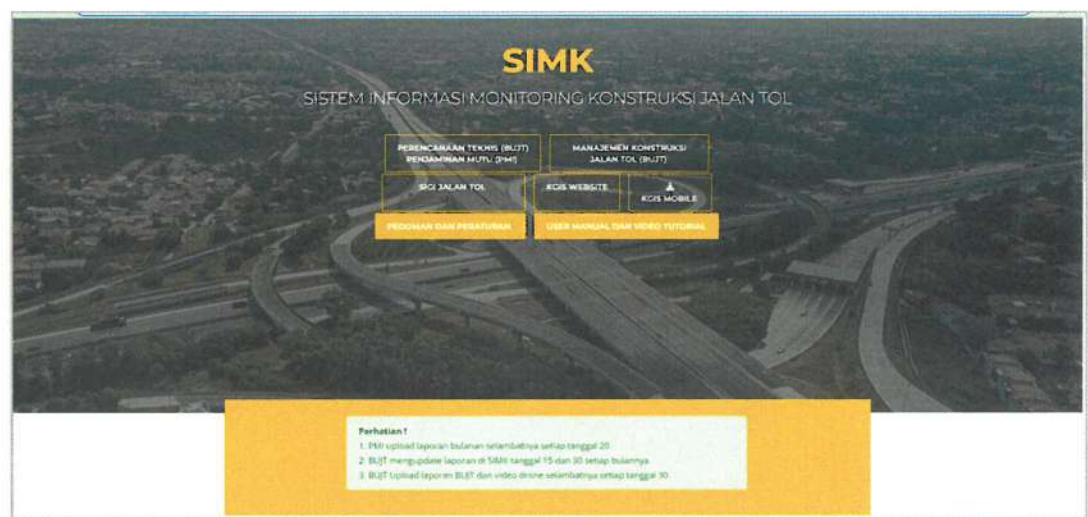
Manfaat :

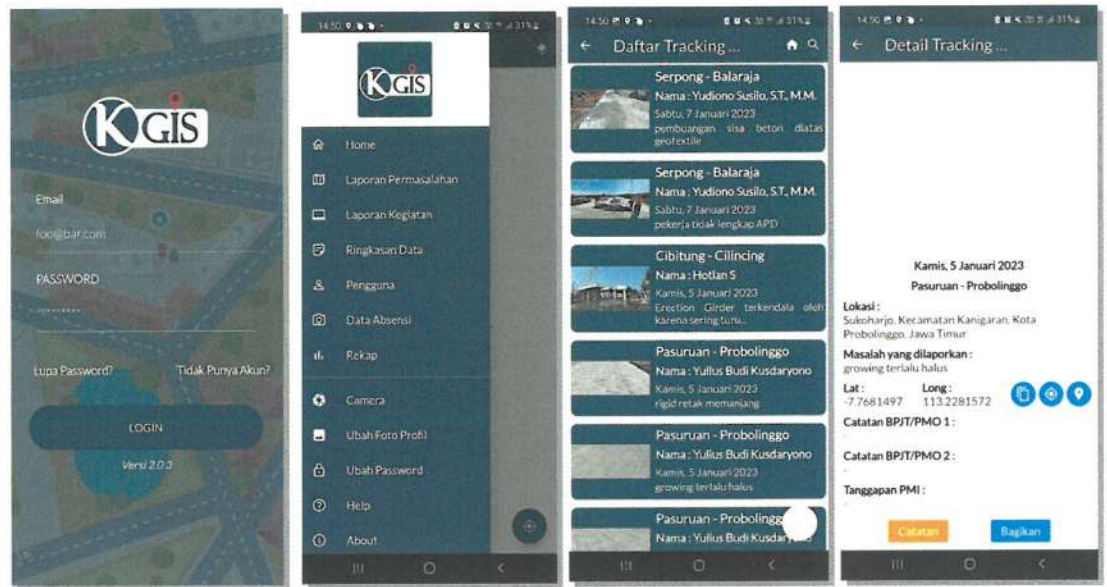
Mendukung Badan Pengatur Jalan Tol dalam program monitoring pekerjaan pada ruas jalan tol konstruksi dan jalan tol operasi.

Hambatan : -

Dokumentasi :

Sistem informasi monitoring konstruksi jalan tol dapat diakses melalui <http://simk.bpjt.pu.go.id/> dan play store K-GIS BPJT.





20. Project Management Office Monitoring Kinerja Operasi dan Pemeliharaan Jalan Tol

Pengaturan, Pengusahaan, Pengawasan Jalan Tol		
100 %		
Kegiatan	Target	Realisasi
Project Management Office Monitoring Kinerja Operasi dan Pemeliharaan Jalan Tol	1 Paket	1 Paket

Merujuk kepada Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor : 43/M/PRT/2015 tentang Badan Pengatur Jalan Tol dan Nomor : 16/M/PRT/2014 tentang Standar Pelayanan Minimal Jalan Tol , Bidang Operasi dan Pemeliharaan menyelenggarakan fungsi:

1. Melakukan rekapitulasi analisis, evaluasi dan rekomendasi terhadap data monitoring pengoperasian dan pemeliharaan jalan tol pada setiap jalan tol operasi, yang meliputi :
 - a. Volume lalu lintas transaksi tol
 - b. Pendapatan tol
 - c. Data umum jalan tol operasi
 - d. Laporan Triwulan BUJT tentang pengoperasian dan pemeliharaan jalan tol
 - e. Fasilitas layanan TIP
2. Melakukan monitoring, evaluasi, rekomendasi dan menyusun laporan implementasi manajemen ODOL di jalan tol;
3. Melakukan monitoring, evaluasi, rekomendasi dan menyusun laporan pemanfaatan ruang milik jalan tol;
4. Melakukan monitoring, evaluasi, rekomendasi dan menyusun laporan kejadian khusus dan penanganannya; dan

5. Melakukan analisis aspek hukum dan legal drafting dalam penyusunan usulan pembaharuan peraturan terkait jalan tol.

Penjelasan :

Berdasarkan Peraturan Menteri PUPR Nomor 43/PRT/M/2015 tentang Badan Pengatur Jalan Tol (BPJT), salah satu tugas BPJT adalah melakukan monitoring pelaksanaan pengoperasian dan pemeliharaan jalan tol, pengelolaan data operasi dan melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan pengoperasian dan pemeliharaan jalan tol yang dilakukan oleh Badan Usaha Jalan Tol pada masa operasi.

Pada Peraturan Menteri PUPR Nomor 20 Tahun 2020 tentang Tugas dan Wewenang Direktorat Jenderal Bina Marga, Direktorat Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan, Badan Pengatur Jalan Tol, dan Badan Usaha Jalan Tol dalam Penyelenggaraan Jalan Tol juga mengatur pengawasan umum jalan tol serta perusahaan pengoperasian dan pemeliharaan jalan tol. Hal ini bertujuan meningkatkan efektivitas penyelenggaraan jalan tol secara umum dan memastikan pelayanan bagi pengguna jalan tol dapat terlaksana dengan baik.

Untuk membantu pelaksanaan tugas-tugas tersebut, maka BPJT dipandang perlu untuk melakukan kegiatan Jasa Konsultansi *Project Management Office* Monitoring Kinerja Operasi dan Pemeliharaan Jalan Tol sebagai tim yang melakukan pendampingan BPJT dalam melaksanakan tugas-tugas tersebut

Output Pekerjaan :

Hasil kegiatan dari *Project Management Office* Monitoring Kinerja Operasi Pemeliharaan Jalan Tol:

1. Tersedianya data monitoring operasional dan pemeliharaan setiap BUJT jalan tol operasi, yang meliputi antara lain:
 - a. Data informasi pelaksanaan pengoperasian dan pemeliharaan jalan tol beserta rekomendasinya.
 - b. Tersedianya evaluasi karakteristik pola pergerakan lalu lintas dan kinerja jalan tol berdasarkan indikator lalu lintas.
 - c. Tersedianya evaluasi data kecelakaan beserta rekomendasinya.
2. Tersedianya data kinerja TI/TIP beserta rekomendasinya.
 - a. Tersedianya data pemenuhan SPM termasuk pola tingkat pemenuhannya.
 - b. Tersedianya rekomendasi operasional pada ruas jalan tol operasi.

Manfaat :

Pendampingan BPJT dalam melaksanakan pengawasan dan pemantauan terhadap perusahaan jalan tol yang telah beroperasi berdasarkan PPJT maupun ketentuan lainnya, meliputi :

1. Membantu BPJT dalam melaksanakan pengawasan terhadap pemenuhan kewajiban BUJT pada pelaksanaan pengoperasian dan pemeliharaan jalan tol selama masa konsesi.
2. Membantu BPJT dalam melakukan evaluasi dan memberikan rekomendasi terhadap pelaksanaan pengoperasian dan pemeliharaan jalan tol oleh BUJT.

3. Membantu BPJT dalam melakukan pengolahan data pengoperasian dan pemeliharaan jalan tol.
4. Membantu BPJT dalam melakukan monitoring dan evaluasi pemanfaatan ruang milik jalan tol
5. Membantu BPJT dalam melakukan monitoring dan evaluasi kejadian khusus pada jalan tol operasi
6. Membantu BPJT dalam melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan rencana kerja implementasi manajemen kendaraan *Over Dimension Over Load* (ODOL) di jalan tol
7. Membantu BPJT dalam melakukan analisis aspek hukum dan penyusunan *legal drafting* atas usulan pembaharuan peraturan terkait pengoperasian jalan tol
8. Membantu BPJT dalam kegiatan rutin berupa penyiapan dokumen atau persuratan dan mengikuti rapat teknis

Hambatan : -

Dokumentasi :

Kunjungan Lapangan



21. Inspeksi Keselamatan Jalan Tol Operasi

Pengaturan, Pengusahaan, Pengawasan Jalan Tol		
100 %		
Kegiatan	Target	Realisasi
Inspeksi Keselamatan Jalan Tol Operasi	1 Paket	1 Paket

Merujuk kepada Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor : 43/M/PRT/2015 tentang Badan Pengatur Jalan Tol dan Nomor : 16/M/PRT/2014 tentang Standar Pelayanan Minimal Jalan Tol, Bidang Operasi dan Pemeliharaan menyelenggarakan fungsi:

1. Pengumpulan data sekunder dalam pelaksanaan Inspeksi Keselamatan Jalan Tol ;
2. Melakukan inspeksi ruas tol prioritas;
3. Melaksanakan koordinasi dalam pelaksanaan kegiatan; dan
4. Menyusun laporan dan melakukan pembahasan laporan, serta kegiatan lainnya yang dianggap perlu dalam pelaksanaan Inspeksi Keselamatan Jalan Tol

Penjelasan :

Badan Pengatur Jalan Tol (BPJT) bertindak selaku Pemerintah berwenang dalam penyelenggaraan jalan tol yang meliputi pengaturan, pengusahaan, dan pengawasan pada Badan Usaha Jalan Tol (BUJT) sesuai yang tertuang dalam Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2005 tentang Jalan Tol.

Pada Peraturan Menteri PUPR Nomor 20 Tahun 2020 tentang Tugas dan Wewenang Direktorat Jenderal Bina Marga, Direktorat Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan, Badan Pengatur Jalan Tol, dan Badan Usaha Jalan Tol dalam Penyelenggaraan Jalan Tol juga mengatur pengawasan umum jalan tol serta pengusahaan pengoperasian dan pemeliharaan jalan tol. Hal ini bertujuan meningkatkan efektivitas penyelenggaraan jalan tol secara umum, memastikan pelayanan bagi pengguna jalan tol dapat terlaksana dengan baik, serta dapat menyediakan infrastruktur jalan yang berkeselamatan.

Berdasarkan Peraturan Menteri PU Nomor 16/PRT/M/2014 tentang Standar Pelayanan Minimal Jalan Tol, penyelenggaraan jalan tol harus memenuhi standar pelayanan yang mencakup beberapa substansi salah satunya substansi keselamatan. Sejalan dengan itu, BPJT memiliki komitmen dalam mewujudkan penyelenggaraan jalan tol yang berkeselamatan.

Output Pekerjaan :

1. Teridentifikasinya karakteristik kecelakaan dan lokasi berbahaya (*blackspot*);
2. Teridentifikasinya kemungkinan adanya defisiensi atau sumber bahaya pada ruas jalan tol yang ditentukan;

3. Mengevaluasi tingkat keselamatan jalan di ruas jalan tol;
4. Menentukan prioritas penanganan keselamatan jalan;
5. Rekomendasi skenario peningkatan keselamatan jalan kepada BPJT.

Manfaat :

Membantu BPJT dalam rangka melaksanakan kegiatan inspeksi keselamatan jalan tol untuk bisa mendapatkan data karakteristik kecelakaan, lokasi berbahaya (*blackspot*), sumber bahaya, dan rekomendasi peningkatan keselamatan jalan.

Hambatan : -

Dokumentasi :



22. Bantuan Teknis dan Monitoring Pelaksanaan Multi Lane Free Flow

Pengaturan, Pengusahaan, Pengawasan Jalan Tol		
100 %		
Kegiatan	Target	Realisasi
Bantuan Teknis dan Monitoring Pelaksanaan Multi Lane Free Flow	1 Paket	1 Paket

Merujuk kepada Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor : 43/M/PRT/2015 tentang Badan Pengatur Jalan Tol dan Nomor : 16/M/PRT/2014 tentang Standar Pelayanan Minimal Jalan Tol, Bidang Operasi dan Pemeliharaan menyelenggarakan fungsi;

1. Melakukan rekapitulasi, analisis, evaluasi dan rekomendasi terhadap data yang diperlukan dalam tahap pengembangan infrastruktur dan pengembangan sistem Multi Lane Free Flow (MLFF);
2. Melakukan monitoring, evaluasi, dan rekomendasi pelaksanaan desain atas infrastruktur dan sistem Multi Lane Free Flow (MLFF) yang dilaksanakan dan dikelola oleh Badan Usaha Pelaksana (BUP);

3. Melakukan monitoring, evaluasi, rekomendasi dan menyusun laporan pelaksanaan konstruksi infrastruktur dan pengembangan sistem Multi Lane Free Flow (MLFF);
4. Melakukan monitoring, evaluasi, rekomendasi dan menyusun laporan pelaksanaan sosialisasi sistem transaksi tol berbasis Multi Lane Free Flow (MLFF); dan
5. Melaksanakan monitoring, evaluasi dan rekomendasi atas implementasi Multi Lane Free Flow (MLFF).

Penjelasan :

Berdasarkan Peraturan Menteri PUPR Nomor 43/PRT/M/2015 tentang Badan Pengatur Jalan Tol (BPJT), salah satu tugas BPJT adalah melakukan monitoring pelaksanaan pengoperasian dan pemeliharaan jalan tol, pengelolaan data operasi dan melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan pengoperasian dan pemeliharaan jalan tol yang dilakukan oleh Badan Usaha Jalan Tol pada masa operasi.

Pada Peraturan Menteri PUPR Nomor 20 Tahun 2020 tentang Tugas dan Wewenang Direktorat Jenderal Bina Marga, Direktorat Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan, Badan Pengatur Jalan Tol, dan Badan Usaha Jalan Tol dalam Penyelenggaraan Jalan Tol juga mengatur pengawasan umum jalan tol serta pengusaha pengoperasian dan pemeliharaan jalan tol. Hal ini bertujuan meningkatkan efektivitas penyelenggaraan jalan tol secara umum dan memastikan pelayanan bagi pengguna jalan tol dapat terlaksana dengan baik.

Sehubungan dengan telah ditandatanganinya Perjanjian Kerjasama (PKS) tentang Proyek Kerjasama Pemerintah Dengan Badan Usaha Sistem Transaksi Tol Nontunai Nirsentuh Berbasis Multi-Lane Free Flow (MLFF) pada tanggal 15 Maret 2021, dimana implementasi MLFF dilaksanakan bertahap pada tahun 2022 dan 2023, maka BPJT bertugas untuk mengawasi Badan Usaha Pelaksana (BUP) dalam melaksanakan kewajiban sesuai dengan yang telah disepakati dalam PKS dimaksud dan membantu BPJT dalam melaksanakan kewajiban sesuai yang tercantum dalam PKS.

Untuk membantu pelaksanaan tugas-tugas tersebut, maka BPJT dipandang perlu untuk melakukan kegiatan Jasa Konsultansi Bantuan Teknis dan Monitoring Pelaksanaan Multi-Lane Free Flow dimana tim konsultan akan melakukan pendampingan BPJT dalam melaksanakan tugas-tugas tersebut.

Output Pekerjaan : Laporan Akhir**Manfaat :**

Pendampingan BPJT dalam melaksanakan pengawasan dan pemantauan terhadap hak dan kewajiban para pihak yang terikat dalam Perjanjian Kerjasama MLFF, meliputi:

1. Membantu BPJT dalam melaksanakan pengawasan terhadap pemenuhan kewajiban BUJT dalam tahap persiapan implementasi MLFF

2. Membantu BPJT dalam melaksanakan pengawasan terhadap pemenuhan kewajiban BUP
3. Membantu BPJT dalam melakukan evaluasi dan memberikan rekomendasi terhadap pekerjaan persiapan implementasi MLFF yang dilakukan oleh BUP, termasuk diantaranya penyusunan desain infrastruktur dan sistem MLFF serta sosialisasi.
4. Membantu BPJT dalam melakukan pengolahan data yang diperlukan dalam tahap persiapan
5. Membantu BPJT dalam pemenuhan kewajiban kepada BUP sesuai dalam PKS.

Hambatan : -

Dokumentasi :



23. Pemeliharaan Sistem Informasi Monitoring Operasi dan Pemeliharaan Jalan Tol

Pengaturan, Pengusahaan, Pengawasan Jalan Tol		
100 %		
Kegiatan	Target	Realisasi
Project Management Office Monitoring Kinerja Operasi dan Pemeliharaan Jalan Tol	1 Paket	1 Paket

Merujuk kepada Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor : 43/M/PRT/2015 tentang Badan Pengatur Jalan Tol dan Nomor : 16/M/PRT/2014 tentang Standar Pelayanan Minimal Jalan Tol , Bidang Operasi dan Pemeliharaan menyelenggarakan fungsi:

1. Melakukan pemutakhiran terhadap sistem informasi berbasis website maupun aplikasi yang telah terbangun, sehingga sistem informasi berbasis website maupun aplikasi yang ada tetap terpelihara;
2. Melakukan pembaharuan data informasi progres pemenuhan Standar Pelayanan Minimal dan pemeliharaan Jalan Tol;
3. Membuat SOP terkait pembaharuan data pemenuhan Standar Pelayanan Minimal Jalan Tol dan metode penilaian Pemenuhan SPM Jalan Tol pada sistem informasi berbasis website maupun aplikasi;

4. Melakukan pemeriksaan lapangan, evaluasi, dan analisis terhadap Pemenuhan SPM Jalan Tol;
5. Melakukan diskusi/sosialisasi knowledge sharing; dan
6. Membuat dokumentasi foto pelaksanaan pemeliharaan dan pemenuhan SPM Jalan Tol pada ruas-ruas operasi yang sedang berjalan untuk knowledge sharing.

Penjelasan :

Berdasarkan Peraturan Menteri PUPR Nomor 43/PRT/M/2015 tentang Badan Pengatur Jalan Tol (BPJT), salah satu tugas BPJT adalah melaksanakan pengendalian pada tahap persiapan, pelaksanaan konstruksi, dan operasi jalan tol.

Pada tahapan persiapan konstruksi jalan tol, BPJT antara lain bertugas menyiapkan dokumen perencanaan jalan tol yang meliputi kegiatan Studi Kelayakan (FS), Basic Design, Gambar Ruang Milik Jalan Tol (Rumija tol) dan Rencana Teknik Akhir atau Detailed Engineering Design (DED).

Sedangkan pada tahap pelaksanaan konstruksi, BPJT memiliki tugas melakukan pengawasan terhadap ruas jalan tol tahap konstruksi berdasarkan spesifikasi jalan tol serta peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dokumen perencanaan terkait, monitoring kinerja Konsultan Pengendali Mutu Independen (PMI), progres pembebasan lahan, progres pelaksanaan konstruksi, pemenuhan jadwal konstruksi dan pembiayaan konstruksi yang efisien, hingga uji laik fungsi jalan tol.

Pada tahap pengoperasian, kewajiban BUJT adalah melakukan pengoperasian dan pemeliharaan jalan tol dalam rangka melayani pengguna jalan tol. Pelaksanaan pelayanan pengoperasian jalan tol harus memenuhi Standar Pelayanan Minimal Jalan Tol seperti yang tertuang di dalam Peraturan Menteri Nomor 16/PRT/M/2014, namun hal-hal lain yang diluar dari Standar Pelayanan Minimal jalan tol yang dirasakan oleh pengguna jalan tol pun harus menjadi perhatian bagi para BUJT untuk terus memberikan pelayanan agar keselamatan, kenyamanan dan keamanan bagi pengguna jalan tol dapat terlaksana dengan baik.

Untuk membantu pelaksanaan tugas-tugas tersebut, maka BPJT dipandang perlu untuk melakukan kegiatan Jasa Konsultansi Penyusunan Sistem Informasi Monitoring Konstruksi dan Pengoperasian Jalan Tol.

Output Pekerjaan : laporan Akhir**Manfaat :**

Mendukung Badan Pengatur Jalan Tol dalam mendukung program Badan Pengatur Jalan Tol dalam melakukan monitoring pemenuhan standar pelayanan minimal pada ruas jalan tol operasi, meliputi :

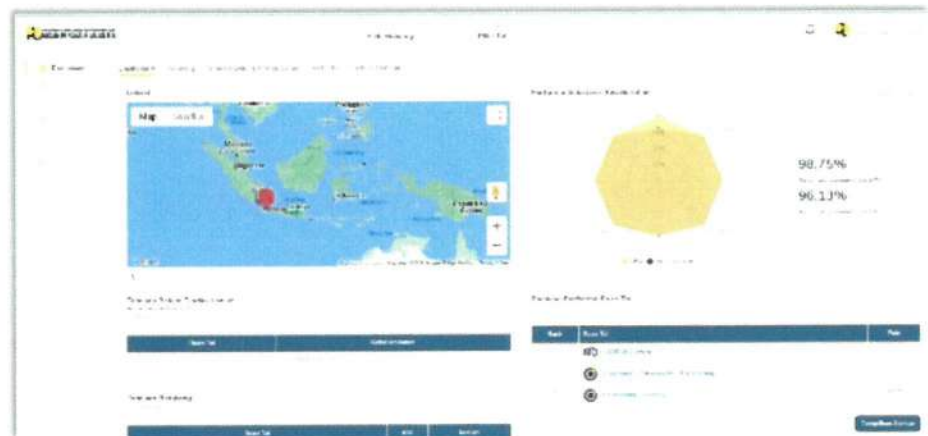
1. Mempermudah pembaharuan data pemenuhan Standar Pelayanan Minimal Jalan Tol, pemeliharaan jalan tol, permasalahan dan dokumentasi lapangan pada ruas jalan tol operasi
2. Membantu BPJT dalam melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan pemeliharaan jalan tol oleh BUJT
3. Membantu BPJT dalam melakukan monitoring pemenuhan SPM oleh BUJT
4. Analisa data *self assessment*, pemeriksaan pemenuhan SPM, dan tingkat kepuasan pengguna jalan tol guna memenuhi ketentuan SPM Jalan Tol

Hambatan : -

Dokumentasi :

Sistem Informasi SPM

Sistem informasi SPM dapat diakses melalui espmbjt.pu.go.id



The screenshot shows a detailed data table within the SPM Information System. The table has columns for 'Perencanaan', 'Tanggal', 'User', 'Ruas Tol', 'KTM', 'Jenis', 'Lokasi', 'Indikator', and 'Cuaca'. The rows are color-coded: red for 'Self Assessment Tol', blue for 'Self Assessment Tol', and green for 'Self Assessment Tol'. The table contains multiple rows of data, including dates, user names, and various indicators.

24. Pengawasan dan Pemantauan Operasional dan Pemeliharaan Jalan Tol Operasi

Merujuk kepada Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor : 43/M/PRT/2015 tentang Badan Pengatur Jalan Tol, Bidang Operasi dan Pemeliharaan menyelenggarakan fungsi;

pengawasan pemenuhan kewajiban badan usaha terkait pengoperasian dan pemeliharaan sesuai perjanjian pengusahaan jalan tol;

1. Pelaksanaan evaluasi rencana dan pengawasan pelaksanaan pengoperasian dan pemeliharaan jalan tol yang disusun oleh badan usaha;
2. Pengawasan terhadap badan usaha atas pemenuhan Standar Pelayanan Minimal Jalan Tol;
3. Pelaksanaan evaluasi pelayanan jalan tol, kepuasan pengguna jalan tol, dan keselamatan jalan tol; dan
4. Pengelolaan data volume lalu lintas dan kecelakaan serta penyusunan rekomendasi kebijakan.

Penjelasan :

Pekerjaan Monitoring Jalan Tol Operasi dan Pemeliharaan Jalan Tol Operasi. Kinerja produk pada output ini diharapkan mampu mendukung fungsi pengawasan dan pemantauan jalan tol operasi, yaitu salah satunya melalui pekerjaan evaluasi pemenuhan Standar Pelayanan Minimum (SPM) jalan tol. Jalan tol yang memenuhi SPM diharapkan bisa memberikan layanan yang optimal dan bisa memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi pengguna jalan. Saat ini total jumlah ruas jalan tol yang sudah beroperasi adalah 69 ruas jalan tol dengan total panjang mencapai 2.599,12 km.

No.	Ruas Jalan Tol	Panjang (Km)
1	Jabodetabek	329,13
2	Trans Jawa	1056,38
3	Non Trans Jawa	311,76
4	Total Trans Sumatera	738,46
5	Sulawesi	61,46
6	Bali	10,07
7	Kalimantan	97,27
TOTAL (DENGAN SURAMADU)		2462
TOTAL (TANPA SURAMADU)		2457

Status : Desember 2022

Output Pekerjaan :

Laporan Akhir

Manfaat :

Mendukung Badan Pengatur Jalan Tol dalam melakukan kegiatan monitoring jalan tol operasi dan pemeliharaan.

Hambatan :

SDM yang kurang serta beban kerja yang besar menjadi penghambat dalam penyerapan anggaran sehingga belum optimal dalam pelaksanaan.

Alternatif Solusi :

Memaksimalkan SDM yang ada dan mengajukan penambahan SDM untuk menunjang kegiatan-kegiatan di bidang operasi dan pemeliharaan.

Dokumentasi :

Kunjungan Lapangan Monitoring Pengusahaan Jalan Tol

**25. Bantuan Dukungan Persiapan dan Pengawasan Pengusahaan Jalan Tol**

Pengaturan, Pengusahaan, Pengawasan Jalan Tol		
100 %		
Kegiatan	Target	Realisasi
Bantuan Dukungan Persiapan dan Pengawasan Pengusahaan Jalan Tol	1 Paket	1 Paket

Merujuk kepada Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor : 43/M/PRT/2015 tentang Badan Pengatur Jalan Tol, Sekretariat BPJT mempunyai tugas memberikan pelayanan teknis kepada BPJT dengan menyelenggarakan fungsi :

1. pelaksanaan kajian dan evaluasi penyiapan pengusahaan jalan tol dan sistem informasi jalan tol;
2. pelaksanaan penyiapan, pelayanan, dan pengawasan pengusahaan jalan tol;

3. pelaksanaan pengawasan dan pemantauan pelaksanaan Perjanjian Pengusahaan Jalan Tol oleh Badan Usaha;
4. pelaksanaan perencanaan, pengelolaan, dan penyiapan bahan penetapan skala prioritas penyaluran dana bergulir serta administrasi, penyaluran, dan pengembalian pinjaman dana bergulir; dan
5. pelaksanaan kegiatan hukum dan hubungan masyarakat, ketatausahaan, kepegawaian, dan keuangan.

Salah satu kegiatan yang menjadi tupoksi adalah pelaksanaan pengawasan dan pemantauan pelaksanaan Perjanjian Pengusahaan Jalan Tol oleh Badan Usaha.

Penjelasan :

Salah satu program Pemerintah guna mendukung pertumbuhan ekonomi nasional adalah percepatan pembangunan infrastruktur, salah satunya melalui kebijakan pembangunan jalan tol. Untuk melaksanakan hal ini, sesuai Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan dan Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2005 tentang Jalan Tol, dibentuk Badan Pengatur Jalan Tol (BPJT) yang ditetapkan dengan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 295/PRT/M/2005 yang selanjutnya diganti dengan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum nomor 43/PRT/M/2015. BPJT bertugas melaksanakan sebagian kewenangan Pemerintah dalam penyelenggaraan jalan tol yang meliputi pengaturan, pengusahaan dan pengawasan badan usaha jalan tol.

Untuk membantu kelancaran pelaksanaan fungsi dan tugas BPJT dibentuk Sekretariat BPJT yang berada di lingkungan Menteri. Sekretariat BPJT adalah unsur staf yang membantu BPJT dalam menyelenggarakan dukungan teknis dan administratif kesekretariatan penyelenggaraan pengaturan jalan tol. Salah satu bagian dari Sekretariat BPJT adalah Bidang Investasi yang bertugas melaksanakan penyiapan, pelayanan, dan pengawasan pengusahaan jalan tol. Dalam melaksanakan tugas tersebut, Bidang Investasi menyelenggarakan fungsi :

- a. penyusunan kajian studi kelayakan finansial dan lingkungan jalan tol dan penentuan model bisnis pengusahaan jalan tol;
- b. penyusunan perjanjian pengusahaan jalan tol dan pelelangan pengusahaan jalan tol;
- c. pengawasan pemenuhan kewajiban badan usaha terkait aspek investasi sesuai perjanjian pengusahaan jalan tol;
- d. pengawasan pelaksanaan investasi jalan tol, penyiapan evaluasi dan penyesuaian tarif tol awal;
- e. pelaksanaan evaluasi investasi terhadap perubahan ruang lingkup pengusahaan jalan tol; dan
- f. penyiapan pengambilalihan hak pengusahaan jalan tol yang telah selesai masa konsesinya atau gagal dalam pelaksanaan konsesinya.

Terkait dengan hal tersebut di atas, mengingat keterbatasan sumber daya manusia di Bidang Investasi serta beban tugas BPJT yang semakin besar di sisi lain, pada Tahun Anggaran 2021 BPJT memerlukan Bantuan Dukungan Penyiapan dan Pengawasan Pengusahaan Jalan Tol. Melalui keberadaan

konsultan tersebut diharapkan penyiapan dan pengawasan perusahaan jalan tol dapat berjalan dengan efektif dan efisien.

Output Pekerjaan :

Hasil kegiatan dari Bantuan Dukungan Penyiapan dan Pengawasan Perusahaan Jalan Tol :

- a. Terlaksananya dokumen manajemen yang mencakup monitoring dan permasalahan jalan tol, pelayanan dan pengawasan perusahaan jalan tol secara efektif dan efisien.
- b. Terlaksananya penyiapan, pelayanan dan pengawasan perusahaan jalan tol secara efektif dan efisien.

Manfaat :

Mendukung Badan Pengatur Jalan Tol dalam mendukung penyiapan dan pengawasan perusahaan jalan tol, meliputi :

- a. Mendukung kinerja BPJT dalam proses pelelangan perusahaan jalan tol.
- b. Melakukan pendampingan monitoring dan evaluasi perusahaan jalan tol pada ruas-ruas yang telah memiliki Perjanjian Perusahaan Jalan Tol (PPJT), termasuk melakukan analisis laporan keuangan yang meliputi diantaranya analisis pendapatan tol, biaya O&M, pengembalian pinjaman.
- c. Memberikan dukungan dalam pelaksanaan analisis finansial atau review Business Plan karena adanya rencana/ usulan perubahan PPJT.
- d. Mempersiapkan pelaksanaan penyusunan analisa/ kajian finansial karena adanya usulan dan/atau perubahan susunan pemegang saham.
- e. Membantu evaluasi terhadap usulan ruas jalan tol, baik dari aspek legal, dan teknis.
- f. Memberikan dukungan dalam pelaksanaan analisis lalu lintas yang diperlukan dalam review Business Plan jalan tol solicited maupun unsolicited baik yang telah memiliki PPJT maupun sedang dalam tahap persiapan.
- g. Melakukan penataan dokumen fisik perusahaan jalan tol yang terdapat di Bidang Investasi dan menjadikan dokumen elektronik dengan melakukan scanning terhadap seluruh dokumen hardcopy sehingga dapat diarsipkan secara elektronik. Hal ini membantu permasalahan keterbatasan ruang arsip di Bidang Investasi Sekretariat BPJT.

Hambatan : -

Dokumentasi :



26. Persiapan dan Pengawasan Investasi Jalan Tol

Pengaturan, Pengusahaan, Pengawasan Jalan Tol		
100 %		
Kegiatan	Target	Realisasi
Persiapan dan Pengawasan Investasi Jalan Tol	12 Bulan	12 Bulan

Merujuk kepada Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor : 43/M/PRT/2015 tentang Badan Pengatur Jalan Tol, Sekretariat BPJT mempunyai tugas memberikan pelayanan teknis kepada BPJT dengan menyelenggarakan fungsi :

- 1) Pelaksanaan kajian dan evaluasi penyiapan pengusahaan jalan tol dan sistem informasi jalan tol;
- 2) Pelaksanaan penyiapan, pelayanan, dan pengawasan pengusahaan jalan tol;
- 3) Pelaksanaan pengawasan dan pemantauan pelaksanaan Perjanjian Pengusahaan Jalan Tol oleh Badan Usaha;
- 4) Pelaksanaan perencanaan, pengelolaan, dan penyiapan bahan penetapan skala prioritas penyaluran dana bergulir serta administrasi, penyaluran, dan pengembalian pinjaman dana bergulir; dan
- 5) Pelaksanaan kegiatan hukum dan hubungan masyarakat, ketatausahaan, kepegawaian, dan keuangan.

Salah satu kegiatan yang menjadi tupoksi adalah pelaksanaan kajian dan evaluasi penyiapan pengusahaan jalan tol dan sistem informasi jalan tol.

Penjelasan :

Persiapan dan Pengawasan Investasi Jalan Tol adalah kegiatan Swakelola yang ada di bidang investasi mencakup lelang jalan tol, perjalanan dinas, dan evaluasi terhadap rencana usaha yang diajukan oleh Badan Usaha Jalan Tol.

Pada tahun 2022, kegiatan evaluasi perubahan rencana usaha yang merupakan bagian dari *business as usual* tugas dan fungsi bidang Investasi BPJT dilakukan pada beberapa ruas jalan tol. Evaluasi perubahan rencana

usaha adalah proses telaahan *business plan* dengan meneliti dokumen-dokumen pendukung yang diajukan oleh BUJT sebagai bukti yang bisa diakui untuk atas adanya perubahan lingkup. Selain evaluasi perubahan rencana, Bidang Investasi juga mendampingi BPKP dalam melaksanakan verifikasi atas penetapan perubahan rencana usaha.



Status Pelelangan Pengusahaan Jalan tol 2022

Berikut adalah ruas-ruas yang dilelang pada tahun 2022 beserta statusnya progresnya:

Tabel 4.1.8 Ruas yang dilelang pada tahun 2022

No	Ruas Jalan Tol	Panjang (Km)	Status
1	Gilimanuk-Mengwi	96,21	Surat Penetapan Pemenang Pelelangan tanggal 7 Maret 2022
2	Akses Patimban	37,05	Surat Penetapan Pemenang Pelelangan tanggal 8 Desember 2022
3	JORR <i>Elevated</i> Cikunir-Ulujami	21,50	Batas akhir Negosiasi pada tanggal 30 November 2022
4	Kamal-Teluknaga-Rajeg	39,20	Proses Negosiasi
5	Kediri-Tulungagung	44,17	Konfirmasi Pemutakhiran Dokumen Pelelangan
6	Sentul Selatan-Karawang Barat	61,50	Konfirmasi Pemutakhiran Dokumen Pelelangan
7	Bogor-Serpong via Parung	31,12	Konfirmasi Pemutakhiran Dokumen Pelelangan
8	Balikipapan-Penajam Paser Utara	7,35	Perpanjangan waktu evaluasi kelayakan proyek oleh pemrakarsa

Kinerja Pengembangan Jalan Tol

Kinerja pengembangan jalan tol pada tahun 2022 adalah sebagaimana tabel berikut:

Tabel 4.1.9 Tabel Capaian Aset Konsesi Pengusahaan Jalan Tol

	Capaian 2019	Capaian Desember 2020	Capaian Desember 2021	Capaian Desember 2022
Jumlah PPJT	77	79	80	81
Jumlah BUJT	53	55	56	57
Aset Konsesi	Rp 217,2 T	Rp 437 T	Rp 537 T	

* Berdasarkan nilai konstruksi 80 Ruas PPJT + Gilimanuk-Mengwi

Tabel 4.1.10 Tabel Nilai Investasi Pengusahaan Jalan Tol

Sub Kategori	Unit	Baseline Des 2021	Capaian s/d Des 2022	Sasaran Akhir 2024
Nilai Investasi (Triliun)	Rupiah (Triliun)	736,37	794,85	1106,43
Foreign Direct Investment*)	Rupiah (Triliun)	9,90 T 1,34%	9,90 T 1,30%	50 T 4,7%
Pembiayaan Internasional	Rupiah (Triliun)	3,89 T 0,53%	4,29 T 0,56%	6 T 5%
Pembiayaan Non Bank BUMN**)	Rupiah (Triliun)	97,65 T 13,26%	123,0 T 15,47%	133 T 12,03%

*) terhadap total ekuitas dan pinjaman

***) terhadap total pinjaman

Tabel 4.1.11 Tabel Penyesuaian Tarif Tol Tahun 2022

No	RUAS	BUJT	JADWAL KENAIKAN TARIF	SURAT KEPUTUSAN BARU
1	Cawang-Tomang-Grogol-Pluit	PT Jasa Marga (Persero) Tbk	31 Desember 2021	31 Januari 2022
	Cawang-Tanjung Priok-Pluit	PT Citra Marga Nusaphala Persada Tbk	14 Januari 2021	9 Juni 2021

No	RUAS	BUJT	JADWAL KENAIKAN TARIF	SURAT KEPUTUSAN BARU
2	Nusa Dua-Ngurah Rai-Benoa	PT Jasamarga Bali Tol	31 Desember 2021	31 Januari 2022
3	Gempol-Pandaan Tahap I	PT Jasamarga Pandaan Tol	31 Desember 2021	23 Februari 2022
	Gempol-Pandaan Tahap II	PT Jasamarga Gempol Pasuruan	1 Agustus 2021	23 Juni 2021
4	Surabaya - Mojokerto	PT Jasamarga Surabaya Mojokerto	27 Desember 2021	4 Maret 2022
5	Cikampek-Palimanan	PT Lintas Marga Sedaya	27 Desember 2021	16 Maret 2022
6	Pondok Aren - Serpong	PT Bintaro Serpong Damai	31 Desember 2021	13 Juni 2022
7	Pasirkoja-Soreang	PT Citra Marga Lintas Jabar	4 Februari 2022	13 Juni 2022
8	Pandaan - Malang	PT Jasa Marga Pandaan Malang	6 April 2022	12 Desember 2022
9	Merak-Tangerang	PT Marga Mandala Sakti	4 Februari 2022	12 Desember 2022

Tabel 4.1.12 Tabel Penyesuaian Tarif Tol Yang Belum Terealisasi

No	RUAS	BUJT	JADWAL KENAIKAN TARIF	SURAT KEPUTUSAN BARU
1	Bekasi-Cawang-Kampung Melayu	PT Kresna Kusuma Dyandra Marga	2 November 2017	(proses perubahan rencan usaha)
2	Medan-Binjai	PT Utama Karya (Persero) Tbk	6 Mei 2021	(menunggu perubahan rencana usaha)
3	Kunciran-Serpong	PT Trans Marga Nusantara	6 Desember 2021	(Penundaan akibat reviu BPKP menjadi Desember 2022, Proses BA di BUJT)

No	RUAS	BUJT	JADWAL KENAIKAN TARIF	SURAT KEPUTUSAN BARU
4	Jakarta-Bogor-Ciawi	PT Jasa Marga (Persero) Tbk	11 Desember 2021	(sirkuler penyesuaian tarif)
5	Terbanggi Besar-Pematang Panggang	PT Utama Karya (Persero) Tbk	20 Desember 2021	(menunggu perubahan rencana usaha)
6	Cinere-Jagorawi Seksi I dan II	PT Translingkar Kita Jaya	31 Desember 2021	(BUJT mengusulkan perubahan rencana usaha)
7	Surabaya-Gempol	PT Jasa Marga (Persero) Tbk	26 Juni 2022	(penundaan akibat reviu BPKP menjadi April 2023)
8	Padalarang - Cileunyi	PT Jasa Marga (Persero) Tbk	26 Juni 2022	(menunggu pemenuhan SPM)
9	Cikampek - Purwakarta - Padalarang	PT Jasa Marga (Persero) Tbk	01 Juli 2022	(menunggu pemenuhan SPM)
10	Semarang Seksi A,B,C	PT Jasa Marga (Persero) Tbk	23 Juli 2022	(proses sirkuler SK Menteri)
11	Belawan-Medan-Tanjung Morawa	PT Jasa Marga (Persero) Tbk	29 Juli 2022	(menunggu pemenuhan SPM)
12	Palimanan-Kanci	PT Jasa Marga (Persero) Tbk	31 Agustus 2022	(menunggu pemenuhan SPM)
13	SS Waru - Bandara Juanda	PT Citra Margatama Surabaya	14 Oktober 2022	(proses sirkuler SK Menteri)
14	Manado - Bitung Segmen Manado - Simpang Susun Danowudu	PT Jasamarga Manado Bitung	14 Oktober 2022	(menunggu pemenuhan SPM)
15	Cimanggis - Cibitung Seksi 1 (Jc. Cimanggis - Ramp On/Off Jatikarya)	PT Jasa Marga (Persero) Tbk	26 Oktober 2022	(menunggu pemenuhan SPM)
16	Pondok Aren - Ulujami	PT Jasa Marga	21 Oktober	(menunggu

No	RUAS	BUJT	JADWAL KENAIKAN TARIF	SURAT KEPUTUSAN BARU
		(Persero) Tbk	2022	pemenuhan SPM)
	Pondok Pinang - Taman Mini (seksi S)	PT Jasa Marga (Persero) Tbk		
	Taman Mini IC - Hankam raya (seksi E1 Selatan)	PT Jasa Marga (Persero) Tbk		
	Hankam Raya- Cikunir (seksi E1 utara)	PT Jasa Marga (Persero) Tbk		
	Cikunir - Cakung (seksi E2)	PT Jasa Marga (Persero) Tbk		
	Cakung - Cilincing (seksi E3)	PT Jasa Marga (Persero) Tbk		
	Kebon Jeruk - Penjaringan (seksi W1)	PT Jasa Marga (Persero) Tbk		
	Ulujami - Kebon Jeruk (seksi W2 utara)	PT Jasa Marga (Persero) Tbk		
	Pondok Pinang - Ulujami (seksi W2 Selatan)	PT Jasa Marga (Persero) Tbk		
	Akses Tanjung Priok	PT Utama Karya (Persero) Tbk		
17	Pekanbaru - Dumai	PT Utama Karya (Persero)	22 Oktober 2022	(menunggu penetapan rencana usaha)
18	Integrasi Jakarta Cikampek Dan Jakarta Cikampek II Elevated	PT Jasa Marga (Persero) Tbk	22 Oktober 2022	(BUJT mengusulkan perubahan rencana usaha)
	Jakarta-Cikampek	PT Jasamarga Transjawa Tol		(menunggu pemenuhan SPM)
19	Depok - Antasari Seksi I (Antasari - Brigif)	PT Citra Wassphutowa	17 November 2022	(menunggu perubahan sistem)

No	RUAS	BUJT	JADWAL KENAIKAN TARIF	SURAT KEPUTUSAN BARU
	Depok - Antasari Seksi II (Brigif - Sawangan)			pengumpulan tol)
20	Krian - Legundi - Bunder - Manyar Seksi 1-3	PT Waskita Bumi Wira	19 November 2022	(menunggu hasil reviu BPKP)
21	Pejagan - Pemalang	PT Pejagan Pemalang Toll Road	28 Desember 2022	(menunggu pemenuhan SPM)
22	Kanci-Pejagan	PT Semesta Marga Raya	28 Desember 2022	(menunggu pemenuhan SPM)

Output Pekerjaan : Laporan Akhir

Manfaat :

Mendukung Sekretariat Badan Pengatur Jalan Tol dalam melakukan kegiatan persiapan dan pengawasan investasi jalan tol.

Hambatan : -

27. Penyusunan Studi Amdal dan Analisa Dampak Lalu Lintas (ANDALALIN) Jalan Tol Cibadak – Pelabuhan Ratu

Pengaturan, Pengusahaan, Pengawasan Jalan Tol		
100 %		
Kegiatan	Target	Realisasi
Penyusunan Studi Amdal dan Analisa Dampak Lalu Lintas (ANDALALIN) Jalan Tol Cibadak – Pelabuhan Ratu	1 Paket	1 Paket

Penjelasan:

Sesuai dengan peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 11 Tahun 2006 tentang jenis rencana usaha dan/atau kegiatan yang wajib di lengkapi dengan analisis mengenai dampak lingkungan hidup bahwa jalan tol dengan panjang lebih dari lima kilo meter wajib menyusun dokumen AMDAL. Penyusunan AMDAL jalan tol tersebut merupakan bagian dari tugas yang harus dilaksanakan oleh Badan Pengatur Jalan Tol (BPJT) selaku badan yang dibentuk oleh pemerintah dan memiliki kewenangan dalam penyelenggaraan jalan tol. Dokumen AMDAL tersebut merupakan salah satu syarat yang harus dipenuhi untuk suatu ruas jalan tol untuk laik dilelangkan

dan nantinya menjadi bagian dari dokumen tender investasi. Di dalam dokumen AMDAL tersebut juga akan terdapat kewajiban yang harus di laksanakan oleh calon Badan Usaha Jalan Tol terkait dengan RKL – RPL.

Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Mengenai Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, bahwa setiap rencana pembangunan memiliki potensi risiko gangguan terhadap lalu lintas umum, ketertiban, faktor keamanan pembangunan hingga faktor keselamatan. Dengan adanya Studi Analisis Dampak Lalu Lintas (ANDALALIN) maka dapat mengantisipasi dampak yang ditimbulkan oleh pembangunan pusat kegiatan atau pengembangan kawasan terhadap lalu lintas di sekitarnya.

Merujuk pada Pasal 43 Peraturan Pemerintah No. 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, diperlukan penyampaian dokumen persyaratan teknis sebagai kelengkapan pengajuan dokumen Andal dan dokumen RKL-RPL antara lain:

1. Pemenuhan Baku Mutu Air Limbah
2. Pemenuhan Baku Mutu Emisi
3. Pengelolaan Limbah B3; dan/atau
4. Analisa mengenai dampak lalu lintas

Ruas Jalan Tol Cibadak-Pelabuhan Ratu merupakan bagian dari rencana ruas jalan tol yang akan ditenderkan. Sehubungan dengan hal di atas Badan Pengatur Jalan Tol bertindak sebagai pemerintah bermaksud menyusun studi AMDAL dan dokumen Andalalin Jalan Tol Cibadak-Pelabuhan Ratu.

Output Pekerjaan :

Laporan Akhir yang berisi:

- a. Dokumen Amdal Jalan Tol Cibadak-Pelabuhan Ratu
- b. Dokumen Standar Teknis/Kajian Pemenuhan Baku Mutu Air Limbah, Pemenuhan Baku Mutu Emisi, Pengelolaan Limbah B3, dokumen andalalin
- c. Surat pernyataan kesanggupan penyedia jasa, berisi mengenai:
 - Tanggung jawab pekerjaan hingga diterbitkannya Persetujuan Andalalin dan Ijin Lingkungan meskipun masa kontrak pekerjaan telah berakhir
 - Bila dikemudian hari Penyedia Jasa mengingkari/ cidera janji, maka Penyedia Jasa bersedia dimasukkan dalam daftar hitam/ blacklist.

Manfaat :

Internal : BPJT/Kementerian PUPR.

Eksternal : Masyarakat Luas Pengguna Jalan Tol, Badan Usaha Jalan Tol, dan Instansi Pemerintah lainnya.

Hambatan : -

Dokumentasi:

28. Penyusunan Dokumen Dampak Lalu Lintas (ANDALALIN) dan Finalisasi Ijin Lingkungan Jalan Tol Samarinda-Bontang

Pengaturan, Pengusahaan, Pengawasan Jalan Tol		
100 %		
Kegiatan	Target	Realisasi
Penyusunan Dokumen Dampak Lalu Lintas (ANDALALIN) dan Finalisasi Ijin Lingkungan Jalan Tol Samarinda - Boantang	1 Paket	1 Paket

Penjelasan :

Sesuai dengan peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 11 Tahun 2006 tentang jenis rencana usaha dan/atau kegiatan yang wajib dilengkapi dengan analisis mengenai dampak lingkungan hidup bahwa jalan tol dengan panjang lebih dari lima kilo meter wajib menyusun dokumen AMDAL. Penyusunan AMDAL jalan tol tersebut merupakan bagian dari tugas yang harus dilaksanakan oleh Badan Pengatur Jalan Tol (BPJT) selaku badan yang dibentuk oleh pemerintah dan memiliki kewenangan dalam penyelenggaraan jalan tol. Dokumen AMDAL tersebut merupakan salah satu syarat yang harus dipenuhi untuk suatu ruas jalan tol untuk laik dilelangkan dan nantinya menjadi bagian dari dokumen tender investasi. Di dalam dokumen AMDAL tersebut juga akan terdapat kewajiban yang harus dilaksanakan oleh calon Badan Usaha Jalan Tol terkait dengan RKL - RPL.

Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Mengenai Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, bahwa setiap rencana pembangunan memiliki potensi risiko gangguan terhadap lalu lintas umum, ketertiban, faktor keamanan pembangunan hingga faktor

keselamatan. Dengan adanya Studi Analisis Dampak Lalu Lintas (ANDALALIN) maka dapat mengantisipasi dampak yang ditimbulkan oleh pembangunan pusat kegiatan atau pengembangan kawasan terhadap lalu lintas di sekitarnya.

Merujuk pada Pasal 43 Peraturan Pemerintah No. 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, diperlukan penyampaian dokumen persyaratan teknis sebagai kelengkapan pengajuan dokumen Andal dan dokumen RKL-RPL antara lain:

1. Pemenuhan Baku Mutu Air Limbah
2. Pemenuhan Baku Mutu Emisi
3. Pengelolaan Limbah B3; dan/atau
4. Analisa mengenai dampak lalu lintas

Ruas Jalan Tol Samarinda-Bontang merupakan bagian dari rencana ruas jalan tol yang akan ditenderkan. Pada tahun 2021 BPJT telah melakukan pekerjaan AMDAL Jalan Tol Samarinda-Bontang sampai dengan Dokumen Kerangka Acuan, Draft dokumen AMDAL (draft ANDAL, RKL dan RPL), namun belum dapat dilanjutkan untuk permohonan penilaian dokumen AMDAL karena sesuai dengan Peraturan Pemerintah No. 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup diperlukan Dokumen Teknis ANDALALIN sebagai persyaratan penilaian dokumen AMDAL. Sehubungan dengan hal tersebut di atas Badan Pengatur Jalan Tol sebagai pemerintah bermaksud menyusun studi AMDAL dan dokumen Andalalin Jalan Tol Samarinda-Bontang.

Output Pekerjaan:

- a. Dokumen Amdal Jalan Tol Samarinda-Bontang
- b. Dokumen Standar Teknis/Kajian Pemenuhan Baku Mutu Air Limbah, Pemenuhan Baku Mutu Emisi, Pengelolaan Limbah B3,
- c. Dokumen andalalin
- d. Surat pernyataan kesanggupan penyedia jasa, berisi mengenai:
 - Tanggung jawab pekerjaan hingga diterbitkannya Persetujuan Andalalin dan Ijin Lingkungan meskipun masa kontrak pekerjaan telah berakhir
 - Bila dikemudian hari Penyedia Jasa mengingkari/ cidera janji, maka Penyedia Jasa bersedia dimasukkan dalam daftar hitam/ blacklist.

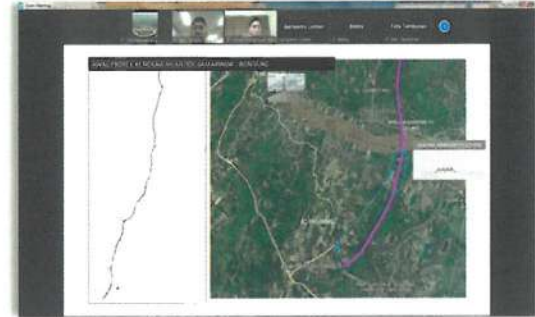
Manfaat :

Internal : BPJT/Kementerian PUPR.

Eksternal : Masyarakat Luas Pengguna Jalan Tol, Badan Usaha Jalan Tol, dan Instansi Pemerintah lainnya.

Hambatan: -

Dokumentasi:



29. Pengembangan dan Pembaruan Sistem Informasi Monitoring Pemenuhan PPJT

Pengaturan, Pengusahaan, Pengawasan Jalan Tol		
100 %		
Kegiatan	Target	Realisasi
Pengembangan dan Pembaruan Sistem Informasi Monitoring Pemenuhan PPJT	1 Paket	1 Paket

Penjelasan :

Salah satu program Pemerintah guna mendukung pertumbuhan ekonomi nasional, adalah percepatan pembangunan jalan tol di Indonesia, dimana untuk Periode 2020–2024, Pemerintah mempunyai program pembangunan ±2500 Km Jalan Tol.

BPJT sebagai Badan yang bertanggung jawab untuk melaksanakan sebagian kewenangan Pemerintah dalam pengelolaan jalan tol, dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya dibantu oleh sebuah sekretariat. Salah satu fungsi Sekretariat BPJT sesuai amanat Permen PU Nomor 43/PRT/M/2015 adalah pelaksanaan pengawasan dan pemantauan pelaksanaan Perjanjian Pengusahaan Jalan Tol (PPJT). Bentuk pengawasan tersebut diantaranya adalah pengawasan pemenuhan kewajiban Badan Usaha Jalan Tol (BUJT) terkait aspek investasi sesuai PPJT.

Sampai dengan tahun 2021, terdapat 79 BUIT yang sudah menandatangani PPJT. Untuk membantu pengawasan pemenuhan kewajiban PPJT tersebut

diatas, BPJT bermaksud mengembangkan sistem informasi monitoring pemenuhan PPJT. Pengembangan sistem informasi tersebut adalah strategi untuk beradaptasi terhadap perkembangan pembangunan jalan tol yang masif dengan dinamika perubahan data yang perlu diperbarui secara berkala sedangkan jumlah SDM yang menjalankan tugas juga terbatas. Diharapkan pengembangan sistem ini dapat mempermudah fungsi pemantauan pemenuhan kewajiban BUJT terhadap PPJT sehingga pelayanan kinerja manajemen pengelolaan perusahaan jalan tol menjadi semakin efektif dan efisien.

Output Pekerjaan:

- a. Website Sistem Informasi Monitoring pemenuhan PPJT
- b. Sosialisasi Web Sistem Monitoring Pemenuhan PPJT

Manfaat :

Penerima manfaat internal adalah manajemen BPJT yang bisa mendapatkan data yang representatif atas proses pemenuhan kewajiban PPJT.

Penerima manfaat eksternal adalah BUJT dimana hak dan kewajiban BUJT bisa dilaksanakan tepat waktu sesuai PPJT.

Hambatan: -

Dokumentasi:



30. Penyusunan Studi Kelayakan Jalan Tol Akses Menuju Ibu Kota Negara dari Kota Balikpapan

Pengaturan, Pengusahaan, Pengawasan Jalan Tol		
100 %		
Kegiatan	Target	Realisasi
Penyusunan Studi Kelayakan Jalan Tol Akses Menuju Ibu Kota Negara dari Kota Balikpapan	1 Paket	1 Paket

Penjelasan :

Salah satu program Pemerintah guna mendukung pertumbuhan ekonomi nasional adalah percepatan pembangunan infrastruktur, salah satunya melalui kebijakan pembangunan jalan tol. Untuk melaksanakan hal ini, sesuai Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan dan Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2005 tentang Jalan Tol, dibentuk Badan Pengatur Jalan Tol (BPJT) yang ditetapkan dengan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 295/PRT/M/2005 yang selanjutnya diganti dengan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum nomor 43/PRT/M/2015. BPJT bertugas melaksanakan sebagian kewenangan Pemerintah dalam penyelenggaraan jalan tol yang meliputi pengaturan, pengusahaan dan pengawasan badan usaha jalan tol.

Untuk membantu kelancaran pelaksanaan fungsi dan tugas BPJT dibentuk Sekretariat BPJT yang berada di lingkungan Menteri. Sekretariat BPJT adalah unsur staf yang membantu BPJT dalam menyelenggarakan dukungan teknis dan administratif kesekretariatan penyelenggaraan pengaturan jalan tol. Salah satu bagian dari Sekretariat BPJT adalah Bidang Investasi yang bertugas melaksanakan penyiapan, pelayanan, dan pengawasan pengusahaan jalan tol. Dalam melaksanakan tugas tersebut, Bidang Investasi menyelenggarakan fungsi:

- a. penyusunan kajian studi kelayakan finansial dan lingkungan jalan tol dan penentuan model bisnis pengusahaan jalan tol;
- b. penyusunan perjanjian pengusahaan jalan tol dan pelelangan pengusahaan jalan tol;
- c. pengawasan pemenuhan kewajiban badan usaha terkait aspek investasi sesuai perjanjian pengusahaan jalan tol;
- d. pengawasan pelaksanaan investasi jalan tol, penyiapan evaluasi dan penyesuaian tarif tol awal;
- e. pelaksanaan evaluasi investasi terhadap perubahan ruang lingkup pengusahaan jalan tol; dan
- f. penyiapan pengambilalihan hak pengusahaan jalan tol yang telah selesai masa konsesinya atau gagal dalam pelaksanaan konsesinya.

Terkait dengan hal tersebut di atas, mengingat keterbatasan sumber daya manusia di Bidang Investasi, beban tugas BPJT yang semakin besar di sisi lain, BPJT memerlukan bantuan Konsultan untuk melakukan penyusunan Studi Kelayakan Jalan Tol Akses Menuju Ibu Kota Negara dari Kota Balikpapan yang dimulai pada tahun Anggaran 2022. Melalui keberadaan konsultan tersebut diharapkan studi Jalan Tol tersebut dapat berjalan dengan efektif dan efisien.

Output Pekerjaan:

1. Hasil penyempurnaan dari laporan Draft Final dengan memperhatikan berbagai masukan dan hasil diskusi/ pembahasan dengan pemberi pekerjaan.
2. Rekomendasi Konsultan sebagaimana kesimpulan atas temuan serta hasil analisis yang dilakukan.

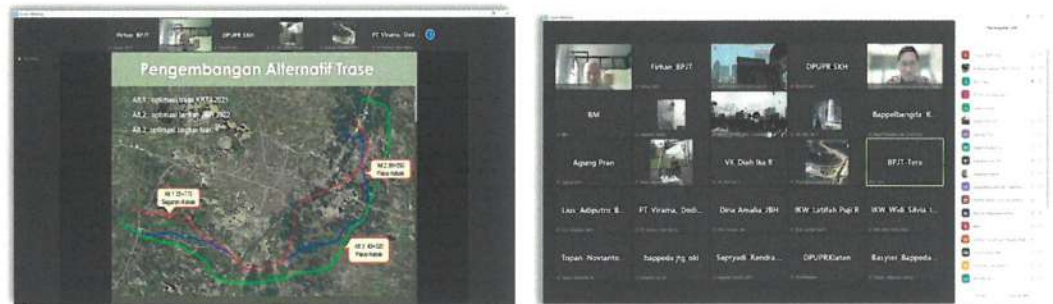
Manfaat :

Internal : Sekretariat BPJT mendapatkan hasil studi kelayakan yang dapat digunakan sebagai dasar kegiatan pembangunan Jalan Tol.

Eksternal : Masyarakat Luas dan Instansi Pemerintah dapat mengetahui dampak serta manfaat pembangunan Jalan Tol.

Hambatan: -

Dokumentasi:



31. Penyusunan Studi Kelayakan Jalan Tol Bandar Udara Supadio – Pelabuhan Kijing

Pengaturan, Pengusahaan, Pengawasan Jalan Tol		
100 %		
Kegiatan	Target	Realisasi
Penyusunan Studi Kelayakan Jalan Tol Bandar Udara Supadio – Pelabuhan Kijing	1 Paket	1 Paket

Penjelasan :

Salah satu program Pemerintah guna mendukung pertumbuhan ekonomi nasional adalah percepatan pembangunan infrastruktur, salah satunya melalui kebijakan pembangunan jalan tol. Untuk melaksanakan hal ini, sesuai Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan dan Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2005 tentang Jalan Tol, dibentuk Badan Pengatur Jalan Tol (BPJT) yang ditetapkan dengan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 295/PRT/M/2005 yang selanjutnya diganti

dengan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum nomor 43/PRT/M/2015. BPJT bertugas melaksanakan sebagian kewenangan Pemerintah dalam penyelenggaraan jalan tol yang meliputi pengaturan, pengusahaan dan pengawasan badan usaha jalan tol.

Untuk membantu kelancaran pelaksanaan fungsi dan tugas BPJT dibentuk Sekretariat BPJT yang berada di lingkungan Menteri. Sekretariat BPJT adalah unsur staf yang membantu BPJT dalam menyelenggarakan dukungan teknis dan administratif kesekretariatan penyelenggaraan pengaturan jalan tol. Salah satu bagian dari Sekretariat BPJT adalah Bidang Investasi yang bertugas melaksanakan penyiapan, pelayanan, dan pengawasan pengusahaan jalan tol. Dalam melaksanakan tugas tersebut, Bidang Investasi menyelenggarakan fungsi:

- a. penyusunan kajian studi kelayakan finansial dan lingkungan jalan tol dan penentuan model bisnis pengusahaan jalan tol;
- b. penyusunan perjanjian pengusahaan jalan tol dan pelelangan pengusahaan jalan tol;
- c. pengawasan pemenuhan kewajiban badan usaha terkait aspek investasi sesuai perjanjian pengusahaan jalan tol;
- d. pengawasan pelaksanaan investasi jalan tol, penyiapan evaluasi dan penyesuaian tarif tol awal;
- e. pelaksanaan evaluasi investasi terhadap perubahan ruang lingkup pengusahaan jalan tol; dan
- f. penyiapan pengambilalihan hak pengusahaan jalan tol yang telah selesai masa konsesinya atau gagal dalam pelaksanaan konsesinya.

Jalan Tol Bandar Udara Supadio-Pelabuhan Kijing direncanakan dibangun pada tahun 2023 dengan target pengoperasian pada tahun 2025. Mengingat sebelum dilakukan pembangunan masih dibutuhkan waktu untuk melakukan pelelangan pengusahaan Jalan Tol, maka penyusunan studi kelayakan perlu dilakukan pada tahun 2022 agar pembangunan dapat diselesaikan sesuai target.

Terkait dengan hal tersebut di atas, mengingat keterbatasan sumber daya manusia di Bidang Investasi, beban tugas BPJT yang semakin besar di sisi lain, BPJT memerlukan bantuan Konsultan untuk melakukan penyusunan Studi Kelayakan Jalan Tol Bandar Udara Supadio-Pelabuhan Kijing yang dilakukan pada tahun Anggaran 2022. Melalui keberadaan konsultan tersebut diharapkan studi Jalan Tol tersebut dapat berjalan dengan efektif dan efisien.

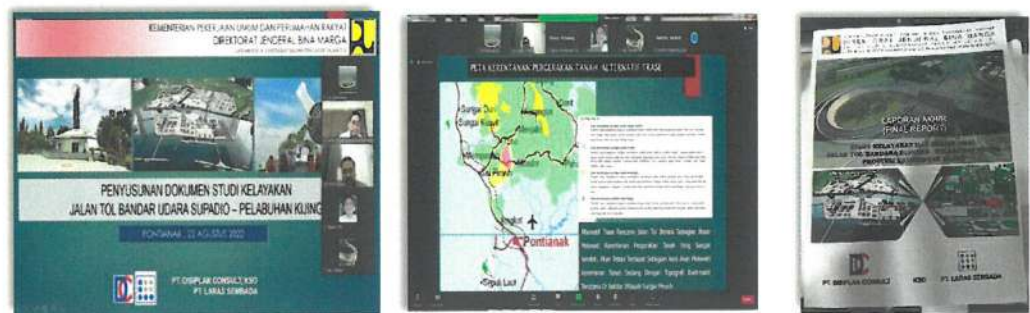
Output Pekerjaan:

1. Hasil penyempurnaan dari laporan Draft Final dengan memperhatikan berbagai masukan dan hasil diskusi/ pembahasan dengan pemberi pekerjaan.
2. Rekomendasi Konsultan sebagaimana kesimpulan atas temuan serta hasil analisis yang dilakukan.

Manfaat :

Internal : Sekretariat BPJT mendapatkan hasil studi kelayakan yang dapat digunakan sebagai dasar kegiatan pembangunan Jalan Tol.

Eksternal : Masyarakat Luas dan Instansi Pemerintah dapat mengetahui dampak serta manfaat pembangunan Jalan Tol.

Hambatan: -**Dokumentasi:****32. Penyusunan Studi Kelayakan dan Desain Awal Jalan Tol Lingkar Timur****- Selatan Kota Surakarta**

Pengaturan, Pengusahaan, Pengawasan Jalan Tol		
100 %		
Kegiatan	Target	Realisasi
Penyusunan Studi Kelayakan dan Desain Awal Jalan Tol Lingkar Timur – Selatan Kota Surakarta	1 Paket	1 Paket

Penjelasan:

Salah satu program Pemerintah guna mendukung pertumbuhan ekonomi nasional adalah percepatan pembangunan infrastruktur, salah satunya melalui kebijakan pembangunan jalan tol. Untuk melaksanakan hal ini, sesuai Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan dan Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2005 tentang Jalan Tol, dibentuk Badan Pengatur Jalan Tol (BPJT) yang ditetapkan dengan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 295/PRT/M/2005 yang selanjutnya diganti dengan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum nomor 43/PRT/M/2015. BPJT bertugas melaksanakan sebagian kewenangan Pemerintah dalam penyelenggaraan jalan tol yang meliputi pengaturan, pengusahaan dan pengawasan badan usaha jalan tol.

Untuk membantu kelancaran pelaksanaan fungsi dan tugas BPJT dibentuk Sekretariat BPJT yang berada di lingkungan Menteri. Sekretariat BPJT adalah unsur staf yang membantu BPJT dalam menyelenggarakan dukungan teknis dan administratif kesekretariatan penyelenggaraan pengaturan jalan tol. Salah satu bagian dari Sekretariat BPJT adalah Bidang Investasi yang bertugas melaksanakan penyiapan, pelayanan, dan pengawasan perusahaan jalan tol. Dalam melaksanakan tugas tersebut, Bidang Investasi menyelenggarakan fungsi:

1. penyusunan kajian studi kelayakan finansial dan lingkungan jalan tol dan penentuan model bisnis perusahaan jalan tol;
2. penyusunan perjanjian perusahaan jalan tol dan pelelangan perusahaan jalan tol;
3. pengawasan pemenuhan kewajiban badan usaha terkait aspek investasi sesuai perjanjian perusahaan jalan tol;
4. pengawasan pelaksanaan investasi jalan tol, penyiapan evaluasi dan penyesuaian tarif tol awal;
5. pelaksanaan evaluasi investasi terhadap perubahan ruang lingkup perusahaan jalan tol; dan
6. penyiapan pengambilalihan hak perusahaan jalan tol yang telah selesai masa konsesinya atau gagal dalam pelaksanaan konsesinya.

Terkait dengan hal tersebut di atas, mengingat keterbatasan sumber daya manusia di Bidang Investasi, beban tugas BPJT yang semakin besar di sisi lain, BPJT memerlukan bantuan Konsultan untuk melakukan penyusunan Studi Kelayakan dan Desain Awal Jalan Tol Lingkar Timur – Selatan Kota Surakarta yang dimulai pada tahun Anggaran 2022. Melalui keberadaan konsultan tersebut diharapkan studi Jalan Tol tersebut dapat berjalan dengan efektif dan efisien.

Output Pekerjaan:

1. Hasil penyempurnaan dari laporan Draft Final dengan memperhatikan berbagai masukan dan hasil diskusi/ pembahasan dengan pemberi pekerjaan.
2. Rekomendasi Konsultan sebagaimana kesimpulan atas temuan serta hasil analisis yang dilakukan.

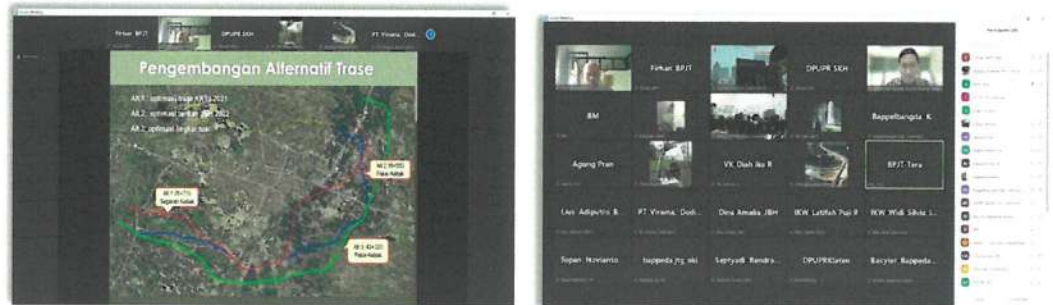
Manfaat :

Internal : Sekretariat BPJT mendapatkan hasil studi kelayakan yang dapat digunakan sebagai dasar kegiatan pembangunan Jalan Tol.

Eksternal : Masyarakat Luas dan Instansi Pemerintah dapat mengetahui dampak serta manfaat pembangunan Jalan Tol.

Hambatan: -

Dokumentasi:



31. Penyusunan Studi AMDAL dan Analisa Dampak Lalu Lintas (ANDALALIN) Jalan Tol Bandar Udara Supadio – Pelabuhan Kijing

Pengaturan, Pengusahaan, Pengawasan Jalan Tol		
100 %		
Kegiatan	Target	Realisasi
Penyusunan Studi AMDAL dan Analisa Dampak Lalu Lintas (ANDALALIN) Jalan Tol Bandar Udara Supadio – Pelabuhan Kijing	1 Paket	1 Paket

Penjelasan:

Sesuai dengan peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 11 Tahun 2006 tentang jenis rencana usaha dan/atau kegiatan yang wajib di lengkapi dengan analisis mengenai dampak lingkungan hidup bahwa jalan tol dengan panjang lebih dari lima kilo meter wajib menyusun dokumen AMDAL. Penyusunan AMDAL jalan tol tersebut merupakan bagian dari tugas yang harus dilaksanakan oleh Badan Pengatur Jalan Tol (BPJT) selaku badan yang dibentuk oleh pemerintah dan memiliki kewenangan dalam penyelenggaraan jalan tol. Dokumen AMDAL tersebut merupakan salah satu syarat yang harus dipenuhi untuk suatu ruas jalan tol untuk laik dilelangkan dan nantinya menjadi bagian dari dokumen tender investasi. Di dalam dokumen AMDAL tersebut juga akan terdapat kewajiban yang harus di laksanakan oleh calon Badan Usaha Jalan Tol terkait dengan RKL – RPL.

Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Mengenai Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, bahwa setiap rencana pembangunan memiliki potensi risiko gangguan terhadap lalu lintas umum, ketertiban, faktor keamanan pembangunan hingga faktor keselamatan. Dengan adanya Studi Analisis Dampak Lalu Lintas (ANDALALIN) maka dapat mengantisipasi dampak yang ditimbulkan oleh pembangunan pusat kegiatan atau pengembangan kawasan terhadap lalu lintas di sekitarnya.

Merujuk pada Pasal 43 Peraturan Pemerintah No. 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup,

diperlukan penyampaian dokumen persyaratan teknis sebagai kelengkapan pengajuan dokumen Andal dan dokumen RKL-RPL antara lain:

1. Pemenuhan Baku Mutu Air Limbah
2. Pemenuhan Baku Mutu Emisi
3. Pengelolaan Limbah B3; dan/atau
4. Analisa mengenai dampak lalu lintas

Ruas Jalan Tol Bandar Udara Supadio – Pelabuhan Kijing merupakan bagian dari rencana ruas jalan tol yang akan dilelangkan. Jalan Tol ini diperlukan untuk mendukung rencana pembangunan Ibu Kota Negara baru Republik Indonesia. Studi Kelayakan Jalan Tol tersebut dilaksanakan oleh BPJT sejak Tahun 2021 dan direncanakan selesai pada 2022. Mengingat pentingnya jalan tol tersebut, Pemerintah bermaksud untuk menyusun studi Amdal secara simultan dengan proses penyelesaian studi kelayakannya. Berdasarkan hal-hal tersebut, Badan Pengatur Jalan Tol bertindak sebagai pemerintah bermaksud merencanakan penyusunan studi AMDAL dan dokumen Andalalin Jalan Tol Bandar Udara Supadio-Pelabuhan Kijing.

Output Pekerjaan:

1. Struktur Organisasi Perusahaan
2. Mobilisasi tenaga ahli dan tenaga pendukung lainnya
3. Jadwal penugasan tenaga ahli dan tenaga pendukung lainnya
4. Metodologi dan pendekatan studi yang dipakai
5. Rencana Kerja
6. Jadwal pelaksanaan pekerjaan

Manfaat:

Internal : BPJT/Kementerian PUPR.

Eksternal: Masyarakat Luas Pengguna Jalan Tol, Badan Usaha Jalan Tol, dan Instansi Pemerintah lainnya.

Hambatan: -

Dokumentasi:





32. Rekonsiliasi Stimulus Dalam Pengusahaan Jalan Tol Yang Terdampak Pandemi Covid-19

Pengaturan, Pengusahaan, Pengawasan Jalan Tol		
100 %		
Kegiatan	Target	Realisasi
Rekonsiliasi Stimulasi Dalam Pengusahaan Jalan Tol Yang Terdampak Pandemi Covid-19	1 Kegiatan	1 Kegiatan

Merujuk kepada Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor : 43/M/PRT/2015 tentang Badan Pengatur Jalan Tol, Sekretariat BPJT mempunyai tugas memberikan pelayanan teknis kepada BPJT dengan menyelenggarakan fungsi :

1. Pelaksanaan kajian dan evaluasi penyiapan pengusahaan jalan tol dan sistem informasi jalan tol;
2. Pelaksanaan penyiapan, pelayanan, dan pengawasan pengusahaan jalan tol;
3. Pelaksanaan pengawasan dan pemantauan pelaksanaan Perjanjian Pengusahaan Jalan Tol oleh Badan Usaha;
4. Pelaksanaan perencanaan, pengelolaan, dan penyiapan bahan penetapan skala prioritas penyaluran dana bergulir serta administrasi, penyaluran, dan pengembalian pinjaman dana bergulir; dan
5. Pelaksanaan kegiatan hukum dan hubungan masyarakat, ketatausahaan, kepegawaian, dan keuangan.

Penjelasan :

Bahwa pandemi Corona Virus Disesae 2019 (COVID-9) telah berdampak pada perekonomian nasional termasuk pada industri jalan tol sehingga guna menjaga iklim investasi dan berkelanjutan industri jalan tol, pemerintah pusat perlu memberikan stimulus kepada Badan Usaha Jalan Tol dan badan Usaha Milik negara yang diberi penugasan oleh Pemerintah untuk melaksanakan pengusahaan jalan tol sebagai upaya untuk percepatan pembangunan infrastruktur di Indonesia.

Bidang Pendanaan Sekretariat BPJT mempunyai tugas untuk mendukung keberlanjutan penyediaan tanah dan dalam rangka percepatan penyediaan dana untuk pengadaan tanah untuk menunjang percepatan pembangunan jalan tol, pendanaan pengadaan tanah untuk kepentingan umum saat ini bersumber terlebih dahulu dari dana Badan Usaha Jalan Tol (BUJT) selaku instansi yang memerlukan tanah yang mendapatkan kuasa berdasarkan perjanjian, yang bertindak atas nama Kementerian dan dapat dibayar kembali oleh Lembaga Manajemen Aset Negara (LMAN).

Atas dasar hal tersebut maka Bidang Pendanaan Sekretariat BPJT melaksanakan kegiatan Rekonsiliasi Stimulus Dalam Pengusahaan jalan Tol Yang Terdampak Pandemi Covid-19.

Total permohonan pelaksanaan rekonsiliasi stimulus CoF dalam pengusahaan Jalan Tol yang terdampak pandemi covid-19 tahun 2022 adalah Rp3.054.585.637.406,00 Total permohonan pelaksanaan rekonsiliasi stimulus dana talangan tanah dalam pengusahaan Jalan Tol yang terdampak pandemi covid-19 tahun 2022 adalah Rp542.767.354.373,00

Output Pekerjaan :

Berita Acara Rekonsiliasi (BAR) antara Sekretaris dan para Kepala Bidang/ Bagian dilingkungan Sekretariat Badan Pengatur Jalan Tol (BPJT) dengan Badan Usaha Jalan Tol (BUJT) serta PPK Pengadaan Tanah Jalan Tol.

Manfaat :

Untuk memfasilitasi/mendukung Sekretariat Badan Pengatur Jalan Tol serta mendapatkan persamaan data dalam pelaksanaan rekonsiliasi stimulus dalam pengusahaan jalan tol yang terdampak pandemi covid-19.

Hambatan : -

Dokumentasi :

Rapat Forum Group Discussion (FGD) Tindak Lanjut Pembahasan Stimulus Pengusahaan Jalan Tol





33. Monitoring Pembayaran Langsung dan Koordinasi Dalam Rangka Percepatan Pembangunan Jalan Tol

Pengaturan, Pengusahaan, Pengawasan Jalan Tol		
100 %		
Kegiatan	Target	Realisasi
Monitoring Pembayaran Langsung dan Koordinasi Dalam Rangka Percepatan Pembangunan Jalan Tol	1 Laporan	1 Laporan

Merujuk kepada Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor : 43/M/PRT/2015 tentang Badan Pengatur Jalan Tol, Sekretariat BPJT mempunyai tugas memberikan pelayanan teknis kepada BPJT dengan menyelenggarakan fungsi :

- a. Pelaksanaan kajian dan evaluasi penyiapan pengusahaan jalan tol dan sistem informasi jalan tol;
- b. Pelaksanaan penyiapan, pelayanan, dan pengawasan pengusahaan jalan tol;
- c. Pelaksanaan pengawasan dan pemantauan pelaksanaan Perjanjian Pengusahaan Jalan Tol oleh Badan Usaha;
- d. Pelaksanaan perencanaan, pengelolaan, dan penyiapan bahan penetapan skala prioritas penyaluran dana bergulir serta administrasi, penyaluran, dan pengembalian pinjaman dana bergulir; dan
- e. Pelaksanaan kegiatan hukum dan hubungan masyarakat, ketatausahaan, kepegawaian, dan keuangan.

Penjelasan

Sehubungan dengan pelaksanaan pendanaan pengadaan tanah pada Proyek Strategis Nasional (PSN) sektor jalan tol akan dilakukan dengan cara Pembayaran Langsung, maka Bidang Pendanaan Sekretariat BPJT perlu melakukan Monitoring terhadap Pembayaran Langsung tersebut. Sedangkan untuk Kegiatan Koordinasi Percepatan Jalan Tol, dengan melakukan Koordinasi dengan Pihak Pihak terkait atau Instansi yang terlibat dalam Percepatan Jalan Tol melalui pelaksanaan kegiatan pembahasan permasalahan permasalahan terkait Percepatan Jalan Tol.

Sehingga diharapkan permasalahan permasalahan tersebut dapat terselesaikan dengan baik. Dan dengan adanya Peraturan menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat nomor 22 Tahun 2020 tentang stimulus dalam perusahaan jalan tol yang terdampak pandemi corona virus disease 2019, perlu kiranya Bidang Pendanaan Sekretariat BPJT dengan instansi instansi terkait, melaksanakan forum diskusi dalam upaya pengembalian DTT & selisih CoF yang tidak bisa dibayarkan oleh LMAN dengan tema 'prosedur & acuan pembayaran stimulus covid 2019 terhadap dokumen pendukung'.

Output Pekerjaan

Koordinasi Percepatan Jalan Tol menitikberatkan pada kesepakatan mendapatkan solusi penyelesaian atau jalan keluar terhadap permasalahan yang ada, dalam rangka percepatan jalan tol dengan Pihak Pihak terkait atau Instansi yang terlibat dalam Percepatan Jalan Tol.

Manfaat :

Dengan melakukan Monitoring terhadap Pembayaran Langsung diharapkan dapat memperoleh informasi serta data akurat terhadap dana yang telah digunakan untuk pengadaan tanah jalan tol, sehingga dapat langsung diakses kedalam sistem pendataan data base yang ada di Bidang Pendanaan dan berkesinambungan.

Hambatan : -

Dokumentasi :



34. Pelaksanaan Check List Kelengkapan Dokumen Dana Talangan Tanah dan Cost of Fund

Merujuk kepada Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor : 43/M/PRT/2015 tentang Badan Pengatur Jalan Tol, Sekretariat BPJT mempunyai tugas memberikan pelayanan teknis kepada BPJT dengan menyelenggarakan fungsi :

- a. Pelaksanaan kajian dan evaluasi penyiapan perusahaan jalan tol dan sistem informasi jalan tol;
- b. Pelaksanaan penyiapan, pelayanan, dan pengawasan perusahaan jalan tol;

- c. Pelaksanaan pengawasan dan pemantauan pelaksanaan Perjanjian Pengusahaan Jalan Tol oleh Badan Usaha;
- d. Pelaksanaan perencanaan, pengelolaan, dan penyiapan bahan penetapan skala prioritas penyaluran dana bergulir serta administrasi, penyaluran, dan pengembalian pinjaman dana bergulir; dan
- e. Pelaksanaan kegiatan hukum dan hubungan masyarakat, ketatausahaan, kepegawaian, dan keuangan.

Penjelasan

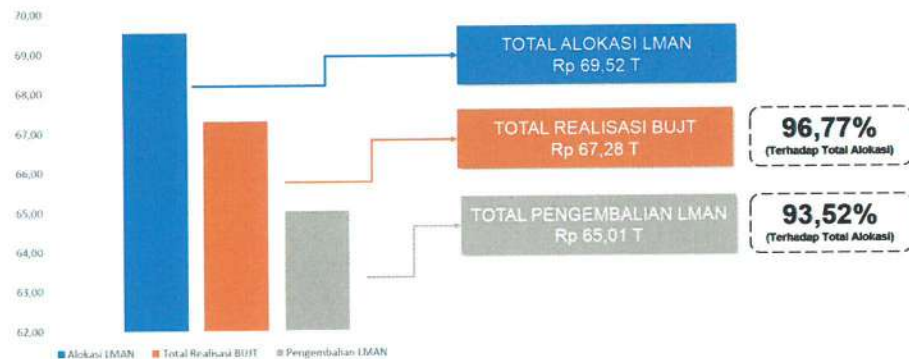
Bidang Pendanaan Sekretariat BPJT mempunyai tugas untuk mendukung keberlanjutan penyediaan tanah dan dalam rangka percepatan penyediaan dana untuk pengadaan tanah untuk menunjang percepatan pembangunan jalan tol, pendanaan pengadaan tanah untuk kepentingan umum saat ini bersumber terlebih dahulu dari dana Badan Usaha Jalan Tol (BUJT) selaku instansi yang memerlukan tanah yang mendapatkan kuasa berdasarkan perjanjian, yang bertindak atas nama Kementerian dan dapat dibayar kembali oleh Lembaga Manajemen Aset Negara (LMAN).

Kepastian ketersediaan Dana Talangan yang wajib disediakan oleh Badan Usaha berdasarkan alokasi dana dalam PPJT atau Amandemen PPJT dan/atau Rencana Penggunaan Anggaran yang telah disepakati oleh PPK Pengadaan Tanah dan Badan Usaha Jalan Tol. Setelah BUJT melakukan pembayaran pengadaan tanah terlebih dahulu perlu dilakukan pemantauan terhadap realisasi pembayaran Dana Talangan yang telah dikeluarkan oleh Badan Usaha berdasarkan Surat Perintah Pembayaran oleh PPK Pengadaan Tanah. Atas dasar hal tersebut maka Bidang Pendanaan Sekretariat BPJT melaksanakan kegiatan Rekonsiliasi Dana Talangan Tanah & Biaya Dana (Cost of Fund) dengan maksud Pembayaran Pengadaan Tanah yang terlebih dahulu dibayarkan oleh BUJT dapat direimbursement sesegera mungkin berdasarkan :

- Peraturan Presiden Nomor 66 Tahun 2020 Tentang Pendanaan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum Dalam Rangka Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional.
- Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 139/PMK.06/2020 Tentang Tata Cara Pendanaan Pengadaan Tanah Bagi Proyek Strategis Nasional Oleh Lembaga Manajemen Aset Negara.

Lembaga Manajemen Aset Negara merupakan lembaga yang bertanggung jawab untuk mengeluarkan Uang Ganti Rugi (UGR) pembiayaan pengadaan tanah yang telah dilakukan pembayaran pengadaan tanah terlebih dahulu oleh Badan Usaha Jalan Tol. Namun tidak semua pembayaran tanah yang sudah dilakukan oleh BUJT dapat dibayarkan tepat waktu oleh LMAN, mempunyai kewajiban harus mengeluarkan biaya dana (Cost Of Fund) atas penggunaan dana BUJT terlebih dahulu untuk pengadaan tanah jalan tol.

Rekapitulasi Dana Talangan Tanah



Output Pekerjaan :

1. Berita Acara Rekonsiliasi (BAR) antara Badan Pengatur Jalan Tol (BPJT) diwakili oleh Kepala Bidang Pendanaan dengan Badan Usaha Jalan Tol (BUJT) serta PPK Pengadaan Tanah Jalan Tol.
2. Surat Permohonan Pembayaran Dana Talangan Tanah (DTT) & Cost of Fund (CoF) yang ditandatangani oleh Kepala BPJT ditujukan kepada Direktur Utama LMAN.

Manfaat :

Untuk memfasilitasi/mendukung Sekretariat Badan Pengatur Jalan Tol serta mendapatkan persamaan data dalam pelaksanaan Check List Kelengkapan Dokumen Dana Talangan Tanah atas pembayaran pengadaan tanah yang telah dibayarkan terlebih dahulu oleh Badan Usaha Jalan Tol & biaya dana (Cost of Fund).

Hambatan : -

Dokumentasi :

Rekonsiliasi Pemenuhan Persyaratan Pengembalian Dana Talangan Tanah dan Biaya Dana (Cost of Fund)



Tabel 4.1.13 Rekapitulasi Cost of Fund Tahun 2022

Cluster	Ruas	Periode			Periode			Periode					
		1 Januari 2022 - 30 April 2022			1 Mei 2022 - 30 Agustus 2022			1 September 2022 - 31 Oktober 2022			1 November 2022 - 31 Desember 2022		
		DTT	Tagihan CoF	Pembayaran LMAN	DTT	Tagihan CoF	Pembayaran LMAN	DTT	Tagihan CoF	Pembayaran LMAN	DTT	Tagihan CoF	Pembayaran LMAN
Jabodetabek	Cinere - Jagrawi*						138.876,325.000	946,150,639	946,150,639				
Jabodetabek	Depak - Anlasari*	5,978,201,785	1,104,867,508									5,238,912,471	
Jabodetabek	Serpong - Cinere	32,359,489,682	2,863,139,137										
Jabodetabek	Cengkareng - Batu Ceper - Kunciran*	71,858,256,344	1,827,211,557	1,827,211,557	832,925,691	832,925,691	344,612,049,979	3,464,892,920	3,464,892,920	8,676,992,100	76,666,573	76,666,573	
Jabodetabek	Kunciran - Serpong*	29,961,202,095	3,695,799,427	3,695,799,427	2,975,393,449	2,975,393,449	42,897,429,485	4,301,595,642	4,301,595,642	15,298,770,326	3,334,996,476	3,334,996,476	
Jabodetabek	6 Ruas Tol DKI Jakarta	15,328,449,182	489,434,204	489,434,204	1,259,443,425	1,259,443,425	10,214,928,457	462,575,859	462,575,859				
Jabodetabek	Bekasi - Cawang - Kampung Melayu	3,675,365,108	37,005,388	37,005,388	52,013,012	52,013,012	416,413,638,261	5,922,308,676	5,919,692,886	63,920,436,005	1,400,908,392		
Jabodetabek	Bogor Ring Road	2,375,769,874	405,459,247	404,414,039									
Jabodetabek	Cibitung - Cilincing*												
Jabodetabek	Cimanggis - Cibitung*	161,536,734,070	10,442,916,468	6,453,864,616	62,055,390,943	5,119,776,577	814,138,046,192	14,161,373,097	15,094,907,946	114,697,381,757	10,061,483,912	8,650,575,520	
Non Trans Jawa	Pandaan - Malang	4,859,873,394	67,548,733	67,548,733	19,150,487,968	435,214,510	2,940,665,061	46,244,975	46,244,975	59,016,042,242	1,418,049,497	1,418,049,497	
Non Trans Jawa	Semarang - Dermek Terintegrasi												
Non Trans Jawa	Serang - Panimbang	35,153,738,412	902,816,191	902,816,191									
Non Trans Jawa	Solo - Jogja - NYA Kulon Progo												
Non Trans Jawa	Yogyakarta - Bawen												
Non Trans Jawa	Balikpapan - Samarinda	28,775,258,976	1,756,414,622				3,895,798,082	177,078,027	177,078,027				
Non Trans Jawa	Clawi - Sukabumi*				24,677,708,777	4,161,907,090							
Non Trans Jawa	Gedebage - Tasikmalaya - Ciacap												
Non Trans Jawa	Krian - Legundi - Bunder - Manyar												
Non Trans Jawa	Manado - Bitung												
Non Trans Jawa	Probolinggo - Banyuwangi	59,071,273,000	2,838,146,294	2,838,146,294	33,488,236,000	944,582,546	26,459,763,000	776,979,568	776,979,568	70,456,242,612	8,685,147,884	8,685,147,884	
Non Trans Jawa	Soreang - Pasir Koja												
Non Trans Jawa	Cileunyi - Sumedang - Dawuan	121,624,114,699	12,243,402,756	12,243,402,756	80,214,612,745	5,455,002,091							
Non Trans Jawa	Gempol - Pasuruan*												
Non Trans Jawa	Jakarta - Cikarpek Sisi Selatan				206,913,540,845	8,074,836,282	148,457,704,302	2,006,355,985					
Non Trans Jawa	Pasuruan - Probolinggo	16,244,743,618	777,682,929	777,682,929									

Cluster	Ruas	Periode						Periode						Periode					
		1 Januari 2022 - 30 April 2022			1 Mei 2022 - 30 Agustus 2022			1 September 2022 - 31 Oktober 2022			1 November 2022 - 31 Desember 2022								
		DTT	Tagihan CoF	Pembayaran L/IMAN	DTT	Tagihan CoF	Pembayaran L/IMAN	DTT	Tagihan CoF	Pembayaran L/IMAN	DTT	Tagihan CoF	Pembayaran L/IMAN	DTT	Tagihan CoF	Pembayaran L/IMAN			
	Total Non Trans Jawa	266,729,002,099	18,686,013,625	16,929,688,903	364,444,686,326	19,071,642,619	19,071,242,578	181,753,930,435	3,006,668,565	1,000,302,570	185,429,974,653	11,842,934,947	11,842,934,947						
Trans Jawa a	Pejagan - Pemalang*																		
Trans Jawa a	Pemalang - Batang*	3,306,063,679	391,957,843	391,957,843															
Trans Jawa a	Kertosono - Mojokerto																		
Trans Jawa a	Semarang - Solo*																		
Trans Jawa a	Batang - Semarang	19,947,133,630	2,559,457,025	2,559,457,025	36,889,007,562	7,907,554,547	7,907,554,547	35,832,033,503	8,055,134,643	8,055,134,643									
Trans Jawa a	Surabaya - Mojokerto*																		
Trans Jawa a	Ngawi - Kertosono	4,571,637,266	991,512,615	991,512,615	1,425,876,039	286,850,894	286,850,894	885,566,528	204,008,982	204,008,982									
Trans Jawa a	Solo - Ngawi	1,999,720,294	258,187,682	258,187,682	2,425,252,815	146,007,719	146,007,719	2,311,613,790	145,201,647	145,201,647									
	Total Trans Jawa	29,824,654,889	4,201,115,165	4,201,115,165	40,439,136,416	8,340,413,160	8,340,413,160	39,029,203,821	8,404,345,272	8,404,345,272	0	0	0	0	0	0			
Trans Sumatera	Betung - Jambi																		
Trans Sumatera	Jambi - Rengat																		
Trans Sumatera	Padang - Pekanbaru	5,904,190,000	76,430,945	76,430,945	448,581,000	8,774,981	8,774,981												
Trans Sumatera	Bakauheni - Terbanggi Besar	5,807,124,193	1,205,081,171	1,205,081,171	10,519,343,917	2,464,085,432	2,464,085,432												
Trans Sumatera	Medan - Binjai																		
Trans Sumatera	Palembang - Indralaya																		
Trans Sumatera	Terbanggi Besar - Pemalang																		
Trans Sumatera	Panggang - Kayu Agung																		
Trans Sumatera	Binjai - Langsa				193,134,371	3,389,111	3,389,111												
Trans Sumatera	Indrapura - Kisaran																		
Trans Sumatera	Kuala Tanjung - Tebing Tinggi - Parapat																		
Trans Sumatera	Lubuk Linggau - Curup - Bengkulu																		
Trans Sumatera	Simpang Indralaya - Muara Enim																		
Trans Sumatera	Kisaran - Tebing Tinggi																		
Trans Sumatera	Medan Kualanan - Tebing Tinggi																		
Trans Sumatera	Parapat - Tarutung - Sibolga																		
Trans Sumatera	Pekanbaru - Kandis - Dumai	763,150,001	91,487,316	91,487,316	82,188,827	7,229,408	7,229,408	24,816,577,156	276,095,121	276,095,121									
Trans Sumatera	Sigi - Banda Aceh				6,681,674,167	102,478,003	102,478,003												
	Total Trans Sumatera	12,474,464,194	1,372,999,432	1,372,999,432	17,934,922,282	2,686,956,935	2,686,956,935	24,816,577,156	276,095,121	276,095,121	0	0	0	0	0	0			
	Total	469,564,755,232	34,703,044,690	28,957,576,116	484,974,035,966	35,117,888,191	35,117,888,191	1,069,737,767,694	28,838,472,045	24,776,650,909	300,117,356,470	21,894,418,869	20,493,510,467						

35. Tenaga Ahli Hukum

Merujuk kepada Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor : 43/M/PRT/2015 tentang Badan Pengatur Jalan Tol, Sekretariat BPJT mempunyai tugas memberikan pelayanan teknis kepada BPJT dengan menyelenggarakan fungsi :

- a. Pelaksanaan kajian dan evaluasi penyiapan perusahaan jalan tol dan sistem informasi jalan tol;
- b. Pelaksanaan penyiapan, pelayanan, dan pengawasan perusahaan jalan tol;
- c. Pelaksanaan pengawasan dan pemantauan pelaksanaan Perjanjian Perusahaan Jalan Tol oleh Badan Usaha;
- d. Pelaksanaan perencanaan, pengelolaan, dan penyiapan bahan penetapan skala prioritas penyaluran dana bergulir serta administrasi, penyaluran, dan pengembalian pinjaman dana bergulir; dan
- e. Pelaksanaan kegiatan hukum dan hubungan masyarakat, ketatausahaan, kepegawaian, dan keuangan.

Penjelasan

Membantu Sekretariat Badan Pengatur Jalan Tol dalam permasalahan hukum yang terkait dengan pengadaan tanah untuk pembangunan jalan tol.

Manfaat :

Mendukung Sekretariat Badan Pengatur Jalan Tol dalam melakukan monitoring permasalahan hukum pengadaan tanah untuk pembangunan jalan tol di BPJT.

Output Pekerjaan : Laporan Bulanan

Hambatan:

Tenaga ahli mulai melakukan kegiatan di pertengahan tahun.

36. Tenaga Ahli Database

Merujuk kepada Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor : 43/M/PRT/2015 tentang Badan Pengatur Jalan Tol, Sekretariat BPJT mempunyai tugas memberikan pelayanan teknis kepada BPJT dengan menyelenggarakan fungsi :

- a. Pelaksanaan kajian dan evaluasi penyiapan perusahaan jalan tol dan sistem informasi jalan tol;
- b. Pelaksanaan penyiapan, pelayanan, dan pengawasan perusahaan jalan tol;
- c. Pelaksanaan pengawasan dan pemantauan pelaksanaan Perjanjian Perusahaan Jalan Tol oleh Badan Usaha;
- d. Pelaksanaan perencanaan, pengelolaan, dan penyiapan bahan penetapan skala prioritas penyaluran dana bergulir serta administrasi, penyaluran, dan pengembalian pinjaman dana bergulir; dan

- e. Pelaksanaan kegiatan hukum dan hubungan masyarakat, ketatausahaan, kepegawaian, dan keuangan.

Penjelasan

Kegiatan Tenaga Ahli Database merupakan kebutuhan dasar untuk dapat menyimpan data secara akurat, tepat dan relevan dalam proses penyampaian informasi. Kegiatan ini rutin dilakukan untuk kegiatan Rekonsiliasi Dana Talangan Tanah (DTT) & biaya dana (Cost of Fund).

Manfaat :

Tersedianya suatu sistem database yang akan mendukung tercapainya efektifitas dan efisiensi informasi pengadaan tanah dilingkungan Sekretariat Badan Pengatur Jalan Tol.

Output Pekerjaan : Laporan Bulanan

Hambatan:

Tenaga ahli mulai melakukan kegiatan di pertengahan tahun.

37. Rasionalisasi Tarif Tol

Merujuk kepada Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor : 43/M/PRT/2015 tentang Badan Pengatur Jalan Tol, Sekretariat BPJT mempunyai tugas memberikan pelayanan teknis kepada BPJT dengan menyelenggarakan fungsi :

- a. Pelaksanaan kajian dan evaluasi penyiapan perusahaan jalan tol dan sistem informasi jalan tol;
- b. Pelaksanaan penyiapan, pelayanan, dan pengawasan perusahaan jalan tol;
- c. Pelaksanaan pengawasan dan pemantauan pelaksanaan Perjanjian Perusahaan Jalan Tol oleh Badan Usaha;
- d. Pelaksanaan perencanaan, pengelolaan, dan penyiapan bahan penetapan skala prioritas penyaluran dana bergulir serta administrasi, penyaluran, dan pengembalian pinjaman dana bergulir; dan
- e. Pelaksanaan kegiatan hukum dan hubungan masyarakat, ketatausahaan, kepegawaian, dan keuangan.

Penjelasan :

Berdasarkan Peraturan Menteri PUPR Nomor 19 tahun 2020 tentang Kompensasi atas Penetapan Golongan Jenias Kendaraan Bermotor dan Perubahan tarif pada jalan Tol, kompensasi diberikan kepada Badan Usaha jalan Tol atas penetapan golongan jenis kendaraan bermotor dan/atau perubahan tarif tol yang mengakibatkan penurunan tingkat kelayakan investasi. Kompensasi dapat diberikan dalam bentuk perpanjangan masa konsesi paling lama sampai dengan 50 (lima puluh) tahun, dan apabila perpanjangan masa konsesi tersebut belum dapat mengembalikan tingkat kelayakan investasi, BUJT diberikan kompensasi dengan penyesuaian tarif khusus. Apabila perpanjangan masa konsesi dan pemberian tarif khusus

belum dapat mengembalikan tingkat kelayakan, BUJT diberikan kompensasi tunai.

Kompensasi diajukan oleh BUJT kepada Menteri PUPR dan dievaluasi oleh BPJT dengan engacu pada besaran tingkat kelayakan investasi sebagaimana ditetapkan dalam PPJT atau yang telah disepakati BPJT dan BUJT. Bentuk besaran kompensasi tersebut disampaikan kepada Menteri PUPR untuk mendapatkan persetujuan dan dituangkan dalam amandemen PPJT. Pengalokasian dana kompensasi tunai dilakukan setelah mendapatkan persetujuan Menteri Keuangan dan pembayarannya dilaksanakan berdasarkan hasil verifikasi BPKP.

Output Pekerjaan : terbayarnya kompensasi tunai atas rasionalisasi tarif jalan tol

Manfaat :

Menjaga tingkat kelayakan investasi jalan tol sebagaimana diperjanjikan dalam PPJT.

Hambatan : -

B. MENINGKATNYA DUKUNGAN MANAJEMEN DAN TUGAS TEKNIS LAINNYA

Persentase capaian kinerja indikator kinerja kegiatan Dukungan Manajemen Ditjen Bina Marga adalah 99.92% untuk mencapai target kinerja Dukungan Manajemen Ditjen Bina Marga didukung dengan komponen kegiatan dalam rincian sebagai berikut:

1. Layanan Perkantoran

Dukungan Manajemen Ditjen Bina Marga			
99,92 %			
Rincian Output	Target	Realisasi	Capaian (%)
Layanan Perkantoran	1 Layanan	1 Layanan	100

Capaian output Layanan Perkantoran sebesar 100.00%, target 1 Layanan dengan realisasi sebesar 1 layanan dengan capaian sebagai berikut:

1.1 Pembayaran Gaji dan Tunjangan

Kegiatan Pembayaran Gaji yang mencakup penggajian seluruh pegawai PNS di lingkungan Sekretariat Badan pengatur Jalan Tol selama 12 bulan dengan capaian kinerja sebesar 100%.

1.2 Pembayaran Gaji dan Tunjangan

Kegiatan Pembayaran Tunjangan kinerja dan honor kepala BPJT selama 12 bulan dengan capaian kinerja sebesar 100%.

1.3 Operasional Perkantoran dan Pimpinan

Kegiatan Operasional perkantoran dan pimpinan, capaian sebesar 100%, output ini merupakan kegiatan rutin seperti Rapat, biaya servis, kebutuhan perkantoran yang dilaksanakan oleh Sekreariat Badan pengatur Jalan Tol.

1.4 Gaji Non PNS Pendukung dan Substantif

Kegiatan Gaji Non PNS Pendukung dan Substantif, capaian sebesar 100%, output ini merupakan kegiatan pembayaran gaji seluruh pegawai Non PNS Pendukung dan Substantif di Sekretariat Badan pengatur Jalan Tol.

2. Layanan Sarana Internal

Dukungan Manajemen Ditjen Bina Marga			
99,92 %			
Rincian Output	Target	Realisasi	Capaian (%)
Layanan Sarana Internal	43 Unit	39 Unit	90,75

Persentase Capaian Kinerja Layanan Sarana Internal sebesar 90.75%, realisasi tidak mencapai 100% dikarenakan tidak dapat terlaksana sesuai target yang direncanakan pada satuan kerja Sekretariat Pengatur Jalan Tol.

Keluaran dari layanan sarana internal adalah Pengadaan Alat Pengolah Data, Pencetak Data dan Komunikasi dan Pengadaan Barang Milik Negara di lingkungan Sekretariat Badan Pengatur Jalan Tol. Dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 282.075.000 dengan realisasi fisik sebesar 96.08% dan realisasi keuangan sebesar Rp. 262.318.000.

4.2. PERBANDINGAN KINERJA ORGANISASI

Pengukuran kinerja adalah proses sistematis dan berkesinambungan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, kebijakan, sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan dalam mewujudkan visi, misi dan strategi dari masing-masing Instansi Pemerintah. Proses pengukuran kinerja Badan Pengatur Jalan Tol dimaksudkan untuk menilai pencapaian setiap indikator kinerja guna memberikan gambaran tentang keberhasilan dan kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran dari Badan Pengatur Jalan Tol.

Pengukuran kinerja dilakukan dengan cara membandingkan realisasi kinerja dengan target kinerja yang dicantumkan dalam dokumen Perjanjian Kinerja dalam rangka pelaksanaan APBN tahun berjalan. Tabel Perbandingan realisasi kinerja dan capaian kinerja 2020, 2021, dan 2022 secara rinci dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 4.2.1 Perbandingan Capaian Kinerja Outcome Tahun 2020-2022

NO	IKSP	SAT	2020			2021			2022		
			TARGET	REAL	KINERJA (%)	TARGET	REAL	KINERJA (%)	TARGET	REAL	KINERJA (%)
Sasaran Program : Meningkatkan Kinerja Pelayanan Jalan Nasional											
Tingkat Aksesibilitas Jalan Nasional											
Parameter	Panjang Jalan Tol Yang Beroperasi	KM	338,41	246,12	72,73	346,15	122,84	35,49	262,8	142,11	54
Sasaran Program : Meningkatkan Dukungan Manajemen dan Tugas Teknis Lainnya											
Tingkat Dukungan Manajemen Kementerian PUPR											
Parameter	Tingkat Dukungan Manajemen Kementerian PUPR	%	-	-	-	-	-	-	100,00	99,92	99,92

Tabel 4.2.2 Perbandingan Capaian Kinerja Output Tahun 2020-2022

NO	OUTPUT	SAT	2020			2021			2022		
			TARGET	REAL	KINERJA (%)	TARGET	REAL	KINERJA (%)	TARGET	REAL	KINERJA (%)
Non Fisik											
1	Layanan Sarana dan Prasarana Internal	Layanan	1.00	1.00	100.00	-	-	-	-	-	-
2	Layanan Dukungan Manajemen Satker	Layanan	1.00	1.00	100.00	-	-	-	-	-	-
3	Layanan Perkantoran	Layanan	1.00	1.00	100.00	1.00	1.00	100.00	1.00	1.00	100.00
4	Layanan Sarana Internal	Unit	-	-	-	73	69	93.96	43	39	90.75
5	Pengaturan, Pengusahaan, Pengawasan Jalan Tol	Rekomendasi Kebijakan	1.00	1.00	100.00	1.00	1.00	100.00	1.00	1.00	100.00
RATA - RATA CAPAIAN KINERJA					100.00			98.79			98.15

Tabel 4.2.3 Perbandingan Realisasi Kinerja Antara Renstra dan Tahun 2022

NO	OUTPUT	SAT	TARGET RENSTRA 2020-2024	2020		2021		2022		CAPAIAN KUMULATIF
				REALISASI	TARGET RENSTRA	REALISASI	TARGET RENSTRA	TARGET PK	REALISASI	
Sasaran Program : Meningkatkan Kinerja Pelayanan Jalan Nasional										
IKP 1 : Tingkat Aksesibilitas Jalan Nasional										
Indikator Kinerja Kegiatan										
1	ABF 010 Pengaturan, Pengusahaan, Pengawasan Jalan Tol	Rekomendasi Kebijakan	-	1,00	1,00	-	1,00	1,00	1,00	3,00
IKP 2 : Rating Kondisi Jalan Nasional										
Indikator Kinerja Kegiatan										
IKP : Tingkat Dukungan Manajemen Kementerian PUPR										
Indikator Kinerja Kegiatan										
1	951 Layanan Sarana dan Prasarana Internal	Layanan	-	1,00	-	-	-	-	-	1,00
2	970 Layanan Dukungan Manajemen Satker	Layanan	-	1,00	-	-	-	-	-	1,00
3	994 Layanan Perkantoran	unit	-	1,00	1,00	-	1,00	1,00	1,00	3,00
4	EAD 002 Layanan Sarana Internal	unit	-	-	69	-	43	39	39	108,00

35. Tenaga Ahli Hukum

Merujuk kepada Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor : 43/M/PRT/2015 tentang Badan Pengatur Jalan Tol, Sekretariat BPJT mempunyai tugas memberikan pelayanan teknis kepada BPJT dengan menyelenggarakan fungsi :

- a. Pelaksanaan kajian dan evaluasi penyiapan pengusahaan jalan tol dan sistem informasi jalan tol;
- b. Pelaksanaan penyiapan, pelayanan, dan pengawasan pengusahaan jalan tol;
- c. Pelaksanaan pengawasan dan pemantauan pelaksanaan Perjanjian Pengusahaan Jalan Tol oleh Badan Usaha;
- d. Pelaksanaan perencanaan, pengelolaan, dan penyiapan bahan penetapan skala prioritas penyaluran dana bergulir serta administrasi, penyaluran, dan pengembalian pinjaman dana bergulir; dan
- e. Pelaksanaan kegiatan hukum dan hubungan masyarakat, ketatausahaan, kepegawaian, dan keuangan.

Penjelasan

Membantu Sekretariat Badan Pengatur Jalan Tol dalam permasalahan hukum yang terkait dengan pengadaan tanah untuk pembangunan jalan tol.

Manfaat :

Mendukung Sekretariat Badan Pengatur Jalan Tol dalam melakukan monitoring permasalahan hukum pengadaan tanah untuk pembangunan jalan tol di BPJT.

Output Pekerjaan : Laporan Bulanan

Hambatan:

Tenaga ahli mulai melakukan kegiatan di pertengahan tahun.

36. Tenaga Ahli Database

Merujuk kepada Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor : 43/M/PRT/2015 tentang Badan Pengatur Jalan Tol, Sekretariat BPJT mempunyai tugas memberikan pelayanan teknis kepada BPJT dengan menyelenggarakan fungsi :

- a. Pelaksanaan kajian dan evaluasi penyiapan perusahaan jalan tol dan sistem informasi jalan tol;
- b. Pelaksanaan penyiapan, pelayanan, dan pengawasan perusahaan jalan tol;
- c. Pelaksanaan pengawasan dan pemantauan pelaksanaan Perjanjian Perusahaan Jalan Tol oleh Badan Usaha;
- d. Pelaksanaan perencanaan, pengelolaan, dan penyiapan bahan penetapan skala prioritas penyaluran dana bergulir serta administrasi, penyaluran, dan pengembalian pinjaman dana bergulir; dan
- e. Pelaksanaan kegiatan hukum dan hubungan masyarakat, ketatausahaan, kepegawaian, dan keuangan.

Penjelasan

Kegiatan Tenaga Ahli Database merupakan kebutuhan dasar untuk dapat menyimpan data secara akurat, tepat dan relevan dalam proses penyampaian informasi. Kegiatan ini rutin dilakukan untuk kegiatan Rekonsiliasi Dana Talangan Tanah (DTT) & biaya dana (Cost of Fund).

Manfaat :

Tersedianya suatu sistem database yang akan mendukung tercapainya efektifitas dan efisiensi informasi pengadaan tanah dilingkungan Sekretariat Badan Pengatur Jalan Tol.

Output Pekerjaan : Laporan Bulanan

Hambatan:

Tenaga ahli mulai melakukan kegiatan di pertengahan tahun.

37. Rasionalisasi Tarif Tol

Merujuk kepada Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor : 43/M/PRT/2015 tentang Badan Pengatur Jalan Tol, Sekretariat BPJT mempunyai tugas memberikan pelayanan teknis kepada BPJT dengan menyelenggarakan fungsi :

- a. Pelaksanaan kajian dan evaluasi penyiapan perusahaan jalan tol dan sistem informasi jalan tol;
- b. Pelaksanaan penyiapan, pelayanan, dan pengawasan perusahaan jalan tol;
- c. Pelaksanaan pengawasan dan pemantauan pelaksanaan Perjanjian Perusahaan Jalan Tol oleh Badan Usaha;
- d. Pelaksanaan perencanaan, pengelolaan, dan penyiapan bahan penetapan skala prioritas penyaluran dana bergulir serta administrasi, penyaluran, dan pengembalian pinjaman dana bergulir; dan

- d. Pelaksanaan perencanaan, pengelolaan, dan penyiapan bahan penetapan skala prioritas penyaluran dana bergulir serta administrasi, penyaluran, dan pengembalian pinjaman dana bergulir; dan
- e. Pelaksanaan kegiatan hukum dan hubungan masyarakat, ketatausahaan, kepegawaian, dan keuangan.

Penjelasan :

Berdasarkan Peraturan Menteri PUPR Nomor 19 tahun 2020 tentang Kompensasi atas Penetapan Golongan Jenias Kendaraan Bermotor dan Perubahan tarif pada jalan Tol, kompensasi diberikan kepada Badan Usaha jalan Tol atas penetapan golongan jenis kendaraan bermotor dan/atau perubahan tarif tol yang mengakibatkan penurunan tingkat kelayakan investasi. Kompensasi dapat diberikan dalam bentuk perpanjangan masa konsesi paling lama sampai dengan 50 (lima puluh) tahun, dan apabila perpanjangan masa konsesi tersebut belum dapat mengembalikan tingkat kelayakan investasi, BUJT diberikan kompensasi dengan penyesuaian tarif khusus. Apabila perpanjangan masa konsesi dan pemberian tarif khusus belum dapat mengembalikan tingkat kelayakan, BUJT diberikan kompensasi tunai.

Kompensasi diajukan oleh BUJT kepada Menteri PUPR dan dievaluasi oleh BPJT dengan engacu pada besaran tingkat kelayakan investasi sebagaimana ditetapkan dalam PPJT atau yang telah disepakati BPJT dan BUJT. Bentuk besaran kompensasi tersebut disampaikan kepada Menteri PUPR untuk mendapatkan persetujuan dan dituangkan dalam amandemen PPJT. Pengalokasian dana kompensasi tunai dilakukan setelah mendapatkan persetujuan Menteri Keuangan dan pembayarannya dilaksanakan berdasarkan hasil verifikasi BPKP.

Output Pekerjaan : terbayarnya kompensasi tunai atas rasionalisasi tarif jalan tol

Manfaat :

Menjaga tingkat kelayakan investasi jalan tol sebagaimana diperjanjiakan dalam PPJT.

Hambatan : -

B. MENINGKATNYA DUKUNGAN MANAJEMEN DAN TUGAS TEKNIS LAINNYA

Persentase capaian kinerja indikator kinerja kegiatan Dukungan Manajemen Ditjen Bina Marga adalah 99,92% untuk mencapai target kinerja Dukungan Manajemen Ditjen Bina Marga didukung dengan komponen kegiatan dalam rincian sebagai berikut:

1. Layanan Perkantoran

Dukungan Manajemen Ditjen Bina Marga			
99,92 %			
Rincian Output	Target	Realisasi	Capaian (%)
Layanan Perkantoran	1 Layanan	1 Layanan	100

Capaian output Layanan Perkantoran sebesar 100.00%, target 1 Layanan dengan realisasi sebesar 1 layanan dengan capaian sebagai berikut:

1.1 Pembayaran Gaji dan Tunjangan

Kegiatan Pembayaran Gaji yang mencakup penggajian seluruh pegawai PNS di lingkungan Sekretariat Badan pengatur Jalan Tol selama 12 bulan dengan capaian kinerja sebesar 100%.

1.2 Pembayaran Gaji dan Tunjangan

Kegiatan Pembayaran Tunjangan kinerja dan honor kepala BPJT selama 12 bulan dengan capaian kinerja sebesar 100%.

1.3 Operasional Perkantoran dan Pimpinan

Kegiatan Operasional perkantoran dan pimpinan, capaian sebesar 100%, output ini merupakan kegiatan rutin seperti Rapat, biaya servis, kebutuhan perkantoran yang dilaksanakan oleh Sekreatriat Badan pengatur Jalan Tol.

1.4 Gaji Non PNS Pendukung dan Substantif

Kegiatan Gaji Non PNS Pendukung dan Substantif, capaian sebesar 100%, output ini merupakan kegiatan pembayaran gaji seluruh pegawai Non PNS Pendukung dan Substantif di Sekreatriat Badan pengatur Jalan Tol.

2. Layanan Sarana Internal

Dukungan Manajemen Ditjen Bina Marga			
99,92 %			
Rincian Output	Target	Realisasi	Capaian (%)
Layanan Sarana Internal	43 Unit	39 Unit	90,75

Persentase Capaian Kinerja Layanan Sarana Internal sebesar 90.75%, realisasi tidak mencapai 100% dikarenakan tidak dapat terlaksana sesuai target yang direncanakan pada satuan kerja Sekretariat Pengatur Jalan Tol.

Keluaran dari layanan sarana internal adalah Pengadaan Alat Pengolah Data, Pencetak Data dan Komunikasi dan Pengadaan Barang Milik Negara di lingkungan Sekretariat Badan Pengatur Jalan Tol. Dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 282.075.000 dengan realisasi fisik sebesar 96.08% dan realisasi keuangan sebesar Rp. 262.318.000.

4.2. PERBANDINGAN KINERJA ORGANISASI

Pengukuran kinerja adalah proses sistematis dan berkesinambungan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, kebijakan, sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan dalam mewujudkan visi, misi dan strategi dari masing-masing Instansi Pemerintah. Proses pengukuran kinerja Badan Pengatur Jalan Tol dimaksudkan untuk menilai pencapaian setiap indikator kinerja guna memberikan gambaran tentang keberhasilan dan kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran dari Badan Pengatur Jalan Tol.

Pengukuran kinerja dilakukan dengan cara membandingkan realisasi kinerja dengan target kinerja yang dicantumkan dalam dokumen Perjanjian Kinerja dalam rangka pelaksanaan APBN tahun berjalan. Tabel Perbandingan realisasi kinerja dan capaian kinerja 2020, 2021, dan 2022 secara rinci dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 4.2.1 Perbandingan Capaian Kinerja Outcome Tahun 2020-2022

NO	IKSP	SAT	2020			2021			2022		
			TARGET	REAL	KINERJA (%)	TARGET	REAL	KINERJA (%)	TARGET	REAL	KINERJA (%)
Sasaran Program : Meningkatkan Kinerja Pelayanan Jalan Nasional											
	Tingkat Aksesibilitas Jalan Nasional										
<i>Parameter</i>	Panjang Jalan Tol Yang Beroperasi	KM	338,41	246,12	72,73	346,15	122,84	35,49	262,8	142,11	54
Sasaran Program : Meningkatkan Dukungan Manajemen dan Tugas Teknis Lainnya											
	Tingkat Dukungan Manajemen Kementerian PUPR										
<i>Parameter</i>	Tingkat Dukungan Manajemen Kementerian PUPR	%	-	-	-	-	-	-	100,00	99,92	99,92

Tabel 4.2.2 Perbandingan Capaian Kinerja Output Tahun 2020-2022

NO	OUTPUT	SAT	2020			2021			2022		
			TARGET	REAL	KINERJA (%)	TARGET	REAL	KINERJA (%)	TARGET	REAL	KINERJA (%)
Non Fisik											
1	Layanan Sarana dan Prasarana Internal	Layanan	1.00	1.00	100.00	-	-	-	-	-	-
2	Layanan Dukungan Manajemen Satker	Layanan	1.00	1.00	100.00	-	-	-	-	-	-
3	Layanan Perkantoran	Layanan	1.00	1.00	100.00	1.00	1.00	100.00	1.00	1.00	100.00
4	Layanan Sarana Internal	Unit	-	-	-	73	69	93.96	43	39	90.75
5	Pengaturan, Pengusahaan, Pengawasan Jalan Tol	Rekomendasi Kebijakan	1.00	1.00	100.00	1.00	1.00	100.00	1.00	1.00	100.00

RATA - RATA CAPAIAN KINERJA	100.00	98.79	98.15
-----------------------------	--------	-------	-------

Tabel 4.2.3 Perbandingan Realisasi Kinerja Antara Renstra dan Tahun 2022

NO	OUTPUT	SAT	TARGET RENSTRA 2020-2024	2020		2021		2022			CAPAIAN KUMULATIF
				REALISASI	TARGET RENSTRA	REALISASI	TARGET RENSTRA	TARGET PK	REALISASI		
Sasaran Program : Meningkatkan Kinerja Pelayanan Jalan Nasional											
IKP 1 : Tingkat Aksesibilitas Jalan Nasional											
Indikator Kinerja Kegiatan											
1	ABF 010	Pengaturan, Pengusahaan, Pengawasan Jalan Tol	-	1,00	1,00	-	1,00	1,00	1,00	1,00	3,00
IKP 2 : Rating Kondisi Jalan Nasional											
Indikator Kinerja Kegiatan											
IKP : Tingkat Dukungan Manajemen Kementerian PUPR											
Indikator Kinerja Kegiatan											
1	951	Layanan Sarana dan Prasarana Internal	-	1,00	-	-	-	-	-	-	1,00
2	970	Layanan Dukungan Manajemen Satker	-	1,00	-	-	-	-	-	-	1,00
3	994	Layanan Perkantoran	-	1,00	1,00	-	1,00	1,00	1,00	1,00	3,00
4	EAD 002	Layanan Sarana Internal	-	-	69	-	43	39	108,00	108,00	

4.2.1 Perbandingan Capaian IKSP dengan Instansi Lain

Adapun Perbandingan capaian Indikator Kinerja Kegiatan Sasarapn program (IKSP) dengan Instansi lain yang sejenis yaitu Sekretariat Badan Pengatur Jalan Tol dengan Direktorat Jalan Bebas Hambatan dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel 4.2.4 Perbandingan Capaian IKSP dengan Instansi Lain

NO	INDIKATOR KINERJA SASARAN PROGRAM IKSP	REALISASI (KM)	CAPAIAN KINERJA (%)	REALISASI (KM)	CAPAIAN KINERJA (%)
		Sekretariat BPJT		Direktorat JBH	
Sasaran Program : Meningkatnya Kinerja Pelayanan Jalan Nasional					
Tingkat Aksesibilitas Jalan Nasional					
Parameter	Panjang Jalan Tol Yang Beroperasi	142.11	54	142.11	54
Sasaran Program : Meningkatnya Dukungan Manajemen dan Tugas Teknis Lainnya					
Tingkat Dukungan Manajemen Kementerian PUPR					
		99.92	99.92		

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa kinerja capaian dari masing-masing Indikator Kinerja Sasaran Program kedua unit organisasi mencapai 54% untuk IKSP Tingkat Aksesibilitas jalan Nasional dengan parameter panjang jalan tol yang beroperasi 142.11 km.

4.3. REALISASI ANGGARAN

Realisasi keuangan Sekretariat Badan Pengatur Jalan Tol tahun 2022 adalah Rp285.139.588.000 dari pagu total Rp.289.808.558.000 realisasi tersebut mencapai persentase 98,39% dengan kinerja fisik mencapai perentase 100,00%. Capaian indikator kinerja program Sekretariat Badan Pengatur Jalan Tol dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 4.2.5 Realisasi Penyerapan Anggaran TA. 2022

NO	OUTPUT	PAGU ANGGARAN (Rp Ribu)		REALISASI (Rp Ribu)	CAPAIAN (%)		KET
		AWAL	REVISI AKHIR		THD TARGET AWAL	THD TARGET REVISI AKHIR	
Sasaran Program : Meningkatnya Kinerja Pelayanan Jalan Nasional							
IKP 1 : Tingkat Aksesibilitas Jalan Nasional							
Indikator Kinerja Kegiatan							
	ABF 010 Pengaturan, Pengusahaan, Pengawasan Jalan Tol	275.080.522	275.080.522	270.770.171	100,00	100,00	
Sasaran Program : Meningkatnya Dukungan Manajemen dan Tugas Teknis Lainnya							

IKP : Tingkat Dukungan Manajemen Kementerian PUPR							
Indikator Kinerja Kegiatan							
EBA 994	Layanan Perkantoran	14.445.961	14.445.961	14.107.100	100,00	100,00	
EBB 951	Layanan Sarana Internal	282.075	282.075	262.318	90,75	90,75	

Penjelasan :

1. Pagu anggaran awal merupakan pagu anggaran sesuai dengan Perjanjian Kinerja revisi Sekretariat Badan Pengatur Jalan Tol.

4.4. ANALISIS ATAS EFISIENSI PENGGUNA SUMBER DAYA MANUSIA

Berdasarkan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 20/PRT/M/2020 tentang Wewenang dan Tugas Direktorat Jenderal Bina Marga, Direktorat Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Perkerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Badan Pengatur Jalan Tol, dalam penyelenggaraan Jalan Tol, dibantu oleh Sekretariat BPJT yang mempunyai 5 Bagian/ Bidang yang menjalankan tugas dan fungsi di Sekretariat Badan Pengatur Jalan Tol. Jumlah PNS Sekretariat Direktorat Jenderal Bina Marga pada tahun 2022 sebanyak 114. Perbandingan efisiensi SDM terhadap capaian kinerja dapat dilihat pada tabel.

Tabel 4.2.6 Efisiensi SDM terhadap Capaian Kinerja

Tahun Anggaran	Jumlah SDM	Realisasi Anggaran (Rp)	Rata - Rata Capaian Kinerja (%)
2020	118	823,419,497	100.00
2021	105	732,639,968	98.79
2022	114	285,139,588	98.48

Dari tabel diatas, capaian kinerja Sekretariat Badan Pengatur Jalan Tol pada tahun 2022 mengalami penurunan menjadi 98,48% dengan jumlah SDM 114 orang, mencapai capaian kinerja fisik sebesar 100% dengan penyerapan anggaran sebesar 98,39%. Dari SDM tersebut, sebanyak 12 orang adalah pegawai yang ditugaskan guna mendukung layanan perkantoran seperti Prambukati dan Pengemudi. Kondisi tersebut dapat diasumsikan bahwa terdapat 102 orang pegawai yang mengerjakan kegiatan swakelola di lingkungan Sekretariat Badan Pengatur Jalan Tol.

4.5. TINDAK LANJUT HASIL EVALUASI SAKIP TAHUN 2021

Sekretariat Badan Pengatur Jalan Tol telah melakukan Evaluasi Sakip Tahun 2021 dengan nilai 78,25% dengan kategori **BB (Sangat Baik)**, akuntabel, berkinerja baik, memiliki sistem kinerja yang andal dan telah melakukan tindak lanjut dari hasil Evaluasi Sakip tahun 2021 sebagai berikut:

- a. Informasi yang disajikan dalam laporan kinerja dimanfaatkan untuk menilai dan memperbaiki pelaksanaan kegiatan.

- b. Rincian data capaian kinerja outcome dijelaskan dalam laporan kinerja.
- c. Telah dilakukan inovasi dalam manajemen kinerja berupa:
 - ✚ rapat internal secara berkala (2 kali dalam seminggu)
 - ✚ melaksanakan Audit Surveillance ISO 9001 : 2015 untuk sistem manajemen mutu yang dijalankan lebih baik, efektif dan efisien
 - ✚ memanfaatkan sosial media (*website* dan aplikasi) untuk informasi yang lebih efisien dan efektif dan
 - ✚ Pengembangan Sistem Transaksi Tol Nontunai Nirsentuh Berbasis *Multi Lane Free Flow* (MLFF)

4.6. PAKET STRATEGIS

Daftar di bawah ini merupakan Daftar Proyek Strategis Nasional sektor jalan tol sebagaimana lampiran dari Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2022 tanggal 20 Juli 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Nomor 7 Tahun 2021 Tentang Perubahan Daftar Proyek Strategis Nasional:

Tabel 4.2.7 Daftar Proyek Strategis Nasional Sektor Jalan Tol

No.	Proyek Strategis Nasional	Status
1.	Jalan Tol Serang - Panimbang	Seksi 1 : Operasi 2021
2	Jalan Tol Pandaan – Malang	Operasi
3	Jalan Tol Manado – Bitung (39 km)	Operasi
4	Jalan Tol Balikpapan – Samarinda (99 km)	Operasi
5	Jalan Tol Medan – Binjai – bagian dari 8 ruas Trans Sumatra	Operasi
6	Jalan Tol Pekanbaru – Kandis – Dumai (131,5 km) - bagian dari 8 ruas Trans Sumatra	Operasi
7	Jalan Tol Kisaran-Tebing Tinggi - bagian dari 8 ruas Trans Sumatra	Konstruksi
8	Jalan Tol Sigli-Banda Aceh - bagian dari 8 ruas Trans Sumatra	Seksi 2,3,4 : Operasi Seksi 1-5-6 : Konstruksi
9	Jalan Tol Binjai-Langsa- bagian dari Trans Sumatra	Seksi Binjai-Stabat: Operasi Seksi Stabat-Pangkalan Brandan: Konstruksi
10	Jalan Tol Bukittinggi-Padang Panjang-Lubuk Alung -Padang - bagian dari Trans Sumatra	Pekanbaru-Bangkinang : Operasi Bangkinang-Pangkalan : Konstruksi Padang-Kapalo Hilalang : Konstruksi
11	Jalan Tol Rantau Prapat-Kisaran – bagian dari Trans Sumatera	Indrapura-Kisaran : Konstruksi
12	Jalan Tol Langsa-Lhokseumawe – Bagian Trans Sumatera	Belum PPJT
13	Jalan Tol Lhokseumawe-Sigli – bagian dari Trans Sumatera	Belum PPJT
14	Jalan Tol Pekanbaru-Bangkinang-Payakumbuh-Bukittinggi – bagian Trans Sumatera	Pekanbaru-Bangkinang : Operasi Bangkinang-Pangkalan : Konstruksi Padang-Kapalo Hilalang : Konstruksi
15	Jalan Tol Tebing Tinggi-Pematang Siantar-Prapat-Tarutung-Sibolga – bagian dari	Tebing Tinggi-Pematang Siantar-Prapat: Konstruksi

No.	Proyek Strategis Nasional	Status
	Trans Sumatera	Tarutung-Sibloga: Belum PPJT
16	Jalan Tol Betung (Sp Sekayu)-Tempino-Jambi – bagian Trans Sumatera	Proses PPJT
17	Jalan Tol Jambi-Rengat – bagian Trans Sumatera	-
18	Jalan Tol Rengat-Pekanbaru – bagian Trans Sumatera	(Sebagian JC Pekanbaru-Pekanbaru) Diusulkan menjadi tambah lingkup Padang-Pekanbaru
19	Jalan Tol Dumai-Sp Sigambal-Rantau Prapat – bagian Trans Sumatera	-
20	Jalan Tol Simpang Indralaya-Muara Enim - bagian Trans Sumatera	Indraprabu : Konstruksi PMME : Konstruksi ditunda Tahap II > 2024
21	Jalan Tol Muara Enim-Lahat-Lubuk Linggau-bagian dari Trans Sumatera	Konstruksi ditunda
22	Jalan Tol Lubuk Linggau-Curup-Bengkulu – bagian Trans Sumatera	Bengkulu-Taba Penanjung: Konstruksi
23	Jalan Tol Kayu Agung-Palembang-Betung	Operasi Sebagian
24	Jalan Tol Cileunyi – Sumedang – Dawuan (59 km)	Operasi Sebagian
25	Jalan Tol Ciawi-Sukabumi-Ciranjang-Padalarang	Ciawi-Sukabumi Seksi 1: Operasi Seksi 2 : Konstruksi Ciranjang-Padalarang diusulkan masuk penambahan lingkup Jalan Tol Padaleunyi
26	Jalan Tol Cengkareng-Batu Ceper-Kunciran	Operasi
27	Jalan Tol Serpong Cinere	Operasi Seksi 1 2021
28	Jalan Tol Cinere Jagorawi	Operasi Sebagian
29	Jalan Tol Cimanggis-Cibitung	Operasi Sebagian
30	Jalan Tol Cibitung-Cilincing	Operasi Sebagian
31	Jalan Tol Bekasi-Cawang-Kampung Melayu	Operasi Sebagian
32	Jalan Tol Serpong-Balaraja	Operasi Sebagian
33	Jalan Tol Semanan-Sunter – bagian dari 6 ruas tol DKI Jakarta	Konstruksi
34	Jalan Tol Sunter-Pulo Gebang – bagian dari 6 ruas tol DKI Jakarta	Operasi
35	Jalan Tol Duri Pulo-Kampung Melayu – bagian dari 6 ruas tol DKI Jakarta	PPJT
36	Jalan Tol Kemayoran-Kampung Melayu – bagian dari 6 ruas tol DKI Jakarta	PPJT
37	Jalan Tol Ulujami-Tanah Abang – bagian dari 6 ruas tol DKI Jakarta	PPJT
38	Jalan Tol Pasar Minggu-Casablanca – bagian dari 6 ruas tol DKI Jakarta	PPJT
39	Jalan Tol Pasuruan-Probolinggo	Operasi Seksi 1-3, Konstruksi Seksi 4A
40	Jalan Tol Probolinggo-Banyuwangi	Pengadaan Lahan Seksi 1
41	Jalan Tol Krian-Legundi-Bunder-Manyar	Seksi 1-3 dan JC Wringinanom: Operasi
42	Jalan Tol Jakarta-Cikampek II Sisi Selatan	Konstruksi
43	Jalan Tol Semarang-Demak	Operasi Sebagian
44	Jalan Tol Yogyakarta-Bawen	Pembebasan Lahan dan Konstruksi Seksi 1
45	Jalan Tol Ngawi-Kertosono-Kediri	Persiapan Konstruksi
46	Jalan Tol Depok-Antasari (termasuk	Persiapan Konstruksi

No.	Proyek Strategis Nasional	Status
	Bojonggede-Salabenda)	
47	Jalan Tol Solo-Yogyakarta-Kulonprogo	Konstruksi
48	Jalan Tol Bogor Ring Road (termasuk-Caringin-Salabenda)	Persiapan Konstruksi
49	Jalan Tol Gedebage-Tasikmalaya-Cilacap	Pengadaan Lahan
50	Jalan Tol Akses Pelabuhan Patimban	Persiapan Penandatanganan PPJT
51	Pembangunan Jalan Tol Gilimanuk-Negara-Pekutatan-Soka-Mengwi	Konstruksi

Sumber : Permenko Nomor 9 Tahun 2022

4.7. PAKET DIRESMIKAN DAN PENGHARGAAN

Berikut data jalan tol yang diresmikan pada tahun 2022, yaitu sebagai berikut :

Tabel 4.2.8 Data Jalan Tol yang diresmikan Tahun 2022

No	Nama Ruas Tol	Tanggal Operasi	Panjang (KM)	Keterangan
1	Cileunyi - Sumedang - Dawuan : Seksi 1 (Cileunyi - Pamulihan)	24 Januari 2022	11,40	Diresmikan
2	Sigli - Banda Aceh : Seksi 2 (Seulimeum - Jantho)	4 Februari 2022	6,35	Dioperasikan
3	Binjai - Langsa : Seksi 1 (Binjai - Stabat)	4 Februari 2022	11,80	Diresmikan
4	Manado - Bitung (Seksi Danowudu - Bitung)	25 Februari 2022	13,43	Diresmikan
5	Cibitung - Cilincing : (Seksi 2 dan 3)	11 Juli 2022	24,45	Diresmikan
6	Lubuklinggau - Curup - Bengkulu : (Seksi Bengkulu - Taba Penanjung)	25 Agustus 2022	16,73	Dioperasikan
7	Serpong - Balaraja : Seksi 1 (Serpong - SS CBD)	20 September 2022	3,97	Diresmikan
8	Pekanbaru - Padang : (Seksi Pekanbaru - Bangkinang)	27 September 2022	30,89	Diresmikan
9	Bekasi Cawang Kampung Melayu : Seksi 1A dan Koneksi Jalan Tol Wiyoto Wiyono Sisi Timur, serta Off Ramp Jatiwaringin	29 September 2022	2,00	Dioperasikan
10	Cileunyi - Sumedang - Dawuan : Seksi 2,3 (Pamulihan - Cimalaka)	13 Desember 2022	21,10	Dioperasikan
11	Semarang - Demak Seksi II (Sayung - Demak)	-	16,01	Selesai Konstruksi
12	Bekasi Cawang Kampung Melayu : Seksi 2A dan 2A - Ujung	-	4,88	Selesai Konstruksi
13	Cinere - Jagorawi Seksi 3A (kukusan - krukut)	-	3,5	Selesai Konstruksi
Total			166,51	Selesai Konstruksi

Peresmian dan Groundbreaking Jalan Tol Tahun 2022

<p>Peresmian Jalan Tol Cileunyi Sumedang Dawuan Seksi 1 (Cileunyi – Pamulihan) 24 Januari 2022</p> 	<p>Peresmian Jalan Tol Binjai – Langsa Seksi 1 (Binjai – Stabat) 4 Februari 2022</p> 
<p>Peresmian Jalan Tol Manado – Bitung Seksi 2B (Danowudu – Bitung) 26 Februari 2022</p> 	<p>Groundbreaking Jalan Akses Tol Makassar New Port (MNP) 7 Februari 2022</p> 
<p>Groundbreaking Jalan Tol Yogyakarta – Bawen</p>	<p>Groundbreaking Jalan Tol Serang – Panimbang Seksi 3 (Cileles – Panimbang)</p>

30 Maret 2022



Groundbreaking Jalan Tol

Gllimanuk – Mengwi

11 September 2022



8 Agustus 2022



Peresmian Jalan Tol Cibitung – Cilincing

Seksi 1 Serpong – Balaraja

20 September 2022



Penghargaan

Pada Tahun 2022, Badan pengatur Jalan Tol telah melaksanakan Audit Surveillance ISO untuk mempertahankan sertifikasi ISO 9001:2015 yang telah diterima 2021 untuk Penyediaan Layanan Pengaturan Jalan Tol dari PT TUV SUD Indonesia. Sertifikasi tersebut hendaknya bisa menjadi motivasi bagi seluruh jajaran BPJT untuk peningkatan kinerja yang lebih baik dan memberikan layanan yang semakin yang lebih prima untuk seluruh pemangku kepentingan.



BAB 5 PENUTUP

5.1. PERMASALAHAN

Hambatan dan kendala yang dihadapi Sekretariat Badan Pengatur Jalan Tol dalam pelaksanaan kinerja pada tahun 2022, yaitu :

- a. Keterbatasan kuantitas dan kapabilitas SDM yang tidak sebanding dengan beban dan risiko kerja yang semakin besar seiring dengan semakin bertambahnya ruas jalan tol yang dikelola.
- b. Belum optimalnya penerapan SOP untuk pelaksanaan kinerja.
- c. Belum optimalnya fungsi *check and balance* dalam pelaksanaan amanah Peraturan Menteri PUPR No 20/PRT/M/2020 antara DJBM, DJPI, BPJT, dan BUJT sehingga masih sering terjadi miskoordinasi dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi.
- d. Perencanaan awal yang kurang sempurna sehingga pada saat pelaksanaan anggaran tidak perlu merevisi anggaran yang telah direncanakan di awal tahun.
- e. Adanya kebijakan Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) yang mewajibkan menggunakan produk dalam negeri untuk semua pengadaan barang dan jasa.

5.2. REKOMENDASI

- a. Pengembangan SDM perlu mendapat perhatian dan perlu diprogramkan penambahan SDM secara periodik baik perekrutan baru maupun mutasi dari Unit Kerja Lainnya sesuai kompetensi yang dibutuhkan;
- b. Perlu adanya peningkatan kemampuan maupun keterampilan dengan cara mengikut sertakan SDM dalam pengembangan kapasitas yang sesuai dengan kebutuhan pekerjaan;
- c. Perlu sinkronisasi pelaksanaan kinerja sesuai ketentuan pembagian wewenang yang ada;
- d. Perencanaan hendaknya dibuat dengan lebih matang dan komprehensif agar tidak banyak perubahan yang dibutuhkan selama dalam pelaksanaan anggaran. Perencanaan harus disesuaikan dengan kemampuan sumber daya manusia dan sarana yang dimiliki agar tidak terjadi deviasi yang begitu besar antara rencana dan realisasi;
- e. Pada awal perencanaan anggaran berikutnya harus dipertimbangkan permasalahan-permasalahan yang terjadi pada tahun berikutnya;
- f. Badan Pengatur Jalan Tol perlu mempertahankan komitmen dan meningkatkan kualitas penerapan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP).

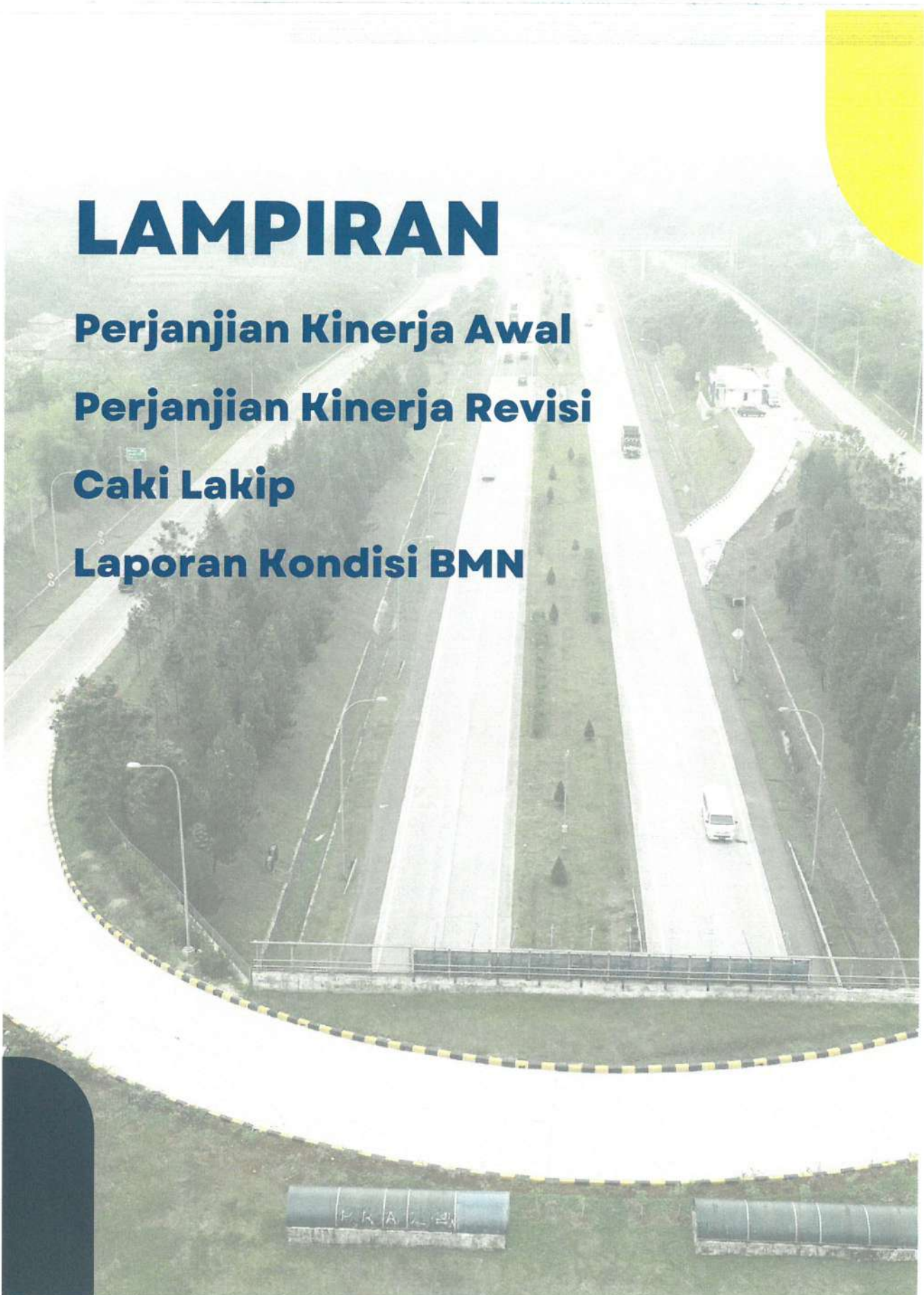
LAMPIRAN

Perjanjian Kinerja Awal

Perjanjian Kinerja Revisi

Caki Lakip

Laporan Kondisi BMN





PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertandatangan di bawah ini:

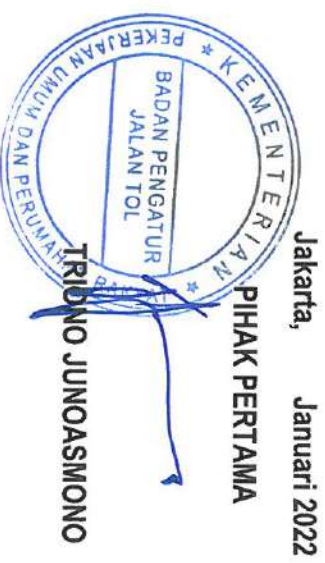
Nama : TRIONO JUNOASMONO
Jabatan : SEKRETARIS BADAN PENGATUR JALAN TOL

Selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**

Nama : HEDY RAHADIAN
Jabatan : DIREKTUR JENDERAL BINA MARGA

Selaku atasan langsung pihak pertama, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**

1. **PIHAK PERTAMA** pada tahun 2022 ini berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab **PIHAK PERTAMA**.
2. **PIHAK KEDUA** akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022
SEKRETARIAT BADAN PENGATUR JALAN TOL
DIREKTORAT JENDERAL BINA MARGA
KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT

Sasaran Program	Indikator Kinerja	Baseline 2021	Target 2022
Meningkatnya Kinerja Pelayanan Jalan Nasional	IKSP : Tingkat Aksesibilitas Jalan Nasional		
	IKK : Tingkat pencapaian pembangunan jalan bebas hambatan Panjang Jalan Tol yang beroperasi	35,48 %	100,00 %
	Rincian Output	123,00 Km	346,15 Km
ABF 010	Pengaturan, Pengusahaan, Pengawasan Jalan Tol	1,00 Rekomendasi Kebijakan	1,00 Rekomendasi Kebijakan

Kegiatan :

1. Pengaturan, Pengusahaan dan Pengawasan Jalan Tol
2. Dukungan Manajemen Ditjen Bina Marga

Direktur Jenderal Bina Marga,



Hedy Rahadian

Jakarta, Januari 2022

Sekretaris Badan Pengatur Jalan Tol,



Triyono Junoasmono

Anggaran

Rp 91.427.972.000

NO.	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR KINERJA/OUTPUT	VOLUME	KOMPONEN	SUB KOMPONEN	LOKASI	ANGGARAN (Dalam Ribuan Rp)	KETERANGAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
			1 Paket		Project Management Office Perencanaan Teknis dan BB Pengawasan Konstruksi Jalan Tol (MYC)	Jakarta Selatan	9.707.830.000	
			1 Paket		Pemeliharaan Sistem Informasi Monitoring Konstruksi BC Jalan Tol	Jakarta Selatan	1.747.658.000	
					Bidang Operasi dan Pemeliharaan	Jakarta Selatan	18.000.000.000	
			1 Paket		Project Management Office Monitoring Kinerja CA Operasi dan Pemeliharaan jalan Tol (MYC)	Jakarta Selatan	4.310.000.000	
			1 Paket		CB Inspeksi Keselamatan Jalan Tol Operasi	Jakarta Selatan	2.300.000.000	
			12 Bulan		Bantuan Teknis dan Monitoring Pelaksanaan Multi CC Lane Free Flow	Jakarta Selatan	3.000.000.000	
			1 Paket		Pemeliharaan Sistem Informasi Monitoring Operasi CD dan Pemeliharaan Jalan Tol	Jakarta Selatan	4.870.000.000	
			1 Paket		Pengawasan dan Pemantauan Operasional dan CE Pemeliharaan Jalan Tol Operasi	Jakarta Selatan	3.520.000.000	
					Bidang Investasi	Jakarta Selatan	21.800.000.000	
			1 Paket		Bantuan Dukung Persewaan dan Pengawasan DA Pengusahaan Jalan Tol	Jakarta Selatan	7.000.000.000	
			11 Bulan		DB Persiapan dan Pengawasan Investasi Jalan Tol	Jakarta Selatan	2.500.000.000	
			1 Paket		Penyusunan Studi AMDAL dan Analisa Dampak Lalu Lintas (ANDALALIN) Jalan Tol Cibadak-Pelabuhan DC Ratu	Jakarta Selatan	4.000.000.000	
			1 Paket		Penyusunan Studi AMDAL dan Analisa Dampak Lalu Lintas (ANDALALIN) dan Finalisasi Ijin Lingkungan DD Jalan Tol Samarinda-Bontang	Jakarta Selatan	2.700.000.000	
			1 Paket		Pengembangan dan Perubahan Sistem Informasi DE Monitoring Pemenuhan PPIJT	Jakarta Selatan	1.600.000.000	
			1 Paket		Penyusunan Studi Kelayakan Jalan Tol Suramadu- DF Tanjung Bulupandan	Jakarta Selatan	4.000.000.000	
			1 Paket		Bidang Pendanaan	Jakarta Selatan	4.551.796.000	
					EA Serah Terima Tanah Bebas	Jakarta Selatan	822.753.000	
			1 Paket		Monitoring Pembayaran Langsung dan Koordinasi EB Dalam Rangka Percepatan Pembangunan Jalan Tol	Jakarta Selatan	1.500.000.000	
			12 Bulan		EC Talangan Tanah	Jakarta Selatan	1.389.107.000	
			12 Bulan		ED Cost Of Fund	Jakarta Selatan	539.936.000	
			12 Bulan		EE Tenaga Ahli Hukum	Jakarta Selatan	100.000.000	
			4 Bulan		EF Tenaga Ahli Database	Jakarta Selatan	200.000.000	
	Meningkatnya Dukungan Manajemen dan Tugas Teknis Lainnya						14.451.689.000	
		Meningkatnya Dukungan Manajemen dan Tata Kelola					14.451.689.000	

NO.	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR KINERJAOUPUT	VOLUME	KOMPONEN	SUB KOMPONEN	LOKASI	ANGGARAN (Dalam Ribuan Rp)	KETERANGAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
		EAD 002	Layanan Sarana Internal	33 Unit	Satker Sekretariat Pengatur Jalan Tol		906.832.000	
				052	Pengadaan Alat Pengolah Data, Pencetak Data dan Komunikasi		184.912.000	
			15 Unit		Pengadaan Alat Pengolah Data, Pencetak Data dan Komunikasi	GA	184.912.000	
				053	Fasilitas Perkantoran	HA	721.920.000	
		EAA 005	Layanan Perkantoran	58 Unit			721.920.000	
			1 Layanan	Satker Sekretariat Pengatur Jalan Tol			13.544.837.000	
				001	Gaji dan Tunjangan		13.544.837.000	
			12 Bulan		A	Pembayaran Gaji dan Tunjangan	9.452.368.000	
			12 Bulan		FA	Pembayaran Gaji dan Tunjangan	3.788.628.000	
							5.663.742.000	
				002	Operasional dan pemeliharaan kantor		4.092.469.000	
			12 Bulan		FB	Operasional Perkantoran dan Pimpinan	1.372.362.000	
			12 Bulan		FC	Gaji Non PNS Pendukung dan Substantif	2.720.107.000	

NO.	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR KINERJA/RINCIAN OUTPUT	VOLUME AWAL (PK REVISI)	VOLUME REVISI (REVISI AKHIR)	VOLUME CAPAIAN	REAL FIS EMON (%)	KINERJA THD AWAL (%)	KINERJA THD AKHIR (%)	KOMPONEN	SUB KOMPONEN	LOKASI	ANGGARAN AWAL (Dalam Ribuan Rp)	ANGGARAN REVISI (Dalam Ribuan Rp)	ANGGARAN CAPAIAN (Dalam Ribuan Rp)	REALISASI THD AWAL (%)	REALISASI THD REVISI (%)	KET		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)=(5)*(7)/100	(7)	(8)=(6)/(4)*100	(9)=(6)/(5)*100	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)=(15)/(13)*100	(17)=(15)/(14)*100	(18)		
										Bidang Pengawasan dan Pemantauan									
									052	Pelaksanaan Pemantauan dan Evaluasi		15.423.859	15.423.859	14.712.066	95,39	95,39			
			1,00	Paket	1,00	Paket	1,00	Paket	100,00	100,00	100,00	CA	Project Management Office Monitoring Kinerja Operasi dan Pemeliharaan Jalan Tol	Jakarta Selatan	3.652.578	3.652.578	3.652.577	100,00	100,00
			1,00	Paket	1,00	Paket	1,00	Paket	100,00	100,00	100,00	CB	Inspeksi Keselamatan Jalan Tol Operasi	Jakarta Selatan	1.869.950	1.869.950	1.856.531	99,28	99,28
			1,00	Paket	1,00	Paket	1,00	Paket	100,00	100,00	100,00	CC	Bantuan Teknis dan Monitoring Pelaksanaan Multi Lane Free Flow	Jakarta Selatan	2.402.940	2.402.940	2.402.939	100,00	100,00
			1,00	Paket	1,00	Paket	1,00	Paket	100,00	100,00	100,00	CD	Pemeliharaan Sistem Informasi Monitoring Operasi dan Pemeliharaan Jalan Tol	Jakarta Selatan	4.542.989	4.542.989	3.937.525	86,67	86,67
			12,00	Bulan	12,00	Bulan	12,00	Bulan	100,00	100,00	100,00	CE	Pengawasan dan Pemantauan Operasional dan Pemeliharaan Jalan Tol Operasi	Jakarta Selatan	2.955.402	2.955.402	2.862.494	96,86	96,86
											Bidang Investasi								
									052	Pelaksanaan Pemantauan dan Evaluasi		35.877.905	35.877.905	35.101.303	97,84	97,84			
			1,00	Paket	1,00	Paket	1,00	Paket	100,00	100,00	100,00	DA	Bantuan Dukungan Persiapan dan Pengawasan Pengusahaan Jalan Tol	Jakarta Selatan	5.870.069	5.870.069	5.870.069	100,00	100,00
			12,00	Bulan	12,00	Bulan	12,00	Bulan	100,00	100,00	100,00	DB	Persiapan dan Pengawasan Investasi Jalan Tol	Jakarta Selatan	1.921.771	1.921.771	1.637.974	85,23	85,23
			1,00	Paket	1,00	Paket	1,00	Paket	100,00	100,00	100,00	DC	Penyusunan Studi AMDAL dan Analisa Dampak Lalu Lintas (ANDALALIN) Jalan Tol Cibadak-Pelabuhan Ratu	Jakarta Selatan	3.390.385	3.390.385	3.390.384	100,00	100,00
			1,00	Paket	1,00	Paket	1,00	Paket	100,00	100,00	100,00	DD	Penyusunan Dokumen Analisa Dampak Lalu Lintas (ANDALALIN) dan Finalisasi Ijin Lingkungan Jalan Tol Samarinda-Bontang	Jakarta Selatan	2.182.869	2.182.869	2.182.868	100,00	100,00
			1,00	Paket	1,00	Paket	1,00	Paket	100,00	100,00	100,00	DE	Pengembangan dan Pembaruan Sistem Informasi Monitoring Pemenuhan PPJT	Jakarta Selatan	1.290.753	1.290.753	1.290.752	100,00	100,00
			1,00	Paket	1,00	Paket	1,00	Paket	100,00	100,00	100,00	DG	Penyusunan Studi Kelayakan Jalan Tol Akses menuju Ibu Kota Negara Dari Kota Balikpapan	Jakarta Selatan	7.356.964	7.356.964	7.356.963	100,00	100,00
			1,00	Paket	1,00	Paket	1,00	Paket	100,00	100,00	100,00	DH	Penyusunan Studi Kelayakan Jalan Tol Bandar Udara Supadio-Pelabuhan Kijing	Jakarta Selatan	8.169.989	8.169.989	8.169.989	100,00	100,00
			1,00	Paket	1,00	Paket	1,00	Paket	100,00	100,00	100,00	DI	Penyusunan Studi AMDAL dan Analisa Dampak Lalu Lintas (ANDALALIN) Jalan Tol Bandar Udara Supadio-Pelabuhan Kijing	Jakarta Selatan	1.210.965	1.210.965	1.136.474	93,85	93,85
			1,00	Paket	1,00	Paket	1,00	Paket	100,00	100,00	100,00	DJ	Penyusunan Studi Kelayakan dan Desain Awal Jalan Tol Lingkar Timur-Selatan Kota Surakarta	Jakarta Selatan	4.484.140	4.484.140	4.065.830	90,67	90,67
											Bidang Pendanaan								
									052	Pelaksanaan Pemantauan dan Evaluasi		188.538.664	188.538.664	187.899.716	99,66	99,66			
			1,00	Kegiatan	1,00	Kegiatan	1,00	Kegiatan	100,00	100,00	0,00	EA	Rekonsiliasi Stimulus Dalam Pengusahaan Jalan Tol Yang Terdampak pandemi Covid-19	Jakarta Selatan	131.944	131.944	69.168	52,42	0,04
			1,00	Laporan	1,00	Laporan	1,00	Laporan	100,00	100,00	100,00	EB	Monitoring Pembayaran Langsung dan Koordinasi Dalam Rangka Percepatan Pembangunan Jalan Tol	Jakarta Selatan	1.075.302	1.075.302	893.368	83,08	83,08

NO.	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR KINERJA/RINCIAN OUTPUT	VOLUME AWAL (PK REVISI)	VOLUME REVISI (REVISI AKHIR)	VOLUME CAPAIAN	REAL FIS EMON (%)	KINERJA THD AWAL (%)	KINERJA THD AKHIR (%)	KOMPONEN	SUB KOMPONEN	LOKASI	ANGGARAN AWAL (Dalam Ribuan Rp)	ANGGARAN REVISI (Dalam Ribuan Rp)	ANGGARAN CAPAIAN (Dalam Ribuan Rp)	REALISASI THD AWAL (%)	REALISASI THD REVISI (%)	KET
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)=(5)*(7)/100	(7)	(8)=(6)/(4)*100	(9)=(6)/(5)*100	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)=(15)/(13)*100	(17)=(15)/(14)*100	(18)
			1,00 Laporan	1,00 Laporan	1,00 Laporan	100,00	100,00	100,00		Pelaksanaan Checklist Kelengkapan Dokumen Dana Talangan Tanah	Jakarta Selatan	937.396	937.396	706.487	75,37	75,37	
			1,00 Laporan	1,00 Laporan	1,00 Laporan	100,00	100,00	100,00		ED Cost Of Fund	Jakarta Selatan	556.800	556.800	438.426	78,74	78,74	
			1,00 Laporan	1,00 Laporan	1,00 Laporan	100,00	100,00	100,00		EE Tenaga Ahli Hukum	Jakarta Selatan	100.000	100.000	99.825	99,83	99,83	
			1,00 Laporan	1,00 Laporan	1,00 Laporan	100,00	100,00	100,00		EF Tenaga Ahli Database	Jakarta Selatan	200.000	200.000	155.220	77,61	77,61	
			1,00 Kegiatan	1,00 Kegiatan	1,00 Kegiatan	100,00	100,00	100,00		XX Rasionalisasi Tarif Jalan Tol Solo-Ngawi	Jakarta Selatan	185.537.222	185.537.222	185.537.222	100,00	100,00	
	Meningkatnya Dukungan Manajemen dan Tugas Teknis Lainnya											14.728.036	14.728.036	14.369.418	97,57	97,57	
		Tingkat Dukungan Manajemen Kementerian PUPR										14.728.036	14.728.036	14.369.418	97,57	97,57	

LAPORAN KONDISI BARANG

UNTUK SEMUA KONDISI

PER DESEMBER 2022

KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT

DITJEN BINA MARGA

SATKER KONSOLIDASI KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT

NAMA UAKPB : SEKRETARIAT PENGATUR JALAN TOL

KODE UAKPB : 033.04.0199.498721

Tanggal : 13/01/2023 09.07.04

Halaman : 1 dari 41

Kode Lap : LKBT-PKPB1

No.	Sub-Sub Kelompok Barang		N U P	Satuan	Harga Perolehan	Kondisi		
	Kode Barang	Nama Barang				Baik	Rusak Ringan	Rusak Berat
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	3.02.01.01.002	Jeep	1	Unit	846,462,000	2	0	0
2			2	Unit	616,100,000	2	0	0
3			3	Unit	264,100,000	1	0	0
4			4	Unit	320,122,400	1	0	0
<i>Jumlah Jeep</i>					2,046,784,400	6	0	0
1	3.02.01.01.999	Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan Lainnya	1	dummy	148,600,000	0	0	1
2			2	dummy	102,200,000	0	0	1
3			3	dummy	165,450,000	1	0	0
<i>Jumlah Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan Lainnya</i>					416,250,000	1	0	2
1	3.02.01.02.003	Mini Bus (Penumpang 14 Orang Kebawah)	1	Unit	433,790,500	2	0	0
2			2	Unit	433,790,500	2	0	0
3			3	Unit	481,020,500	2	0	0
4			4	Unit	481,020,500	2	0	0
5			6	Unit	277,000,000	1	0	0
6			7	Unit	120,000,000	1	0	0
7			8	Unit	199,990,000	0	1	0
<i>Jumlah Mini Bus (Penumpang 14 Orang Kebawah)</i>					2,426,612,000	10	1	0
1	3.02.01.04.001	Sepeda Motor	1	Unit	28,016,000	2	0	0
2			2	Unit	27,699,000	2	0	0
3			3	Unit	32,647,000	2	0	0
4			4	Unit	29,181,000	2	0	0
5			5	Unit	28,198,559	2	0	0
6			6	Unit	21,021,000	1	0	0
7			7	Unit	15,652,500	1	0	0
8			8	Unit	16,168,200	1	0	0
9			9	Unit	16,700,000	1	0	0
10			10	Unit	16,700,000	1	0	0

LAPORAN KONDISI BARANG

UNTUK SEMUA KONDISI

PER DESEMBER 2022

KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT

DITJEN BINA MARGA

SATKER KONSOLIDASI KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT

NAMA UAKPB : SEKRETARIAT PENGATUR JALAN TOL

KODE UAKPB : 033.04.0199.498721

Tanggal : 13/01/2023 09.07.04

Halaman : 2 dari 41

Kode Lap : LKBT-PKPB1

No.	Sub-Sub Kelompok Barang		N U P	Satuan	Harga Perolehan	Kondisi		
	Kode Barang	Nama Barang				Baik	Rusak Ringan	Rusak Berat
1	2	3	4	5	6	7	8	9
11			11	Unit	21,900,000	1	0	0
<i>Jumlah Sepeda Motor</i>					253,883,259	16	0	0
1	3.02.02.01.004	Lori Dorong	1	Unit	3,080,000	1	0	0
<i>Jumlah Lori Dorong</i>					3,080,000	1	0	0
1	3.03.03.08.028	Tool Set	1	Buah	445,500	1	0	0
2			2	Buah	445,500	1	0	0
<i>Jumlah Tool Set</i>					891,000	2	0	0
1	3.03.03.09.999	Alat Ukur Lainnya	1	dummy	204,600,000	1	0	0
2			2	dummy	170,500,000	1	0	0
3			3	dummy	2,596,000	1	0	0
<i>Jumlah Alat Ukur Lainnya</i>					377,696,000	3	0	0
1	3.04.01.04.003	Rak-Rak Penyimpan	1	Buah	5,940,000	1	0	0
<i>Jumlah Rak-Rak Penyimpan</i>					5,940,000	1	0	0
1	3.05.01.01.008	Mesin Ketik Elektronik/Selektrik	1	Buah	7,740,000	2	0	0
2			2	Buah	3,450,000	1	0	0
<i>Jumlah Mesin Ketik Elektronik/Selektrik</i>					11,190,000	3	0	0
1	3.05.01.02.007	Mesin Penghitung Uang	1	Buah	4,835,000	1	0	0
<i>Jumlah Mesin Penghitung Uang</i>					4,835,000	1	0	0
1	3.05.01.04.001	Lemari Besi/Metal	1	Buah	9,494,046	2	0	0
2			2	Buah	32,594,047	2	0	0
3			3	Buah	7,294,045	2	0	0
4			4	Buah	10,594,045	2	0	0
5			5	Buah	5,644,046	2	0	0
6			6	Buah	5,644,045	2	0	0
7			7	Buah	4,544,046	2	0	0
8			8	Buah	6,400,000	2	0	0

LAPORAN KONDISI BARANG

UNTUK SEMUA KONDISI

PER DESEMBER 2022

KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT

DITJEN BINA MARGA

SATKER KONSOLIDASI KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT

NAMA UAKPB : SEKRETARIAT PENGATUR JALAN TOL

KODE UAKPB : 033.04.0199.498721

Tanggal : 13/01/2023 09.07.04

Halaman : 3 dari 41

Kode Lap : LKBT-PKPB1

No.	Sub-Sub Kelompok Barang		N U P	Satuan	Harga Perolehan	Kondisi		
	Kode Barang	Nama Barang				Baik	Rusak Ringan	Rusak Berat
1	2	3	4	5	6	7	8	9
9			9	Buah	6,400,000	2	0	0
10			10	Buah	6,400,000	2	0	0
11			11	Buah	6,400,000	2	0	0
12			12	Buah	6,400,000	2	0	0
13			13	Buah	5,450,000	2	0	0
14			14	Buah	5,450,000	2	0	0
15			15	Buah	5,450,000	2	0	0
16			16	Buah	5,710,500	2	0	0
17			17	Buah	5,710,500	2	0	0
18			18	Buah	5,710,500	2	0	0
19			19	Buah	6,558,750	2	0	0
20			20	Buah	6,558,750	2	0	0
21			21	Buah	6,558,750	2	0	0
22			22	Buah	5,458,750	2	0	0
23			23	Buah	5,458,750	2	0	0
24			24	Buah	3,280,000	2	0	0
25			25	Buah	3,280,000	2	0	0
26			26	Buah	550,000	1	0	0
27			27	Buah	550,000	1	0	0
28			28	Buah	550,000	1	0	0
29			29	Buah	550,000	1	0	0
30			30	Buah	550,000	1	0	0
31			31	Buah	550,000	1	0	0
32			32	Buah	550,000	1	0	0
33			33	Buah	550,000	1	0	0
34			34	Buah	3,262,600	1	0	0
35			35	Buah	3,262,600	1	0	0

LAPORAN KONDISI BARANG

UNTUK SEMUA KONDISI

PER DESEMBER 2022

KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT

DITJEN BINA MARGA

SATKER KONSOLIDASI KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT

NAMA UAKPB : SEKRETARIAT PENGATUR JALAN TOL

KODE UAKPB : 033.04.0199.498721

Tanggal : 13/01/2023 09.07.04

Halaman : 4 dari 41

Kode Lap : LKBT-PKPB1

No.	Sub-Sub Kelompok Barang		N U P	Satuan	Harga Perolehan	Kondisi		
	Kode Barang	Nama Barang				Baik	Rusak Ringan	Rusak Berat
1	2	3	4	5	6	7	8	9
36			36	Buah	3,262,600	1	0	0
37			37	Buah	3,262,600	1	0	0
38			38	Buah	3,262,600	1	0	0
39			39	Buah	3,262,600	1	0	0
40			40	Buah	3,262,600	1	0	0
41			41	Buah	3,262,600	1	0	0
42			42	Buah	2,119,700	1	0	0
43			43	Buah	2,119,700	1	0	0
44			44	Buah	11,825,000	1	0	0
45			45	Buah	18,590,000	1	0	0
46			46	Buah	4,427,500	1	0	0
47			47	Buah	4,427,500	1	0	0
48			48	Buah	4,427,500	1	0	0
49			49	Buah	4,427,500	1	0	0
50			50	Buah	4,427,500	1	0	0
51			51	Buah	4,427,500	1	0	0
52			52	Buah	4,427,500	1	0	0
53			53	Buah	4,427,500	1	0	0
54			54	Buah	3,547,500	1	0	0
55			55	Buah	3,547,500	1	0	0
56			56	Buah	3,547,500	1	0	0
57			57	Buah	3,547,500	1	0	0
58			58	Buah	3,960,000	1	0	0
59			59	Buah	3,960,000	1	0	0
60			60	Buah	3,960,000	1	0	0
61			61	Buah	3,245,000	1	0	0
62			62	Buah	3,245,000	1	0	0

LAPORAN KONDISI BARANG

UNTUK SEMUA KONDISI

PER DESEMBER 2022

KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT

DITJEN BINA MARGA

SATKER KONSOLIDASI KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT

NAMA UAKPB : SEKRETARIAT PENGATUR JALAN TOL

KODE UAKPB : 033.04.0199.498721

Tanggal : 13/01/2023 09.07.04

Halaman : 5 dari 41

Kode Lap : LKBT-PKPB1

No.	Sub-Sub Kelompok Barang		N U P	Satuan	Harga Perolehan	Kondisi		
	Kode Barang	Nama Barang				Baik	Rusak Ringan	Rusak Berat
1	2	3	4	5	6	7	8	9
63			63	Buah	3,245,000	1	0	0
64			64	Buah	3,245,000	1	0	0
65			65	Buah	3,245,000	1	0	0
66			66	Buah	2,035,000	1	0	0
67			67	Buah	4,180,000	1	0	0
68			68	Buah	3,630,000	1	0	0
69			69	Buah	3,630,000	1	0	0
70			70	Buah	3,630,000	1	0	0
71			71	Buah	3,630,000	1	0	0
72			72	Buah	3,630,000	1	0	0
73			73	Buah	4,015,000	1	0	0
74			74	Buah	4,015,000	1	0	0
75			75	Buah	4,015,000	1	0	0
76			76	Buah	4,015,000	1	0	0
77			77	Buah	4,015,000	1	0	0
78			78	Buah	3,025,000	1	0	0
79			79	Buah	3,157,000	1	0	0
80			80	Buah	3,157,000	1	0	0
81			81	Buah	3,157,000	1	0	0
82			82	Buah	3,410,000	1	0	0
83			83	Buah	3,410,000	1	0	0
84			84	Buah	3,410,000	1	0	0
85			85	Buah	3,410,000	1	0	0
86			86	Buah	3,410,000	1	0	0
87			87	Buah	5,192,000	1	0	0
88			88	Buah	5,192,000	1	0	0
89			89	Buah	5,192,000	1	0	0

LAPORAN KONDISI BARANG

UNTUK SEMUA KONDISI

PER DESEMBER 2022

KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT

DITJEN BINA MARGA

SATKER KONSOLIDASI KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT

NAMA UAKPB : SEKRETARIAT PENGATUR JALAN TOL

KODE UAKPB : 033.04.0199.498721

Tanggal : 13/01/2023 09.07.04

Halaman : 6 dari 41

Kode Lap : LKBT-PKPB1

No.	Sub-Sub Kelompok Barang		N U P	Satuan	Harga Perolehan	Kondisi		
	Kode Barang	Nama Barang				Baik	Rusak Ringan	Rusak Berat
1	2	3	4	5	6	7	8	9
90			90	Buah	3,388,000	1	0	0
91			91	Buah	3,388,000	1	0	0
92			92	Buah	3,388,000	1	0	0
93			93	Buah	3,465,000	1	0	0
94			94	Buah	3,465,000	1	0	0
95			95	Buah	3,850,000	1	0	0
96			96	Buah	2,174,250	1	0	0
97			97	Buah	2,145,000	1	0	0
98			98	Buah	2,090,000	1	0	0
99			99	Buah	4,438,500	1	0	0
<i>Jumlah Lemari Besi/Metal</i>					442,667,520	124	0	0
1	3.05.01.04.002	Lemari Kayu	1	Buah	7,260,000	1	0	0
2			2	Buah	5,390,000	1	0	0
3			3	Buah	2,722,500	1	0	0
4			4	Buah	3,197,700	1	0	0
5			5	Buah	3,197,700	1	0	0
6			6	Buah	14,725,700	1	0	0
7			7	Buah	17,205,000	1	0	0
<i>Jumlah Lemari Kayu</i>					53,698,600	7	0	0
1	3.05.01.04.003	Rak Besi	1	Buah	3,582,500	2	0	0
2			2	Buah	3,582,500	2	0	0
3			3	Buah	3,582,500	2	0	0
4			4	Buah	3,582,500	2	0	0
5			5	Buah	3,582,500	2	0	0
6			6	Buah	3,582,500	2	0	0
7			7	Buah	3,582,500	2	0	0
8			8	Buah	1,960,000	1	0	0

LAPORAN KONDISI BARANG

UNTUK SEMUA KONDISI

PER DESEMBER 2022

KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT

DITJEN BINA MARGA

SATKER KONSOLIDASI KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT

NAMA UAKPB : SEKRETARIAT PENGATUR JALAN TOL

KODE UAKPB : 033.04.0199.498721

Tanggal : 13/01/2023 09.07.04

Halaman : 7 dari 41

Kode Lap : LKBT-PKPB1

No.	Sub-Sub Kelompok Barang		N U P	Satuan	Harga Perolehan	Kondisi		
	Kode Barang	Nama Barang				Baik	Rusak Ringan	Rusak Berat
1	2	3	4	5	6	7	8	9
9			9	Buah	1,960,000	1	0	0
10			10	Buah	1,960,000	1	0	0
11			11	Buah	2,233,750	1	0	0
12			12	Buah	2,233,750	1	0	0
13			13	Buah	2,233,750	1	0	0
14			14	Buah	2,233,750	1	0	0
<i>Jumlah Rak Besi</i>					39,892,500	21	0	0
1	3.05.01.04.004	Rak Kayu	1	Buah	2,640,000	1	0	0
<i>Jumlah Rak Kayu</i>					2,640,000	1	0	0
1	3.05.01.04.005	Filing Cabinet Besi	1	Buah	5,231,600	2	0	0
2			2	Buah	5,231,600	2	0	0
3			3	Buah	4,357,100	2	0	0
4			4	Buah	5,588,000	2	0	0
5			5	Buah	4,736,000	2	0	0
6			6	Buah	4,736,000	2	0	0
7			7	Buah	4,736,000	2	0	0
8			8	Buah	4,736,000	2	0	0
9			9	Buah	4,736,000	2	0	0
10			10	Buah	5,176,000	2	0	0
11			11	Buah	7,053,000	2	0	0
12			12	Buah	6,566,250	2	0	0
13			13	Buah	3,500,000	1	0	0
14			14	Buah	3,250,000	1	0	0
15			15	Buah	3,250,000	1	0	0
16			16	Buah	3,250,000	1	0	0
17			17	Buah	3,485,500	1	0	0
18			18	Buah	3,485,500	1	0	0

LAPORAN KONDISI BARANG

UNTUK SEMUA KONDISI

PER DESEMBER 2022

KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT

DITJEN BINA MARGA

SATKER KONSOLIDASI KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT

NAMA UAKPB : SEKRETARIAT PENGATUR JALAN TOL

KODE UAKPB : 033.04.0199.498721

Tanggal : 13/01/2023 09.07.04

Halaman : 8 dari 41

Kode Lap : LKBT-PKPB1

No.	Sub-Sub Kelompok Barang		N U P	Satuan	Harga Perolehan	Kondisi		
	Kode Barang	Nama Barang				Baik	Rusak Ringan	Rusak Berat
1	2	3	4	5	6	7	8	9
19			19	Buah	3,485,500	1	0	0
20			20	Buah	3,485,500	1	0	0
21			21	Buah	3,485,500	1	0	0
22			22	Buah	3,485,500	1	0	0
23			23	Buah	3,485,500	1	0	0
24			24	Buah	3,485,500	1	0	0
25			25	Buah	3,485,500	1	0	0
26			26	Buah	3,485,500	1	0	0
27			27	Buah	2,160,000	1	0	0
28			28	Buah	2,160,000	1	0	0
29			29	Buah	2,160,000	1	0	0
30			30	Buah	2,405,000	1	0	0
31			31	Buah	2,405,000	1	0	0
32			32	Buah	2,405,000	1	0	0
33			33	Buah	2,405,000	1	0	0
<i>Jumlah Filing Cabinet Besi</i>					127,088,550	45	0	0
1	3.05.01.04.006	Filing Cabinet Kayu	1	Buah	1,886,500	1	0	0
2			2	Buah	1,886,500	1	0	0
3			3	Buah	1,886,500	1	0	0
4			4	Buah	1,886,500	1	0	0
<i>Jumlah Filing Cabinet Kayu</i>					7,546,000	4	0	0
1	3.05.01.04.007	Brandkas	1	Buah	27,975,000	2	0	0
2			2	Buah	15,875,000	1	0	0
3			3	Buah	17,800,000	1	0	0
4			4	Buah	14,960,000	1	0	0
<i>Jumlah Brandkas</i>					76,610,000	5	0	0
1	3.05.01.04.011	Rotary Filling	1	Buah	14,300,000	1	0	0

LAPORAN KONDISI BARANG

UNTUK SEMUA KONDISI

PER DESEMBER 2022

KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT

DITJEN BINA MARGA

SATKER KONSOLIDASI KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT

NAMA UAKPB : SEKRETARIAT PENGATUR JALAN TOL

KODE UAKPB : 033.04.0199.498721

Tanggal : 13/01/2023 09.07.04

Halaman : 9 dari 41

Kode Lap : LKBT-PKPB1

No.	Sub-Sub Kelompok Barang		N U P	Satuan	Harga Perolehan	Kondisi		
	Kode Barang	Nama Barang				Baik	Rusak Ringan	Rusak Berat
1	2	3	4	5	6	7	8	9
<i>Jumlah Rotary Filling</i>					14,300,000	1	0	0
1	3.05.01.04.024	Laci Box	1	Buah	1,210,000	1	0	0
<i>Jumlah Laci Box</i>					1,210,000	1	0	0
1	3.05.01.04.025	Lemari Katalog	1	Buah	6,325,000	1	0	0
<i>Jumlah Lemari Katalog</i>					6,325,000	1	0	0
1	3.05.01.05.007	CCTV - Camera Control Television System	1	Buah	19,690,000	1	0	0
<i>Jumlah CCTV - Camera Control Television System</i>					19,690,000	1	0	0
1	3.05.01.05.010	White Board	1	Buah	2,310,000	1	0	0
<i>Jumlah White Board</i>					2,310,000	1	0	0
1	3.05.01.05.013	Copy Board/Elektric White Board	1	Buah	23,877,975	1	0	0
2			2	Buah	21,076,000	1	0	0
<i>Jumlah Copy Board/Elektric White Board</i>					44,953,975	2	0	0
1	3.05.01.05.015	Alat Penghancur Kertas	1	Buah	7,235,000	2	0	0
2			2	Buah	7,235,000	2	0	0
3			3	Buah	4,925,000	1	0	0
4			4	Buah	4,500,000	1	0	0
5			5	Buah	5,200,000	1	0	0
<i>Jumlah Alat Penghancur Kertas</i>					29,095,000	7	0	0
1	3.05.01.05.017	Mesin Absensi	1	Buah	5,995,000	1	0	0
<i>Jumlah Mesin Absensi</i>					5,995,000	1	0	0
1	3.05.01.05.024	Alat Pemotong Kertas	1	Buah	2,060,000	1	0	0
<i>Jumlah Alat Pemotong Kertas</i>					2,060,000	1	0	0
1	3.05.01.05.026	Perforator Besar	1	Buah	19,998,750	1	0	0
<i>Jumlah Perforator Besar</i>					19,998,750	1	0	0
1	3.05.01.05.048	LCD Projector/Infocus	1	Buah	40,294,239	2	0	0
2			2	Buah	38,407,800	2	0	0

LAPORAN KONDISI BARANG

UNTUK SEMUA KONDISI

PER DESEMBER 2022

KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT

DITJEN BINA MARGA

SATKER KONSOLIDASI KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT

NAMA UAKPB : SEKRETARIAT PENGATUR JALAN TOL

KODE UAKPB : 033.04.0199.498721

Tanggal : 13/01/2023 09.07.04

Halaman : 10 dari 41

Kode Lap : LKBT-PKPB1

No.	Sub-Sub Kelompok Barang		N U P	Satuan	Harga Perolehan	Kondisi		
	Kode Barang	Nama Barang				Baik	Rusak Ringan	Rusak Berat
1	2	3	4	5	6	7	8	9
3			3	Buah	42,309,500	2	0	0
4			4	Buah	31,046,800	2	0	0
5			5	Buah	20,850,500	2	0	0
6			6	Buah	12,298,000	1	0	0
7			7	Buah	6,780,000	1	0	0
8			8	Buah	6,780,000	1	0	0
<i>Jumlah LCD Projector/Infocus</i>					198,766,839	13	0	0
1	3.05.01.05.052	Alat Perekam Suara (Voice Pen)	1	Buah	3,287,350	1	0	0
2			2	Buah	3,287,350	1	0	0
3			3	Buah	975,000	1	0	0
<i>Jumlah Alat Perekam Suara (Voice Pen)</i>					7,549,700	3	0	0
1	3.05.01.05.058	Focusing Screen/Layar LCD Projector	1	Buah	13,020,700	2	0	0
2			2	Buah	6,805,700	1	0	0
3			3	Buah	22,990,000	1	0	0
<i>Jumlah Focusing Screen/Layar LCD Projector</i>					42,816,400	4	0	0
1	3.05.01.99.999	Alat Kantor Lainnya	1	dummy	4,098,500	2	0	0
2			2	dummy	797,500	1	0	0
<i>Jumlah Alat Kantor Lainnya</i>					4,896,000	3	0	0
1	3.05.02.01.002	Meja Kerja Kayu	1	Buah	10,377,085	2	0	0
2			2	Buah	9,552,085	2	0	0
3			3	Buah	4,596,585	2	0	0
4			4	Buah	4,596,584	2	0	0
5			5	Buah	4,596,587	2	0	0
6			6	Buah	4,596,587	2	0	0
7			7	Buah	4,877,087	2	0	0
8			8	Buah	8,098,000	2	0	0

LAPORAN KONDISI BARANG

UNTUK SEMUA KONDISI

PER DESEMBER 2022

KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT

DITJEN BINA MARGA

SATKER KONSOLIDASI KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT

NAMA UAKPB : SEKRETARIAT PENGATUR JALAN TOL

KODE UAKPB : 033.04.0199.498721

Tanggal : 13/01/2023 09.07.04

Halaman : 11 dari 41

Kode Lap : LKBT-PKPB1

No.	Sub-Sub Kelompok Barang		N U P	Satuan	Harga Perolehan	Kondisi		
	Kode Barang	Nama Barang				Baik	Rusak Ringan	Rusak Berat
1	2	3	4	5	6	7	8	9
9			9	Buah	4,348,000	2	0	0
10			10	Buah	4,348,000	2	0	0
11			11	Buah	4,348,000	2	0	0
12			12	Buah	4,348,000	2	0	0
13			13	Buah	4,348,000	2	0	0
14			14	Buah	4,573,000	2	0	0
15			15	Buah	4,573,000	2	0	0
16			16	Buah	5,198,000	2	0	0
17			17	Buah	5,198,000	2	0	0
18			18	Buah	5,660,000	2	0	0
19			19	Buah	9,182,500	2	0	0
20			20	Buah	2,907,775	1	0	0
21			21	Buah	2,907,775	1	0	0
22			22	Buah	2,907,775	1	0	0
23			23	Buah	2,907,775	1	0	0
24			24	Buah	2,907,775	1	0	0
25			25	Buah	2,907,775	1	0	0
26			26	Buah	1,820,000	1	0	0
27			27	Buah	1,820,000	1	0	0
28			28	Buah	3,276,000	1	0	0
<i>Jumlah Meja Kerja Kayu</i>					131,777,750	47	0	0
1	3.05.02.01.003	Kursi Besi/Metal	1	Buah	2,230,105	2	0	0
2			2	Buah	2,230,105	2	0	0
3			3	Buah	2,230,105	2	0	0
4			4	Buah	2,230,105	2	0	0
5			5	Buah	2,230,105	2	0	0
6			6	Buah	2,230,105	2	0	0

LAPORAN KONDISI BARANG

UNTUK SEMUA KONDISI

PER DESEMBER 2022

KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT

DITJEN BINA MARGA

SATKER KONSOLIDASI KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT

NAMA UAKPB : SEKRETARIAT PENGATUR JALAN TOL

KODE UAKPB : 033.04.0199.498721

Tanggal : 13/01/2023 09.07.04

Halaman : 12 dari 41

Kode Lap : LKBT-PKPB1

No.	Sub-Sub Kelompok Barang		N U P	Satuan	Harga Perolehan	Kondisi		
	Kode Barang	Nama Barang				Baik	Rusak Ringan	Rusak Berat
1	2	3	4	5	6	7	8	9
7			7	Buah	2,230,105	2	0	0
8			8	Buah	2,230,105	2	0	0
9			9	Buah	2,230,105	2	0	0
10			10	Buah	2,230,105	2	0	0
11			11	Buah	1,845,105	2	0	0
12			12	Buah	1,845,105	2	0	0
13			13	Buah	1,845,105	2	0	0
14			14	Buah	1,845,105	2	0	0
15			15	Buah	1,845,106	2	0	0
16			16	Buah	1,845,106	2	0	0
17			17	Buah	1,845,106	2	0	0
18			18	Buah	1,845,106	2	0	0
19			19	Buah	1,845,106	2	0	0
20			20	Buah	1,860,000	2	0	0
21			21	Buah	1,860,000	2	0	0
22			22	Buah	1,860,000	2	0	0
23			23	Buah	1,860,000	2	0	0
24			24	Buah	1,860,000	2	0	0
25			25	Buah	1,860,000	2	0	0
26			26	Buah	3,290,000	2	0	0
27			27	Buah	3,840,000	2	0	0
28			28	Buah	4,225,000	2	0	0
29			29	Buah	4,225,000	2	0	0
30			30	Buah	4,225,000	2	0	0
31			31	Buah	4,385,775	2	0	0
32			32	Buah	4,385,775	2	0	0
33			33	Buah	4,385,775	2	0	0

LAPORAN KONDISI BARANG

UNTUK SEMUA KONDISI

PER DESEMBER 2022

KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT

DITJEN BINA MARGA

SATKER KONSOLIDASI KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT

NAMA UAKPB : SEKRETARIAT PENGATUR JALAN TOL

KODE UAKPB : 033.04.0199.498721

Tanggal : 13/01/2023 09.07.04

Halaman : 13 dari 41

Kode Lap : LKBT-PKPB1

No.	Sub-Sub Kelompok Barang		N U P	Satuan	Harga Perolehan	Kondisi		
	Kode Barang	Nama Barang				Baik	Rusak Ringan	Rusak Berat
1	2	3	4	5	6	7	8	9
34			34	Buah	4,385,775	2	0	0
35			35	Buah	4,385,775	2	0	0
36			36	Buah	6,200,775	2	0	0
37			37	Buah	5,489,000	2	0	0
38			38	Buah	2,981,000	2	0	0
39			39	Buah	2,981,000	2	0	0
40			40	Buah	2,981,000	2	0	0
41			41	Buah	2,981,000	2	0	0
42			42	Buah	2,981,000	2	0	0
43			43	Buah	2,981,000	2	0	0
44			44	Buah	2,981,000	2	0	0
45			45	Buah	2,981,000	2	0	0
46			46	Buah	2,981,000	2	0	0
47			47	Buah	2,981,000	2	0	0
48			48	Buah	2,981,000	2	0	0
49			49	Buah	2,981,000	2	0	0
50			50	Buah	2,981,000	2	0	0
51			51	Buah	2,981,000	2	0	0
52			52	Buah	2,981,000	2	0	0
53			53	Buah	2,981,000	2	0	0
54			54	Buah	2,981,000	2	0	0
55			55	Buah	2,981,000	2	0	0
56			56	Buah	2,981,000	2	0	0
57			57	Buah	1,693,000	2	0	0
58			58	Buah	1,726,000	2	0	0
59			59	Buah	1,726,000	2	0	0
60			60	Buah	1,726,000	2	0	0

LAPORAN KONDISI BARANG

UNTUK SEMUA KONDISI

PER DESEMBER 2022

KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT

DITJEN BINA MARGA

SATKER KONSOLIDASI KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT

NAMA UAKPB : SEKRETARIAT PENGATUR JALAN TOL

KODE UAKPB : 033.04.0199.498721

Tanggal : 13/01/2023 09.07.04

Halaman : 14 dari 41

Kode Lap : LKBT-PKPB1

No.	Sub-Sub Kelompok Barang		N U P	Satuan	Harga Perolehan	Kondisi		
	Kode Barang	Nama Barang				Baik	Rusak Ringan	Rusak Berat
1	2	3	4	5	6	7	8	9
61			61	Buah	1,726,000	2	0	0
62			62	Buah	1,726,000	2	0	0
63			63	Buah	1,726,000	2	0	0
64			64	Buah	1,726,000	2	0	0
65			65	Buah	1,726,000	2	0	0
66			66	Buah	3,431,000	2	0	0
67			67	Buah	5,996,000	2	0	0
68			68	Buah	5,182,000	2	0	0
69			69	Buah	5,182,000	2	0	0
70			70	Buah	2,266,000	1	0	0
71			71	Buah	2,266,000	1	0	0
72			72	Buah	3,190,000	1	0	0
73			73	Buah	3,190,000	1	0	0
74			74	Buah	1,265,000	1	0	0
75			75	Buah	1,265,000	1	0	0
76			76	Buah	1,265,000	1	0	0
77			77	Buah	1,265,000	1	0	0
78			78	Buah	1,265,000	1	0	0
79			79	Buah	1,265,000	1	0	0
80			80	Buah	1,265,000	1	0	0
81			81	Buah	1,265,000	1	0	0
82			82	Buah	1,265,000	1	0	0
83			83	Buah	1,265,000	1	0	0
84			84	Buah	1,270,500	1	0	0
85			85	Buah	1,270,500	1	0	0
86			86	Buah	1,270,500	1	0	0
87			87	Buah	1,270,500	1	0	0

LAPORAN KONDISI BARANG

UNTUK SEMUA KONDISI

PER DESEMBER 2022

KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT

DITJEN BINA MARGA

SATKER KONSOLIDASI KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT

NAMA UAKPB : SEKRETARIAT PENGATUR JALAN TOL

KODE UAKPB : 033.04.0199.498721

Tanggal : 13/01/2023 09.07.04

Halaman : 15 dari 41

Kode Lap : LKBT-PKPB1

No.	Sub-Sub Kelompok Barang		N U P	Satuan	Harga Perolehan	Kondisi		
	Kode Barang	Nama Barang				Baik	Rusak Ringan	Rusak Berat
1	2	3	4	5	6	7	8	9
88			88	Buah	1,270,500	1	0	0
89			89	Buah	1,270,500	1	0	0
90			90	Buah	1,270,500	1	0	0
91			91	Buah	1,270,500	1	0	0
92			92	Buah	1,270,500	1	0	0
93			93	Buah	1,270,500	1	0	0
94			94	Buah	2,695,000	1	0	0
95			95	Buah	6,545,000	1	0	0
96			96	Buah	3,025,000	1	0	0
97			97	Buah	3,278,000	1	0	0
98			98	Buah	2,024,000	1	0	0
99			99	Buah	2,024,000	1	0	0
100			100	Buah	1,573,000	1	0	0
101			101	Buah	1,573,000	1	0	0
102			102	Buah	1,573,000	1	0	0
103			103	Buah	1,474,000	1	0	0
104			104	Buah	1,474,000	1	0	0
105			105	Buah	1,474,000	1	0	0
106			106	Buah	1,474,000	1	0	0
107			107	Buah	1,474,000	1	0	0
108			108	Buah	1,474,000	1	0	0
109			109	Buah	1,474,000	1	0	0
110			110	Buah	1,474,000	1	0	0
111			111	Buah	1,474,000	1	0	0
112			112	Buah	1,474,000	1	0	0
113			113	Buah	1,474,000	1	0	0
114			114	Buah	1,474,000	1	0	0

LAPORAN KONDISI BARANG

UNTUK SEMUA KONDISI

PER DESEMBER 2022

KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT

DITJEN BINA MARGA

SATKER KONSOLIDASI KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT

NAMA UAKPB : SEKRETARIAT PENGATUR JALAN TOL

KODE UAKPB : 033.04.0199.498721

Tanggal : 13/01/2023 09.07.04

Halaman : 16 dari 41

Kode Lap : LKBT-PKPB1

No.	Sub-Sub Kelompok Barang		N U P	Satuan	Harga Perolehan	Kondisi		
	Kode Barang	Nama Barang				Baik	Rusak Ringan	Rusak Berat
1	2	3	4	5	6	7	8	9
115			115	Buah	1,474,000	1	0	0
116			116	Buah	1,474,000	1	0	0
117			117	Buah	1,474,000	1	0	0
118			118	Buah	1,716,000	1	0	0
119			119	Buah	1,716,000	1	0	0
120			120	Buah	1,716,000	1	0	0
121			121	Buah	1,716,000	1	0	0
122			122	Buah	1,716,000	1	0	0
123			123	Buah	1,716,000	1	0	0
124			124	Buah	1,716,000	1	0	0
125			125	Buah	1,716,000	1	0	0
126			126	Buah	962,500	1	0	0
127			127	Buah	962,500	1	0	0
128			128	Buah	962,500	1	0	0
129			129	Buah	962,500	1	0	0
130			130	Buah	962,500	1	0	0
131			131	Buah	962,500	1	0	0
132			132	Buah	962,500	1	0	0
133			133	Buah	962,500	1	0	0
134			134	Buah	962,500	1	0	0
135			135	Buah	962,500	1	0	0
136			136	Buah	962,500	1	0	0
137			137	Buah	962,500	1	0	0
138			138	Buah	962,500	1	0	0
139			139	Buah	962,500	1	0	0
140			140	Buah	962,500	1	0	0
141			141	Buah	962,500	1	0	0

LAPORAN KONDISI BARANG

UNTUK SEMUA KONDISI

PER DESEMBER 2022

KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT

DITJEN BINA MARGA

SATKER KONSOLIDASI KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT

NAMA UAKPB : SEKRETARIAT PENGATUR JALAN TOL

KODE UAKPB : 033.04.0199.498721

Tanggal : 13/01/2023 09.07.04

Halaman : 17 dari 41

Kode Lap : LKBT-PKPB1

No.	Sub-Sub Kelompok Barang		N U P	Satuan	Harga Perolehan	Kondisi		
	Kode Barang	Nama Barang				Baik	Rusak Ringan	Rusak Berat
1	2	3	4	5	6	7	8	9
142			142	Buah	962,500	1	0	0
143			143	Buah	962,500	1	0	0
144			144	Buah	962,500	1	0	0
145			145	Buah	962,500	1	0	0
146			146	Buah	962,500	1	0	0
147			147	Buah	962,500	1	0	0
148			148	Buah	962,500	1	0	0
149			149	Buah	962,500	1	0	0
150			150	Buah	962,500	1	0	0
151			151	Buah	962,500	1	0	0
152			152	Buah	962,500	1	0	0
153			153	Buah	962,500	1	0	0
154			154	Buah	962,500	1	0	0
155			155	Buah	962,500	1	0	0
156			156	Buah	3,300,000	1	0	0
157			157	Buah	1,650,000	1	0	0
158			158	Buah	1,650,000	1	0	0
159			159	Buah	1,650,000	1	0	0
160			160	Buah	1,650,000	1	0	0
161			161	Buah	1,650,000	1	0	0
162			162	Buah	1,650,000	1	0	0
163			163	Buah	1,650,000	1	0	0
164			164	Buah	1,650,000	1	0	0
165			165	Buah	1,650,000	1	0	0
166			166	Buah	1,650,000	1	0	0
167			167	Buah	1,650,000	1	0	0
168			168	Buah	1,650,000	1	0	0

LAPORAN KONDISI BARANG

UNTUK SEMUA KONDISI

PER DESEMBER 2022

KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT

DITJEN BINA MARGA

SATKER KONSOLIDASI KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT

NAMA UAKPB : SEKRETARIAT PENGATUR JALAN TOL

KODE UAKPB : 033.04.0199.498721

Tanggal : 13/01/2023 09.07.04

Halaman : 18 dari 41

Kode Lap : LKBT-PKPB1

No.	Sub-Sub Kelompok Barang		N U P	Satuan	Harga Perolehan	Kondisi		
	Kode Barang	Nama Barang				Baik	Rusak Ringan	Rusak Berat
1	2	3	4	5	6	7	8	9
169			169	Buah	1,650,000	1	0	0
170			170	Buah	1,650,000	1	0	0
171			171	Buah	1,650,000	1	0	0
172			172	Buah	1,650,000	1	0	0
173			173	Buah	1,650,000	1	0	0
174			174	Buah	1,650,000	1	0	0
175			175	Buah	1,650,000	1	0	0
176			176	Buah	1,650,000	1	0	0
177			177	Buah	1,650,000	1	0	0
178			178	Buah	1,650,000	1	0	0
179			179	Buah	1,650,000	1	0	0
180			180	Buah	1,650,000	1	0	0
181			181	Buah	1,650,000	1	0	0
182			182	Buah	1,650,000	1	0	0
183			183	Buah	1,650,000	1	0	0
184			184	Buah	1,650,000	1	0	0
185			185	Buah	1,650,000	1	0	0
186			186	Buah	1,650,000	1	0	0
187			187	Buah	1,650,000	1	0	0
188			188	Buah	1,650,000	1	0	0
189			189	Buah	1,650,000	1	0	0
190			190	Buah	1,650,000	1	0	0
191			191	Buah	1,650,000	1	0	0
192			192	Buah	1,650,000	1	0	0
193			193	Buah	1,650,000	1	0	0
194			194	Buah	1,650,000	1	0	0
195			195	Buah	1,650,000	1	0	0

LAPORAN KONDISI BARANG

UNTUK SEMUA KONDISI

PER DESEMBER 2022

KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT

DITJEN BINA MARGA

SATKER KONSOLIDASI KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT

NAMA UAKPB : SEKRETARIAT PENGATUR JALAN TOL

KODE UAKPB : 033.04.0199.498721

Tanggal : 13/01/2023 09.07.04

Halaman : 19 dari 41

Kode Lap : LKBT-PKPB1

No.	Sub-Sub Kelompok Barang		N U P	Satuan	Harga Perolehan	Kondisi		
	Kode Barang	Nama Barang				Baik	Rusak Ringan	Rusak Berat
1	2	3	4	5	6	7	8	9
196			196	Buah	1,650,000	1	0	0
197			197	Buah	1,650,000	1	0	0
198			198	Buah	1,650,000	1	0	0
199			199	Buah	1,650,000	1	0	0
200			200	Buah	1,650,000	1	0	0
201			201	Buah	1,650,000	1	0	0
202			202	Buah	1,650,000	1	0	0
203			203	Buah	1,650,000	1	0	0
204			204	Buah	1,650,000	1	0	0
205			205	Buah	1,650,000	1	0	0
206			206	Buah	1,650,000	1	0	0
207			207	Buah	6,930,000	1	0	0
208			208	Buah	6,930,000	1	0	0
209			209	Buah	6,930,000	1	0	0
210			210	Buah	6,930,000	1	0	0
211			211	Buah	6,930,000	1	0	0
212			212	Buah	3,267,000	1	0	0
213			213	Buah	3,267,000	1	0	0
214			214	Buah	3,267,000	1	0	0
215			215	Buah	3,267,000	1	0	0
216			216	Buah	6,638,500	1	0	0
217			217	Buah	3,888,500	1	0	0
218			218	Buah	7,672,500	1	0	0
219			219	Buah	7,672,500	1	0	0
220			220	Buah	22,301,400	1	0	0
221			221	Buah	4,995,000	1	0	0
222			222	Buah	4,995,000	1	0	0

LAPORAN KONDISI BARANG

UNTUK SEMUA KONDISI

PER DESEMBER 2022

KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT

DITJEN BINA MARGA

SATKER KONSOLIDASI KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT

NAMA UAKPB : SEKRETARIAT PENGATUR JALAN TOL

KODE UAKPB : 033.04.0199.498721

Tanggal : 13/01/2023 09.07.04

Halaman : 20 dari 41

Kode Lap : LKBT-PKPB1

No.	Sub-Sub Kelompok Barang		N U P	Satuan	Harga Perolehan	Kondisi		
	Kode Barang	Nama Barang				Baik	Rusak Ringan	Rusak Berat
1	2	3	4	5	6	7	8	9
223			223	Buah	4,995,000	1	0	0
224			224	Buah	4,995,000	1	0	0
225			225	Buah	4,995,000	1	0	0
226			226	Buah	2,997,000	1	0	0
227			227	Buah	2,997,000	1	0	0
228			228	Buah	2,997,000	1	0	0
229			229	Buah	2,997,000	1	0	0
230			230	Buah	2,997,000	1	0	0
231			231	Buah	2,997,000	1	0	0
<i>Jumlah Kursi Besi/Metal</i>					545,360,050	300	0	0
1	3.05.02.01.004	Kursi Kayu	1	Buah	1,870,000	1	0	0
2			2	Buah	1,870,000	1	0	0
3			3	Buah	4,400,000	1	0	0
4			4	Buah	4,372,500	1	0	0
5			5	Buah	4,372,500	1	0	0
6			6	Buah	7,232,500	1	0	0
7			7	Buah	4,042,500	1	0	0
8			8	Buah	4,042,500	1	0	0
9			9	Buah	4,042,500	1	0	0
10			10	Buah	4,042,500	1	0	0
11			11	Buah	4,042,500	1	0	0
12			12	Buah	4,042,500	1	0	0
13			13	Buah	4,042,500	1	0	0
14			14	Buah	4,042,500	1	0	0
15			15	Buah	6,600,000	1	0	0
16			16	Buah	6,600,000	1	0	0
17			17	Buah	6,600,000	1	0	0

LAPORAN KONDISI BARANG

UNTUK SEMUA KONDISI

PER DESEMBER 2022

KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT

DITJEN BINA MARGA

SATKER KONSOLIDASI KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT

NAMA UAKPB : SEKRETARIAT PENGATUR JALAN TOL

KODE UAKPB : 033.04.0199.498721

Tanggal : 13/01/2023 09.07.04

Halaman : 21 dari 41

Kode Lap : LKBT-PKPB1

No.	Sub-Sub Kelompok Barang		N U P	Satuan	Harga Perolehan	Kondisi		
	Kode Barang	Nama Barang				Baik	Rusak Ringan	Rusak Berat
1	2	3	4	5	6	7	8	9
18			18	Buah	6,600,000	1	0	0
<i>Jumlah Kursi Kayu</i>					82,857,500	18	0	0
1	3.05.02.01.005	Sice	1	Buah	7,250,000	1	0	0
2			2	Buah	7,750,000	1	0	0
<i>Jumlah Sice</i>					15,000,000	2	0	0
1	3.05.02.01.006	Bangku Panjang Besi/Metal	1	Buah	11,275,000	1	0	0
<i>Jumlah Bangku Panjang Besi/Metal</i>					11,275,000	1	0	0
1	3.05.02.01.008	Meja Rapat	1	Buah	13,100,000	2	0	0
2			2	Buah	11,100,000	2	0	0
3			3	Buah	1,177,000	1	0	0
4			4	Buah	1,177,000	1	0	0
5			5	Buah	1,177,000	1	0	0
6			6	Buah	1,177,000	1	0	0
7			7	Buah	1,177,000	1	0	0
8			8	Buah	1,177,000	1	0	0
9			9	Buah	1,177,000	1	0	0
10			10	Buah	1,177,000	1	0	0
11			11	Buah	1,177,000	1	0	0
12			12	Buah	1,177,000	1	0	0
13			13	Buah	1,177,000	1	0	0
14			14	Buah	1,177,000	1	0	0
15			15	Buah	1,177,000	1	0	0
16			16	Buah	1,375,000	1	0	0
17			17	Buah	1,375,000	1	0	0
18			18	Buah	1,749,000	1	0	0
19			19	Buah	1,628,000	1	0	0
20			20	Buah	2,475,000	1	0	0

LAPORAN KONDISI BARANG

UNTUK SEMUA KONDISI

PER DESEMBER 2022

KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT

DITJEN BINA MARGA

SATKER KONSOLIDASI KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT

NAMA UAKPB : SEKRETARIAT PENGATUR JALAN TOL

KODE UAKPB : 033.04.0199.498721

Tanggal : 13/01/2023 09.07.04

Halaman : 22 dari 41

Kode Lap : LKBT-PKPB1

No.	Sub-Sub Kelompok Barang		N U P	Satuan	Harga Perolehan	Kondisi		
	Kode Barang	Nama Barang				Baik	Rusak Ringan	Rusak Berat
1	2	3	4	5	6	7	8	9
21			21	Buah	4,922,500	1	0	0
22			22	Buah	5,483,500	1	0	0
23			23	Buah	4,042,500	1	0	0
24			24	Buah	4,042,500	1	0	0
25			25	Buah	4,042,500	1	0	0
26			26	Buah	4,042,500	1	0	0
27			27	Buah	19,574,850	1	0	0
<i>Jumlah Meja Rapat</i>					94,253,850	29	0	0
1	3.05.02.01.009	Meja Komputer	1	Buah	4,730,000	1	0	0
<i>Jumlah Meja Komputer</i>					4,730,000	1	0	0
1	3.05.02.01.013	Meja Telepon	1	Buah	2,640,000	1	0	0
<i>Jumlah Meja Telepon</i>					2,640,000	1	0	0
1	3.05.02.01.014	Meja Resepsionis	1	Buah	2,695,000	1	0	0
2			2	Buah	6,600,000	1	0	0
3			3	Buah	9,911,000	1	0	0
<i>Jumlah Meja Resepsionis</i>					19,206,000	3	0	0
1	3.05.02.01.022	Partisi	1	Buah	34,100,000	1	0	0
<i>Jumlah Partisi</i>					34,100,000	1	0	0
1	3.05.02.01.999	Meubelair Lainnya	1	dummy	792,000	1	0	0
2			2	dummy	792,000	1	0	0
3			3	dummy	792,000	1	0	0
4			4	dummy	792,000	1	0	0
5			5	dummy	792,000	1	0	0
6			6	dummy	792,000	1	0	0
<i>Jumlah Meubelair Lainnya</i>					4,752,000	6	0	0
1	3.05.02.03.001	Mesin Penghisap Debu/Vacuum Cleaner	1	Buah	4,879,600	1	0	0

LAPORAN KONDISI BARANG

UNTUK SEMUA KONDISI

PER DESEMBER 2022

KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT

DITJEN BINA MARGA

SATKER KONSOLIDASI KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT

NAMA UAKPB : SEKRETARIAT PENGATUR JALAN TOL

KODE UAKPB : 033.04.0199.498721

Tanggal : 13/01/2023 09.07.04

Halaman : 23 dari 41

Kode Lap : LKBT-PKPB1

No.	Sub-Sub Kelompok Barang		N U P	Satuan	Harga Perolehan	Kondisi		
	Kode Barang	Nama Barang				Baik	Rusak Ringan	Rusak Berat
1	2	3	4	5	6	7	8	9
<i>Jumlah Mesin Penghisap Debu/Vacuum Cleaner</i>					4,879,600	1	0	0
1	3.05.02.03.005	Air Cleaner	1	Buah	8,195,000	1	0	0
2			2	Buah	5,005,000	1	0	0
<i>Jumlah Air Cleaner</i>					13,200,000	2	0	0
1	3.05.02.04.001	Lemari Es	1	Buah	3,278,000	1	0	0
2			2	Buah	3,278,000	1	0	0
3			3	Buah	4,416,500	1	0	0
<i>Jumlah Lemari Es</i>					10,972,500	3	0	0
1	3.05.02.04.002	A.C. Sentral	1	Buah	32,725,000	1	0	0
<i>Jumlah A.C. Sentral</i>					32,725,000	1	0	0
1	3.05.02.04.004	A.C. Split	1	Buah	13,190,000	2	0	0
2			2	Buah	14,490,000	2	0	0
3			3	Buah	14,290,000	2	0	0
4			4	Buah	12,740,000	2	0	0
5			5	Buah	12,740,000	2	0	0
6			6	Buah	13,578,750	2	0	0
7			7	Buah	13,578,750	2	0	0
8			8	Buah	13,578,750	2	0	0
9			9	Buah	13,578,750	2	0	0
10			10	Buah	13,578,750	2	0	0
11			11	Buah	12,982,500	2	0	0
12			12	Buah	12,982,500	2	0	0
13			13	Buah	12,982,500	2	0	0
14			14	Buah	12,982,500	2	0	0
15			15	Buah	12,982,500	2	0	0
16			16	Buah	6,710,000	1	0	0

LAPORAN KONDISI BARANG

UNTUK SEMUA KONDISI

PER DESEMBER 2022

KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT

DITJEN BINA MARGA

SATKER KONSOLIDASI KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT

NAMA UAKPB : SEKRETARIAT PENGATUR JALAN TOL

KODE UAKPB : 033.04.0199.498721

Tanggal : 13/01/2023 09.07.04

Halaman : 24 dari 41

Kode Lap : LKBT-PKPB1

No.	Sub-Sub Kelompok Barang		N U P	Satuan	Harga Perolehan	Kondisi		
	Kode Barang	Nama Barang				Baik	Rusak Ringan	Rusak Berat
1	2	3	4	5	6	7	8	9
17			17	Buah	11,660,000	1	0	0
<i>Jumlah A.C. Split</i>					218,626,250	32	0	0
1	3.05.02.05.002	Kompur Gas (Alat Dapur)	1	Buah	660,000	1	0	0
2			2	Buah	660,000	1	0	0
<i>Jumlah Kompur Gas (Alat Dapur)</i>					1,320,000	2	0	0
1	3.05.02.05.015	Rak Piring Alumunium	1	Buah	1,870,000	1	0	0
2			2	Buah	1,870,000	1	0	0
<i>Jumlah Rak Piring Alumunium</i>					3,740,000	2	0	0
1	3.05.02.06.002	Televisi	1	Buah	13,040,500	1	0	0
2			2	Buah	13,040,500	1	0	0
3			3	Buah	8,635,000	1	0	0
4			4	Buah	8,635,000	1	0	0
<i>Jumlah Televisi</i>					43,351,000	4	0	0
1	3.05.02.06.007	Loudspeaker	1	Buah	13,022,625	1	0	0
<i>Jumlah Loudspeaker</i>					13,022,625	1	0	0
1	3.05.02.06.008	Sound System	1	Buah	16,280,000	1	0	0
<i>Jumlah Sound System</i>					16,280,000	1	0	0
1	3.05.02.06.013	Megaphone	1	Buah	1,210,000	1	0	0
2			2	Buah	1,210,000	1	0	0
<i>Jumlah Megaphone</i>					2,420,000	2	0	0
1	3.05.02.06.014	Microphone	1	Buah	34,100,000	1	0	0
<i>Jumlah Microphone</i>					34,100,000	1	0	0
1	3.05.02.06.015	Microphone Table Stand	1	Buah	3,630,000	1	0	0
2			2	Buah	3,630,000	1	0	0
3			3	Buah	3,630,000	1	0	0
4			4	Buah	3,630,000	1	0	0

LAPORAN KONDISI BARANG

UNTUK SEMUA KONDISI

PER DESEMBER 2022

KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT

DITJEN BINA MARGA

SATKER KONSOLIDASI KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT

NAMA UAKPB : SEKRETARIAT PENGATUR JALAN TOL

KODE UAKPB : 033.04.0199.498721

Tanggal : 13/01/2023 09.07.04

Halaman : 25 dari 41

Kode Lap : LKBT-PKPB1

No.	Sub-Sub Kelompok Barang		N U P	Satuan	Harga Perolehan	Kondisi		
	Kode Barang	Nama Barang				Baik	Rusak Ringan	Rusak Berat
1	2	3	4	5	6	7	8	9
5			5	Buah	3,630,000	1	0	0
6			6	Buah	3,630,000	1	0	0
<i>Jumlah Microphone Table Stand</i>					21,780,000	6	0	0
1	3.05.02.06.017	Unit Power Supply	1	Buah	10,890,000	1	0	0
<i>Jumlah Unit Power Supply</i>					10,890,000	1	0	0
1	3.05.02.06.020	Camera Video	1	Buah	9,600,000	1	0	0
<i>Jumlah Camera Video</i>					9,600,000	1	0	0
1	3.05.02.06.046	Handy Cam	1	Buah	23,387,500	2	0	0
2			2	Buah	6,490,000	1	0	0
3			3	Buah	23,540,000	1	0	0
<i>Jumlah Handy Cam</i>					53,417,500	4	0	0
1	3.06.01.01.018	Disc Record Player	1	Buah	9,900,000	1	0	0
<i>Jumlah Disc Record Player</i>					9,900,000	1	0	0
1	3.06.01.01.075	Digital Audio Storage System	1	Buah	880,000	1	0	0
2			2	Buah	880,000	1	0	0
<i>Jumlah Digital Audio Storage System</i>					1,760,000	2	0	0
1	3.06.01.02.003	Camera Electronic	1	Buah	4,400,000	1	0	0
2			2	Buah	8,140,000	1	0	0
3			3	Buah	8,140,000	1	0	0
4			4	Buah	8,140,000	1	0	0
<i>Jumlah Camera Electronic</i>					28,820,000	4	0	0
1	3.06.01.02.013	Video Tape Recorder Portable	1	Buah	5,500,000	1	0	0
<i>Jumlah Video Tape Recorder Portable</i>					5,500,000	1	0	0
1	3.06.01.02.051	Flying Spot Scanner	1	Buah	29,700,000	1	0	0
2			2	Buah	42,900,000	1	0	0
<i>Jumlah Flying Spot Scanner</i>					72,600,000	2	0	0

LAPORAN KONDISI BARANG

UNTUK SEMUA KONDISI

PER DESEMBER 2022

KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT

DITJEN BINA MARGA

SATKER KONSOLIDASI KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT

NAMA UAKPB : SEKRETARIAT PENGATUR JALAN TOL

KODE UAKPB : 033.04.0199.498721

Tanggal : 13/01/2023 09.07.04

Halaman : 26 dari 41

Kode Lap : LKBT-PKPB1

No.	Sub-Sub Kelompok Barang		N U P	Satuan	Harga Perolehan	Kondisi		
	Kode Barang	Nama Barang				Baik	Rusak Ringan	Rusak Berat
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	3.06.01.02.099	Automatic Emergency Light	1	Buah	264,000	1	0	0
2			2	Buah	264,000	1	0	0
3			3	Buah	264,000	1	0	0
4			4	Buah	264,000	1	0	0
5			5	Buah	264,000	1	0	0
6			6	Buah	264,000	1	0	0
7			7	Buah	264,000	1	0	0
8			8	Buah	264,000	1	0	0
9			9	Buah	264,000	1	0	0
10			10	Buah	264,000	1	0	0
<i>Jumlah Automatic Emergency Light</i>					2,640,000	10	0	0
1	3.06.01.02.128	Camera Digital	1	Buah	10,950,500	2	0	0
2			2	Buah	8,052,000	2	0	0
3			3	Buah	8,052,000	2	0	0
4			4	Buah	12,815,000	2	0	0
5			5	Buah	42,721,500	2	0	0
6			6	Buah	30,466,500	2	0	0
7			7	Buah	16,870,000	2	0	0
<i>Jumlah Camera Digital</i>					129,927,500	14	0	0
1	3.06.01.02.165	Camera Conference	1	Buah	28,116,000	1	0	0
<i>Jumlah Camera Conference</i>					28,116,000	1	0	0
1	3.06.01.04.014	Mesin Jilid	1	Buah	3,855,000	1	0	0
2			2	Buah	5,025,000	1	0	0
<i>Jumlah Mesin Jilid</i>					8,880,000	2	0	0
1	3.06.01.05.017	Theodolite (Peralatan Studio Pemetaan/peralatan Ukur Tanah)	1	Buah	144,750,000	1	0	0
<i>Jumlah Theodolite (Peralatan Studio Pemetaan/peralatan Ukur Tanah)</i>					144,750,000	1	0	0

LAPORAN KONDISI BARANG

UNTUK SEMUA KONDISI

PER DESEMBER 2022

KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT

DITJEN BINA MARGA

SATKER KONSOLIDASI KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT

NAMA UAKPB : SEKRETARIAT PENGATUR JALAN TOL

KODE UAKPB : 033.04.0199.498721

Tanggal : 13/01/2023 09.07.04

Halaman : 27 dari 41

Kode Lap : LKBT-PKPB1

No.	Sub-Sub Kelompok Barang		N U P	Satuan	Harga Perolehan	Kondisi		
	Kode Barang	Nama Barang				Baik	Rusak Ringan	Rusak Berat
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	3.06.01.05.038	GPS Receiver	1	Buah	13,500,000	1	0	0
2			2	Buah	13,500,000	1	0	0
3			3	Buah	13,500,000	1	0	0
4			4	Buah	13,500,000	1	0	0
<i>Jumlah GPS Receiver</i>					54,000,000	4	0	0
1	3.06.02.01.003	Pesawat Telephone	1	Buah	2,087,143	1	0	0
2			2	Buah	2,087,143	1	0	0
3			3	Buah	2,087,143	1	0	0
4			4	Buah	2,087,143	1	0	0
5			5	Buah	2,087,143	1	0	0
6			6	Buah	2,087,143	1	0	0
7			7	Buah	2,087,142	1	0	0
<i>Jumlah Pesawat Telephone</i>					14,610,000	7	0	0
1	3.06.02.01.010	Facsimile	1	Buah	6,028,000	2	0	0
2			2	Buah	3,740,000	1	0	0
<i>Jumlah Facsimile</i>					9,768,000	3	0	0
1	3.06.02.02.999	Alat Komunikasi Radio Ssb Lainnya	1	dummy	2,860,000	1	0	0
2			2	dummy	2,860,000	1	0	0
3			3	dummy	2,860,000	1	0	0
4			4	dummy	2,860,000	1	0	0
<i>Jumlah Alat Komunikasi Radio Ssb Lainnya</i>					11,440,000	4	0	0
1	3.06.02.06.002	Wireless Amplifier	1	Buah	4,895,000	1	0	0
<i>Jumlah Wireless Amplifier</i>					4,895,000	1	0	0
1	3.08.01.06.058	Alat Pemeriksa Beton	1	Buah	160,750,000	1	0	0
<i>Jumlah Alat Pemeriksa Beton</i>					160,750,000	1	0	0
1	3.08.01.13.081	TV Monitor	1	Buah	17,704,500	1	0	0

LAPORAN KONDISI BARANG

UNTUK SEMUA KONDISI

PER DESEMBER 2022

KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT

DITJEN BINA MARGA

SATKER KONSOLIDASI KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT

NAMA UAKPB : SEKRETARIAT PENGATUR JALAN TOL

KODE UAKPB : 033.04.0199.498721

Tanggal : 13/01/2023 09.07.04

Halaman : 28 dari 41

Kode Lap : LKBT-PKPB1

No.	Sub-Sub Kelompok Barang		N U P	Satuan	Harga Perolehan	Kondisi		
	Kode Barang	Nama Barang				Baik	Rusak Ringan	Rusak Berat
1	2	3	4	5	6	7	8	9
<i>Jumlah TV Monitor</i>					17,704,500	1	0	0
1	3.08.01.41.170	Microwave Oven	1	Buah	1,650,000	1	0	0
2			2	Buah	2,970,000	1	0	0
<i>Jumlah Microwave Oven</i>					4,620,000	2	0	0
1	3.08.01.51.023	Drum Stainless Steel	1	Buah	341,000	1	0	0
2			2	Buah	341,000	1	0	0
3			3	Buah	341,000	1	0	0
4			4	Buah	341,000	1	0	0
5			5	Buah	341,000	1	0	0
6			6	Buah	341,000	1	0	0
7			7	Buah	341,000	1	0	0
8			8	Buah	341,000	1	0	0
<i>Jumlah Drum Stainless Steel</i>					2,728,000	8	0	0
1	3.08.01.56.035	Paper Scale	1	Buah	4,620,000	1	0	0
<i>Jumlah Paper Scale</i>					4,620,000	1	0	0
1	3.10.01.01.002	Mini Komputer	1	Buah	8,713,184	1	0	0
2			2	Buah	8,713,184	1	0	0
3			3	Buah	8,713,184	1	0	0
4			4	Buah	8,713,184	1	0	0
5			5	Buah	12,100,000	1	0	0
6			6	Buah	12,100,000	1	0	0
7			7	Buah	12,100,000	1	0	0
8			8	Buah	12,100,000	1	0	0
<i>Jumlah Mini Komputer</i>					83,252,736	8	0	0
1	3.10.01.01.007	PC Workstation	1	Buah	33,133,500	1	0	0
<i>Jumlah PC Workstation</i>					33,133,500	1	0	0

LAPORAN KONDISI BARANG

UNTUK SEMUA KONDISI

PER DESEMBER 2022

KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT

DITJEN BINA MARGA

SATKER KONSOLIDASI KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT

NAMA UAKPB : SEKRETARIAT PENGATUR JALAN TOL

KODE UAKPB : 033.04.0199.498721

Tanggal : 13/01/2023 09.07.04

Halaman : 29 dari 41

Kode Lap : LKBT-PKPB1

No.	Sub-Sub Kelompok Barang		N U P	Satuan	Harga Perolehan	Kondisi		
	Kode Barang	Nama Barang				Baik	Rusak Ringan	Rusak Berat
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	3.10.01.02.001	P.C Unit	1	Buah	16,190,000	1	0	1
2			2	Buah	16,190,000	1	0	1
3			3	Buah	16,190,000	1	0	1
4			4	Buah	16,190,000	1	0	1
5			5	Buah	16,190,000	1	0	1
6			6	Buah	25,650,000	1	0	1
7			7	Buah	22,990,000	1	0	1
8			8	Buah	27,940,000	1	0	1
9			9	Buah	17,545,000	1	0	1
10			10	Buah	17,545,000	1	0	1
11			11	Buah	17,545,000	1	0	1
12			12	Buah	17,545,000	1	0	1
13			13	Buah	17,545,000	1	0	1
14			14	Buah	17,380,000	1	0	1
15			15	Buah	19,030,000	1	0	1
16			16	Buah	19,030,000	1	0	1
17			17	Buah	19,030,000	1	0	1
18			18	Buah	22,935,000	2	0	0
19			19	Buah	23,485,000	2	0	0
20			20	Buah	23,485,000	2	0	0
21			21	Buah	23,485,000	2	0	0
22			22	Buah	21,715,000	2	0	0
23			23	Buah	21,715,000	2	0	0
24			24	Buah	21,715,000	2	0	0
25			25	Buah	21,715,000	2	0	0
26			26	Buah	26,140,000	2	0	0
27			27	Buah	26,140,000	2	0	0

LAPORAN KONDISI BARANG

UNTUK SEMUA KONDISI

PER DESEMBER 2022

KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT

DITJEN BINA MARGA

SATKER KONSOLIDASI KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT

NAMA UAKPB : SEKRETARIAT PENGATUR JALAN TOL

KODE UAKPB : 033.04.0199.498721

Tanggal : 13/01/2023 09.07.04

Halaman : 30 dari 41

Kode Lap : LKBT-PKPB1

No.	Sub-Sub Kelompok Barang		N U P	Satuan	Harga Perolehan	Kondisi		
	Kode Barang	Nama Barang				Baik	Rusak Ringan	Rusak Berat
1	2	3	4	5	6	7	8	9
28			28	Buah	26,140,000	2	0	0
29			29	Buah	25,562,500	2	0	0
30			30	Buah	24,557,500	2	0	0
31			31	Buah	24,557,500	2	0	0
32			32	Buah	28,516,500	2	0	0
33			33	Buah	28,516,500	2	0	0
34			34	Buah	21,328,000	2	0	0
35			35	Buah	27,609,000	2	0	0
36			36	Buah	13,750,000	1	0	0
37			37	Buah	15,730,000	1	0	0
38			38	Buah	6,490,000	1	0	0
39			39	Buah	6,490,000	1	0	0
40			40	Buah	8,690,000	1	0	0
41			41	Buah	8,690,000	1	0	0
42			42	Buah	8,690,000	1	0	0
43			43	Buah	8,690,000	1	0	0
44			44	Buah	14,498,000	1	0	0
45			45	Buah	9,988,000	1	0	0
46			46	Buah	9,988,000	1	0	0
47			47	Buah	9,988,000	1	0	0
48			48	Buah	9,988,000	1	0	0
49			49	Buah	10,285,000	1	0	0
50			50	Buah	12,155,000	1	0	0
51			51	Buah	12,155,000	1	0	0
52			52	Buah	12,155,000	1	0	0
53			53	Buah	12,155,000	1	0	0
54			54	Buah	12,155,000	1	0	0

LAPORAN KONDISI BARANG

UNTUK SEMUA KONDISI

PER DESEMBER 2022

KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT

DITJEN BINA MARGA

SATKER KONSOLIDASI KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT

NAMA UAKPB : SEKRETARIAT PENGATUR JALAN TOL

KODE UAKPB : 033.04.0199.498721

Tanggal : 13/01/2023 09.07.04

Halaman : 31 dari 41

Kode Lap : LKBT-PKPB1

No.	Sub-Sub Kelompok Barang		N U P	Satuan	Harga Perolehan	Kondisi		
	Kode Barang	Nama Barang				Baik	Rusak Ringan	Rusak Berat
1	2	3	4	5	6	7	8	9
55			55	Buah	14,630,000	1	0	0
56			56	Buah	6,188,600	1	0	0
57			57	Buah	6,188,600	1	0	0
58			58	Buah	6,188,600	1	0	0
59			59	Buah	6,188,600	1	0	0
60			60	Buah	6,188,600	1	0	0
61			61	Buah	6,188,600	1	0	0
62			62	Buah	6,188,600	1	0	0
63			63	Buah	16,418,050	1	0	0
64			64	Buah	9,955,000	1	0	0
65			65	Buah	9,955,000	1	0	0
66			66	Buah	9,955,000	1	0	0
67			67	Buah	9,955,000	1	0	0
68			68	Buah	9,955,000	1	0	0
69			69	Buah	18,986,000	1	0	0
70			70	Buah	18,986,000	1	0	0
71			71	Buah	19,118,000	1	0	0
72			72	Buah	19,118,000	1	0	0
73			73	Buah	19,118,000	1	0	0
74			74	Buah	20,515,000	1	0	0
75			75	Buah	20,515,000	1	0	0
76			76	Buah	24,986,500	1	0	0
77			77	Buah	24,986,500	1	0	0
78			78	Buah	18,868,850	1	0	0
79			79	Buah	18,868,850	1	0	0
80			80	Buah	18,868,850	1	0	0
81			81	Buah	38,798,375	1	0	0

LAPORAN KONDISI BARANG

UNTUK SEMUA KONDISI

PER DESEMBER 2022

KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT

DITJEN BINA MARGA

SATKER KONSOLIDASI KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT

NAMA UAKPB : SEKRETARIAT PENGATUR JALAN TOL

KODE UAKPB : 033.04.0199.498721

Tanggal : 13/01/2023 09.07.04

Halaman : 32 dari 41

Kode Lap : LKBT-PKPB1

No.	Sub-Sub Kelompok Barang		N U P	Satuan	Harga Perolehan	Kondisi		
	Kode Barang	Nama Barang				Baik	Rusak Ringan	Rusak Berat
1	2	3	4	5	6	7	8	9
82			82	Buah	17,082,450	1	0	0
83			83	Buah	22,110,000	1	0	0
84			84	Buah	25,674,000	1	0	0
85			85	Buah	25,674,000	1	0	0
86			86	Buah	29,964,000	1	0	0
87			87	Buah	17,050,000	1	0	0
88			88	Buah	17,050,000	1	0	0
89			89	Buah	31,900,000	1	0	0
<i>Jumlah P.C Unit</i>					1,554,154,125	107	0	17
1	3.10.01.02.002	Lap Top	1	Buah	10,428,000	1	0	0
2			2	Buah	10,428,000	1	0	0
3			3	Buah	10,428,000	1	0	0
4			4	Buah	26,125,000	1	0	0
5			5	Buah	7,507,500	1	0	0
6			6	Buah	14,960,000	1	0	0
7			7	Buah	14,960,000	1	0	0
8			8	Buah	14,960,000	1	0	0
9			9	Buah	14,960,000	1	0	0
10			10	Buah	14,960,000	1	0	0
11			11	Buah	14,960,000	1	0	0
12			12	Buah	14,960,000	1	0	0
13			13	Buah	23,650,000	1	0	0
14			14	Buah	22,247,500	1	0	0
15			15	Buah	30,759,575	1	0	0
16			16	Buah	23,505,900	1	0	0
17			17	Buah	33,823,900	1	0	0
18			18	Buah	33,743,600	1	0	0

LAPORAN KONDISI BARANG

UNTUK SEMUA KONDISI

PER DESEMBER 2022

KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT

DITJEN BINA MARGA

SATKER KONSOLIDASI KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT

NAMA UAKPB : SEKRETARIAT PENGATUR JALAN TOL

KODE UAKPB : 033.04.0199.498721

Tanggal : 13/01/2023 09.07.04

Halaman : 33 dari 41

Kode Lap : LKBT-PKPB1

No.	Sub-Sub Kelompok Barang		N U P	Satuan	Harga Perolehan	Kondisi		
	Kode Barang	Nama Barang				Baik	Rusak Ringan	Rusak Berat
1	2	3	4	5	6	7	8	9
19			19	Buah	26,070,000	1	0	0
20			20	Buah	26,070,000	1	0	0
21			21	Buah	26,400,000	1	0	0
22			22	Buah	42,306,000	1	0	0
23			23	Buah	32,802,000	1	0	0
24			24	Buah	31,218,750	1	0	0
25			25	Buah	31,218,750	1	0	0
26			26	Buah	31,218,750	1	0	0
27			27	Buah	31,704,375	1	0	0
<i>Jumlah Lap Top</i>					616,375,600	27	0	0
1	3.10.01.02.003	Note Book	1	Buah	40,029,443	1	0	1
2			2	Buah	40,029,443	1	0	1
3			3	Buah	40,029,445	1	0	1
4			4	Buah	47,773,491	1	0	1
5			5	Buah	40,291,510	1	0	1
6			6	Buah	50,702,740	1	0	1
7			7	Buah	35,369,010	1	0	1
8			8	Buah	38,765,000	1	0	1
9			9	Buah	38,765,000	1	0	1
10			10	Buah	57,090,000	1	0	1
11			11	Buah	37,435,000	1	0	1
12			12	Buah	38,571,750	1	0	1
13			13	Buah	36,371,750	1	0	1
14			14	Buah	42,035,000	1	0	1
15			15	Buah	30,660,000	1	0	1
16			16	Buah	34,815,000	1	0	1
17			17	Buah	34,815,000	1	0	1

LAPORAN KONDISI BARANG

UNTUK SEMUA KONDISI

PER DESEMBER 2022

KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT

DITJEN BINA MARGA

SATKER KONSOLIDASI KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT

NAMA UAKPB : SEKRETARIAT PENGATUR JALAN TOL

KODE UAKPB : 033.04.0199.498721

Tanggal : 13/01/2023 09.07.04

Halaman : 34 dari 41

Kode Lap : LKBT-PKPB1

No.	Sub-Sub Kelompok Barang		N U P	Satuan	Harga Perolehan	Kondisi		
	Kode Barang	Nama Barang				Baik	Rusak Ringan	Rusak Berat
1	2	3	4	5	6	7	8	9
18			18	Buah	28,160,000	1	0	1
19			19	Buah	31,735,000	1	0	1
20			20	Buah	34,815,000	1	0	1
21			21	Buah	33,890,450	1	0	1
22			22	Buah	28,500,450	1	0	1
23			23	Buah	28,500,450	1	0	1
24			24	Buah	28,500,450	1	0	1
25			25	Buah	27,730,450	2	0	0
26			26	Buah	27,730,450	2	0	0
27			27	Buah	40,150,000	2	0	0
28			28	Buah	40,150,000	2	0	0
29			29	Buah	27,730,000	2	0	0
30			30	Buah	27,730,000	2	0	0
31			31	Buah	27,730,000	2	0	0
32			32	Buah	34,180,000	2	0	0
33			33	Buah	43,200,000	2	0	0
34			34	Buah	30,550,000	2	0	0
35			35	Buah	30,220,000	2	0	0
36			36	Buah	32,482,890	2	0	0
37			37	Buah	35,012,890	2	0	0
38			38	Buah	35,012,890	2	0	0
39			39	Buah	34,902,890	2	0	0
40			40	Buah	49,716,150	2	0	0
41			41	Buah	20,654,600	1	0	0
42			42	Buah	20,654,600	1	0	0
<i>Jumlah Note Book</i>					1,483,188,192	58	0	24
1	3.10.02.01.012	Hard Disk	1	Buah	1,111,000	1	0	0

LAPORAN KONDISI BARANG

UNTUK SEMUA KONDISI

PER DESEMBER 2022

KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT

DITJEN BINA MARGA

SATKER KONSOLIDASI KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT

NAMA UAKPB : SEKRETARIAT PENGATUR JALAN TOL

KODE UAKPB : 033.04.0199.498721

Tanggal : 13/01/2023 09.07.04

Halaman : 35 dari 41

Kode Lap : LKBT-PKPB1

No.	Sub-Sub Kelompok Barang		N U P	Satuan	Harga Perolehan	Kondisi		
	Kode Barang	Nama Barang				Baik	Rusak Ringan	Rusak Berat
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2			2	Buah	1,111,000	1	0	0
<i>Jumlah Hard Disk</i>					2,222,000	2	0	0
1	3.10.02.03.003	Printer (Peralatan Personal Komputer)	1	Buah	11,861,749	2	0	0
2			2	Buah	11,861,748	2	0	0
3			3	Buah	16,124,250	2	0	0
4			4	Buah	14,812,497	2	0	0
5			5	Buah	8,434,502	2	0	0
6			6	Buah	8,434,502	2	0	0
7			7	Buah	14,690,000	2	0	0
8			8	Buah	12,545,000	2	0	0
9			9	Buah	11,165,000	2	0	0
10			10	Buah	11,165,000	2	0	0
11			11	Buah	7,790,000	2	0	0
12			12	Buah	7,790,000	2	0	0
13			13	Buah	10,567,500	2	0	0
14			14	Buah	10,567,500	2	0	0
15			15	Buah	10,567,500	2	0	0
16			16	Buah	12,017,500	2	0	0
17			17	Buah	12,017,500	2	0	0
18			18	Buah	11,110,000	2	0	0
19			19	Buah	11,110,000	2	0	0
20			20	Buah	10,230,000	2	0	0
21			21	Buah	11,330,000	2	0	0
22			22	Buah	61,690,000	2	0	0
23			23	Buah	34,205,000	2	0	0
24			24	Buah	13,965,000	2	0	0
25			25	Buah	13,965,000	2	0	0

LAPORAN KONDISI BARANG

UNTUK SEMUA KONDISI

PER DESEMBER 2022

KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT

DITJEN BINA MARGA

SATKER KONSOLIDASI KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT

NAMA UAKPB : SEKRETARIAT PENGATUR JALAN TOL

KODE UAKPB : 033.04.0199.498721

Tanggal : 13/01/2023 09.07.04

Halaman : 36 dari 41

Kode Lap : LKBT-PKPB1

No.	Sub-Sub Kelompok Barang		N U P	Satuan	Harga Perolehan	Kondisi		
	Kode Barang	Nama Barang				Baik	Rusak Ringan	Rusak Berat
1	2	3	4	5	6	7	8	9
26			26	Buah	16,935,000	2	0	0
27			27	Buah	47,115,000	2	0	0
28			28	Buah	12,290,000	2	0	0
29			29	Buah	16,465,000	2	0	0
30			30	Buah	10,800,000	2	0	0
31			31	Buah	10,800,000	2	0	0
32			32	Buah	15,860,000	2	0	0
33			33	Buah	135,956,700	2	0	0
34			34	Buah	10,637,000	2	0	0
35			35	Buah	4,807,000	2	0	0
36			36	Buah	4,312,000	2	0	0
37			37	Buah	8,301,700	2	0	0
38			38	Buah	5,606,700	1	0	0
39			39	Buah	13,878,700	2	0	0
40			40	Buah	32,189,000	2	0	0
41			41	Buah	7,395,000	2	0	0
42			42	Buah	8,110,000	2	0	0
43			43	Buah	37,672,500	2	0	0
44			44	Buah	7,212,370	2	0	0
45			45	Buah	7,212,370	2	0	0
46			46	Buah	39,072,500	2	0	0
47			47	Buah	10,286,875	2	0	0
48			48	Buah	31,350,000	1	0	0
49			49	Buah	3,795,000	1	0	0
50			50	Buah	3,795,000	1	0	0
Jumlah Printer (Peralatan Personal Komputer)					861,872,163	96	0	0
1	3.10.02.03.004	Scanner (Peralatan Personal Komputer)	1	Buah	53,605,000	2	0	0

LAPORAN KONDISI BARANG

UNTUK SEMUA KONDISI

PER DESEMBER 2022

KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT

DITJEN BINA MARGA

SATKER KONSOLIDASI KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT

NAMA UAKPB : SEKRETARIAT PENGATUR JALAN TOL

KODE UAKPB : 033.04.0199.498721

Tanggal : 13/01/2023 09.07.04

Halaman : 37 dari 41

Kode Lap : LKBT-PKPB1

No.	Sub-Sub Kelompok Barang		N U P	Satuan	Harga Perolehan	Kondisi		
	Kode Barang	Nama Barang				Baik	Rusak Ringan	Rusak Berat
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2			2	Buah	89,090,000	2	0	0
3			3	Buah	89,090,000	2	0	0
4			4	Buah	4,070,000	1	0	0
5			5	Buah	4,070,000	1	0	0
6			6	Buah	30,910,000	1	0	0
7			7	Buah	8,195,000	1	0	0
8			8	Buah	8,195,000	1	0	0
9			9	Buah	48,448,400	1	0	0
10			10	Buah	49,280,000	1	0	0
11			11	Buah	17,875,000	1	0	0
12			12	Buah	20,075,000	1	0	0
<i>Jumlah Scanner (Peralatan Personal Komputer)</i>					422,903,400	15	0	0
1	3.10.02.03.017	External/ Portable Hardisk	1	Buah	890,000	1	0	0
2			2	Buah	890,000	1	0	0
3			3	Buah	920,000	1	0	0
4			4	Buah	920,000	1	0	0
<i>Jumlah External/ Portable Hardisk</i>					3,620,000	4	0	0
1	3.10.02.04.001	Server	1	Buah	134,876,500	2	0	0
2			2	Buah	54,784,400	2	0	0
<i>Jumlah Server</i>					189,660,900	4	0	0
1	3.10.02.04.004	Modem	1	Buah	800,000	1	0	0
2			2	Buah	800,000	1	0	0
<i>Jumlah Modem</i>					1,600,000	2	0	0
1	3.10.02.04.023	Wireless Access Point	1	Buah	510,000	1	0	0
2			2	Buah	510,000	1	0	0
3			3	Buah	420,000	1	0	0

LAPORAN KONDISI BARANG

UNTUK SEMUA KONDISI

PER DESEMBER 2022

KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT

DITJEN BINA MARGA

SATKER KONSOLIDASI KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT

NAMA UAKPB : SEKRETARIAT PENGATUR JALAN TOL

KODE UAKPB : 033.04.0199.498721

Tanggal : 13/01/2023 09.07.04

Halaman : 38 dari 41

Kode Lap : LKBT-PKPB1

No.	Sub-Sub Kelompok Barang		N U P	Satuan	Harga Perolehan	Kondisi		
	Kode Barang	Nama Barang				Baik	Rusak Ringan	Rusak Berat
1	2	3	4	5	6	7	8	9
4			4	Buah	420,000	1	0	0
<i>Jumlah Wireless Access Point</i>					1,860,000	4	0	0
1	3.10.02.04.999	Peralatan Jaringan Lainnya	1	dummy	28,600,000	1	0	0
<i>Jumlah Peralatan Jaringan Lainnya</i>					28,600,000	1	0	0
1	3.11.01.02.016	Distance Meter Electronic	1	Buah	3,500,000	1	0	0
2			2	Buah	3,500,000	1	0	0
3			3	Buah	3,500,000	1	0	0
4			4	Buah	3,500,000	1	0	0
<i>Jumlah Distance Meter Electronic</i>					14,000,000	4	0	0
1	3.12.01.01.001	Bor Mesin Tumbuk Pakai Kabel	1	Buah	82,500,000	1	0	0
<i>Jumlah Bor Mesin Tumbuk Pakai Kabel</i>					82,500,000	1	0	0
1	6.07.05.01.001	Aset Tetap Lainnya Dalam Renovasi	2	dummy	148,132,226	1	0	0
2			3	dummy	188,855,524	1	0	0
3			4	dummy	143,963,572	1	0	0
4			5	dummy	183,045,500	1	0	0
5			6	dummy	153,882,355	1	0	0
6			7	dummy	160,730,240	1	0	0
<i>Jumlah Aset Tetap Lainnya Dalam Renovasi</i>					978,609,417	6	0	0
1	8.01.01.01.001	Software Komputer	1	dummy	616,990,000	1	0	0
2			2	dummy	26,400,000	1	0	0
3			3	dummy	69,003,000	1	0	0
4			4	dummy	88,495,000	1	0	0
5			5	dummy	86,943,000	1	0	0
6			6	dummy	49,300,000	1	0	0
7			7	dummy	2,558,149,000	1	0	0
8			8	dummy	48,620,000	1	0	0

LAPORAN KONDISI BARANG

UNTUK SEMUA KONDISI

PER DESEMBER 2022

KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT

DITJEN BINA MARGA

SATKER KONSOLIDASI KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT

NAMA UAKPB : SEKRETARIAT PENGATUR JALAN TOL

KODE UAKPB : 033.04.0199.498721

Tanggal : 13/01/2023 09.07.04

Halaman : 39 dari 41

Kode Lap : LKBT-PKPB1

No.	Sub-Sub Kelompok Barang		N U P	Satuan	Harga Perolehan	Kondisi		
	Kode Barang	Nama Barang				Baik	Rusak Ringan	Rusak Berat
1	2	3	4	5	6	7	8	9
9			9	dummy	681,945,000	1	0	0
10			10	dummy	813,164,000	1	0	0
<i>Jumlah Software Komputer</i>					5,039,009,000	10	0	0
1	8.01.01.01.999	Aset Tak Berwujud Lainnya	1	dummy	1,034,119,350	1	0	0
2			2	dummy	1,047,090,000	1	0	0
3			3	dummy	1,621,785,000	1	0	0
<i>Jumlah Aset Tak Berwujud Lainnya</i>					3,702,994,350	3	0	0
1	9.01.01.01.004	Jalan, Irigasi, dan Jaringan Rumpun Jalan dan Transportasi	1	Unit	859,386,000,000	1	0	0
2			2	Unit	3,480,789,000,000	1	0	0
3			3	Unit	14,434,371,000,000	1	0	0
4			4	Unit	3,264,015,000,000	1	0	0
5			5	Unit	2,801,011,000,000	1	0	0
6			6	Unit	12,045,035,000,000	1	0	0
7			7	Unit	15,924,516,000,000	1	0	0
8			8	Unit	8,665,707,000,000	1	0	0
9			9	Unit	3,699,172,000,000	1	0	0
10			10	Unit	1,487,806,000,000	1	0	0
11			11	Unit	4,694,820,000,000	1	0	0
12			12	Unit	10,222,894,000,000	1	0	0
13			13	Unit	13,320,141,000,000	1	0	0
14			14	Unit	1,475,354,000,000	1	0	0
15			15	Unit	4,142,023,000,000	1	0	0
16			16	Unit	3,405,040,000,000	1	0	0
17			17	Unit	3,927,501,000,000	1	0	0
18			18	Unit	5,548,740,000,000	1	0	0
19			19	Unit	3,835,400,000,000	1	0	0

LAPORAN KONDISI BARANG

UNTUK SEMUA KONDISI

PER DESEMBER 2022

KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT

DITJEN BINA MARGA

SATKER KONSOLIDASI KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT

NAMA UAKPB : SEKRETARIAT PENGATUR JALAN TOL

KODE UAKPB : 033.04.0199.498721

Tanggal : 13/01/2023 09.07.04

Halaman : 40 dari 41

Kode Lap : LKBT-PKPB1

No.	Sub-Sub Kelompok Barang		N U P	Satuan	Harga Perolehan	Kondisi		
	Kode Barang	Nama Barang				Baik	Rusak Ringan	Rusak Berat
1	2	3	4	5	6	7	8	9
20			20	Unit	3,378,555,000,000	1	0	0
21			21	Unit	2,290,991,000,000	1	0	0
22			22	Unit	7,252,577,000,000	1	0	0
23			23	Unit	5,133,695,000,000	1	0	0
24			24	Unit	4,697,223,000,000	1	0	0
25			25	Unit	1,886,958,000,000	1	0	0
26			26	Unit	4,629,189,000,000	1	0	0
27			27	Unit	12,797,393,000,000	1	0	0
28			28	Unit	7,712,887,000,000	1	0	0
29			29	Unit	5,732,757,000,000	1	0	0
30			30	Unit	4,928,066,000,000	1	0	0
31			31	Unit	4,699,029,000,000	1	0	0
32			32	Unit	13,174,329,000,000	1	0	0
33			33	Unit	4,475,180,000,000	1	0	0
34			34	Unit	2,534,285,000,000	1	0	0
35			35	Unit	3,485,025,000,000	1	0	0
36			36	Unit	3,298,513,000,000	1	0	0
37			37	Unit	9,992,171,000,000	1	0	0
38			38	Unit	1,394,331,000,000	1	0	0
39			39	Unit	15,725,348,000,000	1	0	0
40			40	Unit	10,265,874,000,000	1	0	0
41			41	Unit	2,472,944,000,000	1	0	0
42			42	Unit	9,248,995,000,000	1	0	0
43			43	Unit	4,702,774,000,000	1	0	0
44			44	Unit	3,191,116,000,000	1	0	0
45			45	Unit	4,368,856,000,000	1	0	0
46			46	Unit	1,388,337,000,000	1	0	0

LAPORAN KONDISI BARANG

UNTUK SEMUA KONDISI

PER DESEMBER 2022

KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT

DITJEN BINA MARGA

SATKER KONSOLIDASI KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT

NAMA UAKPB : SEKRETARIAT PENGATUR JALAN TOL

KODE UAKPB : 033.04.0199.498721

Tanggal : 13/01/2023 09.07.04

Halaman : 41 dari 41

Kode Lap : LKBT-PKPB1

No.	Sub-Sub Kelompok Barang		N U P	Satuan	Harga Perolehan	Kondisi		
	Kode Barang	Nama Barang				Baik	Rusak Ringan	Rusak Berat
1	2	3	4	5	6	7	8	9
47			47	Unit	1,672,707,000,000	1	0	0
48			48	Unit	866,539,000,000	1	0	0
49			49	Unit	2,488,360,000,000	1	0	0
50			50	Unit	8,326,296,000,000	1	0	0
51			51	Unit	4,316,991,000,000	1	0	0
52			52	Unit	12,007,108,000,000	1	0	0
53			53	Unit	26,106,590,000,000	1	0	0
54			54	Unit	7,404,960,000,000	1	0	0
55			55	Unit	54,469,000,000	1	0	0
<i>Jumlah Jalan, Irigasi, dan Jaringan Rumpun Jalan dan Transportasi</i>					335,335,139,000,000	55	0	0

Jakarta Selatan, 30 September 2021

Penanggung Jawab UAKPB

Kepala Bagian Umum

Kusnaedi, ST

NIP